

AHMAD SYAFI' I SJ

DISERTASI

PENGUASAAN, PEMILIKAN DAN KONSEP *AT-TA'MĪM*

DISKURSUS AGRARIA DALAM PERSPEKTIF
MODERN HUKUM ISLAM



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PENGUASAAN, PEMILIKAN
DAN KONSEP *AT-TA'MĪM*: *DISKURSUS AGRARIA*
DALAM PERSPEKTIF MODERN HUKUM ISLAM**



Oleh:

Ahmad Syafi'i Sulaiman Jamrozi

NIM: 1630016007

DISERTASI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Doktor Ilmu Agama Islam

YOGYAKARTA

2021



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281, Telp. & Faks, (0274) 557978
email: pps@uin-suka.ac.id, website: http://pps.uin-suka.ac.id.

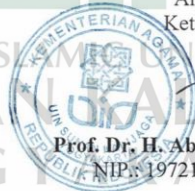
PENGESAHAN

Judul Disertasi : PENGUASAAN, PEMILIKAN DAN KONSEP *AT-TA'MIM*:
DISKURSUS AGRARIA DALAM PERSPEKTIF MODERN
HUKUM ISLAM
Ditulis oleh : Ahmad Syafi'i Sulaiman Jamrozi
NIM : 1630016007
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam
Konsentrasi : Ilmu Hukum Dan Pranata Sosial Islam

**Telah dapat diterima
Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor (Dr.)
Dalam Bidang Studi Islam**

Yogyakarta, 16 Desember 2021

An. Rektor/
Ketua Sidang,



Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag.
NIP.: 19721204 199703 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281, Telp. & Faks, (0274) 557978
email: pps@uin-suka.ac.id, website: http://pps.uin-suka.ac.id.

YUDISIUM

BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENILAI DALAM UJIAN TERTUTUP (PADA TANGGAL 11 AGUSTUS 2021), DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM SIDANG UJIAN TERBUKA, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDUS, **AHMAD SYAFI'I SULAIMAN JAMROZI** NOMOR INDUK: **1630016007** LAHIR DI BLITAR , TANGGAL **16 AGUSTUS 1979**,

LULUS DENGAN PREDIKAT :

PUJIAN (CUM LAUDE)/SANGAT MEMUASKAN/MEMUASKAN**

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR **STUDI ISLAM KONSENTASI ILMU HUKUM DAN PRANATA SOSIAL ISLAM** DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

***SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR KE-797.**

YOGYAKARTA, 16 Desember 2021

An. REKTOR /
KETUA SIDANG,

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag.
NIP.: 19721204 199703 1 003

** CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN

**DAFTAR HADIR DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR**

Nama Promovendus : Ahmad Syafi'i Sulaiman Jamrozi (A. S. J.)
NIM : 1630016007
Judul Disertasi : PENGUASAAN, PEMILIKAN DAN KONSEP AT-TA'MIM: DISKURSUS
AGRARIA DALAM PERSPEKTIF MODERN HUKUM ISLAM

Ketua Sidang : Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag. (A. M.)
Sekretaris Sidang : Ahmad Rafiq, M.Ag., M.A., Ph.D. (A. R.)
Anggota : 1. Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL (R. L.)
(Promotor/Penguji)
2. Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si. (N. I.)
(Promotor/Penguji)
3. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. (N. H.)
(Penguji)
4. Prof. Dr. H. Kamsi, M.A. (K. A.)
(Penguji)
5. Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. (A. B.)
(Penguji)
6. Dr. Sulistyarningsih, S.Sos., M.Si. (S. A.)
(Penguji)

Di Ujikan di Yogyakarta pada hari Senin tanggal 16 Desember 2021

Tempat : Aula Lt. 1 Gd. Pascasajana UIN Sunan Kalijaga
Waktu : Pukul 10.00 WIB. S.d. Selesai
Hasil / Nilai (IPK) : 3,85
Predikat Kelulusan : ~~Pujian (Cum laude)~~ Sangat Memuaskan / Memuaskan

Sekretaris Sidang,

Ahmad Rafiq, M.Ag., M.A., Ph.D.
NIP. 19741214 199903 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Syafi'i Sulaiman Jamrozi
NIM : 1630016007
Program/Prodi: Doktor/Studi Islam
Konsentrasi : Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam
(IHPSI)

menyatakan bahwa naskah **Disertasi** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Oktober 2021

Saya yang menyatakan,



Ahmad Syafi'i Sulaiman Jamrozi
NIM: 1630016007

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

PENGESAHAN PROMOTOR

Telah disetujui untuk diajukan Ujian Terbuka Promosi Doktor

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, MA., DCL ()

Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si ()

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan,
arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**PENGUASAAN, PEMILIKAN
DAN KONSEP AT-TA'MIM: DISKURSUS AGRARIA
DALAM PERSPEKTIF MODERN HUKUM ISLAM**

yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Syafi'i Sulaiman Jamrozi

NIM : 1630016007

Program/Prodi : Doktor/Studi Islam

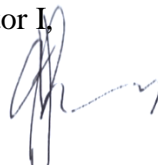
Konsentrasi : Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam
(IHPSI)

saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat
diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta untuk diajukan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 29 Oktober 2021

Promotor I



Prof. Drs. H. Ratno Lukito, MA., DCL.

NIP.1968032219903

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**PENGUASAAN, PEMILIKAN
DAN KONSEP AT-TA'MIM: DISKURSUS AGRARIA
DALAM PERSPEKTIF MODERN HUKUM ISLAM**

yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Syafi'i Sulaiman Jamrozi
NIM : 1630016007
Program/Prodi : Doktor/Studi Islam
Konsentrasi : Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam
(IHPSI)

saya berpendapat bahwa Disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 29 Oktober 2021
Promotor II,



Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si.
NIP.195709211988121001

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**PENGUASAAN, PEMILIKAN
DAN KONSEP AT-TA'MIM: DISKURSUS AGRARIA
DALAM PERSPEKTIF MODERN HUKUM ISLAM**

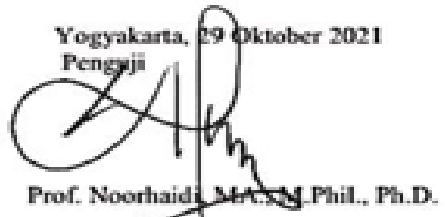
yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Syafi'i Sulaiman Jamrozi
NIM : 1630016007
Program/Prodi : Doktor/Studi Islam
Konsentrasi : Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam
(IHPSI)

saya berpendapat bahwa Disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 29 Oktober 2021
Penguji



Prof. Noorhaidi, M.P., M.Phil., Ph.D.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**PENGUASAAN, PEMILIKAN
DAN KONSEP AT-TA'MIM: DISKURSUS AGRARIA
DALAM PERSPEKTIF MODERN HUKUM ISLAM**

yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Syafi'i Sulaiman Jamrozi
NIM : 1630016007
Program/Prodi : Doktor/Studi Islam
Konsentrasi : Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam
(IHPSI)

saya berpendapat bahwa Disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 29 Oktober 2021
Penguji



Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**PENGUASAAN, PEMILIKAN
DAN KONSEP AT-TA'MIM: DISKURSUS AGRARIA
DALAM PERSPEKTIF MODERN HUKUM ISLAM**


yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Syafi'i Sulaiman Jamrozi
NIM : 1630016007
Program/Prodi : Doktor/Studi Islam
Konsentrasi : Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam
(IHPSI)

saya berpendapat bahwa Disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 29 Oktober 2021
Penguji


Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**PENGUASAAN, PEMILIKAN
DAN KONSEP AT-TA'MIM: DISKURSUS AGRARIA
DALAM PERSPEKTIF MODERN HUKUM ISLAM**

yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Syafi'i Sulaiman Jamrozi
NIM : 1630016007
Program/Prodi : Doktor/Studi Islam
Konsentrasi : Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam
(IHPSI)

saya berpendapat bahwa Disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 29 Oktober 2021
Penguji



Dr. Sulistyaningsih, S.Sos., M.Si.

ABSTRAK

Disertasi ini mengkaji sistem penguasaan dan kepemilikan tanah, utamanya mulai era Nabi saw hingga era para khalifah (*al-khulafā' al-rasyidūn*), serta konsep *at-ta'mīm*. Dengan menggunakan teori hak milik (*theory of property rights*), teori kontinuitas dan perubahan, (*theory of continuity and change*) dan teori “ruang kosong” (*minṭaqah al-farāgh; the discretionary area*), kajian ini akan membahas beberapa permasalahan penting, yaitu: 1) konsep hubungan hukum antara negara dan tanah serta fitur sistem penguasaan dan kepemilikan tanah; 2) dinamika penguasaan negara atas tanah (sumber daya agraria; 3) implikasi otoritas penguasaan negara atas tanah; 4) konsep kebijakan *at-tāmīm* dan formulasi nalar kepentingan umum yang ideal sebagai basis moral kebijakan publik di bidang agraria.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan menggunakan perspektif modern hukum Islam, yaitu pendekatan rasional, etis, dan komparatif. Kajian ini menghasilkan beberapa temuan penting. *Pertama*, dalam perspektif hukum Islam, hubungan hukum antara negara dengan tanah (sumber daya agraria) mewujud dalam bentuk hubungan penguasaan dan bukan hubungan kepemilikan. Adapun fitur konsep penguasaan dan kepemilikan tanah dalam perspektif hukum Islam bersifat komunalistik-religius yang penguasaannya ada pada kendali otoritas negara sebagai representasi dari kepentingan publik dengan menambahkan bobot dan nilai spiritualitas dan moralitas agama sebagai pembeda dari sistem kepemilikan paham sosialisme sekuler. *Kedua*, dinamika penguasaan tanah oleh negara dalam hukum Islam bermula pada saat Nabi Muhammad saw hijrah ke Madinah dan komunitas Muslim mewujud menjadi sebuah negara dalam suasana wilayah religio-politik yang plural, yaitu Negara Madinah. Penguasaan negara atas tanah ini pada umumnya melalui kegiatan dakwah yang terewejahtahkan dalam wujud ekspansi wilayah dakwah baik melalui jalan damai dengan perjanjian (*bi aṣ-ṣulḥ*) maupun melalui misi militeristik

dengan jalan peperangan (*bi al-fath*). Perluasan cakupan wilayah dakwah ini pada gilirannya menyisakan implikasi-implikasi lain di luar implikasi agama, semisal implikasi sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang notabene merupakan fakta yang tidak bisa terelakkan yang harus dihadapi umat Islam pada saat itu. *Ketiga*, implikasi logis dari konsep otoritas penguasaan negara atas tanah ini telah memposisikan negara sebagai representasi institusi publik yang memiliki berbagai otoritas terhadap tanah, yang meliputi: 1) otoritas penguasaan negara atas tanah; 2) otoritas pelimpahan hak penguasaan negara kepada pihak lain (*tauliyah al-siyāsī*); 3) otoritas pengelolaan tanah oleh negara; dan 4) otoritas pembatasan bahkan pencabutan hak kepemilikan individu atas tanah. *Keempat*, konsep *at-ta'mīm* pada dasarnya merupakan konsekuensi logis dari konsepsi Islam tentang kepemilikan harta yang merupakan suatu fungsi sosial. Konsepsi ini telah memberi ruang bagi penguasa atau pemerintah untuk mengisi zona vakum (*minṭaqah al-farāgh*) atau kekosongan hukum dengan membuat suatu paket regulasi berupa kebijakan intervensi negara atas kepemilikan tanah individu. Intervensi ini bisa berupa kebijakan *at-ta'mīm* atas dasar prinsip merealisasikan kepentingan umum. Nalar kepentingan umum yang dijadikan dasar kebijakan *at-ta'mīm* harus dipersepsi dengan formulasi nalar sebagai berikut: 1) keberlakuan kaidah yang menyatakan bahwa "kepentingan umum harus lebih diprioritaskan dari pada kepentingan individu" tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi hanya berlaku pada fakta bahwa kedua kepentingan tersebut berada pada kualifikasi derajat yang setara; 2) kepentingan umum tersebut harus memenuhi dua prinsip dasar, yaitu asas kebutuhan dan manfaat dan asas kesepakatan dan kesepahaman; 3) kemaslahatan dapat dijadikan argumentasi hukum manakala kemaslahatan itu memenuhi beberapa persyaratan, yaitu: *maṣlahah* itu harus sejalan dengan tujuan ditetapkannya hukum Islam, *maṣlahah* tersebut harus berkategori *darūriyyah* atau *ḥājiyyah* yang menempati kedudukan *darūriyyah*, khusus terkait kasus tertentu,

maṣlahah itu harus beratribut umum dan menyeluruh (*kulliyyah*), dan *maṣlahah* harus bersifat pasti (*qaṭ'īyyah*); dan 4) mengingat konsep kepentingan umum itu bersifat dinamis dan konsensus (*ijmā'*) merupakan salah satu metode untuk memperoleh kepentingan umum, maka *ijmā'* harus dipersepsi sebagai konsep yang hidup (*living ijmā'*) dan dinamis yang berorientasi pada masa kini dan masa yang akan datang, bukan “barang” masa lalu yang sudah selesai.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Islam telah meletakkan dasar-dasar pembaruan hukum agraria, dari sistem kepemilikan tanah pra-Islam yang opresif dan feudalistik-eksploitatif menuju distribusi kepemilikan tanah yang adil dan humanis-religius. Untuk menjelaskan gagasan reforma agraria dalam perspektif hukum Islam, pembahasan dalam disertasi ini telah membuktikan adanya reformasi sistem penguasaan dan kepemilikan tanah oleh negara berdasarkan data historis, khususnya pada awal sejarah Islam. Pergeseran paradigma dari sistem kepemilikan monopolistik yang mengarah pada budaya feodalistik pra-Islam ke sistem kepemilikan Islam yang bersifat komunalistik-religius di bawah kendali otoritas Nabi Muhammad saw sebagai kepala negara (*waliyyu al-amr*) atas dasar prinsip keadilan, -yang kemudian juga dilanjutkan oleh para khalifah sesudahnya- bertumpu pada semangat untuk mewujudkan cita-cita kemaslahatan umum. Meskipun demikian, terdapat dua poin penting yang perlu digaribawahi. *Pertama*, fakta bahwa adanya pluralitas pandangan hukum di kalangan para ulama dalam mempersepsi konsep penguasaan tanah di era Nabi saw dan para khalifah sesudahnya semakin menguatkan akan heterogenitas sejarah tanah, dan sejarah agraria itu sendiri, yang tidak dapat direduksi, boleh jadi karena tumpang-tindihnya formasi sosial yang terjadi pada tanah tersebut, sebagaimana terefleksikan dalam pepatah tradisional Keagrariaan Islam yang menyatakan bahwa: “Tanah itu berbeda (statusnya, sejarahnya) dari satu jengkal tanah ke jengkal lainnya” (*al-arḍ bitifriqi 'alā syibr; land differs from one foot of ground to the next*). *Kedua*, bahwa terdapat

proses gerak (*continuity*) dan proses perubahan (*change*) dalam beberapa konsep hukum Keagrariaan Islam. Istilah-istilah hukum seperti *iqṭā'*, *ḥimā*, dan juga *kharāj*, merupakan beberapa istilah yang memiliki asosiasi-asosiasi konotatif dan produk linguistik budaya dan doktrin sosial era sebelum Islam. Ini sekaligus menguatkan tesis Ira M. Lapidus yang menyatakan bahwa masyarakat Islam Timur Tengah dibangun dari institusi yang telah mapan sebelumnya dengan sebuah corak dan identitas kultur Islami.



ABSTRACT

This dissertation studies land tenure system, in particular from Prophet Muhammad pbuh era to the four caliphs (*al-khulafā' al-rasyidīn*), and *at-ta'mīm* concept. Using theory of property rights, theory of continuity and change, and theory of vacuum zone (*minṭaqah al-fāragh*), the research discusses several important issues, namely: 1) the concept of legal relationship between the state and land also the feature of land ownership; 2) the dynamics of the state's control over land (agrarian resources); 3) the implication of the state's control over land; 4) the concept of *at-tamim* policy and the reasonable formula of ideal public good as the agrarian public concern moral base.

This literature study employed modern Islamic law perspective, viz. rational, ethical, and comparative approaches and discovered several essential points. First, legal relationship between the state and land (agrarian resources) in Islamic law perspective manifests as controlling and not as ownership relationship while the concept of land tenure features is communalistic-religious in nature where the state keeps the control to represent public concern by enriching the value of spiritualism and religious moral that make them different from secular socialism ownership system. Second, the state's control of land in Islamic law began as the prophet Muhammad pbuh moved to Madinah and Muslim community transformed into nation in a plural religious-politic atmosphere. The control was inserted during religious address activities either in peace treaty (*bi as-sulh*) or in military conquer (*bi al-fath*). The activities, however, left inevitable excesses of social, politics, economy, and culture at that time. Third, the logical implication of state-control of land concept had put the nation a public institution representation that had land authorities, including 1) state-control over land authority; 2) taking over to other party authority (*tauliyah al-siyāsī*); 3) state land management authority; and 4) limiting, even withdrawing, individual ownership. Fourth, *at-ta'mim*

concept is basically a logical consequence of a concept in Islam which says wealth possession has social function. It gave the ruler a room to fill the vacuum zone (*minṭaqah al-faragh*) or a vacant of law and issued a state intervening policy on individual land ownership. The intervention could be *at-ta'mīm* policy on putting public interest in action. Being the basis of *at-ta'mīm* policy, the public concern must have the following formula: 1) the principle's statement "public concern must be above any individual interest" is not absolute. The statement applies only when both interests are of equal qualification; 2) the public concerns must meet two basic principles: on the need and benefit basis and on understanding and agreement principle; 3) benefits (*maṣlahah*) can be used a legal argument when it meets the following requirements: it is in line with establishing Islamic law; it is categorized as *ḍarūriyyah* – related to particular case – or *ḍarūriyyah*-sense *ḥājīyyah*; it addresses everyone and comprehensive (*kullīyyah*) in nature; and it must be certain (*qaṭ'iyyah*); and 4) since public concern concept is dynamic and consensus (*ijmā'*) is one method to reach public concern, *ijma'* must be believed a living concept (living *ijmā'*) and dynamic with present and future orientation, not old-fashioned.

The study proves that Islam has put the basic of agrarian law reform, from oppressive and feudal-exploitative pre-Islam ownership system to fair and human-religious one. To elaborate the agrarian reform in Islamic law perception, the dissertation presents historical data on state-owned land system, in particular in the early history of Islam. The shifting paradigm from monopolistic system prone to pre-Islam feudal to communal-religious ownership system of Islam under the control of prophet Muhammad as head of state (*waliyyu al-amr*) on fairness principle basis and followed by his successors was based on the spirit of reaching public good. There are two points should be noticed. First, the fact of different views on land tenure during the prophet era and his successors among Muslim clerics confirms the unreduceable heterogeneity of land

history, and agrarian too. This is possibly due to a social formation overlap of land as it is in a proverb “Land differs from one foot of ground to the next” (*al-arḍ bitifriqi ‘ala syibr*). Second, there are continuity and change processes in some Islamic agrarian concepts. Terms of law such as *iqṭā’*, *ḥimā*, and *kharāj* are connotative and linguistic products and social doctrine before Islam. It also confirms the thesis from Ira M. Lapidus who stated that the Middle Eastern Islamic societies were built on the institution of ancient institutions with an Islamic cultural style and identity.



ملخص الرسالة

بحثت هذه الرسالة في نظام حيازة الأراضي وتمليكها، بدءاً من عهد النبي محمد ووصولاً إلى عهد الخلفاء الراشدين، وكذلك في مفهوم التأميم. ناقشت هذه الرسالة عدة قضايا مهمة معتمدة على نظرية حقوق الملكية (*theory of property rights*)، ونظرية الاستمرارية والتغيير (*theory of continuity and change*)، ونظرية منطقة الفراغ (*theory of vacuum zone*)، وهذه القضايا هي كالتالي: (1) مفهوم العلاقة القانونية بين الدولة والأراضي وخصائص نظام حيازة الأراضي وتمليكها؛ (2) ديناميات سيطرة الدولة على الأراضي (الموارد الزراعية؛ (3) آثار سيطرة الدولة على الأراضي؛ (4) مفهوم سياسة التأميم (عملية تحويل الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج والمبادلة في المجتمع إلى ملكية جماعية، بهدف تحقيق المصلحة العامة) والصياغة المثالية لمنطق المصلحة العامة كأساس أخلاقي للسياسة العامة في القطاع الزراعي.

هذه الرسالة عبارة عن بحث مكثي حيث استخدم الباحث منظورا حديثا للشريعة الإسلامية، وهو منهج عقلائي وأخلاقي ومقارن. أسفرت هذه الدراسة عن العديد من النتائج الهامة. أولاً،

من منظور الشريعة الإسلامية، تتمثل العلاقة القانونية بين الدولة والأراضي (الموارد الزراعية) في شكل علاقة حيازية لا ملكية. أما سمة مفهوم حيازة الأراضي وتمليكها من منظور الشريعة الإسلامية فهي سمة مجتمعية دينية، حيث تخضع حيازتها لسيطرة الدولة باعتبارها تمثيلاً للمصلحة العامة من خلال إضافة القيمة الروحانية والأخلاق الدينية التي تميزها عن نظام الملكية للاشتراكية العلمانية. ثانياً، بدأت ديناميات سيطرة الدولة على الأراضي في الشريعة الإسلامية عندما هاجر النبي محمد إلى المدينة المنورة وأصبح المجتمع المسلم دولة ذات جو ديني سياسي تعددي، أي دولة المدينة المنورة. كانت سيطرة الدولة على هذه الأراضي تتم بشكل عام من خلال أنشطة الدعوة أو توسيع مناطق الدعوة سواء كانت بالصلح أو بالعملية العسكرية (الفتح). وكان هذا التوسيع يترك بدوره آثاراً أخرى تتجاوز الآثار الدينية، مثل الآثار الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية التي تعتبر حقائق يجب على المسلمين مواجهتها في ذلك الوقت. ثالثاً، إن التضمين المنطقي لمفهوم حيازة الدولة على الأراضي قد وضع الدولة في موقف محرج لأنها تمثل المؤسسة العامة التي لها سلطات مختلفة على الأراضي،

وتشمل: (1) سلطة سيطرة الدولة على الأراضي؛ (2) سلطة تفويض حقوق سيطرة الدولة إلى أطراف أخرى؛ (3) سلطة الدولة في إدارة الأراضي؛ و(4) سلطة تقييد الحقوق وإلغاء الملكية الفردية للأراضي. رابعاً، إن مفهوم التأميم هو في الأساس نتيجة منطقية للمفهوم الإسلامي لملكية العقارات التي هي وظيفة اجتماعية. ولقد أعطى هذا المفهوم للدولة أو الحكومة المجال لملء منطقة الفراغ أو الفراغ القانوني بأن تضع أنظمة في شكل سياسات تدخل الدولة لملكية الأراضي الفردية. ويمكن أن يكون هذا التدخل في شكل سياسة التأميم بقصد تحقيق المصلحة العامة. ومنطق المصلحة العامة الذي يتم استخدامه كأساس لسياسة التأميم يجب فهمه من خلال الصيغة التالية: (1) إن صحة القاعدة الفقهية التي تنص على أن "المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة" ليست مطلقة بل مقيدة، وتكون لهاتين المصلحتين درجة متساوية؛ (2) يجب أن تحقق المصلحة العامة مبدئين أساسيين، وهما مبدأ الحاجة والمنفعة ومبدأ الاتفاق والتفاهم، (3) يمكن استخدام المصلحة كحجة شرعية عندما تستوفي بعدة متطلبات، وهي: أن توافق المصلحة مع مقاصد الشريعة، وأن تتصف بضرورة قطعية

كلية؛ و 4) بما أن مفهوم المصلحة العامة ديناميكي وأن الإجماع هو إحدى طرق الحصول على المصلحة العامة، فيجب أن نعتبره مفهوما حيويا وديناميكيا موجها إلى الحاضر و المستقبل، ولا نعتبره أشياء أثرية من الماضي.

أشارت هذه الرسالة إلى أن الإسلام قد وضع أسسا لإصلاح القانون الزراعي، من نظام ملكية الأراضي القمعي والإقطاعي الاستغلالي قبل الإسلام إلى نظام التوزيع العادل والإنساني والديني لملكية الأرض. كما أثبتت هذه الرسالة قيام الدولة بإصلاح نظام حيازة الأراضي وتمليكها بناء على البيانات التاريخية، وخاصة في بداية التاريخ الإسلامي. وكان التحول النموذجي من نظام التملك الاحتكاري المؤدي إلى ثقافة إقطاعية ما قبل الإسلام إلى نظام التملك الإسلامي ذي سمة مجتمعية دينية تحت سلطة النبي محمد كولي الأمر على أساس العدالة - التي استمرت إلى الخلفاء الراشدين من بعده - يتركز على روح لتحقيق المصلحة العامة. ومع ذلك، هناك نقطتان مهمتان يجب مراعاتهما ؛ أولا، حقيقة أن هناك آراء فقهية متعددة بين العلماء في إدراك مفهوم حيازة الأراضي في عهد النبي والخلفاء الراشدين من بعده

تعزز من عدم تجانس تاريخ الأرض، والتاريخ الزراعي نفسه، والذي قد لا يستطيع اختزاله، بسبب المشاكل الاجتماعية التي تحيط بالأرض، كما ينعكس في المثل الزراعي الإسلامي التقليدي الذي ينص على أن: "الأرض بتفرق على شر". **ثانياً**، أن هناك عملية حركة (استمرارية) وعملية تغيير في العديد من مفاهيم الفقه الزراعي الإسلامي. والمصطلحات الفقهية مثل الإقطاع، والحمى والخراج، هي مصطلحات لها معانٍ ضمنية وهي نتاج لغويات ثقافية واعتقادات اجتماعية لعصر ما قبل الإسلام. وهذا الأمر يعزز أيضاً رسالة كتبها إيرا م. لايبندوس Ira M. Lapidus التي تقول أن المجتمع الإسلامي في الشرق الأوسط مبني قوي التأسيس على هوية ثقافية إسلامية.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 pada 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B b	Be
ت	Tā'	T t	Te
ث	Šā'	š	s dengan satu titik di atas
ج	Jīm	J j	Je
ح	Ḥā'	Ḥ ḥ	h dengan satu titik di bawah
خ	Khā'	Kh kh	Ka dan Ha
د	Dāl	D d	De
ذ	Ẓāl	Ẓ ẓ	z dengan satu titik di atas
ر	Rā'	R r	Er
ز	Zā'	Z z	Zet
س	Sīn	S s	Es

ش	Syīn	Sy sy	Es dan Ye
ص	Ṣād	Ṣ ṣ	Es dengan satu titik di bawah
ض	Ḍād	Ḍ ḍ	De dengan satu titik di bawah
ط	Ṭā'	Ṭ ṭ	Te dengan satu titik di bawah
ظ	Ẓā'	Ẓ ẓ	Zet dengan satu titik di bawah
ع	'Ain	ء	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G g	Ge
ف	Fā'	F f	Ef
ق	Qāf	Q q	Qi
ك	Kāf	K k	Ka
ل	Lām	L l	El
م	Mīm	M m	Em
ن	Nūn	N n	En
هـ	Hā'	H h	Ha
و	Wāwu	W w	We
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Yā'	Y y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Tulisan	Dibaca
حَدَّث	<i>ḥaddaṣa</i>
مَوَاطَّأ	<i>Muwaṭṭaʿa</i>

C. Vokal

1. Vokal Pendek

Tulisan	Dibaca
اَ	a
اُ	u
اِ	i

Vokal Panjang

Tulisan	Dibaca
قَالَ	<i>qāla</i>
يَقُولُ	<i>yaqūlu</i>
قِيلَ	<i>qīla</i>

2. Vokal Rangkap

Tulisan	Dibaca
كَيْفَ	<i>kaifa</i>

حَوْلَ	<i>ḥaula</i>
--------	--------------

D. *Tā' Marbūṭah* di Akhir Kata

1. *Tā' marbūṭah* (ة) yang dibaca mati (*sukūn*) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia seperti *salat*, *zakat*, *bidah* dan lainnya.

Tulisan	Dibaca
قراءة	<i>qirā'ah</i>
كتابة	<i>kitābah</i>

2. *Tā' marbūṭah* yang diikuti kata sandang *al* (ال) jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Tulisan	Dibaca
كتابة الحديث	<i>kitābah al-ḥadīṣ</i>
قراءة الكتب	<i>qirā'ah al-kutub</i>

E. Kata Sandang *Alif* dan *Lām* (ال)

1. Kata sandang *alif* dan *lām* (ال) diikuti huruf *syamsiyyah* dengan menggandakannya dan dipisahkan tanda (-).

Tulisan	Dibaca
التراجم	<i>at-tarājum</i>
السرقيطي	<i>as-Saraqusṭī</i>

2. Kata sandang *alif* dan *lām* (ال) diikuti huruf *qamariyyah* ditulis *al* dengan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Tulisan	Dibaca
الموطأ	<i>al-Muwaṭṭaʿ</i>
الأندلس	<i>al-Andalus</i>

F. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

Tulisan	Dibaca
علماء الأندلس	<i>ulamāʿ al-Andalus</i>
تفسير غريب الموطأ	<i>Tafsīr Gharīb al-Muwaṭṭaʿ</i>

G. Kata Serapan dari Bahasa Arab

Kata serapan dari yang digunakan berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti *Alquran*, *hadis*, *bidah*, *haji*, *fakih*, *hakim* dan lainnya. Kata asli dalam bahasa Arab masih digunakan untuk menjelaskan istilah teknis atau gelar seperti *al-faqīh*, *al-ḥakim*, *muḥaddisūn* dan lainnya pada awal penjelasan.



KATA PENGANTAR

Seiring dengan berseminya bunga kebahagiaan di hati, tiada yang lebih tepat untuk mewakili bahasa nurani, selain hanya puji syukur kehadiran Ilahi, atas bimbingan-Nya selama ini, untuk meniti jalan panjang kehidupan, melewati hamparan padang ujian, dan jurang-jurang romantika kehidupan. Untaian shalawat dan rajutan salam sudah sepatutnya diberikan kepada sang Nabi, penjelas kalam Ilahi, pemilik hati nan suci, Muhammad saw., putra Abdullah, buah hati Aminah. Disertasi dengan judul **“Penguasaan, Pemilikan dan Konsep *at-Ta’im*: Diskursus Agraria dalam Perspektif Modern Hukum Islam”** ini diajukan guna memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Agama Islam. Dengan segala keterbatasan dan kemampuan yang ada, disertasi ini dapat diselesaikan dengan melewati beberapa tahapan ujian dan revisi.

Disertasi ini tidak akan selesai tanpa dukungan, bantuan, bimbingan dan arahan dari semua pihak. Selanjutnya, atas nama "ketulusan", penulis menyadari bahwa draf awal disertasi ini menjadi mungkin untuk diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak, baik moril maupun materiil. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak berikut:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A., (Rektor UIN Sunan Kalijaga), Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag (Direktur Pascasarjana), H. Ahmad Muttaqin, S.Ag., M.Ag., MA, Ph.D. (Wakil Direktur) dan Ahmad Rafiq, M. Ag, M.A., Ph.D (Ketua Program Studi Program Doktor), seluruh staf pengajar serta pegawai administrasi yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik kepada para mahasiswa termasuk penulis, baik pelayanan akademik maupun non akademik sehingga dapat memperlancar penulis guna menyelesaikan kuliah dan penulisan disertasi ini
2. Prof. Drs. H. Ratno Lukito, MA., DCL. dan Prof. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si., selaku Promotor yang telah memberikan

arahan dan bimbingan yang sangat berharga di sela-sela kesibukan beliau berdua yang sangat padat, namun tetap sudi membaca dan memberikan masukan konstruktif untuk perbaikan penulisan disertasi ini dari waktu ke waktu. Mereka berdua selalu memberikan motivasi kepada penulis hingga penulis berkesempatan untuk melakukan ziarah intelektual spiritual di negeri Kinanah, negeri seribu menara Mesir.

3. Para penguji yang memberikan masukan, catatan dan penguatan argumen dalam berbagai tahapan ujian disertasi ini.
4. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan RI yang telah memberikan beasiswa untuk membantu kebutuhan finansial dan akademik serta monitoring dan mengevaluasi selama menempuh perkuliahan dan menyelesaikan disertasi ini.
5. Kedua orang tua penulis; K. Mukri Mahalli (almarhum) dan Ibu Istiatun, yang telah memberikan segalanya buat penulis, kasih sayang yang tak terbatas, kesejukan bak embun pagi, kesabaran laksana tetesan air yang berhasil melubangi batu hitam. "Sungkem putramu yang sering merepotkan, tapi mudah-mudahan bisa dibanggakan". Demikian juga ucapan terima kasih kepada keluarga besar PP. 'Ainul 'Ulum, utamanya kepada mertua penulis: K.H. Ahmad Sunani (almarhum) dan Hj. Mashfufah, yang tak lelah berdo'a mantra kesabaran, kebajikan dan kesalehan buat penulis.
6. Istri tercinta drh. Roiin Umayya dan putra-putri penulis, Ahmad Azza el-Fadholy, Fathin Azma Hilwana, dan Moch. Faiq Mahasin, dan ketiga putra-putri penulis lainnya (putra/putri yang ke-4, 5, 6 yang ketiganya telah berpulang ke rahmatullah), yang -dengan kesabaran dan kegigihannya dalam menjalani laku kehidupan ini- mereka telah mampu memberikan "spirit tersendiri" bagi penulis, terutama selama melakukan "pengembaraan intelektual". Tanpa kehadiran mereka, hidup ini terasa hampa. Kepada mereka semua, disertasi ini penulis persembahkan.
7. Dr. H. M. Suyudi, M.Ag (Rektor IAI Sunan Giri Ponorogo), Dr. Suad Fikriawan, MA (Dekan Fakultas Syariah), Dian Putri Ayu, M.Sy (Kaprosdi Hukum Ekonomi Syariah) dan Nafi'ah,

S.H., M.Esy. (Kaprodi Ekonomi Syariah) yang telah memberikan wahana untuk mengabdikan diri di Fakultas Syariah IAI Sunan Giri Ponorogo.

Penulis tidak mampu membalas semua amal kebaikan mereka tersebut dan hanya berdoa semoga kebaikan mereka dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda dan tercatat sebagai amal sholeh bagi mereka semua.

“Tiada gading yang tak retak”, karena “retak” itulah disebut gading. Kiranya, inilah ungkapan yang tepat untuk mengakhiri kata pengantar ini. Artinya, penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan akan sebuah kritik dan saran yang bersifat “korektif” dan “konstruktif” demi kebaikan dan kemanfaatan disertasi ini. Akhirnya, hanya kepada Ilahi kita mengabdikan, kepada Gusti kita berbakti, kepada Rabbi kita berserah diri dan kepada hati nurani kita berkaca diri.

Yogyakarta, 29 September 2020



(Ahmad Syafi'i Sulaiman Jamrozi)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIARISME	vi
NOTA DINAS	vii
ABSTRAK	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xxv
KATA PENGANTAR	xxxii
DAFTAR ISI	xxxv
DAFTAR TABEL, GAMBAR DAN BAGAN	xxxvii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	19
C. Signifikansi Penelitian	19
D. Manfaat Penelitian	20
E. Kajian Pustaka	20
F. Kerangka Teori	38
G. Metode Penelitian	61
H. Sistematika Penelitian	65
BAB II : KONSEP HAK MILIK DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF	67
A. Diskursus Konsepsi Hak Milik	67
1. Batasan Konseptual Hak Milik	71
2. Institusionalisasi Hak Milik	88
B. Hak Milik dalam Perspektif Kapitalis, Sosial, dan Islam.....	120
1. Hak Milik dalam Perspektif Kapitalis ..	121
2. Hak Milik dalam Perspektif Sosial	137
3. Hak Milik dalam Perspektif Islam.....	148

**BAB III : DINAMIKA SISTEM PENGUASAAN DAN
KEPEMILIKAN TANAH DALAM HUKUM
ISLAM 175**

- A. Sistem Kepemilikan Tanah sebelum Islam 184
- B. Penguasaan dan Kepemilikan Tanah
pada Masa Peradaban Islam..... 206
 - 1. Kebijakan Lahan Protektorat (*Himā*) 212
 - 2. Kebijakan Distribusi Tanah (*Iqtā'*) 229

**BAB IV: IMPLIKASI OTORITAS NEGARA DALAM
PENGUASAAN TANAH 277**

- A. Penguasaan Negara atas Tanah..... 277
- B. Penguasaan Negara atas Tanah Taklukan.. 290
 - 1. Tanah yang Masuk Wilayah Islam
melalui Jalur Penaklukan (*bi al-fath*)... 296
 - 2. Tanah yang Masuk Wilayah
Islam lewat Jalur Dakwah
(*al-arḍ al-muslimah bi ad-da'wah*)..... 311
 - 3. Tanah yang Masuk Wilayah
Islam lewat Perjanjian Damai
(*arḍ aṣ-ṣulh*)..... 314
- C. Pelimpahan Otoritas Hak Penguasaan
Negara Kepada Pihak Lain 346
- D. Hak Pengelolaan Tanah oleh Negara..... 355

**BAB V: INTERVENSI NEGARA DALAM KEBIJAKAN
PENGAMBILALIHAN TANAH INDIVIDU
UNTUK KEPENTINGAN UMUM
(*AT-TA'MĪM*) 369**

- A. Kebijakan Pengambilalihan Tanah
Individu oleh Negara 374
- B. Konsepsi Dasar Kebijakan *at-Ta'mīm*..... 376
 - 1. Definisi dan Historisitas *at-Ta'mīm*..... 377

2. Pandangan Hukum Ulama terhadap Konsep <i>at-Ta'mīm</i>	383
3. Implementasi Konsep <i>at-Ta'mīm</i> dalam Sejarah Hukum Islam.....	422
4. Meninjau Ulang Konsep <i>At-Ta'wīd</i>	427
C. Reformulasi Nalar Kepentingan Umum dalam Kebijakan <i>at-Ta'mīm</i>	436
1. <i>Maṣlahah</i> sebagai Basis Moral Kebijakan Publik	437
2. Rasionalisasi Nalar Kepentingan Umum dan Kaidah Pembanding	446
3. Reformulasi Konsep <i>al-Maṣlahah</i>	461
BAB VI: PENUTUP	483
A. Kesimpulan.....	483
B. Implikasi Penelitian	487
DAFTAR PUSTAKA	493
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	605

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL, GAMBAR, DAN BAGAN

Tabel 2.1 Makna Teknis Kepemilikan dalam Perspektif Hukum Islam, 79

Tabel 3.1 Perbedaan Konsepsi Hukum Kepemilikan Tanah, 278

Gambar 3.1 Organisasi Sosial di Sasanid Iran, 192

Gambar 4.1 Bangsa sebagai Landasan Pokok Kehidupan Islam, 331

Bagan 5.1 Klasifikasi Kepentingan Manusia versi Ibn ‘Āsyūr, 447



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penguasaan tanah dalam sejarah umat manusia berlangsung melalui proses yang dinamis dan berporos pada dinamika konsep hak milik dan hukum kepemilikan.¹ Perkembangan konsep hak milik (*property rights*) dan hukum kepemilikan (*property law*) telah menjadi diskursus yang menarik dan berkait berkelindan dengan kajian hukum, sosial, politik dan ekonomi.² Para sarjana menyatakan bahwa properti dan kepemilikan merupakan komponen konseptual yang penting dari sistem hukum dan sistem ekonomi.³ Keduanya memainkan

¹ FAO, *Land Tenure Studies 3: Land Tenure and Rural Development* (FAO, 2012). Lihat juga Richard Ameyaw Ampadu, "Finding the Middle Ground: Land Tenure Reform and Customary Claims Negotiability in Rural Ghana," *Disertasi* (International Institute of Social Studies [IISS], 2013), 7-9; Uwacu Alban Singirankabo dan Maurits Willem Ertsen, "Relations between Land Tenure Security and Agricultural Productivity: Exploring the Effect of Land Registration," *Land* 9, no. 5 (2020): 2-3; Olivier De Schutter, "The Role of Property Rights in the Debate on Large-Scale Land Acquisitions," *CRIDHO Working Paper* 1 (2015), 3-5.

² Sheila R. Foster dan Daniel Bonilla, "The Social Function of Property: A Comparative Law Perspective," *FORDHAM LAW REVIEW* 80 (2011): 101-113; Nestor M. Davidson, "Property and Relative Status," *Michigan Law Review* 107, no. 5 (March, 2009): 759-772; Amnon Lehavi, *The Construction of Property: Norms, Institutions, Challenges* (New York: Cambridge University Press, 2013); Ekaterina Pravilova, *A Public Empire: Property and the Quest for the Common Good in Imperial Russia* (UK: Princeton University Press, 2014), 19, 71-77.

³ Richard A. Epstein, "Possession as The Root of Title," dalam *Liberty, Property, and the Law: A Collection of Essays*, ed. Richard A. Epstein, New York & London: Garland Publishing, Inc., 2000, 175. Lihat juga Theo R. G. van Banning, *The Human Right to Property* (Groningen-Oxford: Intersentia-Hart, 2001), 371; Bahaa Ali el-Dean, *Privatization and the Creation of A Market-Based Legal System: The Case of Egypt* (Leiden-Boston: Brill, 2002), 9; Tracy C. Miller, "The Role of Property Rights in Economic Development that Benefits the Poor," Paper dipresentasikan di *Baylor University*- 10/24/08, 3-4; Christian Bjørnskov dan Martin Paldam, "The Spirits of Capitalism and Socialism A Cross-Country Study of Ideology," *Economics Working Paper 2009-18*, 2; Svetozar Pejovich, *The Economics of Property Rights: Towards a*

peran sentral dalam struktur dan fungsi sistem ekonomi apa pun, baik sosialis maupun kapitalis.⁴

Sistem ekonomi kapitalis dan sosialis adalah dua sistem yang saling bersaing dan mendominasi dunia, baik pada masa lalu maupun masa kini.⁵ Menurut pengamatan Marian Zalesco atas ekonomi global dari perspektif sejarah dan juga perspektif hari ini, ia beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Mereka ditentukan oleh sistem ekonomi yang ada di wilayah geografis tertentu. Dalam catatan sejarah sejauh ini, perekonomian telah bertindak dalam lima bentuknya, yaitu: dalam komunitas primal (*a primal community*), perbudakan (*slavery*), feodalisme (*feudalism*), kapitalisme (*capitalism*) dan sosialisme (*socialism*).⁶

Theory of Comparative Systems (Boston-London: Kluwer Academic Publishers, 2007), 27-29; Paul, Q, Hirst, *Law, Socialism and Democracy* (New York: Routledge, 2010), 8-10.

⁴ Hayatullah Laduddin, "Property and Ownership Right from an Islamic Perspective," *Advances in Natural and Applied Sciences* 6, no. 7 (2012): 1125-1129.

⁵ Lihat Stephan Eisel, *Between Ideologies: the Social Market Economy*, Januari 2012, diakses 6 September 2018, http://www.kas.de/wf/doc/kas_31897-1522-11-30.pdf?120904143031;

Bernard Chavance, "The Historical Conflict of Socialism and Capitalism, and The Post-Socialist Transformation," *UNCTAD X, High-level Round Table on Trade and Development: Directions for the Twenty-first Century*, Bangkok, 12 February (2000), 1-2; Robert L. Bradley JR dan Roger Donway, "Capitalism, Socialism, and 'The Middle Way': A Taxonomy," *The Independent Review* 15, no. 1 (2010): 71-76.

⁶ Charles F. Andrain, *Comparative Political Systems: Policy Performance and Social Change* (New York-London: M.E. Sharpe, Inc., 1994), 3; Chavance, "The Historical Conflict," 1-3; Satyananda J. Gabriel, "Comparative Economic System," dalam *21st Century Economics: A Reference Handbook*, ed. Rhona C Free, Los Angeles, Singapore, London: Sage Publications, Inc., 2010, 442; K. Aiginger, M. Landesmann, "Competitive Economic Performance: USA versus EU," *WIIW Research Reports* no. 2 (November 2002), 10-11; Clement A. Tisdell, *Competition, Diversity, and Economic Performance: Processes, Complexities, and Ecological Similarities* (Cheltenham-UK & Northampton-USA: Edward Elgar Publishing, Inc., 2013), 70-73; Marian Zalesco, "Capitalism Vs. Socialism- An Attempt to Analyse the Competitiveness of Economic System," *Ekonomia I Prawo: Economics and Law* 14, no. 1 (2015): 62.

Yang pertama (sistem ekonomi kapitalis) mendukung dan memperkenalkan kebebasan individu dalam kegiatan ekonomi ke level tertinggi. Kapitalisme sebagai sistem ekonomi yang mengadvokasi kebebasan hak kepemilikan individu yang tidak dibatasi (*al-ḥurriyah al-fardiyyah*),⁷ menyebabkan konsentrasi kekayaan hanya beredar di tangan segelintir orang dan monopoli pasar oleh kelompok yang kuat secara finansial. Sistem ini mendapatkan banyak kritik karena kegagalannya untuk menyediakan kesejahteraan seluruh umat manusia.⁸

Sementara yang kedua, sosialisme, sebagai antitesis dari kapitalisme dan sistem ekonomi alternatif yang lebih menekankan pada hak kepemilikan sosial, gagal memberikan sistem ekonomi yang seimbang. Sistem ini mendasarkan basis filosofi ajarannya pada konsep bahwa kepentingan sosial sebagai suatu hal yang paling utama (*al-jamā'ah hiya al-aṣl*).⁹ Sistem sosialis memberi negara atau asosiasi komunitas kepemilikan atas sumber daya paling produktif dan membatasi kepemilikan individu dan kebebasan ekonomi. Meskipun tidak menghapuskan hak kepemilikan individu secara langsung, sistem ini membatasi kepemilikan pribadi terhadap sekumpulan

⁷ Ḥasan 'Abd al-Ḥamīd Uwayd, *an-Nuzum al-Islāmiyyah wa al-Madzāhib al-Mu'āṣirah: Dirāsah Muqāranah* (Riyād: Dār ar-Rasyīd, 1981), 46; Bruce R. Scott, "The Political Economy of Capitalism," Working Papers-07-037, Harvard Business School (2006): 1-30.

⁸ Terkait berbagai kritik terhadap sistem ekonomi ini, bisa dilihat di antaranya dalam E. K. Hunt, *Property and Prophets: The Evolution of Economic Institutions and Ideologies*, ed. ke-7 (Armonk-New York & London-England: M.E. Sharpe, Inc., 2003), 240-243; Luc Boltanski dan Eve Chiapello, "The New Spirit of Capitalism," *International Journal of Politics, Culture, and Society* 18, no. 3/4, (Spring-Summer, 2005): 161-188; John Bratton dan David Denham, *Capitalism and Classical Social Theory*, ed. ke-2 (Toronto: University of Toronto Press, 2014); Eve Chiapello, "Capitalism and Its Criticisms," dalam *New spirits of capitalisms*, ed. Paul du Gay dan Glenn Morgan, Oxford: Oxford Scholarship Online, 2013, 60-82; William I. Robinson, *Global Capitalism and the Crisis of Humanity* (New York: Cambridge University Press, 2014), 26-27.

⁹ Maḥmūd bin Ibrāhīm al-Khaṭīb, *An-Nizām al-Iqtisādī fi al-Islām* (Riyād: Maktabah Ḥaramain, 1989), 79-81.

kecil produk konsumen dan membatasi hak agen swasta dalam mengambil kebijakan ekonomi.

Prinsip sosialisme adalah menyerahkan kekayaan publik ke dalam kendali otoritas negara.¹⁰ Dengan kata lain, kepemilikan kolektif adalah dasar kegiatan ekonomi bagi negara (*al-milkiyyah al-jamā'ah hiya asās an-nasyāf al-iqtisādī li ad-daulah*).¹¹ Satu-satunya tujuan adalah untuk memaksimalkan kesetaraan sosial dan memenuhi kebutuhan minimum semua individu masyarakat berdasarkan kepentingan.¹² Karena penindasannya terhadap hak kepemilikan atau kepentingan individu dan pengambilan keputusan ekonomi, sistem ini tidak dapat berlangsung lama dan berakhir dengan disintegrasi Uni Soviet pada abad terakhir dan, sebagai akibatnya, membuka jalan bagi hegemoni sistem kapitalis yang lebih menekankan pada hak dan kebebasan individu. Seperti halnya kapitalis, sistem sosialis ini juga tidak luput dari berbagai kritik.¹³

¹⁰ A.C. Fernando, *Business Environment* (India: Pearson, 2011), 115; Jon .D. Wisman, "The Financial Crisis of 1929 Reexamined: The Role of Soaring Inequality," *Review of Political Economy* 26, no. 3, (2014): 372–391; John .D. Wisman, "Capitalism and Inequality Re-examined," (2015): 1-19, diakses 06 September 2018, https://www.researchgate.net/publication/281346322_CAPITALISM_AND_I_NEQUALITY_RE-EXAMINED.

¹¹ Muḥammad ‘Abd Allāh Syāhīn Muḥammad, *al-Iqtisād al-Islāmī al-Munqiz min ad-Ḍalāl* (Mesir: Dār Ḥamīsrā li an-Nasyr wa at-Tauzī‘, 2018), 48.

¹² Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu: asy-Syāmil li al-Adillah asy-Syar’iyyah wa al-Ārā’ al-Maḏhabiyah wa Ahamm an-Nazariyyāt al-Fiqhiyyah wa Taḥqīq al-Aḥādīs an-Nabawiyah wa Takhrījūhā*, juz 5, cet. ke-2 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2003), 513-515.

¹³ Kritik terhadap model sistem ekonomi ini bisa dilihat, misalnya, dalam Don Lavoie, "A Critique of the Standard Account of the Socialist Calculation Debate," *The Journal of Litenorion Studies* 5, no. 1 (Winter 1981): 41-86; Hans G. Ehrbar, *Notes about Selected Literature about Socialism*, 16 November 1999, 1-16, diakses 6 September 2018, <http://content.csbs.utah.edu/~ehrbar/socialis.pdf>; Laduddin, "Property and Ownership Right"; Wisman, "Capitalism and Inequality Re-Examined"; Michael Makovi, "Two Opposing Literary Critiques of Socialism: George Orwell Versus Eugen Richter and Henry Hazlitt," *Munich Personal RePEc Archive* (MPRA) (2015): 1-31.

Dalam konteks diskursus hegemoni dan dominasi dua arus besar ideologi dunia tersebut, lantas di manakah posisi Islam? Sejauh penelusuran penulis, terdapat disparitas pandangan di kalangan para sarjana dalam memersepsikan sistem ekonomi Islam dalam kajian mereka. Disparitas pandangan para sarjana ini, paling tidak, dapat penulis kategorikan ke dalam tiga kelompok pandangan. *Pertama*, pandangan yang menyatakan bahwa Islam sangat kompatibel dengan sosialisme.¹⁴ *Kedua*, pandangan yang menyatakan sebaliknya bahwa Islam lebih kompatibel dengan sistem kapitalis.¹⁵ *Ketiga*, pandangan yang menegaskan bahwa Islam sebagai sistem yang ditetapkan secara syar'ī menyediakan sistem ekonomi yang komprehensif di mana hak kepemilikan individu dan sosial diakui secara seimbang (*at-tawāzun/al-muwāzanah*).¹⁶

Dalam memersepsikan prinsip keseimbangan (*at-tawāzun/al-muwāzanah*) antara dua kutub kepemilikan tersebut (kepemilikan individu *vis a vis* kepemilikan publik), di kalangan

¹⁴ Kecenderungan pandangan ini bisa dilihat dalam beberapa kajian, misalnya, David Westerlund, "Reviewed Work(s): From Socialism to Islam? Notes on Islam as a Political Factor in Contemporary Africa," *The Journal of Modern African Studies* 24, no. 2 (Juni 1986): 360-361; Volker Nienhaus, "Fundamentals of an Islamic Economic System Compared to the Social Market Economy," *KAS INTERNATIONAL REPORTS* 11 (2010): 75-96. Dalam konteks pemikir nasional, hal ini tercermin dalam karya beberapa tokoh. Lihat misalnya, HOS Tjokroaminoto, *Islam dan Sosialisme* (Bandung: Segi Arsy, 2010); Adnan, *Islam Sosialis: Pemikiran Sistem Ekonomi Sosialis Religius Sjafruddin Prawiranegara* (Jogjakarta: Menara Kudus, 2004).

¹⁵ Maxime Rodinson, *Islam and Capitalism* (New York: Pantheon Books, 1973), 5-11, 23-26, 28-35, 118.

¹⁶ 'Alī Kan'ān, *al-Iqtisād al-Islāmī: Dirāsah fī 'Anāšir al-Intāj* (al-Qāhira: Dār al-Ma'ārif, 1997), 42; Mu'assasah Āl al-Bait li al-Fikr al-Islāmī, *Nizām al-Hukm al-Islāmī wa ad-Dimuqarātī: al-Furūq wa Imkāniyyah at-Ta'āyisy, Abhās ad-Daurah as-Šālīsh 'Asyrah li al-Mu'tamar al-'Ām*, 7-5 Rajab/23-25 Aghustus, vol. 1 (Yordan: Mu'assasah Āl al-Bait li al-Fikr al-Islāmī, 2004), 268; Mahā Riyād 'Abd Allāh, *Šundūq an-Naqdi ad-Daulī: Taqdīr Iqtisādī Islāmī* (Fırjīniyā-al-Wilāyāt al-Muttaḥidah al-Amrīkiyyah: al-Ma'had al-'Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 2012), 155; Jamīl 'Abd al-Qādir Muhammad Akbar, *al-'Aqlu wa Ḥatmiyyah al-Fasād* (Yordan: 'Ālim al-Kutub al-Ḥadīṣ, 2014), 890-891; Aṭ-Ṭāhir Sa'dī Qānah, *ad-Daur at-Tauzī' li al-Milkiyyah fī al-Iqtisād al-Islāmī* (Oman-Yordan: Dār al-Khalīj li aṣ-Ṣaḥāfah li an-Nasyr, 2018), 183-185.

ulama masih terjadi perbedaan pandangan. Sebagian kalangan mengajukan teori bahwa hak kepemilikan (tanah) dalam ekonomi Islam merupakan jalan tengah antara kapitalisme di satu sisi dan sosialisme pada sisi lainnya.

Sistem ekonomi Islam mengambil posisi tengah antara dua ekstremitas mazhab kapitalis dan sosialis. Pandangan ini diintrodusir di antaranya oleh Syed Nawab Haider Naqvi,¹⁷ Abū A'ḷā al-Maudūdī (1903-1979),¹⁸ Yūsuf Kamāl,¹⁹ Kāmil Mūsā,²⁰ Mirza Mohammad Hussain,²¹ Afzalur Rahman (1915-1998),²² dan 'Abd Allāh bin 'Abd al-Muḥsin aṭ-Ṭarīqī.²³ Sementara itu, para pakar lain, seperti Aḥmad al-Ḥusainī, Asghar Ali Engineer, Abdel Hameed M. Basyir, Muḥammad Bāqir aṣ-Ṣadr (1935-1980 M), 'Alī al-Khafif, Sayyid Quṭub, Muḥammad al-Ghazālī,²⁴ dan Yūsuf al-Qardāwī,²⁵ mengintrodusir pandangan

¹⁷ Syed Nawab Haider Naqvi, *Islam, Economic and Society* (London: Kegan Paul International, 1994), 101; Naqvi, "The Dimension of an Islamic Economic Model," *Islamic Economic Studies* 4, no. 2 (May 1997), 3-6.

¹⁸ Abū 'A'ḷā al-Maudūdī, *Usus al-Iqtisād baina al-Islām wa an-Nuzūm al-Mu'āṣirah*, terj. Imam Munawir (Surabaya: Bina Ilmu, 2005), 38.

¹⁹ Yūsuf Kamāl, *al-Islām wa al-Mazāhib al-Iqtisādiyyah al-Mu'āṣirah*, cet. ke-2 (al-Qāhirah: Dār al-Wafā' li aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī', 1990), 147-148.

²⁰ Kāmil Mūsā, *Aḥkām al-Mu'āmalāt*, cet. Ke-2 (Beirūt: Mu'assasah ar-Risālah, 1994), 16-17.

²¹ Mirza Mohammad Hussain, *Islam and Socialism* (Lahore Pakistan: Muhammad Asyraf, t.t.), 17; Adnān Khālid, *al-Mazhab al-Iqtisādī al-Islāmī* (Jeddah: Maktabah as-Sawwādī, 1990), 135-136.

²² Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, ed. ke-2 (Seerah Foundation, 2016), 10-11.

²³ 'Abd Allāh bin 'Abd al-Muḥsin aṭ-Ṭarīqī, *al-Iqtisād al-Islāmī: Ususun wa Mabādī'u wa Ahdāfūn*, cet. ke-11 (ar-Riyād: Mu'assasah al-Jarīsī li at-Tauzī' wa al-I'lān, 2009), 26.

²⁴ Muḥammad al-Ghazālī, *al-Islām wa al-Audā' al-Iqtisādiyyah*, cet. ke-3 (al-Qāhirah: Nahḍah Miṣra li aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī', 2005), 128.

²⁵ Dalam hal ini, al-Qardāwī menegaskan bahwa di antara nilai pokok yang terkandung dalam ekonomi Islam adalah 'nilai moderasi' (*qīmah wasaṭiyah*) dan 'keseimbangan' (*at-tawāzūn*). Oleh karenanya, menurut al-Qardāwī, nilai keseimbangan yang moderat telah memosisikan Islam berdiri di tengah-tengah antara individu dan masyarakat, sebagaimana halnya Islam berada pada posisi tengah dan seimbang antara dunia dan akhirat, antara aspek jasmanai dan rohani, antara rasio/akal dan rasa/hati, dan antara idealitas

yang berbeda dari pandangan para pemikir di atas. Kelompok kedua ini berpandangan bahwa kepemilikan tanah dalam Islam bersifat *komunalistik-teistik* yang mana penguasaannya ada pada otoritas negara.

Mohammad Malkawi, seorang intelektual dari Jordan yang memiliki konsen terhadap studi berbagai ideologi dunia, menyatakan bahwa ciri yang paling menonjol dari ekonomi politik ialah yang mendefinisikan kepemilikan properti dalam masyarakat.²⁶ Kepemilikan pribadi (*private ownership*) diakui sebagai fitur khas kapitalisme (*as the distinctive feature of capitalism*), sedangkan kepemilikan publik (*public ownership*) atas alat-alat produksi merupakan ciri utama sosialisme (*the main characteristic of socialism*).²⁷ Ekonomi politik Islam mengakui kedua bentuk kepemilikan tersebut secara seimbang, baik itu kepemilikan individu maupun kepemilikan publik,²⁸ meskipun sebagian ulama ada yang mengintrodusir bentuk ketiga dari kepemilikan, yaitu kepemilikan negara.²⁹

dan realitas. Lihat Yūsuf al-Qarḍāwī, *Daur al-Qiyam wa al-Akhlāq fī al-Iqtisād al-Islāmī*, 81-83.

²⁶Mohammad Malkawi, *Fall of Capitalism and Rise of Islam* (USA: Xlibris Corporation, 2010), 189-190.

²⁷ *Ibid.*, 188

²⁸ Pembagian kepemilikan ke dalam dua kategori, yaitu kepemilikan individu dan kepemilikan umum, merupakan perkara yang mudah dipahami oleh siapa pun. Adapun pembagian kepemilikan ke dalam tiga kategori merupakan permasalahan yang rumit yang membutuhkan pemahaman dan penjelasan yang lebih detail. Lihat, Ibrāhīm ‘Abd al-Laṭīf Ibrāhīm al-‘Abīdī, *al-Milkiyyah as-Ṣalās: Dirāsah ‘an al-Milkiyyah al-‘Āmmah wa al-Milkiyyah al-Khāṣṣah wa al-Milkiyyah ad-Daulah fī an-Nizām al-Iqtisādī al-Islāmī*, cet. ke-1 (Dubai: Dāirah asy-Syu’ūn al-Islāmiyyah wa al-‘Amal al-Kahirī, 2009), 121; Fahad bin ‘Abd Allāh bin Muḥammad al-‘Umarī, *Naz’u al-Milkiyyah al-Khāṣṣah wa Ahkāmuhā fī al-Fiqh al-Islāmī* (Saudi Arabia: Jāmi’ah al-Imām Muḥammad bin Sa’ūd al-Islāmiyyah, 2003), 97; Aṭ-Ṭāhir Qānah, “ad-Daur at-Tauzī’ī li al-Milkiyyah fī al-Iqtisād al-Islāmī: Dirāsah Muqāranah,” *Tesis* (Jāmi’ah al-Hāj Lakhḍar Batna, 2006-2007), 67, 74-76.

²⁹ Di antara ulama yang membagi hak kepemilikan atas tanah ke dalam tiga kategori kepemilikan, yaitu hak milik individu, hak milik komunal dan hak milik negara, adalah Ibrāhīm al-Khaṭīb, Muḥammad Bāqir aṣ-Ṣadr, Wahbah az-Zuhailī, Taqiyuddin an-Nabhānī, Ibrāhīm ‘Abd al-Laṭīf Ibrāhīm al-‘Abīdī. Dalam bahasa lain, Mohammad Malkawi, Ahmad H. Mustafa dan Hossein G. Askari dan Amir Kia mengategorikan kepemilikan dengan istilah

Dalam konsepsi Islam, kehadiran negara memiliki peran yang besar dalam mencapai keseimbangan antara kepemilikan individu dan kepemilikan publik serta dalam upaya secara terus-menerus guna mempertahankan keseimbangan sebagaimana dimaksud. Tanpa kehadiran negara sebagai representasi dari publik yang berperan dalam menegakkan nilai-nilai moralitas-religiusitas (*fi hirāsah ad-dīn*) dan mengatur pranata kepemilikan (*wa siyāsah ad-dunyā*), tentu kedua kutub kepentingan dari kedua model kepemilikan tersebut akan selalu berebut panggung dalam perekonomian suatu negara dan saling mendominasi satu dengan lainnya. Manakala hal ini terjadi sebagai akibat ketiadaan kehadiran pemerintah, menurut al-Māwardī, kehidupan masyarakat akan mengalami kekacauan (*wa laulā al-wulāt lakānū fauḍā muhmilīn*).³⁰

Mengingat negara memiliki otoritas dalam hal keberlanjutan sumber daya alam, negara juga berkewajiban

private, public, and government ownership. Lihat al-Khaṭīb, *an-Nizām al-Iqtisādī fi al-Islām*, 163; Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, juz 5 (Beirūt Dār al-Fikr, 1985), 522-523; Taqiyuddin an-Nabhānī, *The Economic System of Islam* (London: Al-Khilāfah Publications, 1990), 210; Ibrāhīm ‘Abd al-Laṭīf Ibrāhīm al-‘Abīdī, *al-Milkiyyah as-Ṣalās: Dirāsah ‘an al-Milkiyyah al-‘Āmmah wa al-Milkiyyah al-Khāṣṣah wa al-Milkiyyah ad-Daulah fi an-Nizām al-Iqtisādī al-Islāmī* (Ḥukūmah Dubai: Dārah asy-Syu‘ūn al-Islāmiyyah wa al-‘Amal al-Khairī, 2009); Malkawī, *Fall of Capitalism*, 191-208; Ahmad H. Mustafa dan Hossein G. Askari, “The Economic Implications of Land Ownership and Cultivation in Islam,” dalam *Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economy*, ed. Munawwar Iqbal, Islamabad: International Institute of Islamic Economics, 1996, 106-107; Amir Kia, “A Non-Technical Primer on Private Ownership in Islam,” *Journal of Business Inquiry* 6, no. 1 (2007): 73-76.

³⁰ Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Māwardī, *Kitāb al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt ad-Dīniyyah*, ed. Aḥmad Mubārak al-Baghḍādī (Kuwait: Maktabah Dār Ibn Qutaibah, 1989), 3. Lihat juga Asmā’ ‘Abd al-Mun’im Harīdī, *Maḥmūd an-Nubuwwah fi al-Qur’ān al-Karīm* (al-Qāhirah: Jāmi’ah ‘Ain Syams, 2001), 164; Aḥmad Maḥmūd ‘Āli Maḥmūd, *al-Bai’ah fi al-Islām: Tārīkhuhā wa Aqsāmuhā baina an-Nazariyyah wa at-Taṭbīq* (Oman: Dār ar-Rāzī li aṭ-Ṭibā’ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī’, 2003), 53; Muḥammad ‘Abd Allāh al-Wardī, *al-Aḥkām al-Fiqhiyyah al-Muta’alliqah bi Khulūw al-Bilād min al-Ḥākim wa Taṭbīqahā al-Mu’āshirah: an-Nawāzil al-Fiqhiyyah fi Manāṭiq as-Ṣirā’* (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2020), 52.

mendistribusikan sumber daya alam tersebut secara adil atas nama dan untuk kepentingan dan kesejahteraan umat. Dalam kerangka inilah, urgensi negara hadir dalam pranata kehidupan sosial dan ekonomi Islam.³¹

Sistem sosio-ekonomi Islam menjadi sistem yang independen dengan visi sosialnya sendiri. Ia menyeimbangkan antara hak kepemilikan individu dan hak kepemilikan sosial. Sistem ekonomi Islam oleh karenanya dianggap oleh para pendukungnya sebagai tatanan sosial yang adil dan manusiawi sesuai dengan ajaran Islam. Tatanan sosial ini adalah bukan kapitalis atau komunis, melainkan berdiri sendiri dan menggabungkan semua fitur yang baik dari masyarakat yang sehat dan seimbang”.³² Menurut Wahbah az-Zuhaili, sistem ekonomi Islam menggabungkan sifat-sifat terbaik dari sistem sosialis dan kapitalis, sembari menghindari sifat-sifat terburuk keduanya.³³ Dalam konteks hukum pertanahan Islam, asas fungsi sosial hak atas tanah secara teoretis merupakan pengakuan atas kepentingan perorangan dan kepentingan sosial atau kepentingan umum atas tanah.³⁴

Berpijak pada diskursus di atas, penulis dalam kajian ini hendak membuktikan dan sekaligus menguatkan pandangan bahwa hukum pertanahan Islam bersifat “komunalistik-teistik” atau “komunalistik-religius” (*communalistic-religious*) yang penguasaannya ada pada kendali otoritas negara. Menurut Hasan Muhammad ‘Aqal, fungsi sosial dari kepemilikan tidak berarti bahwa Islam tidak mengizinkan kepemilikan pribadi.

³¹ Şahib Rubai’i, *Ru’yah fî Mu’assisât ad-Daulah wa al-Mujtama’* (Damaskus: Dâr Şafahât li ad-Diräsât wa an-Nasyr, 2011).

³² Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics: Theory and Practice (Foundations of Islamic Economics)*, edisi revisi (Kent, U.K.: Hodder and Stoughton, 1986), 346-347. Lihat juga Sohrab Behdad, “Property Rights in Contemporary Islamic Economic Thought: A Critical Perspective,” *Review of Social Economy* 47, no. 2 (July 2006), 185.

³³ Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, 514-515.

³⁴ Laduddin, “Property and Ownership Right”; Triana Rejekiningsih, “Asas Fungsi Sosial Hak atas Tanah pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan dari Teori, Yuridis dan Penerapannya di Indonesia),” *Yustisia* 5, no. 2 (Mei-Agustus 2016), 306.

Sebaliknya, peraturan yang mengatur kepemilikan adalah bukti yang jelas dari pemberian hak kepada individu untuk memiliki properti, sesuai dengan kondisi yang menjaga dan melindungi hak-hak kolektif.³⁵ Tesis Nuzhat Iqbal yang menyatakan bahwa kepemilikan individu dibatasi oleh batasan-batasan sosial keagamaan dan kewajiban sebagai warga negara dalam kerangka distribusi kekayaan secara adil dan merata tampak menemukan signifikansinya dalam kajian penulis ini.³⁶

Sebagaimana diakui, hak kepemilikan atas tanah memainkan peran yang sangat penting dalam masyarakat dewasa ini. Tanah memiliki peran yang sangat vital dalam kehidupan manusia, baik dari aspek ekonomi,³⁷ sosial, budaya maupun agama.³⁸ Ia dianggap sebagai penggerak untuk

³⁵ Nādiyah Ḥasan Muḥammad ‘Aqal, *Naẓariyyah at-Tauzī’ fī al-Iqtisād al-Islāmī: Dirāsah Ta’ṣīliyyah-Taṭbīqīyyah* (Yordan: Dār an-Nafā-is li an-Nasyr wa at-Tauzī’, 2010), 44.

³⁶ Nuzhat Iqbal, “The Concept of Land Ownership in Islam and Poverty Alleviation in Pakistan,” *The Pakistan Development Review* 39, no. 4 (2000): 649-650.

³⁷ Dalam kaitannya dengan ini, Muḥammad al-Ghazālī menyatakan pandangannya sebagai berikut: “Tanah masih merupakan landasan kehidupan ekonomi yang penting bagi manusia (*ruknān hammān fī ḥayāh al-insān al-iqtisādiyyah*) dan merupakan faktor krusial di antara faktor-faktor produksi ekonomi (*‘awāmil al-intāj al-iqtisādī*) lainnya. Kehidupan berkait berkelindan dengan tanah. Dari apa yang ditanam, manusia mendapatkan makanan dan pakaian; dari kayu dan batunya manusia dapat membangun rumah; dari bahan tambangnya ia dapat membuat logam dan senjata; dari pepohonan dan batu bara ia bisa memperoleh api; dari air dan minyaknya merupakan sumber industri dan kekuatan manusia. Tanah merupakan sumber pokok kekayaan manusia. Segala sesuatu yang berguna untuk hidup manusia keluar dari tanah.” Lihat Muḥammad al-Ghazālī, *al-Islām wa al-Manāḥij al-Iṣytirākīyyah*, cet. ke-4 (al-Qāhirah: Syirkah Naḥḍah Miṣrā, 2005), 120.

³⁸ Terkait dengan pentingnya lahan dan kompleksitas masalah yang mengemuka terkait tanah disebabkan oleh terbatasnya bidang tanah yang tersedia jika dibandingkan dengan jumlah manusia yang membutuhkan tanah yang semakin meningkat. Berdasarkan pemahaman tersebut, penting untuk membuat regulasi tentang kepemilikan tanah. Dalam konteks ini, regulasi di bidang pertanahan sangat berkait berkelindan dengan ajaran agama dan ideologi yang mendasari pembuatannya. Lihat Nur Adhim, Sukirno, dan Muh. Afif Mahfud, “The Social Function of Land In Liberal And Islamic Law Perspective,” Paper dipresentasikan dalam *The First International Conference on Islamic Development Studies* (ICIDS), September 10-12, Bandar

perkembangan ekonomi dan sangat penting selama perkembangan spasial. Sistem hak properti, oleh karenanya, merupakan hasil dari evolusi masyarakat secara bertahap dan cara mereka mengelola dan menggunakan lahan.³⁹ Sistem ini berakar pada periode ketika hak milik pribadi atas tanah dan kepemilikan tanah pribadi belum ada. Selama berabad-abad, hak milik pribadi atas tanah berangsur-angsur berevolusi dan menjadi terlembagakan di banyak negara.⁴⁰ Bersamaan dengan itu, lahan bebas menjadi semakin langka dan semakin berharga bagi manusia.⁴¹

Dalam lintasan sejarah, perkembangan hak kepemilikan atas tanah telah menunjukkan adanya perkembangan yang dinamis seiring dengan ritme perkembangan zaman.⁴² Proses dialektika sejarah manusia dalam memosisikan hak milik atas tanah pada akhirnya melahirkan struktur sosial yang juga berpengaruh pada bagaimana manusia memperlakukan dan

Lampung, Indonesia (2019), 1. Lihat juga Ahmad Suhendra, "Models of Land Ownership in Islam: Analysis on Hadis Ihyā' al-Mawāt," *ESENSIA: Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin* 18, no. 2, Oktober (2017): 189-199.

³⁹ Bruce G. Carruthers dan Laura Ariovich, "The Sociology of Property Rights," *Annual Review of Sociology* 30 (2004): 23-46.

⁴⁰ Sanne Holtslag-Broekhof, "Dealing with Private Property for Public Purposes: An Interdisciplinary Study of Land Transactions from a Micro-Scale Perspective," *PhD Thesis* (Wageningen, NL: Wageningen University, 2016), 1.

⁴¹ G. Feder dan D. Feeny, "Land Tenure and Property Rights: Theory and Implications for Development Policy," *The World Bank Economic Review* 5 (1991):135-153.

⁴² Dinamika hukum kepemilikan dalam sejarahnya menggambarkan karakteristik yang khas sebagai refleksi dari dinamika sosial politik yang berkembang pada penggal sejarah manusia. Pada suatu waktu, kepemilikan itu menampakkan watak yang individualistik yang memberikan kemerdekaan penuh terhadap pemiliknya untuk melakukan apa saja dengan barang miliknya yang tak terbatas (*indefinited, unrestricted, unlimited*). Akan tetapi, dalam perkembangannya, mulai dari abad pertengahan hingga abad ke-19, dinamika kepemilikan mulai mengarah pada konsep yang lebih bersifat sosial dari pada individual. Lihat Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 66; Ridwan, *Pemilikan Rakyat dan Negara atas Tanah Menurut Hukum Pertanahan Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), 115-116. Bandingkan dengan Iqbal, "The Concept of Land," 649.

memersepsi tanah miliknya yang telah membangun relasi pemilik tanah dengan tanahnya, pemilik tanah dengan lingkungan sosialnya dan pemilik tanah dengan negara sebagai pemegang otoritas politik.⁴³

Munculnya relasi yang penuh ketegangan (*tension*) dan bahkan konflik, baik antarindividu, individu dengan lingkungan, maupun individu dengan negara, menjadi sesuatu yang sangat mungkin terjadi dan sekaligus bisa dipahami.⁴⁴ Hal ini disebabkan oleh sifat alamiah dari tanah yang konstan di satu sisi, sementara perkembangan manusia yang membutuhkan tanah dari waktu ke waktu jumlahnya semakin bertambah pada sisi yang lain.⁴⁵

Relasi rakyat (individu/kolektif) dan negara dalam hal kepemilikan mencapai titik harmoni ketika dibalut dengan landasan hukum yang kuat.⁴⁶ Ayatullah Mahmud Taliqani menegaskan bahwa batas-batas hak milik dan hubungan ekonomi didasarkan pada keselarasan tiga unsur, yaitu:

⁴³ Ridwan, *Pemilikan Rakyat dan Negara*, 117.

⁴⁴ Konflik antara kekuasaan (*power*) dan hak kepemilikan (*property right*) merupakan konflik yang banyak terjadi di negara berkembang. Konflik tersebut disebabkan pemerintahan negara tersebut menggunakan kekuasaannya dengan mengeluarkan keputusan-keputusan yang justru mengganggu kesejahteraan rakyatnya. Dengan alasan pembangunan, misalnya, banyak hak kepemilikan (*property right*) masyarakat adat atas sebuah hutan lenyap begitu saja. Lebih jauh, baca Sihol Farida Tambunan, "Keadilan sebagai Pemecahan Masalah Konflik antara Kekuasaan (Power) dan Hak Kepemilikan (Property Right) dalam Negara Demokrasi (Sebuah Tinjauan Filsafat)," *Jurnal Masyarakat & Budaya* 10, no. 2 (2008): 117-138.

⁴⁵ Joel E. Cohen, "Human Population: The Next Half Century," *Science* 302 (2003), 1172-1175; Inter-Departmental Working Group on Land Use Planning, "Guidelines for land-use planning," *FAO Development Series 1* (1993), 6-7.

⁴⁶ Dalam pandangan Ibn Khaldun, hukum yang dibuat oleh negara bisa berjalan efektif jika memenuhi tiga syarat pokok. *Pertama*, hukum yang dibuat pemerintah tidak boleh dipaksakan oleh rakyatnya. *Kedua*, hukum yang diberlakukan oleh negara tidak membebani rakyat sehingga melahirkan beban psikologis yang justru akan merusak mental dan kejiwaannya. *Ketiga*, hukum yang diberlakukan oleh pemerintah berangkat dari kesadaran rakyatnya, bukan melalui indoktrinasi. Lihat Hakimul Ikhwan Affandi, *Akar Konflik Sepanjang Masa: Elaborasi Pemikiran Ibn Khaldun* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 128.

individu, hukum dan negara.⁴⁷ Negara dengan otoritasnya⁴⁸ dapat membuat paket hukum sebagai referensi ketika terjadi benturan kepentingan antara individu dan masyarakat, individu dan negara, atau masyarakat dan negara. Dalam konteks inilah, Islam sengaja menyisakan ‘ruang kosong’ (*miṭṭaqah al-farāg*) yang mana tugas pengisiannya diserahkan kepada penguasa (*waliyyu al-amr*) berdasarkan tuntutan situasi dan kondisi yang dihadapinya.⁴⁹

Kehadiran negara dalam pengaturan hak milik di tengah-tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberi batasan-batasan relasi antara anggota masyarakat satu dan lainnya.⁵⁰ Harta milik pribadi bisa berubah statusnya menjadi milik bersama jika ada kehendak sendiri dari pemiliknya, seperti

⁴⁷ Ayatullah Mahmud Taliqani, “Ciri-Ciri Ekonomi Islam,” dalam *Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-Masalah*, ed. John J. Donohue dan John L. Esposito, terj., Mahnun Husain, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995, 384-387.

⁴⁸ Terkait dengan otoritas negara dalam penguasaan sumber agraria bisa dibaca dalam, di antaranya, Ahmad Syafi’i Sulaiman Jamrozi dan Ratno Lukito, “The Logic of State Authority on the Control of Agrarian Resource (Socio-Anthropological and Islamic Perspective),” *American Journal of Social Sciences and Humanities* 4, no. 4, (2019): 516-527.

⁴⁹ Bāqir aṣ-Ṣadr, *Iqtiṣādunā: Dirāsah Mauḍū’iyyah Tatanāwalu bi an-Naqdi wa al-Baḥṣi al-Mazāhibi al-Iqtiṣādiyyah li al-Mārkiṣiyyah wa ar-Ra’sumāliyyah wa al-Islām fī Ususihā al-Fikriyyah wa Tafāṣīlihā*, cet. ke-10 (Beirūt: Dār at-Ta’āruf li al-Maṭbū’āt, 1987), 378.

⁵⁰ Pembatasan konsentrasi hak milik (*reducing concentration in ownership*) oleh pemerintah Islam untuk mengubah kebijakan kelompok kapitalis yang tidak adil dalam hal distribusi kekayaan berbeda dengan pandangan kaum sosialis yang meniadakan hak milik pribadi menjadi hak kolektif sehingga menghilangkan kreativitas masyarakat dalam membangun etos kerja dan semangat *entrepreneurship*. Pembatasan pemerintah dimaksudkan guna merealisasikan distribusi kekayaan secara egaliter sesuai dengan semangat Islam. Lihat M. Umer Chapra, *Islam and Economic Development* (New Delhi: Adam Publisher & Distributors, 2007), 73-74; Charles McDaniel, “Islam and the Global of Society: A Religious Approach to Modernity,” *Brigham Young University Law Review* 2003, no. 2 (2003): 507-540; Salman Ahmed Shaikh, “Equitable Distribution of Income with Growth in an Islamic Economy,” *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 3, no. 3 (Desember 2017): 6-14. Bandingkan dengan Brent Butgereit dan Art Carden, “Capitalism, Socialism and Calculation,” *Institute of Economic Affairs* (Oxford: Blackwell Publishing, 2011), 41-43.

seseorang menyerahkan hartanya menjadi harta wakaf yang dapat digunakan untuk kepentingan umum.⁵¹ Lebih dari itu, faktor lainnya adalah karena kehendak *syara'*, seperti kebutuhan umat mendesak untuk membuat jalan umum di atas tanah milik pribadi. Dalam konteks ini, pemerintah dapat menggunakan tanah milik pribadi untuk kepentingan umum.⁵²

Transformasi kepemilikan individu menjadi milik publik dengan alasan untuk kemaslahatan umum, dalam konsep hukum Islam, diistilahkan sebagai “nasionalisasi/transformasi hak milik” (*ta'mīm al-milkiyyah*).⁵³ Kebijakan *at-ta'mīm* ini, di satu sisi, telah memosisikan pemerintah sebagai institusi yang mempunyai otoritas untuk melakukan intervensi dalam bentuk membuat kebijakan terkait dengan pemanfaatan tanah sekaligus membuktikan bahwa persoalan tanah merupakan sumber produksi yang berdimensi publik. Pada sisi lainnya, konsep ini juga bisa dimaknai sebagai wujud implementasi dari sistem penguasaan tanah dalam Islam yang bersifat *komunalistik-religius* sebagaimana yang telah penulis singgung di atas.

Meskipun negara dengan dalih nalar kepentingan umum (*al-maṣlaḥah al-‘āmmah*) diperbolehkan untuk mengambil alih

⁵¹ Al-Khaṭīb, *an-Niẓām al-Iqtisādī fī al-Islām*, 41-46; Rafiq Yūnus al-Miṣrī, *Uṣūl al-Iqtisādī al-Islāmī* (Damaskus: Dār al-Qalam, 1993), 163. Bandingkan dengan Muḥammad Bāqir aṣ-Ṣadr, *Iqtisādunā* (Beirut: Dār at-Ta'rīf al-Maṭbū'āt, 1981), 333-340.

⁵² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fikih Muamalat)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 62; Mr. Kiran Ranganath Kale, “Concept of Public Purpose: It's Importance in Present Legal Scenario,” *International Journal of Innovative Studies in Sociologies and Humanities (IJSSH)* 2, no. 5 (July 2017): 8-13; Holstlag-Broekhof, “Dealing with Private Property,” 13-14.

⁵³ *At-ta'mīm* adalah mentransformasikan hak milik harta yang dimiliki seseorang menjadi milik publik (*taḥwīlu milkiyyati mālin min al-milkiyyah al-khāṣṣah ilā milkiyyah al-‘āmmah*). Lebih lanjut lihat al-Khaṭīb, *an-Niẓām al-Iqtisādī fī al-Islām*, 50-51; Muḥammad ‘Abd al-Jawwād, *Milkiyyah al-Arādī fī al-Islām: Taḥdīd al-Milkiyyah wa at-Ta'mīm* (al-Qāhirah: at-Ṭibā'ah al-‘Alamiyyah, 1391 H), 232-233. Bandingkan dengan Sayyid ‘Abd al-Ḥamīd Aḥmad, *Naz'u al-Milkiyyah fī Itāri Qarārāh al-Manfa'ah al-‘Āmmah wa al-Muṣādarah wa Ta'mīm* (al-Iskandariyyah: Maktabah al-Wafā' al-Qānūniyah, 2018), 208-210.

kepemilikan tanah rakyat, negara tetap berkewajiban untuk memperhatikan kepentingan individu yang tanahnya diambil alih dengan memberikan ganti rugi yang layak dan adil. Dengan kata lain, negara sebagai institusi publik dalam konteks kebijakan *at-ta'mīm* tetap harus memperhatikan keseimbangan antara dua kutub kepentingan, baik kepentingan individu maupun kepentingan publik.

Pemerintah dengan alasan menciptakan kepentingan umum (*maṣlahah al-‘āmmah*) mempunyai otoritas untuk melakukan “pembatasan hak milik” (*taḥdīd al-milkiyyah*) dan bahkan “pencabutan hak milik (tanah)” (*naz‘u al-milkiyyah/naz‘u al-arādī*), di mana otoritas kebijakan ini bersinggungan langsung dengan kepemilikan tanah rakyat.⁵⁴ Dalam posisi ini, tentu saja negara akan dihadapkan pada dua kutub kepentingan, yaitu antara kepentingan warga negara (kepentingan individu) di satu sisi dan kepentingan negara (kepentingan umum) atas nama pembangunan pada sisi yang lain.

Dalam konteks pembangunan tersebut, negara merupakan salah satu entitas yang berkuasa untuk mengubah realitas kehidupan warganya. Terdapat beberapa pandangan pakar yang bisa dikaji dari berbagai khazanah keilmuan terkait tugas dan fungsi adanya negara. Vivienne Wee dan Cynthia Chou, misalnya, berpendapat bahwa “(State) power is the authority to define and thereby shape realities is also the power to make history and create discourse”.⁵⁵ Wujud otoritas negara dalam menentukan kehidupan warganya berupa campur tangan mereka terhadap arah perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat. Jacobsen dan Lipman memberikan perspektifnya bahwa adanya negara adalah sebagai pemelihara ketertiban, memajukan kesejahteraan individu dan masyarakat, menjunjung tinggi

⁵⁴ Wahbah az-Zuhailī, *Wasāṭiyyah al-Islām wa Simāhatuhu* (Damaskus: Kulliyat Syarī‘ah Jāmi‘ah Dimasyqā, t.t.), 30-31.

⁵⁵ Vivienne Wee dan Cynthia Chou, “Continuity and Discontinuity in the Multiple Realities of Riau,” *KITLV Journals*, no. 4 (1997): 527-541.

moralitas.⁵⁶ Dalam uraian yang tidak jauh berbeda, J. Barents merumuskan bahwa visi dari sebuah negara adalah sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban serta penyelenggaraan kepentingan umum.⁵⁷

Persoalan di atas, bagaimanapun juga, telah melahirkan perdebatan panjang di kalangan para pemikir.⁵⁸ Perdebatan dimaksud, paling tidak, menyangkut dua hal. *Pertama*, kepentingan mana yang perlu diprioritaskan, apakah kepentingan individu atau kepentingan umum? Jawaban atas persoalan ini terpolarisasi ke dalam tiga kelompok. Sebagian berpandangan bahwa kepentingan individu perlu diprioritaskan atas kepentingan umum. Kelompok kedua berpendapat bahwa

⁵⁶ Jacobsen dan Lipman, "Political Science," dalam *College Outline Series Barmers and Noble* (New York, 1956), 15-18; Muntoha, "Otoritas Negara dalam Pengaturan Kehidupan Beragama di Indonesia: Urgensi Ataukah Intervensi," *Millah* 11, no. 2 (Februari 2012): 519-540.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Dalam sejarah filsafat hukum, diskursus ini telah melahirkan berbagai aliran hukum. Salah satu aliran dimaksud adalah 'aliran utilitarianisme' (*maẓhab al-manfa'ah*), yaitu suatu teori (ilmu hukum) yang mendasarkan paham ajarannya pada pengejaran kepentingan-kepentingan dan kegunaan. Adapun tokoh-tokoh yang menjadi proponent aliran ini adalah Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan Rudolf Von Ihering. Jika posisi pemikiran Bentham tentang teori kepentingan melahirkan tesis *individual utilitarianism* dan pemikiran Mill melahirkan antitesis *social utilitarianism*, pemikiran Ihering merupakan sintesis dari kedua pemikiran tersebut. Lebih jauh lihat Jeffrie G. Murphy dan Jules L. Coelman, *The Philosophy of Law an Introduction of Jurisprudence* (San Francisco&London: Westview Press, 1990), 72-74; Cristoper Berry Gray (ed.), *The Philosophy of Law an Encyclopedia*, vol. I (Grland Publishing, Inc., 1999), 79-80; Taufiq at-Tawil, *Falsafah al-Akhlâq*, 218-222; Robert L. Holmes, *Basic Moral Philosophy*, ed. ke-2 (New York: Wadsworth Publishing Company, 1998), 131-39; Philippa Foot, *Moral Dilemmas and Other Topics in Moral Philosophy* (Oxford: Clarendon Press, 2002), 59-77; Emmett Barcalow, *Moral Phylosophy: Theories and Issues*, ed. ke-2 (New York: Wadsworth Publishing Company, An International Thomson Publishing Company, 1998), 125-41; Henry Hazlitt, *The Fondations of Morality* (Princeton: D. Van Nostrand Company, Inc, 1964); W. Friedmann, *Legal Theory*, ed. ke-4 (London: Stevens & Sons Limited, 1960), 267-269, 275-278; Gerald J. Postema, *Bentham and The Common Law Tradition* (Oxford: Clarendon Press, 1986), 403; Austin M. Chinhengo, *Essential Jurisprudence*, ed. ke-2 (London-Sydney: Cavendish Publishing Limited, 2000), 71.

kepentingan umum harus lebih diprioritaskan daripada kepentingan individu dengan syarat-syarat tertentu.⁵⁹ Sementara itu, kelompok ketiga berupaya memadukan dan mencari titik temu antara dua pandangan yang berbeda sebelumnya.

Kedua, nalar kepentingan umum (*al-maṣlaḥah al-‘āmmah*, *public interest*) sebagai dasar bagi otoritas pemerintah atau negara untuk melakukan “pembatasan hak milik” (*taḥdīd al-milkiyyah*) dan bahkan “pencabutan hak milik tanah” (*naz‘u al-milkiyyah/naz‘u milkiyyah al-arāqī*). Sebagai dalih untuk mendapatkan tanah tersebut, pemerintah secara legal-formal mendasarkan berbagai kebijakannya pada nalar kepentingan umum yang diwujudkan dalam bentuk berbagai paket regulasi pertanahan.

Persoalan yang kerap kali mengemuka berkaitan dengan regulasi pertanahan, baik dalam kajian hukum Islam maupun perundang-undangan, adalah lahirnya nuansa otoritarianisme penguasa dalam kebijakan pengambilalihan hak kepemilikan tanah rakyat dalam rangka menunjang program pembangunan dengan dalih nalar kepentingan umum. Dalam konteks ini, menurut hemat penulis, paling tidak terdapat dua problem epistemologis yang krusial yang perlu dikaji lebih jauh.

Pertama, menyangkut persoalan makna dan kriteria dari kepentingan umum itu sendiri. Tafsir atas makna kepentingan umum sebagai dasar hukum (*‘illat al-ḥukmi*) pencabutan hak milik tanah rakyat oleh negara telah melahirkan bias tafsir yang

⁵⁹ Lihat misalnya kajian Khālid Ḥamidī ‘Abd al-Karīm dan Yāsir Muḥammad ‘Abd ar-Raḥmān, “Ta‘āruḍ al-Maṣāliḥ al-‘Āmmah wa al-Khāṣṣah: Dirāsah Uṣūliyyah al-Fiqhiyyah,” *Majallah Jāmi‘ah al-Madīnah al-‘Ālamīyyah*, no. 13 (Juli 2015): 77-101; ‘Abd ar-Raḥmān bin Sa‘īd al-Ḥāzīmī, “Taḥdīm al-Maṣāliḥ al-‘Āmmah ‘alā al-Maṣāliḥ al-Khāṣṣah,” *Al-Alūkah aṣ-Ṣaqāfiyyah*, diakses 14 September 2015, <http://www.alukah.net/culture/0/100824/>; Muḥammad al-Wakīlī, *Fiqh al-Aulawīyyāt: Dirāsah fi aḍ-Ḍawābiḥ* (Fīrjiniyā: al-Ma‘had al-‘Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 1997), 137-139; ‘Iṣmat ‘Abd al-Majīd Bakr, *Musykilāt at-Tasyrī’: Dirāsah Naẓariyyah wa Taṭbīqīyyah Muqāranah* (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2014), 239; ‘Abd ar-Raḥmān bin Mu‘ammar Sanūsī, *I’tibār al-Ma‘ālāt wa Murā‘ah Natā-ij at-Taṣarrufāt: Dirāsah Muqāranah fi Uṣūl al-Fiqh wa Maqāṣid asy-Syarī‘ah* (al-Qāhirah: Dār Ibn al-Jauzī, 2003), 27.

terkadang melanggar nilai-nilai kehormatan kepemilikan atas tanah, khususnya terkait dengan isu Hak Asasi Manusia (HAM).⁶⁰ Kedua, persoalan dalam hal menentukan titik keseimbangan antara kepentingan umum di satu sisi dan kepentingan individu pada sisi yang lain.⁶¹

Titik keseimbangan tersebut, menurut hemat penulis, perlu dirumuskan demi terealisasinya cita keadilan atau kemaslahatan sebab nalar yang terbangun di benak publik selama ini –yang seolah-olah telah menjadi *common sense*– adalah bahwa setiap “kepentingan umum” apa pun wujud dan bagaimanapun intensitasnya harus diprioritaskan dan dimenangkan atas “kepentingan individu”. Nalar semacam ini, dalam kajian hukum Islam, memang mendapatkan legalitasnya yang bersumber dari kaidah: “kepentingan umum harus diprioritaskan atas kepentingan individu (*al-maṣlaḥah al-‘āmmah muqaddamah ‘alā al-maṣlaḥah al-fardiyyah*).⁶² Meskipun demikian, kaidah ini, menurut hemat penulis, perlu dikaji lebih

⁶⁰ “Public Interest”, diakses 18 September 2018, http://en.wikipedia.org/wiki/Public_interest; Muwahid, “Implikasi Yuridis Kekaburan Makna Kepentingan Umum dalam Undang-Undang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum,” *Al-Hikam, Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (September 2015): 1-12; Achmad Rusyaidi, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum: Antara Kepentingan Umum dan Perlindungan HAM*, diakses 18 September 2018, <http://prpmakasar.wordpress.com>.

⁶¹ A.A. Oka Mahendra, *Menguak Masalah Hukum, Demokrasi dan Pertanahan* (Jakarta: Sinar Harapan, 1996), 256.

⁶² Abū Ṭayyib al-Maulūd as-Sarīrī, *Nail al-Munā fi Nazm al-Muwāfaqāt li asy-Syāṭibī li al-‘Allāmah al-Qāḍī Abī Bakar Muḥammad al-Gharnāqī (760-829 H)*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2015), 256; Ḥusain bin Ma‘lawī asy-Syahrānī, *Huqūq al-Ikhtirā’ wa at-Ta‘līf fi al-Islām* (Riyād: Dār at-Ṭayyibah li an-Nasyr wa at-Tauzī’, 2004), 314; Aḥmad Āmīn, *Zu‘amā’ al-Iṣlāḥ fi al-‘Aṣr al-Ḥadīṣ* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Arabī, t.t.), 48; Nūr ad-Dīn bin Mukhtār al-Khādīmī, *‘Ilm al-Maqāṣid asy-Syarī‘ah*, (Beirut: Maktabah al-‘Abīkān, 2014), 28; ‘Adnān Muḥammad ‘Umāmah, *at-Tajdīd fi al-Fikr al-Islāmī* (al-Qāhīrah: Dār Ibn al-Jauzī, t.t.), 337; ‘Abd al-Ghafūr Muḥammad Ismā‘īl al-Bāyātī, *al-Madkhal li Dirāsah al-Qawā‘id al-Fiḥriyyah: Dirāsah Manhajīyyah Jāmi‘ah baina an-Nazariyyah wa at-Taṭbīq* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2015), 169.

jauh untuk kemudian ditempatkan secara objektif dan proporsional sehingga bisa merealisasikan cita keadilan sosial.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari eksplorasi latar belakang di atas, beberapa pertanyaan sentral yang hendak dijawab dan dianalisis dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana konsep hubungan hukum antara negara dan tanah dalam perspektif hukum Islam? Bagaimana pula fitur konsep penguasaan dan kepemilikan tanah dalam perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana dinamika penguasaan tanah (sumber daya agraria) oleh negara dalam perspektif hukum Islam?
3. Bagaimana implikasi otoritas penguasaan (negara) atas tanah (sumber daya agraria) dalam perspektif hukum Islam?
4. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap konsep kebijakan transformasi kepemilikan tanah rakyat oleh negara? Bagaimana pula konstruk nalar kepentingan umum yang ideal dan proporsional dalam kebijakan nasionalisasi hak milik tanah rakyat oleh negara sehingga bisa mewujudkan cita keadilan sosial?

C. Signifikansi Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki, baik dalam aspek teoretis dan historis, asal-usul dan dinamika konsep kepemilikan dan penguasaan negara atas tanah dalam Islam. Secara lebih rinci, tujuan dari penelitian ini adalah

- 1) Untuk menjelaskan bagaimana fitur konsep penguasaan dan kepemilikan tanah serta hubungan hukum antara negara dan tanah menurut hukum Islam.
- 2) Untuk menjelaskan dinamika penguasaan negara atas tanah (sumber daya agraria) dalam Islam.
- 3) Untuk menjelaskan bagaimana implikasi penguasaan negara atas tanah dalam hukum Islam.
- 4) Untuk menjelaskan bagaimana perspektif hukum Islam

terhadap konsep kebijakan nasionalisasi aset tanah rakyat oleh negara dan membuktikan bahwa kaidah yang menyatakan "kepentingan umum harus diprioritaskan daripada kepentingan individu" (*al-maṣlahah al-‘āmmah muqaddamah ‘alā al-maṣlahah al-khāṣṣah*) tidak berlaku mutlak serta sekaligus merumuskan konstruk nalar kepentingan umum (*public interest*) yang ideal dan proporsional dalam kebijakan nasionalisasi hak milik tanah rakyat oleh negara sehingga bisa mewujudkan cita keadilan sosial.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan disumbangkan dari penelitian ini adalah, *pertama*, secara akademis, temuan penelitian ini dimaksudkan guna memberikan kontribusi secara teoretis untuk pengembangan wawasan dan kajian di bidang hukum pertanahan dan perundang-undangan, khususnya konsep kebijakan transformasi kepemilikan tanah rakyat oleh negara untuk kepentingan umum (*at-ta'mīm*) di satu sisi dan konsep nalar kepentingan umum yang dijadikan dasar oleh pemerintah dalam berbagai aktivitas pengadaan tanah untuk pembangunan pada sisi yang lain dalam perspektif hukum Islam.

Kedua, dari aspek pengembangan kebijakan pemerintah di bidang hukum pertanahan, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan suntikan yang substansial dari segi normatif hukum konsepsi kepemilikan tanah dalam Islam dan konsepsi penguasaan negara atas sumber agraria, khususnya bidang pertanahan, serta konsep kebijakan *at-ta'mīm* dalam perspektif hukum Islam guna pengembangan program reformasi agraria (*land reform*) yang lebih progresif, humanis, dan berkeadilan sosial.

E. Kajian Pustaka

Kajian yang mengangkat tema agraria dalam perspektif hukum Islam secara komprehensif, sejauh penelusuran penulis,

bisa dibilang masih terbatas jumlahnya. Kajian-kajian yang ada selama ini pada umumnya masih terfragmentasikan dalam berbagai subpembahasan secara terpisah dalam berbagai kitab yang beragam. Sebagian ada yang masuk dalam subpembahasan dari kajian sistem ekonomi Islam, sebagian lainnya, secara umum, masuk dalam kajian bidang fikih muamalah (*fiqh al-mu'āmalah*), utamanya saat mengkaji konsepsi hak milik dalam bingkai hukum Islam (*mafḥūm al-ḥuqūq fī asy-syarī'ah*). Begitu juga kajian tentang nalar kepentingan umum dan penguasaan tanah (sumber daya agraria) dalam perspektif hukum Islam. Pada umumnya, para ulama dan sarjana, utamanya ulama klasik, mengkaji tema ini pada saat mereka menulis kitab *fiqh al-mu'āmalah*. Dalam karya *fiqh al-mu'āmalah* inilah, tema terkait penguasaan tanah (sumber daya agraria) disajikan dalam beragam subpembahasan, misalnya dalam bab *ijārah, ihyā' al-mawāt, kharāj, ḥimā, iqtā'* dan lain sebagainya.

Mengkaji hukum pertanahan Islam (*Islamic land law*) meniscayakan adanya kajian terhadap konsep hak milik (*property rights*). Hal ini karena rumusan hukum kepemilikan yang menjadi kerangka acuan hukum (*legal framework*), bagaimana perlindungan terhadap hak-hak hukum atas benda (tanah) dan bagaimana suatu harta (tanah) diatur dalam lalu lintas ekonomi,⁶³ didasarkan pada konsep hak milik (*property rights*).

Terdapat beberapa kajian yang mengetengahkan perdebatan filosofis tentang konsep hak milik. Di antaranya adalah kajian Ian Shapiro yang berjudul *The Evolution of Rights in Liberal Theory*.⁶⁴ Maksud, orisinalitas, dan garis besar buku Shapiro sangat menjanjikan. Ia telah mencoba membuat sketsa penjelasan tentang evolusi bagian-bagian utama (teori politik

⁶³ Dean Lueck dan Thomas J. Miceli, *Property Law*, Working Paper -04 (University of Connecticut, 2004), 1; Abdel Hameed Bashir, "Property Rights, Institutions and Economic Development: An Islamic Perspective", dalam *Humanomics*, (2002), ABI/INFORM Global, 75.

⁶⁴ Ian Shapiro, *The Evolution of Rights in Liberal Theory* (Cambridge: Cambridge University Press, 1986).

liberal) yang secara historis sensitif dan berguna untuk memahami bentuk-bentuk teori hak milik yang dominan dalam setiap momen sejarahnya.⁶⁵ Dalam analisisnya, Shapiro menggunakan struktur hak (*a structure of rights*), meliputi subjek, substansi, dasar, dan tujuan hak.⁶⁶ Struktur ini ia gunakan untuk mengkaji keragaman pandangan tentang hak dari kesatuan perspektif (*a unified perspective*). Dengan mendasarkan pada kerangka berpikir Thomas Hobes (1588-1679), yang menurut Shapiro merupakan tokoh yang memainkan peran sentral dalam momen transisi dari feodalisme akhir ke kapitalisme awal, Shapiro menyatakan bahwa secara alamiah setiap orang memiliki hak yang tidak terbatas pada saat belum ada sistem kekuasaan. Sebaliknya, setelah ada kontrak, setiap orang hanya berhak atas hak yang diperbolehkan oleh hukum. Lebih jauh, Shapiro menegaskan bahwa hak milik pribadi adalah hak yang ada pascakontrak yang diberikan oleh negara.⁶⁷ Hak merupakan kemampuan untuk melakukan tindakan secara otonom, sementara hukum merupakan pembatasan yang ditetapkan dari luar. Menurut penulis, Shapiro dengan karyanya ini telah memberikan kontribusi pada teori politik dengan mengidentifikasi rencana penelitian yang bermanfaat.

Kajian filosofis tentang konsep hak milik juga dilakukan oleh T.M. Knox. Dalam bukunya *Hegel's Philosophy of Right*, ia menyatakan bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengimplementasikan kehendaknya pada ruang publik. Substansi hak yang dimiliki oleh seseorang memberikan otoritas bagi orang tersebut untuk menggunakan hak sesuai keinginannya.⁶⁸

⁶⁵ *Ibid.*, 301.

⁶⁶ *Ibid.*, 14.

⁶⁷ *Ibid.*, 40-41.

⁶⁸ T.M. Knox, *Hegel's Philosophy of Right* (London: Oxford University Press, 1969), 41.

Diskursus teoretis seputar konsep hak milik juga bisa dilihat dalam artikel Edwin G. West yang berjudul *Property Rights in the History of Economic Thought: From Locke to J. S. Mill*.⁶⁹ Dalam kajiannya ini, Edwin menengahkan beberapa pandangan terkait teori hubungan hak milik pribadi, hak milik masyarakat, dan hak milik negara. *Pertama*, hak komunal merupakan hak yang sejak awal lahir dalam sejarah umat manusia sebagai hak alamiah, sedangkan hak individu, meskipun sudah ada, masih bersifat artifisial. Hak milik bersama ini bisa menjadi hak milik pribadi sebab penguasaan, perolehan, pembelian dan sejenisnya. Negara dalam konteks ini adalah pihak yang mengatur dan menetapkan hak milik pribadi karena adanya hubungan antara subjek dan objek dalam bentuk usaha. Pandangan ini dinyatakan oleh Cicero, David Hume, dan Hugo Grotius. *Kedua*, hak milik pribadi merupakan hak yang paling utama karena ia merupakan hak asasi yang fundamental. Manusia dapat mengembangkan dirinya sepenuhnya sebab hak milik pribadi yang dimilikinya. Pandangan ini didasarkan pada tiga asumsi dasar. *Pertama*, setiap manusia peduli dan bertanggung jawab penuh atas apa yang menjadi hak miliknya. *Kedua*, stabilitas sosial akan tercipta manakala setiap orang bertanggung jawab terhadap kepemilikannya masing-masing. *Ketiga*, hak milik komunal cenderung memicu lahirnya percekocan. Pandangan ini didukung oleh Thomas Aquinas, seorang filsuf penerus gagasan Aristoteles, Samuel Freiherr von Pufendorf, dan John Locke.⁷⁰ Sketsa perdebatan politis ini menggambarkan adanya tarik ulur posisi dan peran individu, masyarakat dan negara dalam penguasaan hak milik.

⁶⁹ Edwin G. West, "Property Rights in the History of Economic Thought: From Locke to J. S. Mill," *Carleton Economic Papers* 01-01 (Carleton University, Department of Economics), 1-35. <http://www.carleton.ca/economics/wp-content/uploads/cep01-01.pdf>.

⁷⁰ *Ibid.* Baca juga, Maria, S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008), 135-138.

Bernhard Heitger dalam artikelnya *Property Rights and the Wealth of Nations: Across-Country Study*⁷¹ menyajikan pemetaan tentang diskursus konsep hak milik antara mazhab kapitalis dan sosialis. Menurut Bernhard, di kalangan pemikir Barat dan Islam, diskursus seputar *property rights* telah menjadi perdebatan yang cukup menarik antara dua aliran. *Pertama*, aliran atau mazhab yang berpandangan bahwa kepemilikan mutlak bersifat individual. Pandangan ini didukung oleh Adam Smith, Mill, Malthus, dan François Facchini. *Kedua*, aliran yang berpandangan sebaliknya, yaitu bahwa kepemilikan mutlak bersifat komunal. Pandangan ini dikemukakan oleh Karl Marx dan Frederic Engels. Keduanya menyerukan penghapusan hak milik individu. Lebih jauh, dari kajian ini, Heitger menyajikan hipotesis sentral yang menyatakan bahwa hak milik pribadi dan supremasi hukum yang terjamin merupakan penentu penting bagi pertumbuhan ekonomi.⁷²

Sementara itu, untuk kajian yang membahas konsep hak milik dalam Islam dapat dibaca dalam karya Muhammad H. Behesti yang bertajuk *Ownership in Islam*. Karya ini membahas asal-usul kepemilikan, tingkat kepemilikan, dan cara perolehan hak milik. Karya ini tidak memberikan penjelasan secara rinci terkait kepemilikan atas tanah. Perlindungan terhadap hak milik dalam Islam, menurut Behesti, diakui sebagai hak yang bersifat alamiah (*human nature*).⁷³ Selain karya Behesti, Siti Mariam Malinumbay dalam risetnya yang berjudul *The Concept of Law Ownership: Islamic Perspective* menuturkan bahwa diskursus kepemilikan tanah tidak hanya terkait dengan wacana sosial dan hukum *unsich*, tetapi juga berkait berkelindan dengan aspek politik, khususnya terkait dengan isu kebebasan, kekuasaan, dan segala hal yang berkaitan dengan kepemilikan aset. Lebih jauh,

⁷¹ Bernhard Heitger, "Property Rights and the Wealth of Nations: Across-Country Study," *Cato Journal* 23, no. 3 (Winter, 2004): 381-402.

⁷² *Ibid.*, 399.

⁷³ Muhammad H. Behesti, *Ownership in Islam*, terj. Lukman Hakim (Jakarta: Pustaka Hidayat, 1992).

Malinumbay menyatakan bahwa untuk menjaga harmoni kepentingan antarindividu, negara mempunyai otoritas untuk membuat berbagai regulasi yang terkait dengan kepemilikan atas tanah. Oleh karenanya, tegas Malinumbay, konsep kepemilikan dalam Islam berbeda dengan konsep Kapitalis dan Marxis.⁷⁴

Senada dengan Malinumbay, hak kepemilikan atas tanah tidak hanya terkait dengan masalah hukum semata juga dinyatakan oleh Nuzhat Iqbal dalam artikelnya *The Concept of Law Ownership in Islam and Poverty Alleviation in Pakistan*. Dalam artikel ini, Iqbal menyatakan bahwa konsep kepemilikan sangat berhubungan dengan politik ekonomi yang secara sistemik perlu dibuat sistem kelembagaannya. Salah satu tesis yang diajukan Iqbal melalui artikelnya ini ialah bahwa kepemilikan individu dibatasi oleh batasan-batasan sosial keagamaan dan kewajiban sebagai warga negara dalam konteks distribusi kekayaan secara adil dan merata.⁷⁵

François Facchini, seorang profesor madya di Universitas Paris 1 Panthéon-Sorbonne dan sekaligus anggota dari Pusat Ekonomi Sorbonne (Prancis), telah melakukan kajian yang cukup menarik terkait relasi antara Islam dan pembangunan ekonomi. Dalam artikelnya yang berjudul *Islam and Private Property*,⁷⁶ ia menyatakan bahwa relatif tidak adanya kebebasan ekonomi di negara-negara dunia muslim dapat dijelaskan oleh sejarah hukum di kalangan muslim, lebih khusus lagi oleh konsepsinya tentang hak milik. Bagi Facchini, hal ini menunjukkan bahwa kendala utama munculnya kepemilikan

⁷⁴ Siti Mariam Malinumbay S. Salasal, "The Concept of Land Ownership: Islamic Perspective," *Buletin Geoinformasi* 2, no.2 (Desember 1998): 285-290.

⁷⁵ Iqbal, "The Concept of Land," 649-650.

⁷⁶ François Facchini, "Islam and Private Property," 1st *Workshop of the European Network on the Economics of Religion (ENER) in Granada, Spain*, 16-17 November (2007) JEL Classification: KOO, N23: 1-16.

pribadi adalah persoalan status tanah, yang berasal dari dominasi kekhalifahan pertama.⁷⁷

Sementara itu, kajian tentang konsepsi kepemilikan, khususnya yang membahas fitur kepemilikan Islam yang mengakui tiga konsep kepemilikan, yaitu kepemilikan individu (*al-milkiyyah al-khāsshah*), kepemilikan umum (*al-milkiyyah al-‘āmmah*), dan kepemilikan negara (*al-milkiyyah ad-daulah*), di antaranya dilakukan oleh Ibrāhīm ‘Abd al-Latīf Ibrāhīm al-‘Abīdī.⁷⁸

Dalam kajiannya yang bertajuk *al-Milkiyyāt as-Šalās: Dirāsah ‘an al-Milkiyyat al-‘Āmmah wa al-Milkiyyat al-Khāsshah wa Milkiyyat ad-Daulah fī an-Nizām al-Iqtisādī al-Islāmī*, al-‘Abīdī menegaskan bahwa kepemilikan Islam lebih berdimensi publik. Kepemilikan individu diperbolehkan secara hukum kecuali dalam hal-hal primer yang diperlukan oleh masyarakat (*al-asyyā’ aḍ-ḍarūriyyah li al-mujtama’*). Segala sesuatu yang dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup masyarakat, yang mana kehidupan masyarakat akan terganggu jika individu mengontrol dan menguasainya, hal itu tidak boleh dimiliki oleh individu.

Pada sisi yang lain, kata al-‘Abīdī, Islam mengakui adanya kepemilikan pribadi tanpa harus mengabaikan kepemilikan publik, tidak seperti teori ekonomi kapitalisme yang terlalu mengagungkan kepemilikan pribadi dan sosialisme yang berusaha menghapuskan kepemilikan individu. Kepemilikan publik, dalam pandangan al-‘Abīdī, mencakup berbagai sumber kekayaan penting yang menjadi hajat hidup seluruh masyarakat. Sementara itu, kepemilikan negara berbeda dengan kepemilikan publik. Kedua bentuk kepemilikan ini berbeda dari segi hukumnya. Pemilik dari kepemilikan publik adalah umat,

⁷⁷ *Ibid.*, 1.

⁷⁸ Ibrāhīm ‘Abd al-Latīf Ibrāhīm al-‘Abīdī, *al-Milkiyyāt as-Šalās: Dirāsah ‘an Milkiyyah al-‘Āmmah wa al-Milkiyyah al-Khāsshah wa Milkiyyah ad-Daulah fī Nizām al-Iqtisādī al-Islāmī* (Dubai: Dārah asy-Syu’ūn al-Islāmiyyah wa al-‘Amal al-Khayarī, 2009), 133-136.

sementara pemilik kepemilikan negara adalah negara itu sendiri yang notabene sebagai institusi publik yang memiliki otoritas untuk mengatur pranata sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Meskipun tidak memfokuskan kajiannya pada ketiga model kepemilikan sebagaimana yang dilakukan oleh Ibrāhīm al-‘Abīdī di atas, Muḥammad ‘Abd al-Fattāḥ al-‘Ajlūnī dalam karyanya *Afkār wa Mafāhim fī al-Iqtisād al-Islāmī* juga membahas ketiga model kepemilikan tersebut dalam bingkai sistem ekonomi Islam. Selaras dengan pandangan Ibrāhīm al-‘Abīdī, al-‘Ajlūnī juga menyatakan bahwa masyarakat Islam bukanlah seperti masyarakat kapitalis yang hanya meyakini kepemilikan individu saja dan juga bukan seperti masyarakat sosialis yang hanya mengakui eksistensi kepemilikan publik belaka, melainkan masyarakat yang mengakui eksistensi tiga model kepemilikan, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan publik dan kepemilikan negara. Masyarakat Islam juga tidak dianggap sebagai masyarakat yang mencampurkan dua kepemilikan. Sebaliknya, ini adalah prinsip Islam yang memang berbeda sama sekali dan sistem ekonomi Islam adalah bagian tak terpisahkan darinya.

Lebih jauh, al-‘Ajlūnī menegaskan bahwa termasuk kesalahan adalah pandangan yang menyatakan bahwa masyarakat Islam merupakan masyarakat kapitalis, meskipun ia mengizinkan kepemilikan individu atas modal dan alat-alat produksi, karena kepemilikan individu dalam konsepsi Islam bukan termasuk prinsip dan kaidah umum. Suatu kesalahan juga untuk menyebut masyarakat Islam sebagai masyarakat sosialis, meskipun ia mengadopsi prinsip kepemilikan publik dan kepemilikan negara atas sejumlah kekayaan dan modal, karena konstruk sosialis atas kepemilikan sosial bukanlah aturan umum dalam konsepsi Islam.⁷⁹ Pandangan semacam ini jauh sebelumnya juga pernah dinyatakan oleh Sa‘īd Abū al-Futūḥ

⁷⁹ Muḥammad ‘Abd al-Fattāḥ al-‘Ajlūnī, *Afkār wa Mafāhim fī al-Iqtisād al-Islāmī* (Yordan: Dār al-Ma‘mūn li an-Nasyr wa at-Tauzī‘, 2012), 58.

Muḥammad Basyūnī dalam karyanya *al-Ḥurriyah al-Iqtisādiyyah fī al-Islām wa Aṣaruhā fī at-Tanmiyyah*,⁸⁰ Muḥammad Bāqir Ṣadr dalam *al-Majmū'ah al-Kāmilah li Mu'allafāt as-Sayyid Muḥammad Bāqir aṣ-Ṣadr*,⁸¹ dan Na'imah Syūmān dalam karya akademiknya yang berjudul *al-Islām baina Keynez wa Mārks wa Ḥuqūq al-Insān fī al-Islām*.⁸²

Hasil penelitian lain terkait dengan hukum pertanahan dalam perspektif Islam juga dilakukan oleh at-Tahānuwī dalam kitabnya yang berjudul *Aḥkām al-Arādī*.⁸³ Demikian juga kajian Muḥammad 'Abd al-Jawwād, *Milkiyyah al-Arādī fī al-Islām: Taḥdīd al-Milkiyyah wa at-Ta'mīm*. Dalam kitabnya ini, 'Abd al-Jawwād memaparkan bahwa proses pengambilalihan kembali hak milik (tanah) seseorang oleh negara atau pemerintah dalam perundang-undangan tanah Islam dibedakan ke dalam tiga konsep, yaitu *taḥdīd al-milkiyyah*, *at-ta'mīm* dan *muṣādarah*.⁸⁴ Konsep kebijakan nasionalisasi aset tanah rakyat oleh negara yang menjadi konsen kajian penulis merujuk pada konsep *at-ta'mīm* dari ketiga istilah tersebut. Meskipun fokus kajian al-Jawwād ini sama dengan bagian dari fokus kajian penulis, kajian mendalam dan kritik nalar kepentingan umum (*public interest*, *al-maṣlahah al-'āmmah*) yang penulis lakukan kurang dieksplorasi dalam karya al-Jawwād ini. Dari perspektif inilah, ada perbedaan antara kajian penulis dan kajian yang dilakukan oleh al-Jawwād.

⁸⁰ Sa'īd Abū al-Futūḥ Muḥammad Basyūnī, *al-Ḥurriyah al-Iqtisādiyyah fī al-Islām wa Aṣaruhā fī at-Tanmiyyah* (al-Qāhirah: Dār al-Wafā' li aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr, 1988), 83.

⁸¹ Muḥammad Bāqir aṣ-Ṣadr, *al-Majmū'ah al-Kāmilah* (Beirut: Dār at-Ta'āruf li al-Maṭbū'at, 1990), 280.

⁸² Na'imah Syūmān, *al-Islām baina Keynez wa Mārks wa Ḥuqūq al-Insān fī al-Islām* (Damaskus: Ittihād al-Kitāb al-'Arab, 2000), 51.

⁸³ Ḥāmid Ibn Ṣābir al-Farūqī at-Tahānuwī, *al-Aḥkām al-Arādī* (Riyāḍ: Maktabah al-Malk Fahd, 2001).

⁸⁴ Muḥammad 'Abd al-Jawwād, *Milkiyyah al-Arādī fī al-Islām: Taḥdīd al-Milkiyyah wa at-ta'mīm*, (al-Qāhirah: aṭ-Ṭabā'ah al-'Alamiyyah, 1391 H), 232-233.

Selanjutnya adalah buku yang ditulis oleh Mahmoud A. Gulaid yang bertajuk *Land Ownership in Islam*. Buku ini menyetengahkan pembahasan konsep hak kepemilikan (*ownership rights*), macam-macamnya berikut pengaturannya dengan mendasarkan pada pemikiran ulama klasik dan praktik pengaturan tanah dalam sejarah Islam, yaitu pada era Ottoman Turki. Terkait dengan macam-macam hak milik atas tanah, A. Gulaid membagi hak milik atas tanah menjadi tiga, yaitu hak milik individu, hak milik komunal, dan hak milik negara. Hak milik individu atas tanah harus tunduk pada batasan-batasan syariat yang implementasinya dibuat oleh pemerintah sebagai pemegang otoritas yang sah.⁸⁵ Kajian Ghulaid ini pada dasarnya senada dengan kajian yang pernah dilakukan Muḥammad ‘Abd Allāh al-‘Arabī yang mengungkap dimensi kepemilikan individu dan batasan-batasannya menurut hukum Islam. Kajian ‘Abd Allāh al-‘Arabī tersebut termaktub dalam karyanya yang berjudul *al-Milkiyyah al-Khaṣṣah wa Hudūdihā fī al-Islām*.⁸⁶

Dalam karyanya yang lain, *Effect of Islamic Laws and Institutions on Land Tenure with Special Reference to Some Muslim Countries*,⁸⁷ Gulaid lebih lanjut membahas seputar ragam struktur agraria di berbagai negara muslim, struktur kepemilikan tanah dan cakupan fragmentasinya serta determinasi kepemilikan modal. Kajian Gulaid dalam karyanya ini menunjukkan bahwa sistem campuran yang direpresentasikan dalam model struktur penguasaan dan kepemilikan tanah bersifat dinamis, fleksibel, dan untuk semua tujuan praktik, mampu memenuhi kebutuhan umat muslim. Namun, betapa intensifnya sistem yang digunakan di setiap

⁸⁵ Mahmoud A. Gulaid, *Land Ownership in Islam* (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2001), 10-25.

⁸⁶ Muḥammad ‘Abd Allāh al-‘Arabī, “al-Milkiyyah al-Khaṣṣah wa Hudūdihā fī al-Islām,” *Dirāsāt fī al-Islām al-‘Adad ar-Rābi’ wa as-Ṣalāsūn* (al-Qāhirah: al-Majlis al-‘A’lā li asy-Syu’ūn al-Islāmiyyah, 1964).

⁸⁷ Mahmoud A. Gulaid, *Effect of Islamic Laws and Institutions on Land Tenure with Special Reference to Some Muslim Countries* (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2002), 37.

negara muslim dapat bervariasi. Ini menunjukkan adanya keragaman yang besar di antara negara-negara muslim karena pada kenyataannya, tidak semuanya menerapkan hukum syariat dengan intensitas dan tujuan yang sama.

Selanjutnya, kajian yang terkait dengan pemaknaan *property rights* dan institusionalisasi hak milik dalam Islam dapat dilihat pada, misalnya, karya M. Siraj Sait dan Hilary Lim yang berjudul *Land, Law and Islam: Property and Human Rights in Muslim World*. Di awal pembahasannya, Sait dan Hilary Lim, dengan mengutip pandangan Abdul Rauf (1984), menyatakan bahwa konsep “kepemilikan ganda” (*dual ownership; human being-God*) merupakan salah satu fitur khusus dari doktrin ekonomi Islam. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa Islam melindungi dan mendukung hak pribadi untuk memiliki apa saja yang mungkin bisa didapatkan, melalui cara-cara yang sah dan ini merupakan hak suci (*a sacred right*). Namun, kepemilikan manusia sangat dipengaruhi oleh pemahaman teologis bahwa segala sesuatu, pada akhirnya, adalah milik Allah Swt. semata. Apa yang tampaknya menjadi kepemilikan sebenarnya adalah soal perwalian, di mana kita memiliki wewenang sementara untuk mengatur dan memanfaatkan kepemilikan tersebut. Buku ini juga berusaha untuk mengatasi kesenjangan dalam hal minimnya literatur yang memadai terkait bagaimana prinsip-prinsip dan praktik Islam dalam masalah penguasaan tanah, mengingat banyak ulasan global tentang penguasaan tanah dan strateginya namun gagal untuk memperhitungkan prinsip-prinsip dan praktik Islam karena ia dianggap sudah tidak relevan lagi.⁸⁸

Kajian mengenai konsepsi tanah dan hak milik (*property rights*) dalam perjalanannya mengalami perkembangan yang cukup dinamis dan strategis, utamanya dalam menentukan kebijakan dan desain proyek. Di samping itu, konsep hukum

⁸⁸ M. Siraj Sait dan Hilary Lim, *Land, Law and Islam: Property and Human Rights in Muslim World* (London & New York: Zet Books, 2006), 1-2.

tanah dan *property rights* tidak hanya dimaknai sebagai aset yang bersifat fisik saja, tetapi juga mencakup setiap hak yang mempunyai nilai dan konsekuensi ekonomis dan sosial-agama (*socio-religious*). Persepsi semacam ini, misalnya, disampaikan oleh E. Barton dalam artikelnya *Property Rights and Human Rights: Efficiency and Democracy as Criteria For Regulatory Reform*. Dalam artikelnya ini, Barton menyatakan bahwa *property rights* merupakan manifestasi dasar kebebasan sebagai konsekuensi dari prinsip demokrasi.⁸⁹ Senada dengan Barton, Kim dan T. Mahoney juga menyatakan bahwa *property rights* merupakan hak seseorang atas berbagai sumber legal yang dimilikinya, baik hak untuk menggunakan maupun untuk mengalihkannya pada orang lain.⁹⁰ Terkait dengan kajian dasar-dasar metodologi hukum pertanahan dan kaitannya dengan berbagai isu kemanusiaan dapat juga dibaca dari hasil penelitian Sait dan Lim yang terbaru, *Islam, Land and Property: Research Series*. Karya ini menjelaskan konsep hak milik atas tanah berikut basis metodologinya yang dikaitkan dengan berbagai isu, seperti HAM, Gender, dan *philanthropy*.⁹¹

Kajian berikutnya adalah karya Abdul Hameed M. Bashir yang bertajuk *Property Rights, Institution, and Economic Development: An Islamic Perspective*. Fokus kajian M. Bashir ini adalah pada penjelasan tentang urgensi *property rights* untuk dilembagakan dan diakui sebagai institusi ekonomi yang berkekuatan hukum (*legal*). Negara, dalam pandangan M. Bashir, seharusnya membuat regulasi terkait dengan hak kepemilikan yang didasarkan pada dua nilai etika dasar, yaitu “*socio-economic-justice*” (*al-‘adl*) dan “*mutual benevolence*”

⁸⁹ Stephen E. Barton, “Property Rights and Human Rights: Efficiency and Democracy as Criteria for Regulatory Reform”, *Journal of Economic Issues* 17, no. 4 (Desember 1983): 916.

⁹⁰ Jongwook Kim dan Joseph T. Mahoney, “Property Rights Theory, Transaction Cost Theory: An Organizational Economic Approach to Strategic Management,” *Managerial and Decision Economics* (2005): 226.

⁹¹ Sirat Sait dan Hilary Lim, *Islam, Land and Property: Research Series* (Nairobi: UN-HABITAT, 2005).

(*al-ihsān*). Karya ini juga membahas praktik-praktik bisnis yang dilarang oleh syariat.⁹²

Masih dalam isu yang sama, Ali Akbar dalam artikelnya, *Konsep Kepemilikan dalam Islam*,⁹³ menyatakan bahwa Islam memberikan ruang dan kesempatan kepada manusia untuk mengakses segala sumber kekayaan yang dianugerahkan Allah Swt. di bumi ini guna memenuhi semua tuntutan kebutuhan hidupnya. Lebih dari itu, Akbar menegaskan bahwa konsep kepemilikan berangkat dari pandangan bahwa manusia memiliki kecenderungan dasar (*fiṭrah*) untuk memiliki harta secara individu, tetapi juga membutuhkan kehadiran pihak lain dalam kehidupan sosialnya. Karenanya, harta sebagai amanat dari Allah Swt. harus dimanfaatkan sebaik-baiknya guna mewujudkan kesejahteraan ekonomi seluruh umat manusia.

Sementara itu, Yusdani dalam artikelnya yang bertajuk *Sumber Hak Milik dalam Perspektif Hukum Islam*⁹⁴ menjelaskan bahwa konsep dasar kepemilikan dalam perspektif hukum Islam memiliki konsep tertentu jika dibandingkan dengan hukum perdata, kapitalisme dan sosialisme, terutama dalam hal sumber kepemilikan. Dalam kajiannya, Yusdani menyatakan bahwa sumber-sumber kepemilikan dalam sudut pandang Islam adalah *ihyā' al-mawāt*, *khalāfiyat*, dan *tawallud min mamlūk*. Konsep akad atau transaksi merupakan sumber kepemilikan dalam hukum sosial Islam. Karenanya, seorang muslim harus mengembangkan jenis-jenis baru akad sesuai dengan prinsip bebas dari kontrak dalam hukum Islam. Untuk mengembangkan jenis-jenis baru akad dalam hukum Islam, Yusdani mengingatkan bahwa hal ini sangat penting dalam konteks merespons perkembangan masalah sosial modern.

⁹² Abdul Hameed M. Bashir, "Property Rights, Institutions and Economic Development: An Islamic Perspective," *Humanomic* 18 (2002): 75-86.

⁹³ Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan dalam Islam," *Jurnal Ushuluddin* 18, no. 2 (Juli 2012): 124-140.

⁹⁴ Yusdani, "Sumber Hak Milik dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Mawarid* 9 (2003): 58-69.

M. Siraj Sait dalam *research paper*-nya, *The Relevance of Islamic Land Law for Policy and Project Design*, mencoba mengkaji sejauh mana relevansi hukum pertanahan Islam dalam kerangka menentukan kebijakan pemerintah berikut desain proyeknya. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa hukum pertanahan Islam sebagai strategi suplemental dalam pelayanan tujuan pembangunan internasional dan hak atas tanah dipandang sebagai upaya yang relatif baru. Pengalaman komunitas internasional menyebarkan hukum Islam di bidang lain, seperti perlindungan lingkungan dan keuangan Islam, menawarkan semacam model panduan yang berharga dan ragam metodologi yang memungkinkan untuk diaplikasikan. Lebih dari itu, Siraj Sait secara singkat juga menguraikan *Global Land Tool Network* (GLTN) dalam mengembangkan pendekatan suplemental hukum pertanahan Islam sebagai bagian dari inisiatif untuk menciptakan alat lahan yang inovatif, terjangkau, berperspektif keadilan gender dan dapat diskalakan. Hak-hak kesetaraan perempuan muslim ditawarkan sebagai studi kasus praktis. Menurutnya, konsepsi hukum pertanahan Islam sendiri adalah bidang kajian yang baru muncul dan tantangan untuk memanfaatkan potensinya sangat menarik.⁹⁵

Sebagaimana penulis singgung di awal, khusus terkait kajian yang mengangkat problem kepemilikan tanah dalam konsepsi hukum Islam memang relatif masih jarang dilakukan, untuk tidak mengatakan tidak ada sama sekali. Sejauh penelusuran penulis, hanya terdapat beberapa karya yang mencoba untuk memfokuskan kajiannya pada tema ini. Di antara kajian langka tersebut adalah karya Muḥammad ‘Alī Naṣr Allāh yang berjudul *Taṭūr Niṣām Milkiyyah al-Arāḍī fī al-Islām*. Dalam karyanya ini, ‘Alī Naṣr Allāh mengkaji sejarah perkembangan sistem kepemilikan tanah mulai dari model

⁹⁵ M. Siraj Sait, “The Relevance of Islamic Land Law for Policy and Project Design,” *Conference on Challenges for Land Policy and Administration*, 14-15 February (Washington DC: The World Bank, 2008): 1-13.

sistem kepemilikan tanah dan metode produksi pertanian sebelum Islam, kepemilikan tanah di masa awal Islam, perkembangan distribusi tanah di era pemerintahan Umayyah hingga dampak kepemilikan tanah terhadap sistem politik dan administrasi selama pemerintahan Umayyah.⁹⁶ Secara lebih spesifik, ‘Alī Naṣr Allāh juga melakukan kajian evolusi sistem kepemilikan tanah dalam Islam, utamanya model tanah-tanah di wilayah as-Sawwād di Irak.⁹⁷

Sementara itu, Muḥammad Najmān Yāsīn, dengan menggunakan pendekatan sejarah, melakukan kajian kepemilikan tanah negara dalam Islam untuk konteks tanah aṣ-Ṣawāfī mulai era kepemimpinan Rasulullah saw. hingga akhir pemerintahan Umayyah dan pengaruhnya terhadap ekonomi, sosial dan politik.⁹⁸ Sebelum Najmān Yāsīn, ‘Abd al-Mahdī ‘Abd al-Hādī Miṣrī pada dasarnya telah lebih dulu mengkaji kepemilikan tanah negara dalam Islam untuk konteks tanah aṣ-Ṣawāfī, tetapi dari perspektif ekonomi Islam.⁹⁹ Problem kepemilikan tanah dalam perspektif Islam juga telah dikaji oleh pemikir muslim kenamaan Abū al-‘Alā al-Maudūdī dalam karyanya yang berjudul *Mas’alah Milkiyyah al-Arḍi fī al-Islām*.¹⁰⁰

Selanjutnya, kajian yang membahas tema seputar kebijakan negara sebagai regulator dalam konteks pembatasan kepemilikan tanah rakyat, khususnya kebijakan nasionalisasi

⁹⁶ Muḥammad ‘Alī Naṣr Allāh, *Ṭaṭūr Niẓām Milkiyyah al-Arāḍi fī al-Islām* (Beirut: Dār al-Ḥadāsh li aṭ-Ṭibā’ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī, 1982).

⁹⁷ ‘Alī Naṣr Allāh, *Ṭaṭūr Milkiyyah al-Arāḍi fī al-Islām: Namūzaj Arāḍi as-Sawwād* (Beirut: Dār al-Ḥadāsh li aṭ-Ṭibā’ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī, 1982).

⁹⁸ Muḥammad Najmān Yāsīn, *Arḍ aṣ-Ṣawāfī; al-Arḍ al-Khāṣṣah bi ad-Daulah fī al-Islām munẓ ‘Aṣr ar-Risālah ḥattā Nihāyah al-‘Aṣr al-Umawī* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2014).

⁹⁹ ‘Abd al-Mahdī ‘Abd al-Hādī Miṣrī, *al-Arḍ al-Khāṣṣah bi ad-Daulah fī al-Islām: Arḍ aṣ-Ṣawāfī (Abḥās fī al-Iqtisād al-Islāmī)* (Yordan: Dār Umm al-Qurā, 1989).

¹⁰⁰ Abū al-‘Alā al-Maudūdī, *Mas’alah Milkiyyah al-Arḍi fī al-Islām*, terjemah Muḥammad Āṣim al-Ḥaddād, cet. ke-2 (al-Ahwār-Pakistan: Dār al-‘Arūbah li ad-Da’wah al-Islāmiyyah, 1969).

kepemilikan tanah individu untuk kepentingan umum (*at-ta'mīm*), juga sudah pernah dibahas oleh para pengkaji sebelumnya. Namun, sejauh penelusuran penulis, konstruk nalar kepentingan umum (*al-maṣlahah al-'āmmah*) yang dijadikan basis kebijakan dimaksud belum dielaborasi secara lebih komprehensif oleh para pengkajinya.

Farīd Muḥammad al-Khaṭīb, misalnya, dalam kajian tesisnya yang berjudul *Tahwīl al-Milkiyyah al-'Āmmah ilā Milkiyyah Khāṣṣah: Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah bi al-Qānūn*, menyatakan bahwa peran negara dalam perekonomian Islam tidak saja terwakili dalam peran negatif (*bidaurin salbiyyin* yang hanya mementingkan masalah pertahanan, keamanan dan peradilan *unsich*). Sebaliknya, peran negara juga bersifat positif (*daurun ijābiyyun*) yang didasarkan pada penyediaan segala sesuatu yang akan membawa manfaat bagi warganya, dan mencegah segala sesuatu yang mengganggu mereka dari berbagai masalah yang mengkhawatirkan serta dalam berbagai bidang ekonomi, sosial, politik dan lainnya.¹⁰¹ Lebih jauh, ia menyatakan bahwa kepemilikan merupakan hak yang menjadi milik pemiliknya, yang mana ia berhak untuk menasarufkannya sesuai dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Yang menarik dari kajian Muḥammad al-Khaṭīb ini dan ini yang berbeda dari pandangan *mainstream* termasuk penulis ialah hasil temuan kajiannya yang menyatakan bahwa hak atas properti tidak bisa menjadi fungsi sosial (*al-wazīfah al-ijtimā'iyah*), melainkan hak seperti semua hak lainnya. Meskipun demikian, seperti halnya pandangan *mainstream*, ia juga menyatakan bahwa karena statusnya sebagai hak, tidak ada larangan untuk mengambil dari pemiliknya manakala ia memang diperlukan. Penguasa, dalam konteks ini, memiliki otoritas untuk mengintervensi dalam

¹⁰¹ Farīd Muḥammad al-Khaṭīb, *Tahwīl al-Milkiyyah al-'Āmmah ilā Milkiyyah al-Khāṣṣah: Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah bi al-Qānūn* (al-Qāhirah: Jāmi'ah al-Qāhirah, Kulliyah Dār al-'Ulūm, Qism asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah, 2001), 346.

mengatur properti dan menetapkan hukum yang sesuai dan ia harus memberi kompensasi kepada setiap orang yang kepemilikannya diambil alih. Dalam kasus ini, kepentingan umum merupakan prinsip yang membimbing penguasa untuk mengambil kebijakan yang membawa kebaikan bagi masyarakat.¹⁰²

Kajian selanjutnya adalah kajian yang dilakukan oleh Ahmad Al Saadi dalam artikelnya yang berjudul *al-Milkiyyah al-‘Āmmah fī al-Islām: Nazrah Fiqhiyyah Ta’šīliyyah*. Dalam artikelnya ini, Al Saadi menyatakan bahwa menurut tren yang paling kuat dalam fikih Islam, negara tidak berhak untuk membelanjakan kepemilikan publik, kecuali dengan mengawasi penggunaannya, dan berusaha mencegah konflik di antara manusia yang mungkin terjadi dalam berinvestasi. Oleh sebab itu, menurut Al Saadi, setiap harta yang belum diintervensi oleh usaha manusia dan harta itu menjadi hajat hidup orang banyak maka individu dan kelompok harus dicegah untuk tidak memiliki harta itu secara penuh. Dalam konteks ini, penguasa diperbolehkan untuk memberikan sebagian dari harta publik ini kepada beberapa orang sebagai tanah milik untuk diambil manfaatnya (*iqṭā’u intifā’*), bukan sebagai hak milik untuk suatu kemaslahatan. Menurut Al Saadi, di antara penerapannya adalah bahwa nasionalisasi tidak diperbolehkan menurut peraturan yang diadopsi oleh pemerintah Arab pada abad yang lalu. Akan tetapi, jika penguasa melihat adanya kemaslahatan publik dalam kebijakan nasionalisasi beberapa properti dengan atau tanpa kompensasi yang adil dan hal itu memang sangat mendesak untuk dilakukan, ia dapat melakukannya karena secara umum penasarufan dana publik dan kekayaan negara oleh penguasa bergantung pada kepentingan publik.¹⁰³

¹⁰² *Ibid.*, 369-370.

¹⁰³ Ahmad as-Sa‘dī, “al-Milkiyyah al-‘Āmmah fī al-Islām: Nazriyyah Fiqhiyyah Ta’šīliyyah,” *Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 2, c. 1, sayı: 2 (2012): 266-286.

Sementara itu, Haddawī ‘Āyadah dalam artikelnya yang bertajuk *al-Mafhūm al-Mu‘āšir li Amlāk ad-Daulah al-Khāṣṣah* mencoba membuat pendekatan hukum terhadap konsep modern tentang kekayaan negara, berdasarkan gagasan bahwa perampasan properti oleh negara pada dasarnya bukanlah sebagai tujuan, melainkan sebagai sarana penguasaan negara di berbagai sektor dan bidang agar menempatkan negara pada arah konsepsinya tentang layanan publik.¹⁰⁴

Khusus terkait kajian tentang konsep nasionalisasi tanah individu menjadi kepemilikan publik oleh negara (*at-ta‘mīm*) dalam perspektif hukum Islam juga masih relatif jarang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Konsep nasionalisasi ini terbilang tema baru dalam kajian fikih. Istilah *at-ta‘mīm* ini nyaris tidak ditemukan dalam kajian fikih klasik. Sejauh penelusuran penulis, ada beberapa sarjana modern yang mencoba mengangkat tema ini dalam kajian mereka.

Di antaranya adalah kajian yang dilakukan oleh Sa‘d ad-Dīn Mus‘ad Hilālī dalam karyanya *al-Jadīd fī al-Fiqh as-Siyāsī al-Mu‘āšir*. Dalam kajiannya ini, Mus‘ad Hilālī menyatakan bahwa istilah *at-ta‘mīm* dalam konvensi ekonomi sosialis adalah kepemilikan pemerintah atas industri atau alat produksi pada level nasional. Nasionalisasi dalam pengertian ini, menurut Mus‘ad Hilālī, muncul -untuk pertama kalinya- bersamaan dengan terjadinya revolusi Bolshevik di Uni Soviet pada tahun 1917 M, di mana negara-negara menggulingkan kepemilikan pemilik pabrik untuk menjadi kepemilikan umum negara.¹⁰⁵ Sementara itu, kajian yang mencoba untuk mengungkap sebab-sebab yang melatarbelakangi munculnya ide nasionalisasi ini dilakukan oleh beberapa peneliti semisal Abū al-Futūh

¹⁰⁴ Haddawī ‘Āyadah, “al-Mafhūm al-Mu‘āšir li Amlāk ad-Daulah al-Khāṣṣah”, *Majallah al-Manār li al-Buḥūs wa ad-Dirāsāt al-Qānūniyyah wa as-Siyāsīyyah* 1, no 1 (2017): 239-255.

¹⁰⁵ Sa‘d ad-Dīn Mus‘ad Hilālī, *al-Jadīd fī al-Fiqh as-Siyāsī al-Mu‘āšir* (al-Qāhirah: Maktabah Wahbah li an-Nasyr wa at-Tauzī‘, 2011). 37.

Muḥammad Basyūnī,¹⁰⁶ ‘Abd as-Salām al-‘Ibādī,¹⁰⁷ dan Fahd ibn ‘Abdillāh al-‘Umarī.¹⁰⁸

Adapun karya akademik yang menyajikan disparitas pandangan hukum di kalangan ulama antara yang pro dan kontra dalam memersepsi konsep nasionalisasi aset tanah (*atta’ mīm*) dapat dilihat dalam karya Muḥammad ‘Alī al-Khaffī,¹⁰⁹ karya Muḥammad Fathī ‘Usmān,¹¹⁰ karya ‘Abd Allāh Kannūn,¹¹¹ karya Muḥammad Yūsuf Mūsā,¹¹² dan lain sebagainya. Menurut hemat penulis, kajian-kajian para sarjana ini terkesan masih bersifat deskriptif dan kurang komprehensif.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis kiranya dapat menegaskan bahwa kajian tentang sistem penguasaan dan kepemilikan tanah serta nasionalisasi aset individu oleh negara dalam perspektif hukum Islam secara lebih sistematis, mendalam dan komprehensif belum ada yang mengkaji, baik oleh ulama klasik maupun oleh sarjana modern. Oleh karenanya, penelitian ini, sejauh survei penulis, benar-benar kajian yang orisinal.

F. Kerangka Teori

Dalam kerangka mengkaji beberapa persoalan dalam disertasi ini, penulis mengelaborasi beberapa perspektif teori

¹⁰⁶ Abū al-Futūḥ Muḥammad Basyūnī, *al-Hurriyyah al-Iqtisādiyyah fī al-Islām wa Āsaruhā fī at-Tanmiyah*, cet. ke-1 (al-Qāhirah: Dār al-Wafā’ li at-Ṭibā’ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī’ al-Mansūrah, 1988), 165.

¹⁰⁷ ‘Abd as-Salām al-‘Ibādī, *al-Milkiyyah fī asy-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, juz 2 (Oman: Maṭābi’ Wizārat al-Auqāf wa asy-Syu’ūn wa al-Muqaddasāt al-Islāmiyyah, t.t.), 333-334.

¹⁰⁸ Fahd ibn ‘Abdillāh al-‘Umarī, *Naz’ al-Milkiyyah al-Khāṣṣah wa Aḥkāmihā fī al-Fiqh al-Islāmī* (Saudi Arabia: Jāmi’ah li al-Imām Muḥammad bin Sa’ūd al-Islāmiyyah, 2003), 529.

¹⁰⁹ ‘Alī al-Khaffī, *Buḥūs wa Maqālāt fī at-Tasyrī’ al-Islāmī*, cet. ke-1 (al-Qāhirah: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 2010), 120-121.

¹¹⁰ Muḥammad Fathī ‘Usmān, *al-Fikr al-Islāmī wa at-Taṭawwur*, cet. ke-3 (ttp.: ad-Dār as-Su’ūdiyyah, 1985), 60.

¹¹¹ ‘Abd Allāh Kannūn, *al-Islām Ahdā*, cet. ke-2 (Beirut: Dār as-Ṣaḳāfah, 1984), 16

¹¹² Muḥammad Yūsuf Mūsā, *al-Islām wa al-Ḥaiāh: Dirāsāt wa Taujihāt* (ttp.: Maktabah Wabnah, 1961), 124.

sebagai alat bantu analisis dalam penelitian ini. Beberapa teori sebagaimana dimaksud penulis paparkan sebagai berikut.

1. Teori Hak Milik (*Theory of Property Rights*)

Perkembangan konsep hak milik (*property rights*) dengan hukum kepemilikan (*property law*) telah menjadi diskursus yang menarik dan berkait berkelindan dengan kajian hukum, sosial, politik dan ekonomi. Kajian tentang konsepsi hak milik dan hukum kepemilikan ini penting karena menjadi kerangka acuan (*legal framework*) bagaimana penguasaan dan perlindungan terhadap hak-hak hukum atas harta (tanah) dan bagaimana suatu harta diatur dalam lalu lintas ekonomi.¹¹³

Kecenderungan manusia secara naluriah untuk menguasai berbagai sumber daya dalam bentuk kepemilikan suatu harta menjadikan kehidupan manusia bergerak dinamis dan kerap kali melahirkan berbagai konflik, baik dalam relasi konflik antarindividu maupun konflik antarkelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya.¹¹⁴ Oleh karenanya, dalam sejarah umat manusia, masalah hukum hak milik telah menjadi diskursus yang menarik, terutama dalam konteks perkembangan ekonomi kontemporer.¹¹⁵

Salah satu perselisihan utama antara kapitalisme dan komunisme adalah masalah apakah alat produksi harus dimiliki secara pribadi atau publik.¹¹⁶ Oleh karenanya, para penulis awal tentang ekonomi Islam menghabiskan banyak waktu untuk

¹¹³ Lueck dan Miceli, *Property Law*, 1; Bashir, "Property Rights, Institutions."

¹¹⁴ Syaqqī 'Abduh asy-Syāhi, *Al-Māl wa at-Ṭuruq Istismārihi fī al-Islām* (Madīnah: Maṭba'ah Hasan, 1984), 26.

¹¹⁵ Secara garis besar, perdebatan menyangkut konsep *property law* pada umumnya mengacu pada tiga aliran mazhab ekonomi besar, yaitu sistem ekonomi kapitalis (*ra'sumāliyyah*), sistem sosialis (*isytirākīyyah*), dan ekonomi Islam. Masing-masing sistem ekonomi tersebut tentu saja memiliki basis filosofis dan kerangka paradigmatis yang tidak sama prinsip-prinsip dasarnya antara satu dan yang lainnya.

¹¹⁶ Stein Ugelvik Larsen (ed.), *The Challenges of Theories on Democracy: Elaborations over New Trends in Transistology* (New York and Boulder, CO: Columbia University Press, 2000), 435.

menggambarkan teori hak milik Islam dan membedakannya dari teori kapitalis dan komunis. Siddiqi,¹¹⁷ misalnya, memberikan ringkasan singkat dan referensi penting. Dalam kajiannya, Siddiqi menyatakan bahwa kunci filosofi ekonomi Islam terletak pada hubungan manusia dengan Tuhan, alam semesta-Nya, dan umat-Nya, yakni manusia lain, dan hakikat serta tujuan hidup manusia di bumi. Hubungan manusia-Tuhan ditentukan oleh *tauḥīd*.¹¹⁸

Sementara itu, Maududi berpendapat bahwa kapitalisme menyebabkan peningkatan konsentrasi kekayaan di tangan pemilik alat produksi, yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Komunisme, bagaimanapun, tidak memberikan solusi karena kepemilikan pemerintah dalam praktiknya ternyata juga dimiliki oleh sekelompok kecil atau sekelompok orang -dan dalam praktiknya ini sering kali lebih tirani daripada kapitalis swasta yang tidak mengontrol pemerintah.¹¹⁹

Adanya konflik antara kepentingan pribadi dan kepentingan publik, antara keegoisan dan altruisme, antara efisiensi dan keadilan, atau antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan, adalah masalah yang telah melibatkan pikiran para pemikir terbesar dalam sejarah manusia yang berusaha menyelesaikan konflik antara konsep-konsep ini dan untuk mengoordinasikannya dengan cara yang mendorong pertumbuhan dan kemajuan sistem sosial. Masalah-masalah ini selalu menjadi perhatian utama para filsuf, teolog, pengacara, ilmuwan politik, dan ekonom. Menurut Mohammad Javad

¹¹⁷ Mohammad Nejatullah Siddiqi, "Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature," dalam *Studies in Islamic Economics*, ed. Khurshid Ahmad, Leicester: Islamic Foundation, 1980.

¹¹⁸ *Ibid.*, 4-5.

¹¹⁹ Sayyid Abul A'la al-Maududi, *Economic Problem of Man and its Islamic Solution* (Lahore: Islamic Publications, 1947); Maududi, *Economic System of Islam* (Lahore: Islamic Publications, 1970).

Nourahmadi,¹²⁰ konsep utama dan penghubung antara topik-topik ini adalah hak milik (*property rights*).

Menurut Bruce G. Carruthers dan Laura Ariovich,¹²¹ kepemilikan (*ownership*) memiliki beberapa dimensi atau komponen, yaitu: objek kepemilikan (*objects of property*), subjek kepemilikan (*subjects of property*), artikulasi penggunaan atau hak milik (*articulation of use/property rights*), penegakan hak (*enforcement of rights*), dan transformasi atau pengalihan hak milik (*transfer of property rights*). Dimensi kepemilikan yang berbeda mencirikan struktur kepemilikan dalam teori dan sistem ekonomi. Konsep kepemilikan, dalam konteks kajian ini, identik dengan struktur kepemilikan, kelembagaan hak milik dan sistem kepemilikan, yang mencakup berbagai dimensi tersebut di atas. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para sarjana tentang keberadaan lembaga kepemilikan dan perlunya definisi yang tepat dan perlindungan hak milik sebagai lembaga ekonomi yang memberikan disiplin dan keamanan dalam sistem ekonomi. Akan tetapi, ada ketidaksepakatan yang serius atas berbagai aspek struktur kepemilikan.¹²²

Kepemilikan, hak milik, dan struktur kepemilikan adalah konsep yang sangat relevan. “Kepemilikan” mengacu pada atribusi aset atau kemampuan (kontrol?) dari seseorang tertentu

¹²⁰ Mohammad Javad Nourahmadi, “Shaheed Sadr’s Perspective on Property Rights in Islam,” dalam *Handbook of Ethics of Islamic Economics and Finance: De Gruyter Studies in Islamic Economics, Finance and Business*, ed. Abbas Mirakhor, Zamir Iqbal, dan Seyed Kazem Sadr, vol. 5, Berlin/Boston: Walter de Gruyter GmbH, 2020, 254.

¹²¹ Carruthers dan Ariovich. “The Sociology of Property.”

¹²² Joseph A. McCahery dan Luc Renneboog, *The Economics of the Proposed European Takeover Directive: CEPS Research Report in Finance and Banking*, no. 32 (Brussels: Centr for European Policy Studies, 2003), 12; Giovanni dan Isadora Tarola, “Is Governance an Issue for Plumbers? Preliminary Remarks on Consolidation of Securities Settlement Systems,” dalam *Capital Markets in the Age of the Euro: Cross-Border Transactions, Listed Companies and Regulation*, ed. Guido Ferrarini, Klaus J. Hopt, dan Eddy Wymeersch, The Hague/London/New York: Kluwer Law International, 2002, 232.

secara sah atau badan hukum selama periode waktu tertentu.¹²³ Lebih jauh, kepemilikan melibatkan hak ekonomi yang diakui secara sosial. Properti adalah tempat di mana hak tersebut diperoleh dan pemilik adalah mereka yang memiliki hak. Dalam arti tertentu, properti menyangkut hubungan diadik yang mengandung dua unsur (*dyadic relationship*) antara orang dan benda.¹²⁴ Sir William Blackstone mendefinisikan properti sebagai: “. . . dominasi tunggal dan lalim (*that sole and despotic dominion*) yang diklaim dan dijalankan oleh seseorang atas hal-hal eksternal dunia, dengan eksklusi total dari hak individu lain di alam semesta.”¹²⁵

Menurut Carruthers dan Laura Ariovich, definisi Blackstone ini menyatakan kepemilikan pribadi sebagai kontrol eksklusif individu atas properti. Namun, terlepas dari kekuatan ideologisnya, konsepsi diadik ini merindukan adanya dimensi sosial dan politik dari properti.¹²⁶ Oleh karena itu, kekuatan untuk menjalankan kendali atas aset atau sumber daya dianggap sebagai kepemilikan. Sering kali didefinisikan juga sebagai hak sisa kendali (*the residual rights of control*), yang berarti bahwa kepemilikan memberi pemilik hak untuk menjalankan kendali

¹²³ Mohsen Renani, *Bazar and Na bazar* (Tehran: Planning and Budget Organization, 1997), 287.

¹²⁴ Carruthers dan Ariovich, “The Sociology of Property,” 23.

¹²⁵ W. Blackstone, *Commentaries on the Laws of England*, vol. 2 (Chicago: Univ. Chicago Press, 1766); Carol M. Rose, “Canons of Property Talk, or, Blackstone’s Anxiety,” *The Yale Law Journal* 108, no. 3 (Dec. 1998): 601; Teresa Michals, “That Sole and Despotic Dominion”: Slaves, Wives, and Game in Blackstone’s Commentaries,” *Eighteenth-Century Studies* 27, no. 2 (Winter, 1993-1994): 208; Ellen Frankel Paul, *Property Rights and Eminent Domain* (USA and London: Transaction Publisher, 2009), 185; Felix S. Cohen, “Dialogue on Private Property,” dalam *Private and Common Property: Liberty, Property, and the Law*, ed. Richard A. Epstein, New York and London: Routledge Taylor & Francis Group, 2011, 6; Alison Clarke dan Paul Kohler, *Property Law: Commentary and Materials* (New York: Cambridge University Press, 2005), 183.

¹²⁶ Carruthers dan Ariovich, “The Sociology of Property,” 23.

atas sumber daya hanya dalam batas-batas tertentu yang ditentukan oleh sistem hukum dan/atau kewajiban kontrak.¹²⁷

Berkaitan dengan hak kepemilikan (*the right of ownership*), I. Fisher menyatakan: “Hak milik adalah kebebasan atau izin untuk menikmati manfaat kekayaan sambil menanggung biaya yang ditimbulkan oleh manfaat itu ... hak milik bukanlah benda atau peristiwa fisik, tetapi merupakan hubungan sosial yang abstrak. Hak milik bukanlah sesuatu”.¹²⁸ Oleh karena itu, hak milik adalah hubungan antarmanusia yang timbul dari adanya barang langka dan berkaitan dengan kegunaannya.

Teori hak milik pada dasarnya tidak menekankan siapa yang “memiliki” tanah, melainkan menganalisis ketentuan formal dan informal yang menentukan siapa yang berhak menikmati aliran manfaat yang muncul dari penggunaan aset dan siapa yang tidak memiliki hak tersebut.¹²⁹ Hak-hak ini perlu disetujui secara kolektif untuk membentuk klaim yang efektif. Dengan demikian, hak milik melibatkan hubungan antara pemegang hak, orang lain, dan struktur pemerintahan untuk mendukung klaim tersebut.¹³⁰

Hak milik terdiri dari dua komponen: aturan dan mekanisme penegakannya. Aturan tersebut dapat berasal dari

¹²⁷ Syed B. Hussain, *Encyclopedia of Capitalism* (New York: Golson Books, Ltd, 2004), 629.

¹²⁸ I. Fisher, *Elementary Principles of Economics* (New York: Macmillan, 1923), 27. Juga, Svetozar Pejovich, *The Economics of Property Rights* (Dordrecht, the Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 1990), 27; Conor Vibert, *Theories of Macro Organizational Behavior: A Handbook of Ideas and Explanations* (Armonk, New York, London, England: M.E. Sharpe, 2004), 64.

¹²⁹ Hosaena Ghebru, “Technical Efficiency and Productivity Differential Effects of Land Right Certification: A Quasi-Experimental Evidence,” *Quarterly Journal of International Agriculture* 54, no. 1 (2015): 4; Wibke Crewett, Ayalneh Bogale, dan Benedikt Korf, “Land Tenure in Ethiopia: Continuity and Change, Shifting Rulers and the Quest for State Control,” *CGIAR Systemwide Program on Collective Action and Property Rights (CAPRI)-Working Paper* no. 91 (September, 2008): 2.

¹³⁰ Edella Schlager dan Elinor Ostrom, “Property-Rights Regimes and Natural Resources: A Conceptual Analysis,” *Land Economics* 68, no. 3 (1992): 254.

hukum agama, hukum negara, hukum adat, aturan kelompok pengguna, dan kerangka kerja lainnya. Penegakan hukum perundang-undangan biasanya menjadi tanggung jawab negara, yang berarti bahwa hak-hak tersebut didasarkan pada hukum formal. Hak milik berdasarkan jenis aturan lain dapat ditegakkan oleh otoritas adat atau oleh kelompok pengguna, yang mengelola distribusi hak atau anggota kelompok itu “menentukan atau menegakkan hak di antara mereka sendiri”.¹³¹

Kepemilikan (*ownership*) dapat dilihat sebagai “seikat tongkat” (*a bundle of sticks*), yang terdiri dari hak-hak berikut.¹³²

C: Hak untuk mengontrol aset dan memutuskan penggunaannya.

V: Klaim atas nilai yang dihasilkan aset.

E: Hak untuk mengecualikan orang lain dari menggunakan aset.

T: Hak untuk mentransfer ikatan C, V, E, ke pihak lain.

Sementara itu, hak kepemilikan (*right of ownership*) mengandung empat elemen:¹³³ (i) hak untuk menggunakan aset (*usus*); (ii) hak untuk memperoleh manfaat dari aset itu (*usus fructus*); (iii) hak untuk mengubah bentuk dan substansinya (*abusus*), dan (iv) hak untuk mengalihkan semua atau sebagian hak yang ditentukan dalam (i), (ii), dan (iii) kepada orang lain dengan harga yang disepakati bersama.

Di lain pihak, Schlager dan Ostrom telah mengembangkan konsep “kumpulan hak” (*bundles of rights*). Konsep “kumpulan hak” yang dikembangkan oleh Schlager dan Ostrom ini berguna

¹³¹ *Ibid.*

¹³² Dennis C. Mueller, *The Oxford Handbook of Capitalism* (Oxford: Oxford University Press, 2012), 205; Denise R. Johnson, “Reflection on the Bundle of Rights,” *Vermont Law Review* 32, no. 2 (2007): 253; Myrl L. Duncan, “Reconceiving the Bundle of Sticks: Land as a Community Based Resources,” *Environmental Law* 32, no. 4 (2002): 773-807; Daniel B. Klein dan John Robinson, “Property: A Bundle of Rights? Prologue to the Property Symposium,” *ECON JOURNAL WATCH* 8, no. 3 (September 2011): 193-204.

¹³³ Pejovich, *the Economics of Property*, 28.

untuk menganalisis distribusi hak di antara kelompok pengguna yang berbeda dan antara individu di bawah berbagai rezim tenurial.¹³⁴ Schlager dan Ostrom membedakan antara dua jenis utama hak milik, —yang mereka definisikan sebagai “kewenangan untuk melakukan tindakan tertentu yang terkait dengan domain tertentu” dan yang terkait dengan peningkatan tingkat komando atas aliran manfaat dan sumber daya yang diberikan kepada pemegang hak—, yaitu: hak milik tingkat operasional (*operational level property rights*) dan hak milik pilihan kolektif (*collective-choice property rights*).¹³⁵

Hak milik tingkat operasional termasuk hak untuk memasuki properti fisik yang ditentukan (hak akses) dan hak untuk mendapatkan “produk” dari suatu sumber daya (hak penarikan atau pengambilan kembali). Hak milik pilihan kolektif meliputi (1) *management rights* (hak pengelolaan, misalnya, untuk mengubah dan menggunakan sumber daya); (2) *exclusion rights* (hak pengecualian, yaitu menentukan siapa yang berhak atas akses dan hak penarikan dan siapa yang memutuskan tentang pengalihan hak tersebut); dan (3) *alienation rights* (hak alienasi/pemindahtanganan, hak untuk menjual atau menyewakan sumber daya).¹³⁶ Perbedaan antara hak tingkat operasional dan hak pilihan kolektif adalah perbedaan antara “melaksanakan hak dan berpartisipasi dalam definisi hak masa depan yang akan dilaksanakan”, yang berarti bahwa pemegang hak pilihan kolektif menentukan aturan operasional.¹³⁷

Dari paparan di atas, dapat dinyatakan bahwa, pada prinsipnya, komponen terpenting dari kumpulan hak (*the bundle of rights*) yang menentukan kepemilikan adalah eksklusivitas (*exclusivity*) dan alienasi (*alienability*). Eksklusivitas mengacu

¹³⁴ Schlager dan Ostrom, “Property-Rights Regimes,” 249-251.

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ *Ibid.* Lihat juga, E. Ostrom, “Private and Common Property Rights,” dalam *Civil Law and Economics. Encyclopedia of Law and Economics*, ed. Bouckaert dan G. DeGeest, vol. 2 B., Cheltenham: Elgar, 2000.

¹³⁷ Schlager dan Ostrom, “Property-Rights Regimes,” 251.

pada hak untuk menentukan siapa yang boleh (dan siapa yang tidak boleh) menggunakan sumber daya dengan cara tertentu, sedangkan alienasi mengacu pada hak untuk mengalihkan kepemilikan kepada orang lain.¹³⁸

Selanjutnya, dalam konteks sistem ekonomi Islam, utamanya dalam konteks kajian disertasi ini, penulis merasa perlu untuk mengelaborasi konsep struktur kepemilikan (*the concept of structure ownership*) di atas dengan teori *maṣlaḥah* sebagai basis etis struktur kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam (*the ethical basis of the ownership structure in the Islamic economic system*) dan teori “ruang kosong” (*naẓariyyah miṭṭaqah al-farāg*) dalam legislasi hukum Islam di bidang ekonomi yang memberikan otoritas bagi penguasa untuk mengisinya dengan berbagai paket regulasi sekunder.

Meskipun terdapat anasir-anasir yang sama antara kepemilikan tanah dalam hukum Islam dan kepemilikan dalam sistem hukum sosialis, terdapat distingsi yang mendasar, yaitu pada aspek landasan etikanya. Jika filosofi dalam sistem sosialis sekuler didasarkan pada spirit asas kebersamaan atas nama kepentingan manusia semata, asas kepemilikan bersama dalam Islam dilandasi oleh semangat spiritualitas jemaah sebagai refleksi ketuhanan tanpa menegasikan lembaga kepemilikan individu sebagai pribadi yang otonom.¹³⁹

Sistem kepemilikan tanah dalam bingkai ekonomi Islam, yang memberikan perhatian yang sama baik pada individu maupun komunitasnya, memberikan penekanan pada motif pribadi langsung, tidak seperti sistem yang hanya menekankan hasil akhir bagi komunitas. Islam tidak menggabungkan individu ke dalam komunitas, juga tidak mengabaikan kewajiban sosialnya.¹⁴⁰ Islam melihat tidak ada konflik antara kepentingan sah individu dan komunitasnya. Mengabaikan

¹³⁸ Hussain, *Encyclopedia of Capitalism*, 629.

¹³⁹ Ridwan, *Hak Milik: Perspektif Islam, Kapitalis, dan Sosialis* (Yogyakarta: Debut Wahana Press, 2011), 53.

¹⁴⁰ Rauf, *A Muslim's Reflection on Democratic Capitalism*, 20.

motif pribadi langsung dan hanya menekankan hasil akhir bagi komunitas telah menyebabkan keserakahan, keegoisan, dan penderitaan yang tak terkatakan. Memberi perhatian yang sama pada motif pribadi langsung dan pada saat yang sama menegaskan bahwa motif tersebut harus disetujui adalah cara untuk membimbing kebebasan ekonomi manusia menuju keselarasan antara kepentingan terbaik individu dan masyarakat.¹⁴¹ Hasilnya, dengan cara ini, akan lebih baik dan lebih besar.

Konsep dasar Islam tentang hak milik yang diuraikan di atas memiliki konsekuensi etika dan moral yang luas. Karena dunia diciptakan untuk kepentingan manusia, beberapa jenis sumber daya alam tidak dapat dimiliki secara pribadi karena kepemilikan pribadi akan menghilangkan manfaat yang ditujukan untuk publik. Kebanyakan cendekiawan Islam berpendapat bahwa tanah umum, hutan, danau, sungai dan mineral (termasuk minyak) termasuk dalam kategori ini.¹⁴²

Pemerintah harus memegang kendali otoritas properti publik dengan kepercayaan dan merancang mekanisme untuk memungkinkan seluruh publik mendapatkan keuntungan dari properti tersebut. Sebagai contoh, air adalah sumber daya publik yang sering menjadi subjek sengketa internasional. Pengelolaan air dalam Islam, misalnya, menurut Faruqui,¹⁴³ telah memberikan perbandingan hukum Islam dengan hukum internasional dan pendekatan saat ini.

2. Kontinuitas dan Perubahan dalam Hukum Keagrariaan Islam.

“Kontinuitas” dan “perubahan” adalah topik yang telah didiskusikan dan diperdebatkan selama masih ada filosofinya.

¹⁴¹ *Ibid.*

¹⁴² Asad Zaman, *Islamic Economics: A Survey of the Literature* (UK: Religion and Development Research Program Lead Research Institution, International Development Department, University of Birmingham, 2008), 32.

¹⁴³ Naser I. Faruqui, Asit K. Biswas, dan Murad J. Bino (eds.), *Water Management In Islam* (Tokyo: UNU Press, 2001).

Seperti konsep dasar lainnya, kontinuitas dan perubahan diperlukan untuk membantu pemahaman tentang dunia. Tanpa konsep kontinuitas dan perubahan, akan sulit memahami bagaimana peristiwa-peristiwa yang berbeda bisa berkaitan sedemikian rupa sehingga menciptakan sejarah yang koheren tentang situasi dan kondisi dunia, termasuk dunia pemikiran.¹⁴⁴ Kedua konsep ini sering digunakan untuk menggambarkan sejarah pemikiran, tidak terkecuali sejarah pemikiran hukum Islam.¹⁴⁵ Secara dialektis, keduanya sangat berkait berkelindan satu sama lainnya. Artinya, sejarah pemikiran sering kali dilihat sebagai proses pertautan atau tarik-menarik antara kutub-kutub kontinuitas di satu sisi dan kutub-kutub perubahan pada sisi yang lain. Oleh karena itu, istilah kontinuitas dan perubahan sering kali dipasangkan dengan istilah-istilah lain seperti istilah “keseragaman” (*uniformity*) dan “keragaman” (*diversity*), “persamaan” (*equality*) dan “perbedaan” (*difference*), atau “konsensus” (*consensus*) dan “konflik” (*conflict*). Namun, istilah “kontinuitas” dan “perubahan” menekankan lebih pada proses sejarah, tidak hanya pada produk. Dengan sedikit penyederhanaan, dapat dikatakan kontinuitas adalah proses menuju keseragaman, persamaan, atau konsensus, sedangkan perubahan adalah proses menuju keberagaman, perbedaan, atau konflik.

Ada banyak perspektif teori yang bisa digunakan untuk menganalisis kontinuitas dan perubahan masalah di berbagai bidang dan tema. Beberapa di antaranya lebih menekankan pada unsur kontinuitas, sementara yang lain lebih menekankan pada aspek perubahan dan pergeseran. Salah satu yang menarik adalah apa yang dikemukakan oleh John Obert Voll dalam karyanya, *Islam: Continuity and Change in the Modern*

¹⁴⁴ Soraj Hongladarom, “Metaphysics of Change and Continuity: Exactly What is Changing and What Gets Continued?,” *Kilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy*, no. 2 (May 2015): 42.

¹⁴⁵ Lihat misalnya kajian Wael B. Hallaq, *Authority, Continuity, and Change in Islamic Law* (New York: Cambridge University Press, 2001).

World.¹⁴⁶ Penelitian Voll memusatkan perhatiannya pada aspek kontinuitas dan perubahan yang terkandung dalam fenomena kebangkitan Islam di zaman modern.¹⁴⁷ Namun, seperti yang akan ditunjukkan di bawah ini, cara pandang yang ia kemukakan sebenarnya juga membantu dalam studi tentang

¹⁴⁶ John Obert Voll, *Islam: Continuity and Change in the Modern World* (Boulder: Westview Press, 1982).

¹⁴⁷Voll menyebut setidaknya empat perspektif yang digunakan para peneliti dan sejarawan ketika menganalisis kemunculan fenomena kebangkitan aktivisme Islam di tahun 1970-an. Perspektif pertama adalah perspektif krisis. Krisis yang dihadapi suatu komunitas tidak hanya dapat mendorong mereka untuk berubah, tetapi juga dapat menjadi alasan untuk menegaskan kontinuitas dan menjaga kontinuitas. Umat Islam di zaman modern menghadapi krisis berupa keterbelakangan dan keterbelakangan di bidang politik, sains, dan teknologi. Di satu sisi, krisis memicu keinginan untuk berubah. Namun, di sisi lain, krisis juga memunculkan gerakan untuk menjaga kesinambungan dalam bentuk penegasan kembali nilai-nilai dan ajaran Islam di zaman modern ini. Krisis adalah kata kunci untuk menjelaskan perubahan dan kontinuitas. Perspektif kedua adalah perspektif sukses. Perspektif ini kontras dengan perspektif pertama karena lebih menekankan pada kesuksesan, kekuatan, atau potensi. Krisis dianggap bukan kekuatan sentral yang mendorong perubahan atau kontinuitas. Ia hanyalah pengecualian atau jeda sebelum sukses. Fakta paling menentukan adalah keberhasilan setelah krisis. Dalam kasus kebangkitan Islam yang diteliti oleh Voll, keberhasilan itu bisa berupa penguatan posisi para pemimpin muslim di arena internasional, atau semakin banyaknya negara muslim merdeka, atau bahkan "bom minyak" tahun 1970-an. Perspektif ketiga adalah perspektif keberagaman. Perspektif ini menolak klaim universalitas dan menekankan perhatian pada reaksi tertentu yang unik untuk perubahan situasi. Dalam konteks kebangkitan Islam abad ke-20, misalnya, gerakan anti komunis di Indonesia belum bisa dianggap identik dengan berdirinya negara-negara muslim di masa lalu. Yugoslavia. Masing-masing memiliki keunikan tersendiri. Dengan cara pandang seperti itu, kontinuitas dan perubahan tidak lagi didekati sebagai sesuatu yang bulat dan utuh, tetapi sebagai sesuatu yang bersifat parsial dan partikular. Perspektif keempat adalah perspektif evolusi. Perspektif ini mencoba mengidentifikasi pola umum atau garis evolusi dalam sejarah pemikiran tertentu. Kecenderungan pada periode tertentu tidak dapat sepenuhnya lepas dari kecenderungan lain yang mendahuluinya pada periode sebelumnya. Masa lalu selalu dilihat sebagai faktor krusial dalam membentuk masa kini dan masa depan. Fenomena kebangkitan Islam di tahun 1970-an, misalnya, harus dilihat sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan dari tren lain yang telah berlangsung selama dua atau tiga abad terakhir, atau bahkan sejak zaman klasik. Dengan demikian, kontinuitas dan perubahan yang terjadi dalam suatu fase harus dilacak presedennya atau penjelasannya di fase lain di masa lalu. Lihat *Ibid.*, 349-354.

kontinuitas dan perubahan, termasuk dalam penelitian yang penulis lakukan.

Banyak ditemukan bukti bahwa produk hukum merupakan bagian dari evolusi sejarah, yang di dalamnya tidak dapat dilepaskan dari proses kontinuitas (*continuity*) dan perubahan (*change*) ini. Para sarjana Barat menunjukkan bahwa teori klasik hukum Islam adalah produk dari proses sejarah yang kompleks yang mencakup periode tiga abad dan, lebih jauh, pertumbuhan awal hukum Islam terkait erat dengan perkembangan sosial, politik dan ekonomi kontemporer.¹⁴⁸

Di bidang hukum pewarisan, misalnya, tidak ada sarjana yang berbuat lebih banyak untuk mempromosikan pemahaman sosio-historis tentang hukum selain Noel J. Coulson, meskipun ia tidak pernah mengartikulasikan penjelasan yang terpadu dan komprehensif yang tersebar di banyak tulisannya.¹⁴⁹ Begitu juga halnya sistem penguasaan dan pemilikan tanah dalam Islam merupakan produk dari faktor sejarah dan budaya yang mencerminkan hubungan antara manusia, masyarakat dan tanah.¹⁵⁰ Tidak ada sistem penguasaan dan pemilikan tanah yang mempertahankan sifat aslinya; alih-alih sistem itu terus berkembang untuk mencerminkan keadaan yang berubah.¹⁵¹

¹⁴⁸ Lihat misalnya karya Joseph Schacht, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* (Oxford: Clarendon Press, 1959); Schacht, "Pre-Islamic Back Groud and Early Development of Jurisprudence," dalam *Law in the Middle East: Origin and Development of Islamic Law*, ed. Majid Khadduri dan Herbert J. Liebesny, vol. I, Clark, New Jersey: The Lawbook Exchange, Ltd., 2008, 34; David S. Power, "The Islamic Inheritance System: A Socio-Historical Approach," dalam *Issues in Islamic Law*, ed. Mashood A. Baderin, vol. II, London and New York: Routledge, 2016, 165; N.J. Coulson, *A. History of Islamic Law* (USA and UK: Aldine Tracsaction, 2011), 5.

¹⁴⁹ Coulson, *A. History of Islamic Law*; Coulson, *Conflict and Tension in Islamic Jurisprudence* (Chicago: The University of Chicago Press, 1968); Coulson, *Succession in The Muslim Family* (London: Cambridge University Press, 1971).

¹⁵⁰ Michael Kirk (ed.), *Land Tenure Security in Selected Countries* (Kenya: United Nations Human Settlements Programme [UN-Habitat], 2015), vii; Sait dan Lim, *Land, Law and Islam*, 3.

¹⁵¹ Rita Esinu Sewornu, Benjamin Quaye dan Nelson Duut Namikat, "Land Tenure Security in Ghana," dalam *Land Tenure Security in Selected*

Penguasaan tanah (sumber daya agraria) mulai era Rasulullah sampai era *nation-state*, misalnya, sangat berkait berkelindan dengan formasi-formasi sosial yang pernah mewarnai kehidupan umat Islam dari masa ke masa (feodalisme, merkantilisme, kolonialisme, kapitalisme, imperialisme). Hal ini sebagaimana dikutip oleh Siraj Sait dan Hilary Lim dalam *Land, Law and Islam*, terdapat pepatah tradisional dalam keagrariaan Islam yang menyatakan, *al-arḍ taftariqu bi asy-syibr*, “Tanah itu berbeda (statusnya, sejarahnya) dari satu jengkal ke jengkal yang lain”.¹⁵² Artinya, terdapat heterogenitas sejarah tanah dan sejarah agraria itu sendiri, yang tidak bisa direduksi—boleh jadi karena tumpang-tindihnya formasi sosial yang terjadi pada tanah tersebut.¹⁵³ Dalam konteks disertasi ini, konsep “kontinuitas” (*continuity, aṣ-ṣawābit*) dimaksudkan guna mencermati sejauh mana dan dan hal apa saja yang ada dalam paradigma atau keyakinan lama terkait hukum penguasaan dan kepemilikan tanah dalam Islam yang masih berjalan dan diteruskan oleh komunitas setempat dalam periode sejarah tertentu dan yang mana yang sudah mengalami perubahan (*change, al-mutaḡayyirāt*).

3. Ruang Kosong (*Minṭaqah al-Farāḡ*) dalam Legislasi Hukum Islam

Dunia Islam adalah dunia yang sangat luas, banyak ras dan lingkungan yang beragam, realitas kehidupan di dalamnya selalu berubah-ubah, dan permasalahan yang dihadapi di setiap generasi selalu silih berganti, sejak era sahabat hingga saat ini. Banyak kejadian dan persoalan hukum yang bermunculan, lantas bagaimana pandangan hukum Islam?

Countries, ed. Michael Kirk, Kenya: United Nations Human Settlements Programme [UN-Habitat], 2015, 4.

¹⁵² Sait dan Lim, *Land, Law and Islam*, 54.

¹⁵³ Muhammad Al-Fayyadl, “Pengantar: Islam, Pembebasan, dan Keadilan Agraria,” dalam Gita Anggraini, *Islam dan Agraria: Telaah Normatif dan Historis Perjuangan Islam dalam Merombak Ketidakadilan Agraria* (Yogyakarta: STPN Press, 2016), x.

Di hadapan persoalan-persoalan tersebut, hukum Islam tidak berdiri dalam posisi yang membingungkan, pandangannya tidaklah imajiner/fiktif, melainkan realistis: memperhitungkan kepentingan umat yang sesungguhnya yang tidak bertentangan dengan teks Al-Qur'an atau sunah yang otentik dan definitif serta prinsip-prinsip umum Islam. Ini adalah fitur fleksibilitas dari hukum Islam, bahkan hal itu merupakan faktor penting bagi kebaikan hukum Islam untuk diterapkan di mana pun dan kapan pun. Yūsuf al-Qarḍāwī menyebut persoalan baru yang belum ada hukumnya dalam Al-Qur'an maupun dalam sunah, dan yang membutuhkan ijtihad para mujtahid, sebagai “ruang yang didiamkan” (*minṭaqah al-‘afwi*) dalam legislasi Islam,¹⁵⁴ yang mana istilah ini diambil dari hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa, “Apa yang dihalalkan dalam Al-Qur'an, maka ia hukumnya halal. Dan apa yang diharamkan, maka ia haram. Sementara apa yang didiamkan oleh-Nya, maka hal itu dimaafkan. Oleh karenanya, terimalah permaafan dari Allah. Sesungguhnya Allah tidak lupa sedikit pun”.¹⁵⁵ Istilah “ruang yang didiamkan” (*minṭaqah al-‘afwi*) ini pada hakikatnya sama dengan istilah “ruang kosong” (*minṭaqah al-farāg*).¹⁵⁶

Istilah *minṭaqah al-farāg* (ruang kosong) merupakan frasa yang berasal dari dua kata, yaitu *al-minṭaqah* dan *al-farāg*. Kata *al-minṭaqah*, berdasarkan indikasi penyandarannya pada kata *al-farāg*, berarti ‘bidang’ (*ar-ruq‘ah*) atau ‘area kecil’ (*al-misāḥah aṣ-ṣagīrah*). Sementara itu, kata *al-farāg* berarti ‘kosong’ atau ‘kekosongan’ (*al-khalā’*) sebagaimana dinyatakan dalam ayat:

¹⁵⁴ Yūsuf al-Qarḍāwī, *Madkhal li Dirāsah asy-Syarī‘ah al-Islāmiyyah* (al-Qāhirah: Maktabah Wahbah, 1990), 138; al-Qarḍāwī, *Tajdīd ad-Dīn al-laṣī Nansyuduhu* (Amman, Jordan: Dār al-Manhal, 2011), 28.

¹⁵⁵ Sulaimān ibn ‘Abd al-Qawī Ṭūfī, *Syarḥ Mukhtaṣar ar-Rauḍah* (Beirut: Mu’assasah ar-Risālah, 1987), 13. Juga, Abū Ja’far Aḥmad ibn Muḥammad ibn Salāmah aṭ-Ṭaḥāwī, *Syarḥ Musykil al-Āsār*, ed. Syu’aib Arnā’ūt, juz 2 (Beirut: Mu’assasah ar-Risālah, 1994), 226.

¹⁵⁶ Saif ad-Dīn ‘Abd al-Fattāḥ Ismā‘īl, *Fī an-Nazariyyah as-Siyāsīyyah min Manẓūr al-Islāmī: Manhajīyyah at-Tajdīd as-Siyāsī wa Khibrāh al-Wāqī’ al-‘Arabī al-Mu’āṣir*, vol. 25 (Amman: al-Ma’had al-‘Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 1998), 128.

“Dan menjadi kosonglah hati ibu Mūsā....,”¹⁵⁷ yakni kosong dari kesabaran (*khāliyan min aṣ-ṣabri*). Kata *al-farāgu* (kekosongan) ini kebalikan dari *asy-syuglu* (kesibukan), atau sebaliknya. Pemaknaan yang demikian ini sebagaimana dinyatakan oleh ar-Rāḡib al-Aṣfahānī (w. 502 H).¹⁵⁸ Menurut Karīm Mājid ar-Rubai’ī, dari penjelasan aspek linguistik ini, makna *al-farāg* dapat dipahami dan mungkin kaidah ‘kekosongan’ hadir dari sudut pandang makna linguistik ini dan itu merupakan kaidah yurisprudensial yang umum di kalangan para ahli hukum, yaitu penyelesaian suatu aktivitas dan kekosongan aktivitas (*al-intihā’ min al-‘amal wa al-khuluwwu minhu*),¹⁵⁹ tetapi tidak mungkin memahami konsep wilayah kekosongan legislatif (*minṭaqah al-farāg at-tasyrī’ī*) dari perspektif makna linguistik sebagaimana penulis nyatakan sebelumnya. Ruang atau wilayah ini dikenal sebagai ruang kekosongan legislatif yang pengisiannya diserahkan kepada penguasa dan para ahli hukum. Dengan kata lain, Islam memiliki kekosongan legislatif dalam aturan-aturannya yang telah ditinggalkan Tuhan.

Dalam karyanya *Iqtiṣādunā*, Bāqir aṣ-Ṣadr menyatakan bahwa yang dimaksud *minṭaqah al-farāg* (ruang kosong) adalah ruang yang sejak awal memang sengaja tidak diisi oleh syariat dengan aturan hukum yang tetap (*aḥkām sābitah*).¹⁶⁰ Sementara dalam karyanya yang lain, *al-Islām Yaqudu al-Hayāh*, ia menyatakan bahwa *minṭaqah al-farāg* adalah area yang mencakup berbagai kasus hukum di mana syariat menyerahkan kepada orang tertentu untuk mengambil sikap atasnya. Bāqir aṣ-Ṣadr memersepsi area tersebut sebagai wilayah yang secara

¹⁵⁷ Q.S. Al-Qaṣaṣ [28]:10.

¹⁵⁸ Ar-Rāḡib al-Aṣfahānī, *al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur’ān* (Beirūt: Dār Iḥyā’ at-Turāṣ al-‘Arabī, 1423 H), 392.

¹⁵⁹ Hasan Karīm Mājid ar-Rubai’ī, “Nazariyyah al-Firāgh at-Tasyrī’ī ‘inda as-Sayyid asy-Syahīd Muḥammad Bāqir aṣ-Ṣadr: Juḡrūhā at-Tārikhiyyah wa Ḥudūduhā ma Mawānī’uhā as-Syar’iyyah,” *Journal of Human Science (Majallah ‘Ulūm al-Insāniyyah)* 1, no. 16 (2013), 71.

¹⁶⁰ Aṣ-Ṣadr, *Iqtiṣādunā: Dirāsah Mauḍū’iyyah*, 378.

hukum dipercayakan kepada penguasa yang sah untuk diaplikasikan (diisi) guna merealisasikan kepentingan umum (*limaṣāliḥ al-‘āmmah*).¹⁶¹

Sementara itu, Muḥammad Ishāq al-Fayyād mendefinisikan *minṭaqah al-farāg* sebagai area kosong dari teks-teks hukum syariah, baik dalam Al-Qur’an maupun sunah. Ia merupakan wilayah yang menyangkut perkara-perkara yang pada dasarnya memang diperbolehkan (*minṭaqah al-mubāḥāt*), termasuk elemen ketiga dalam Islam, yakni elemen dinamis dari hukum Islam.¹⁶² Dalam pandangan Syams ad-Dīn, *minṭaqah al-farāg* (ruang kosong) merupakan ruang dalam Islam yang mana legislasinya diserahkan oleh Allah kepada penguasa yang sah (*waliyyu al-amr*) dan para ahli hukum (*fuqahā’*), di mana perkembangan dan perubahannya disesuaikan dengan kebutuhan umat.¹⁶³ Al-Hā-irī, mengamini pandangan gurunya (Bāqir aṣ-Ṣadr), menyatakan bahwa *minṭaqah al-farāg* adalah ruang atau wilayah yang diisi dengan peraturan hukum yang berubah-ubah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan, tetapi ia tetap bersyarat dan tetap dalam bingkai tema primer berbagai aturan hukum yang permanen (*al-aḥkām aṣ-ṣābitah*)¹⁶⁴ atau dengan kata lain, ia merupakan dimensi fleksibilitas Islam (*murūnah al-Islām*) untuk diisi oleh penguasa (*waliyyu al-amr*).¹⁶⁵

Konsepsi “ruang kosong” (*minṭaqah al-farāg*) di atas merupakan konsepsi yang dibangun di kalangan ulama syi’ah. Adapun konsepsi “ruang kosong” di kalangan ulama suni, pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan konsepsi ulama syi’ah.

¹⁶¹ Bāqir aṣ-Ṣadr, *al-Islām Yaqūdu al-Ḥayāh*, 19.

¹⁶² Muḥammad Ishāq al-Fayyād, *al-Anmūzaj fī Manhaj al-Hukūmah al-Islāmiyyah* (Qum: Maktabah al-Fayyād, 1426 H), 31.

¹⁶³ Muḥammad Mahdī Syams ad-Dīn, *al-Ijtihād wa at-Tajdīd fī Fiqh al-Islāmī* (Beirūt: al-Mu’assasah ad-Dauliyyah li ad-Dirāsāt wa an-Nasyr, 1412 H), 105.

¹⁶⁴ Kāzīm al-Hā-irī, *al-Marja’iyyah wa al-Qiyādah*, cet. ke-3 (Qum: Dār at-Tafsīr, 1425 H), 132.

¹⁶⁵ Al-Hā-irī, *Asās al-Hukūmah al-Islāmiyyah* (Beirūt: Maṭba’ah an-Nīl, 1399 H), 24.

Hanya saja, istilah yang digunakan di kalangan ulama suni adalah *minṭaqah al-‘afwi*¹⁶⁶ (ruang yang didiamkan). Dalam kaitannya dengan ini, Yūsuf al-Qarḍāwī, salah seorang ulama yang semasa dengan ulama-ulama syi’ah di atas, menegaskan bahwa “ruang yang didiamkan” (*minṭaqah al-‘afwi*) pada hakikatnya adalah “ruang kosong” (*minṭaqah al-farāg*) yang sengaja ditinggalkan oleh teks-teks hukum (*an-nuṣūṣ asy-syarī‘ah*) sebagai medan ijtihad para mujtahid guna mengisinya dengan aturan yang terbaik dan paling sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat dengan tetap memperhatikan tujuan umum dari syariat serta tetap dalam bingkai spirit dan ketentuan-ketentuan teksnya.¹⁶⁷

Asy-Syātibī mengategorikan diamnya Syāri‘ tersebut (*sukūt asy-Syāri‘*) ke dalam dua kategori, yaitu: *pertama*, kategori sesuatu yang didiamkan oleh Syāri‘ atau tidak dijelaskan hukumnya karena memang tidak ada wujudnya. Oleh karenanya, tidak perlu ada hukum yang menjelaskan karena tidak ada suatu kejadian apa pun yang memang membutuhkan hukum, seperti kejadian atau persoalan yang tidak terjadi di masa Rasulullah saw., tetapi terjadi setelahnya. Dalam konteks ini, ahli hukum perlu mengkaji dan memprosesnya sesuai dengan ketetapan hukum berdasarkan kategori keumuman dan prinsip-prinsipnya karena tidak ada satu kasus pun, ada

¹⁶⁶ *Al-mubāḥ* dan *al-‘afwu* dua istilah yang essensinya adalah sama. *Al-mubāḥ* adalah suatu hukum yang mana Allah (*asy-Syāri‘*) memberi kebebasan kepada para mukallaf untuk memilih antara mengerjakannya atau meninggalkannya, dan termasuk dalam hal ini adalah “sesuatu yang didiamkan” (*al-maskūt ‘anhu*). Sebagian ulama usul fikih berpandangan bahwa *mubāḥ* adalah hukum yang mana Allah (*asy-Syāri‘*) memberi kebebasan kepada para mukallaf untuk memilih antara mengerjakannya atau meninggalkannya, sementara *al-maskūt ‘anhu* (sesuatu yang didiamkan) dinamakan *al-‘afwu*. Lihat, Rāsyid Sa‘īd Syahwān, *ad-Ḍawābiṭ asy-Syar‘iyyah li as-Sawābiṭ wa al-Mutaghayyirāt fī al-Islām* (Amman, Jordan: Dār al-Mā’mūn li an-Nasyr wa at-Tauzī’, 2013), 25.

¹⁶⁷ Al-Qarḍāwī, *Madkhal li Dirāsah asy-Syarī‘ah*, 138. Lihat juga, Ibrāhīm an-Na’imah, *Uṣūl at-Tasyrī‘ ad-Dustūrī fī al-Islām* (Irak: Jumhūr al-‘Irāq, Diwān al-Waqfi as-Sunnī-Markaz al-Buḥūs wa ad-Dirāsāt al-Islām, 1430 H), 116.

hukumnya dalam syariat.¹⁶⁸ Menurut Muḥammad Bakr Ismā‘īl Ḥabīb, untuk menetapkan hukum dalam wilayah ini adalah dengan cara menarik kasus cabang pada asal yang telah ditetapkan oleh *syara’* dan mencari maksud atau tujuan *syara’* melalui mekanisme *ta’līl*, menyelami ‘*illat, maṣlahah mursalah*, maupun melalui mekanisme penalaran induktif (*istiqrā’*).¹⁶⁹

Kedua, kategori diamnya asy-Syāri‘ (*sukūt asy-Syāri‘*) dalam memberikan hukum atas persoalan yang sedang terjadi, sementara situasi dan kondisi menuntut adanya kepastian hukum. Diam dalam kategori ini berfungsi sebagaimana teks hukum di mana asy-Syāri‘ bertujuan supaya tidak ada penambahan atau pengurangan dalam teks hukum.¹⁷⁰ Dalam pandangan Bakr Ismā‘īl Ḥabīb, jika sampai terjadi penambahan dari ketentuan yang sudah ada, hal itu masuk kategori *bid‘ah*. Dikategorikan *bid‘ah* sebab tujuan mendiamkan tidak lain adalah untuk menghindari adanya penambahan (*az-ziyādah*) dan pengurangan (*an-nuqṣān*). Kategori kedua ini berkaitan dengan persoalan dalam ibadah, bukan transaksi sosial (*mu‘āmalah*), mengingat hukum asal dalam persoalan ibadah adalah berdasarkan apa yang telah disyariatkan dalam Al-Qur’an dan sunah.¹⁷¹

Bagaimanapun, menjadi jelas dari paparan tersebut di atas bahwa bagian dari realitas “ruang kosong” atau “ruang yang didiamkan” direpresentasikan oleh wilayah dari subjek yang ditinggalkan oleh syariat, yang mana syariat belum menentukan suatu aturan khusus untuk suatu hikmah tertentu atasnya, serta tugas legislasi dipasrahkan kepada ahli hukum untuk mengisinya dengan peraturan hukum dan perundang-undangan yang sesuai, menurut kemaslahatan yang ada yang ditetapkan oleh kondisi temporal dan spasial.

¹⁶⁸ Abū Ishāq Ibrāhīm Mūsā asy-Syātibī, *al-I’tisām*, ed. Aḥmad ‘Abd asy-Syāfi, juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2016), 268.

¹⁶⁹ Muḥammad Bakr Ismā‘īl Ḥabīb, *Maqāṣid asy-Syarī‘ah Ta’ṣīlan wa Taf’īlan* (Makkah: Dār at-Ṭibā‘ah al-Ḥadrā’, 2006), 154.

¹⁷⁰ Asy-Syātibī, *al-I’tisām*, 268-269.

¹⁷¹ Bakr Ismā‘īl Ḥabīb, *Maqāṣid asy-Syarī‘ah*, 157.

Konsep “ruang kosong” tersebut pada hakikatnya merupakan konsep yang sangat berkait berkelindan dengan kajian yang telah ada sebelumnya mengenai hal-hal yang konstan, tetap dan tidak berubah (*aş-şawābit*) serta hal-hal yang bisa berubah (*al-mutaghayyirāt*) dalam ajaran Islam. Dari kedua dimensi Islam ini, dimensi yang tetap (*aş-şawābit*) dan yang berubah-ubah (*al-mutaghayyirāt*), konsep atau teori ruang kosong (*naẓariyyah minṭaqah al-farāg*), termasuk dimensi Islam yang berubah-ubah yang berkait berkelindan dengan variabel kehidupan yang berkembang yang perkembangannya tunduk pada unsur ruang dan waktu.¹⁷²

Sementara itu, Falāḥ ‘Abd al-Ḥasan Hāsyim ad-Dūkhī menyatakan bahwa berdasarkan pandangan para ulama, hal-hal yang masuk ke dalam kategori bidang “wilayah kosong” di antaranya adalah: bidang *al-mubaḥāt* yang bersifat umum (*al-mubaḥāt bi ma‘na al-‘amm*), mendiagnosis masalah dan menetapkan skala prioritas (*tasykhīṣ al-mauḍū‘āt wa taḥdīd al-uluwiyyāt*), ketentuan hukum yang bersifat umum (*al-aḥkām al-‘āmmah*) yang subjeknya adalah masyarakat, persoalan transaksi sosial (*al-mu‘āmalah*) yang belum disebutkan hukumnya oleh *asy-Syārī*‘, dan persoalan-persoalan baru (*al-masā‘il al-mustaḥḍasah*) dalam kehidupan.¹⁷³ Adapun otoritas pengisian ‘ruang kosong’ ini diserahkan kepada penguasa atau para ahli hukum.

Salah satu ciri agama Islam sebagai hukum umum bagi umat manusia dan untuk segala ruang dan waktu, serta pendekatan yang tak lekang oleh waktu yang sejalan dengan ilmu dan perkembangan, adalah dengan meninggalkan “ruang

¹⁷² Falāḥ ‘Abd al-Ḥasan ad-Dūkhī, *Minṭaqah al-Farāg at-Tasyrī‘: Dirāsah Muqāranah li Ahammi al-‘Anāṣir al-Murūnah li at-Tasyrī‘ al-Islāmiyyah*, cet. ke-2 (Qum, Iran: Markaz al-Muṣṭafā al-‘Ālamī li at-Tarjamah wa an-Nasyr, 1437 H), 192.

¹⁷³ Falāḥ ‘Abd al-Ḥasan Hāsyim ad-Dūkhī, “Minṭaqah al-Farāg wa Isykalātuhā al-‘Aqidiyyah: Dirāsah fī al-Ab‘ād al-‘Aqidiyyah li Minṭaqah al-Farāg fī asy-Syarī‘ah al-Islāmiyyah,” *Majallah ad-Dalīl*, no. 7 (Syitā’, 2020), 72-78.

kosong” dalam syariat. Wilayah ini merupakan wilayah tanpa teks legislatif baik dalam Al-Qur’an maupun sunah yang berkenaan dengan hal-hal yang sifatnya mubah dan merupakan unsur yang dinamis dalam syariat. Menurut Ishāq al-Fayyād, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, hukum Islam adalah hukum yang abadi dan integral yang mampu memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia di setiap zaman, sepanjang sejarahnya dan selamanya. *Kedua*, pemerintahan yang dibentuk pada zaman Nabi adalah pemerintahan yang sederhana dengan segala organ dan pilarnya sehingga model pemerintahan ini jelas tidak cukup memadai untuk konteks saat ini karena pemerintahan saat ini telah berkembang dengan segenap komponen, lembaga, dan sistemnya yang mencakup aspek ekonomi, pendidikan, sosial, administrasi, keamanan, intelijen, tentara, polisi dan seterusnya. *Ketiga*, tidak mungkin membangun sistem pemerintahan yang tetap, seperti sistem ritual keagamaan (*‘ibādah*) sepanjang sejarah dan di setiap zamannya. Oleh karenanya, sistem pemerintahan perlu berubah seiring dengan perubahan waktu dan berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan publik dalam semua aspeknya. *Keempat*, penguasa (*waliyyu al-amr*) tidak diperkenankan mengubah dan mengeliminasi ketentuan hukum yang telah ditetapkan dalam syariat dari keharusan melaksanakan suatu kewajiban dan perintah untuk tidak melaksanakan perkara yang diharamkan, misalnya, dan sejenisnya.¹⁷⁴

Semua faktor di atas meniscayakan bagi pembuat hukum (*asy-Syāri‘*) untuk meninggalkan “ruang kosong” dalam syariat dan memberikan kewenangan yang luas kepada penguasa (*waliyyu al-amri*) di dalamnya untuk membuat peraturan hukum sekunder sesuai dengan kebutuhan keadaan dan kebutuhan waktu di setiap zaman guna merealisasikan kemaslahatan publik. Kewenangan dalam pengisian “ruang kosong” dengan

¹⁷⁴ Al-Fayyād, *al-Anmūzaj fī Manhaj al-Hukūmah*, 31-33.

peraturan hukum sekunder ini dapat dilakukan dengan cara mendeduksi elemen-elemen dinamis dari hukum-hukum Islam yang sifatnya umum. Proses ini, menurut Bāqir aṣ-Ṣadr sebagaimana dinukil Ḍabīḥ Allāh Na’īmīyān,¹⁷⁵ membutuhkan beberapa hal, *pertama*, ketersediaan pemahaman Islam tentang unsur-unsur yang tetap, pengetahuan yang mapan tentang batasan-batasan dan signifikansi umumnya (*dilālatuhā al-‘āmmah*). *Kedua*, adanya pengetahuan penuh atas sifat beberapa peraturan hukum yang berubah-ubah, seperti ekonomi, dan kajian yang cermat tentang tujuan yang diinginkan dari batasan-batasan umum tadi serta mekanisme untuk merealisasikannya. *Ketiga*, pemahaman hukum Islam tentang penguasa hukum (*al-ḥākim asy-syar’ī*) dan penguasa pemerintahan (*waliyyu al-amr*) dan ketersediaan kerangka kerja legislatif guna merealisasikan unsur dinamis itu dalam konteks kekuasaan penguasa yang sah dan sejauh mana mandat atau amanah yang diberikan kepadanya.

Dalam konsep Islam, otoritas pemerintah dalam mengisi “ruang kosong” yang mewujud dalam bentuk regulasi kepemilikan tanah sangat terkait dan dipengaruhi oleh konsep relasi antara agama (*dīn*) dan negara (*daulah*). Dalam domain agama, otoritas pemerintah ini didasarkan pada justifikasi landasan normatif-teologis Al-Qur’an surah An-Nisā’ ayat 59 tentang mandat politis yang dimiliki oleh “negara/pemerintah” (*ūli al-amr*) dalam mengatur kehidupan masyarakat.

Seluruh otoritas dan wewenang yang komprehensif dan umum yang diberikan kepada negara guna mengintervensi bidang kehidupan ekonomi masyarakat, dipersepsi sebagai salah satu prinsip fundamental yang penting dalam sistem ekonomi Islam. Dalam pandangan Bāqir aṣ-Ṣadr, intervensi negara ini tidak hanya terbatas sekadar mengadaptasi aturan hukum Islam yang permanen, tetapi juga mengisi wilayah kosong yang ada

¹⁷⁵ Ḍabīḥ Allāh Na’īmīyān, “Nazariyyah Mintāqah al-Farāg,” *al-Ijtihād*, 25 November 2017, diakses dari www.ijihadnet.net.

pada hukum Islam.¹⁷⁶ Oleh sebab itu, negara mendesak masyarakat agar mengadaptasi unsur-unsur statis dari hukum Islam di satu sisi. Lebih dari itu, di sisi lain, negara juga diharapkan mampu merancang unsur-unsur dinamis selaras dengan situasi dan kondisi guna mengisi kekosongan hukum yang ada guna merealisasikan kemaslahatan umum.

Yūsuf al-Qardāwī mengonstatir bahwa substansi *maṣlahah* yang dikehendaki oleh syariah Islam untuk ditegakkan dan dipelihara itu merupakan *maṣlahah* yang komprehensif, integral dan holistik, yang mencakup perpaduan *maṣlahah dunyawīyyah* dan *maṣlahah ukhrawīyyah*, *maṣlahah fardiyyah* dan *maṣlahah mujtama'īyyah*, *maṣlahah qaumiyyah khāṣṣah* dan *maṣlahah insāniyyah 'āmmah*. Atas dasar ini, Yūsuf al-Qardāwī menegaskan bahwa konsep *maṣlahah* yang menjiwai syariat Islam, tidak bisa diidentikkan dengan utilitarianisme dan pragmatisme, yang *notabene* berhulu pada paham materialisme.¹⁷⁷ Dengan kata lain, Yūsuf al-Qardāwī pada dasarnya ingin menekankan pentingnya nilai keseimbangan (*balance*) dalam konsep *maṣlahah*.

Dalam perspektif hukum Islam, kepemilikan tanah oleh seseorang dalam konteks individu dalam relasi sosial diakui secara yuridis. Pemilik tanah mempunyai kewenangan untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan keinginannya. Kewenangan manusia atas kepemilikan harta (*ḥaq al-milkiyyah/property right*), dalam kaidah filsafat hukum Islam, dilindungi dalam kerangka “perlindungan harta” (*ḥifẓ al-māl*) sebagai salah satu prinsip dasar dan kebutuhan yang fundamen bagi kehidupan (*al-kulliyāt al-khams/uṣūl al-khamsah*)¹⁷⁸. Lebih dari itu, kaidah *ḥifẓ al-māl* dalam konteks ini tidak saja dimaknai sebagai upaya perlindungan hak milik (*ḥurriyah at-*

¹⁷⁶ Aṣ-Ṣadr, *Iqtisādunā: Dirāsah Mauḍū'īyyah*, 680.

¹⁷⁷ Yūsuf al-Qardāwī, *Madkhal li Dirāsah asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (al-Qāhirah: Maktabah Wahbah, 1990), 62.

¹⁷⁸ 'Alī Ḥasaballāh, *Uṣūl at-Tasyrī' al-Islāmī* (Kuwait: Dār al-Ma'rifah, t.t.), 176.

tamlīk), tetapi juga sebagai upaya mewujudkan “keseimbangan ekonomi” (*at-tawāzun al-iqtisādī*).¹⁷⁹ Tanah, di samping sebagai instrumen ekonomis, juga mempunyai kandungan sosial humanistik.¹⁸⁰ Dengan demikian, pemilikan harta oleh seseorang haruslah disertai dengan pertanggungjawaban secara moral.

G. Metode Penelitian

Studi ini memusatkan kajian pada penelitian kepustakaan (*library research*) yang sifatnya deskriptif analitis dan berdasarkan kajian teks. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah **Perspektif Modern Hukum Islam** (*Modern Perspective on Islamic Law*).

Sebagaimana diketahui, hukum Islam merupakan sistem hukum utama ketiga di dunia setelah sistem *common law* dan *civil law*. Meskipun Al-Qur’an dan sunah adalah sumber asli hukum Islam, sistem hukum Islam telah mengembangkan banyak sumber, metodologi, dan perspektif lain.¹⁸¹ Seperti sistem hukum lainnya, sistem hukum Islam telah berkembang selama berabad-abad di berbagai masyarakat muslim, memasukkan budaya dan adat istiadat lokal serta beberapa keputusan negara yang terbatas (*some limited state decrees*) dan khususnya karya para ahli hukum Islam. Dalam ungkapan Joseph Schacht, “Hukum Islam mewakili kasus ekstrem dari ‘para ahli hukum’; di mana hukum Islam dibuat dan dikembangkan oleh para ahli; ilmu hukum, dan (para memangku otoritas lainnya)..., yang berperan sebagai legislator,

¹⁷⁹ Lihat Hasil-Hasil Munas Alim Ulama Konbes NU 2017, diakses dari <https://www.nu.or.id/archive/read/54/hasil-munas-dan-konbes-nu-2017>. Lihat juga Mohamad Shohibuddin, *Perspektif Agraria Kritis: Teori, Kebijakan dan Kajian Empiris* (Yogyakarta: STPN Press, 2018), 114-115.

¹⁸⁰ Q.S. Az-Zāriyāt [51]:19.

¹⁸¹ Ann Black, Hossein Esmaeili dan Nadirsyah Hosen, *Prolog of Modern Perspectives on Islamic Law* (UK-USA: Cheltenham, UK & Northampton, MA, USA, 2013), xi.

serta karya-karya ilmiah yang memiliki kekuatan hukum”.¹⁸² Oleh karena itu, hukum Islam bukanlah *common* atau *civil law* (hukum perdata), melainkan *juristic law*.¹⁸³

Secara tradisional, hukum Islam terdiri dari wahyu (*revelation*) dan akal (*reason*). Setelah wafatnya Nabi Muhammad (633 M), wahyu hukum Islam oleh Tuhan kepada umat manusia terhenti. Umat manusia sekarang mengandalkan akal untuk memahami hukum Islam. Menurut Muhammad Iqbal (w. 1937), umat manusia membutuhkan bimbingan para Nabi ketika itu, terutama saat dikendalikan oleh nafsu dan naluri. Namun, sejak zaman Nabi Muhammad, orang-orang mencapai kemampuan bernalar dan inilah mengapa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir (*khatam al-anbiyā'*). Iqbal menyimpulkan hakikat wahyu (*wahy*) adalah akal. Artinya, manusia sejak zaman Nabi terakhir harus melibatkan akal dan pengalaman manusia dalam mengembangkan sistem hukum Islam.¹⁸⁴ Dalam konteks inilah, kajian dalam disertasi ini juga mengkaji konsep penguasaan dan kepemilikan tanah dalam Islam dengan menggunakan perspektif kontemporer yang rasional (*rational*), etis (*ethical*), dan komparatif (*comparative*), yaitu Perspektif Modern Hukum Islam (*Modern Perspective on Islamic Law*).

Pendekatan rasional (*the rational approach*) dalam kajian ini merupakan upaya menuju pembaharuan pemikiran Islam tradisional klasik atas dasar pemikiran rasional. Tidak ada alasan teologis mengapa Islam harus bertentangan dengan hak asasi manusia, demokrasi, supremasi hukum, masyarakat sipil dan pluralisme. Kajian ini merupakan upaya, dalam konteks hukum Islam, untuk menunjukkan bahwa Islam, sebagai

¹⁸² Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (New York: Oxford University Press, 1964), 5.

¹⁸³ Gamal Moursi Badr, “Islamic Law: Its Relation to Other Legal Systems,” *The American Journal of Comparative Law* 26, no. 2 (February 1977): 187-198.

¹⁸⁴ Allama Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, ed. ke-2 (Pakistan, Lahore: Institute of Islamic Culture and Iqbal Academy, 1989), 99–116.

pandangan dunia agama, budaya, politik, etika, dan ekonomi, dapat menghadapi dunia yang modern dan terus berubah dengan cepat sebagaimana yang kita jalani saat ini. Perspektif ini bukan berarti mengabaikan wahyu dan nalar dalam pengertian klasik, melainkan menggunakan wacana hukum Islam klasik sebagai wahana untuk menanggapi beberapa masalah modern. Penulis tidak mengabaikan basis tekstual Islam klasik yang kaya karena kumpulan pengetahuan semacam itu memberikan alat yang berharga untuk menjawab pertanyaan dan masalah di dunia Islam kontemporer.¹⁸⁵ Pada saat yang sama, penulis tidak memperlakukan karya-karya klasik tersebut sebagai satu-satunya sumber otoritas, tetapi sebagai landasan pemikiran hukum (ijtihad) masing-masing ulama yang dikhususkan untuk mencapai solusi atas tantangan dalam konteksnya masing-masing.¹⁸⁶

Sementara itu, pendekatan etis (*the ethical approach*) dalam kajian ini berarti bahwa rasionalitas saja tidak cukup karena etika merupakan salah satu unsur inti ajaran Islam. Ajaran Islam tidak terbatas pada ibadah dan pada seperangkat nasihat moral. Sebagaimana Islam telah berurusan dengan hubungan manusia dengan Tuhan, Islam juga memberikan rambu-rambu terkait hubungan manusia satu sama lain. Ia, dalam berbagai bentuk, telah mengatur hak dan kewajiban individu juga. Menurut Ann Black, Hossein Esmaili, dan Nadirsyah Hosen, ada persimpangan antara hukum dan etika Islam sebagaimana tercermin dalam diskusi tentang ekonomi, hukum keluarga, hukum pidana dan perdebatan kontemporer.¹⁸⁷

Adapun pendekatan komparatif (*comparative approach*) dalam kajian ini dimaksudkan guna mengevaluasi praktik hukum Islam di berbagai waktu, wilayah, mazhab dan tempat, serta menghubungkan hukum Islam dengan sistem hukum lain

¹⁸⁵ Lihat, Ann Black, Hossein Esmaili, dan Nadirsyah Hosen, *Modern Perspectives on Islamic Law* (Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 2013), xi-xii.

¹⁸⁶ *Ibid.*, xii.

¹⁸⁷ *Ibid.*

(*common law dan civil law*). Semua pendekatan ini menyatukan perspektif modern tentang hukum Islam.¹⁸⁸ Ketiga pendekatan ini menyatukan perspektif modern hukum Islam sebagaimana dimaksud.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data penelitian kepustakaan (*library research*), yang meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Di antara sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa kitab hadis, kitab *as-Sīrah an-Nabawiyah* wa *as-Sīrah aṣ-Ṣaḥābah* semisal kitab *Tārīkh at-Ṭabarī*; *Tārīkh ar-Rusul wa al-Mulūk* karya Ibn Jarīr at-Ṭabarī, kitab *Bidayah wa an-Nihāyah* karya Ibn al-Kaṣīr, kitab *Tārīkh Madīnah Dimasyqī* karya Abū al-Qāsim ‘Alī ibn al-Ḥasan ibn Hibah Allāh ibn ‘Abdullāh asy-Syāfi‘ī, *Al-Kāmil fī at-Tārīkh: Tārīkh Ibn al-Aṣīr* karya Asy-Syaibānī, dan lain sebagainya. Di samping itu, penulis juga menggunakan beberapa kitab fikih yang membahas tentang tanah dan permasalahannya, seperti kitab *al-Kharrāj* karya Qāḍī Abū Yūsuf Ya‘qūb bin Ibrāhīm, kitab *al-Amwāl* karya Abū Ubaid al-Qāsim bin Salām, *Kitāb al-Kharāj* karya Yaḥyā ibn Ādam Al-Qurasyiyī, kitab *Kitāb al-Amwāl* karya Ḥamīd Ibn Zanjawiyah, kitab *al-Istikhrāj li Aḥkām al-Kharāj* karya Ibn Rajab al-Ḥanbalī, *al-Mugnī* karya Ibn Qudāmah al-Maqdisī, dan lain sebagainya. Sumber literatur Islam klasik ini digunakan untuk menggali data terkait dasar kepemilikan tanah dalam Islam. Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku literatur, jurnal, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik *dokumentasi*. Sumber data yang berhasil diinventarisir kemudian diidentifikasi serta diklasifikasikan dengan melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis sesuai dengan tujuan dan kebutuhan penelitian. Sementara itu, analisis

¹⁸⁸ *Ibid.*

data penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode analisis konten (*content analysis*)¹⁸⁹, yaitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha memunculkan karakteristik pesan yang dilakukan secara objektif dan sistematis.¹⁹⁰ Secara teknis, operasionalisasi metodologi di atas dilakukan melalui tiga tahap, yaitu, *pertama*, reduksi data dengan memasukkan dan memilih data; *kedua*, mendeskripsikan data secara sistematis; dan *ketiga*, interpretasi atau tafsir dan pemberian makna atas data.

H. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, sistematika penulisan penelitian ini penulis organisasikan ke dalam enam bab.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang menjadi kerangka acuan (*research design*) dalam proses penelitian. Pada bab ini dijelaskan latar belakang masalah dan perdebatan akademik seputar fokus penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori dan metode penelitian yang digunakan. Bab ini berfungsi sebagai pemandu proses penelitian, baik dari sisi substansi maupun teknis penelitian secara keseluruhan.

Bab II membahas tentang diskursus konsep hak milik dalam berbagai perspektif. Pembahasan ini merupakan bagian penting dari substansi penelitian yang berfungsi sebagai sebuah kerangka dasar bagi proses berpikir menuju penemuan solusi masalah. Pembahasan bab ini meliputi diskursus konsep hak milik, baik menyangkut batasan konseptualnya maupun institusionalisasinya. Bab ini juga menyajikan bahasan tentang diskursus hak milik dalam tiga perspektif: sosialis, kapitalis, dan Islam.

¹⁸⁹ Sujono dan Abdurrahman, *Metodologi Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 13.

¹⁹⁰ Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 84-85.

Selanjutnya, dalam bab III, penulis menyajikan pembahasan tentang dinamika sistem penguasaan dan kepemilikan tanah dalam hukum Islam. Pembahasan dalam bab ini meliputi empat subpembahasan utama, yaitu: sistem kepemilikan tanah sebelum Islam; penguasaan dan kepemilikan tanah di masa Islam yang meliputi: kebijakan lahan protektorat (*himā*) dan kebijakan distribusi tanah (*iqṭā'*).

Bab IV hadir untuk membahas berbagai implikasi otoritas negara dalam penguasaan tanah. Kajian bab ini meliputi pembahasan tentang penguasaan negara atas tanah, penguasaan negara atas tanah taklukan yang mencakup beberapa subpembahasan: tanah yang masuk wilayah Islam melalui jalur penaklukan; tanah yang masuk ke dalam wilayah Islam melalui jalur dakwah; dan tanah yang masuk ke pangkuan Islam lewat jalur perjanjian (*ard aṣ-ṣulh*). Bab ini juga menyajikan bahasan tentang pelimpahan otoritas hak kepemilikan negara atas tanah kepada pihak lain, dan ditutup dengan konsepsi tentang hak pengelolaan tanah oleh negara.

Bab V hadir guna membedah persoalan-persoalan yang lebih substantif, yakni seputar nalar kepentingan umum dan intervensi negara terhadap kepemilikan tanah individu. Terdapat tiga pembahasan krusial dalam bab ini. *Pertama*, kebijakan pengambilalihan tanah individu oleh negara untuk kepentingan umum. *Kedua*, pembahasan terkait kebijakan pengambilalihan tanah individu oleh negara untuk kepentingan umum (*at-ta'mīm*) yang mencakup subpembahasan: definisi dan historisitas konsep *at-ta'mīm*; pandangan hukum ulama terkait konsep *at-ta'mīm*; implementasi konsep *at-ta'mīm* dalam sejarah hukum Islam; dan upaya meninjau ulang konsep *at-ta'wīd* (kompensasi). *Ketiga*, gagasan reformulasi nalar kepentingan umum dalam kebijakan *at-ta'mīm* yang mencakup: *al-maṣlahah* sebagai basis moral kebijakan publik; rasionalisasi kepentingan umum dan kaidah pembandingan; dan reformulasi konsep *al-maṣlahah*. Bab VI merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan-kesimpulan temuan penelitian dan implikasi penelitian serta catatan rekomendasi.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari eksplorasi panjang dalam bab-bab sebelumnya berikut analisis atas konsep otoritas penguasaan, pemilikan dan konsep *at-ta'mīm* dalam perspektif modern hukum Islam, penulis dapat menarik beberapa hal penting sebagai kesimpulan, di samping saran dan implikasi teoretis dari penelitian ini.

Pertama, dalam perspektif hukum Islam, hubungan antara negara dan tanah (sumber daya agraria) mewujud dalam bentuk hubungan penguasaan dan bukan hubungan kepemilikan karena yang menjadi landasan pokok kehidupan dalam konsepsi Islam adalah bangsa (*anna al-ummah hiya al-aṣl*), bukan negara itu sendiri. Oleh sebab itu, otoritas penguasaan negara atas tanah (sumber daya agraria) bukanlah otoritas yang lahir dengan sendirinya dari negara, melainkan berasal dari hak bangsa (*ummah*) yang kemudian dilimpahkan kepada negara untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Keberadaan negara sebagai representasi dari bangsa (*ummah*) atau sebagai institusi publik merupakan sarana (*al-wasīlah*) yang berfungsi untuk mengelola, mengatur, dan/atau menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan sumber daya agraria guna merealisasikan kepentingan umum dan kemakmuran bangsa sebagai *ultimate-goal* (*al-gāyah*)-nya.

Fitur konsep penguasaan dan kepemilikan tanah dalam perspektif hukum Islam bersifat komunalistik-religius yang penguasaannya ada pada kendali otoritas negara dengan menambahkan bobot dan nilai spiritualitas dan moralitas agama (teologis-religius) sebagai pembeda dari sistem kepemilikan paham sosialisme sekuler. Paling tidak terdapat dua argumentasi yang penulis ajukan untuk memperkuat konsepsi tersebut. *Pertama*, argumentasi yuridis-normatif

berupa teori “zona kosong” (*naẓariyyah minṭaqah al-farāg*). Negara (*waliyyu al-amr*) dengan otoritas yang dimilikinya dapat mengisi “ruang kosong” dari doktrin hukum ekonomi Islam sesuai dengan kebutuhan zaman dan cita-cita umum ekonomi Islam, yaitu keadilan sosial. *Kedua*, argumentasi historis berupa bukti-bukti sejarah terkait gagasan reformasi hukum penguasaan dan kepemilikan tanah yang mewujud dalam berbagai kebijakan pemerintah, mulai era Nabi saw. hingga era para khalifah sesudahnya, melalui instrumen regulasi kebijakan “distribusi tanah” (*iqṭā'*) dan “lahan protektorat” (*ḥimā*) dalam kerangka menciptakan stabilitas dan keseimbangan sosial (*social balance*).

Kedua, dinamika penguasaan tanah (sumber daya agraria) oleh negara dalam hukum Islam bermula pada saat Nabi Muhammad saw. hijrah ke Madinah dan komunitas muslim mewujud menjadi sebuah negara dalam suasana wilayah religio-politik yang plural, yaitu Negara Madinah. Penguasaan negara atas tanah pada umumnya melalui kegiatan dakwah yang terejawantahkan dalam wujud ekspansi wilayah dakwah, baik melalui jalan damai dengan perjanjian (*bi aṣ-ṣulḥ*) maupun melalui misi militeristik dengan jalan peperangan (*bi al-faṭḥ*). Misi militeristik dengan jalan peperangan yang dilakukan oleh Nabi saw. dan para sahabatnya pada dasarnya tidak didasari semata-mata oleh motif-motif duniawi, semisal motif ekonomi dan politik, melainkan lebih didasarkan pada misi religiositas (dakwah islamiah). Perluasan cakupan wilayah dakwah ini pada gilirannya menyisakan implikasi-implikasi lain di luar implikasi agama, semisal implikasi sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang notabene merupakan fakta yang tidak bisa terelakkan yang harus dihadapi umat Islam pada saat itu.

Ketiga, dalam konsepsi hukum Islam, negara merupakan institusi publik yang memiliki otoritas untuk mengelola masyarakat suatu negara berikut aset-asetnya. Atas dasar inilah, Islam memberikan otoritas berupa hak sekaligus

kewajiban kepada kepala negara guna menegakkan nilai-nilai spiritual agama (*li ḥirāsah ad-dīn*) dan mengatur pranata sosial (*li ḥirāsah ad-dunyā*), mengatur relasi antarindividu, individu dengan masyarakat, serta relasi individu dan masyarakat dengan negara. Dalam konteks pengaturan fungsi sosial tanah, pemerintah (*imām*) memiliki otoritas guna membuat paket kebijakan berupa regulasi pertanahan dalam kerangka mengatur dan menata penggunaan tanah untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*al-maṣlahah al-‘āmmah*). Implikasi logis dari konsepsi otoritas penguasaan negara atas tanah ini telah memosisikan negara sebagai institusi publik yang memiliki berbagai kewenangan atau otoritas terhadap tanah. Di antara otoritas sebagaimana dimaksud adalah 1) otoritas penguasaan tanah oleh negara; 2) otoritas pelimpahan hak penguasaan negara kepada pihak lain; 3) otoritas pengelolaan tanah oleh negara; dan 4) otoritas pembatasan, bahkan pencabutan, hak kepemilikan rakyat atas tanah untuk kepentingan umum.

Keempat, kebijakan pengambilalihan kepemilikan tanah individu oleh negara menjadi kepemilikan publik (*at-ta’ mīm*) pada dasarnya merupakan konsekuensi logis dari konsepsi Islam tentang kepemilikan harta (tanah) yang pada hakikatnya merupakan suatu fungsi sosial (*wazīfah ijtimā’iyyah*). Konsepsi ini telah memberi ruang bagi penguasa atau pemerintah untuk mengisi zona vakum (*miṭṭaqah al-farāg*) atau kekosongan hukum dengan membuat suatu paket regulasi berupa kebijakan intervensi negara atas kepemilikan tanah individu. Intervensi ini bisa berupa kebijakan *at-ta’ mīm*. Paket regulasi berupa kebijakan *at-ta’ mīm* oleh negara ini harus didasarkan pada prinsip merealisasikan kepentingan umum (*al-maṣlahah al-‘āmmah*). Konsepsi ini sekaligus mengukuhkan pandangan yang menyatakan bahwa karakter umum dari legislasi Islam bersifat kolektif-kolegial, bukan personal-individual (*aṭ-ṭābi’ al-‘ām li at-tasyrī’ al-Islām ṭābi’ un jamā’ iyyun lā fardiyyun*).

Nalar kepentingan umum (*al-maṣlahah al-‘āmmah*) yang dijadikan dasar kebijakan *at-ta’mīm* sebagaimana dimaksud harus dipersepsi dengan formulasi nalar sebagai berikut: *pertama*, keberlakuan kaidah yang menyatakan bahwa “kepentingan umum harus lebih diprioritaskan dari pada kepentingan individu” (*al-maṣlahah al-‘āmmah muqaddamah ‘alā maṣlahah al-khāṣṣah*) tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi hanya berlaku pada fakta bahwa kedua kepentingan tersebut berada pada kualifikasi derajat yang setara. Artinya, kaidah ini baru bisa diimplementasikan manakala kedua kepentingan yang saling berhadap-hadapan tersebut berada pada derajat yang seimbang. Dalam konteks ini, sangat logis jika kepentingan umum lebih diprioritaskan dari pada kepentingan individu sebab perhatian dan kepedulian syariat terhadap kepentingan umum jauh lebih besar porsinya daripada perhatian syariat atas kepentingan pribadi.

Mengingat sistem sosial Islam didasarkan pada konsepsi masyarakat muslim dengan sistem sosial yang terintegrasi dan dibangun berdasarkan prinsip kesalingan (*‘alā mabda’ at-tabādul*), pada saat yang bersamaan Islam juga membebaskan kompensasi (*ta’wīd*) yang adil dan humanis yang wajib diberikan oleh pihak yang memprioritaskan kepentingan umum kepada pihak yang kepentingannya dikalahkan. Kompensasi yang adil, sepadan dan manusiawi, tidak saja menjangkau kalkulasi fisik-material, melainkan juga harus mempertimbangkan kalkulasi nonfisik berupa hak atas makna *sosio-religio-psikologis* rakyat yang menjadi korban.

Kedua, kebijakan *at-ta’mīm* tersebut harus memenuhi dua prinsip dasar, yaitu (1) asas kebutuhan dan asas manfaat (*utility, taḥqīq li al-maṣlahah*); (2) asas kesepakatan dan kesepahaman (*mutual agreement and understanding; al-musyāwarah*). *Ketiga*, kemaslahatan dapat dijadikan argumentasi hukum (*ḥujjiyyah al-istiṣlāh*) manakala kemaslahatan itu memenuhi beberapa persyaratan: (1) *maṣlahah* itu harus sejalan dengan tujuan ditetapkannya

hukum Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta; (2) *maṣlahah* tersebut harus berkategori *ḍarūriyyah* atau *ḥājiyyah* yang menempati kedudukan *ḍarūriyyah*; (3) khusus terkait kasus tertentu, *maṣlahah* itu harus beratribut umum dan menyeluruh (*kulliyyah*); dan (4) *maṣlahah* harus bersifat pasti (*qaṭ'īyyah*).

Keempat, kepentingan umum harus dirumuskan oleh para ahli yang berkompeten di bidangnya (*ahl al-khubrah*), demikian juga pihak yang merumuskan kriteria kepentingan umum beserta prosedur untuk menerapkannya haruslah pihak-pihak yang memenuhi kualifikasi, baik kualifikasi moral maupun profesional. *Kelima*, mengingat kepentingan umum itu bersifat dinamis dan konsensus (*ijmā'*) merupakan salah satu metode untuk memperoleh kepentingan umum, *ijmā'* harus dipersepsi sebagai konsep yang hidup dan dinamis (*living ijmā'*) yang berorientasi pada masa kini dan masa yang akan datang, bukan “barang” masa lalu yang sudah selesai.

B. Implikasi Penelitian

Dari beberapa temuan penelitian ini, terdapat beberapa poin penting yang perlu digarisbawahi sebagai implikasi penelitian sekaligus sebagai rekomendasi, baik pada ranah akademik maupun kebijakan guna pengembangan hukum pertanahan Islam (fikih agraria).

1. Kontinuitas dan Perubahan dalam Hukum Keagrariaan Islam

Penelitian ini hanya memfokuskan pada praktik penguasaan dan kepemilikan tanah mulai era risalah hingga era khilafah (*al-khulafā' ar-rāsyidūn*) serta mengangkat isu utama tentang konsep kebijakan nasionalisasi kepemilikan tanah rakyat oleh negara (*at-ta'mīm*). Kajian disertasi ini setidaknya menunjukkan beberapa kontribusi penting. *Pertama*, para ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam memersepsi konsep penguasaan dan kepemilikan tanah di era Nabi saw. dan para khalifah sesudahnya (*al-khulafā' ar-*

rāsyidūn) sehingga melahirkan pluralitas pandangan hukum di kalangan mereka. Begitu juga halnya dengan konsepsi *atta'mīm*. Pluralitas pandangan ini semakin menguatkan pepatah tradisional dalam keagrariaan Islam yang menyatakan, “Tanah itu berbeda (statusnya, sejarahnya) dari satu jengkal kaki ke jengkal kaki lainnya” (*al-arḍ bitifriqi ‘alā syibr; land differs from one foot of ground to the next*).¹ Artinya, memang terdapat heterogenitas sejarah tanah, dan sejarah agraria itu sendiri, yang tidak dapat direduksi, boleh jadi karena tumpang-tindihnya formasi sosial yang terjadi pada tanah tersebut.

Kedua, kajian disertasi ini juga sekaligus menguatkan tesis Ira M. Lapidus yang menyatakan bahwa pola-pola institusional masyarakat yang khas dalam komunitas Islam bermula dari institusi yang telah lama berkembang di dalam masyarakat Mesopotamia kuno. Konstelasi struktur keagamaan, politik dan kekerabatan serta kesukuan yang diciptakan dalam negara-kota dan imperium Mesopotamia telah menyediakan basis bagi evolusi masyarakat Timur tengah di masa kemudian, baik sebelum maupun selama periode Islam, dan kemudian terjadilah reproduksi atau penyebaran dari Timur Tengah kepada masyarakat Islam di wilayah lainnya. Dengan kata lain, “masyarakat Islam Timur Tengah dibangun dari institusi yang telah mapan sebelumnya dengan

¹ Pepatah tradisional keagrariaan Islam ini juga penulis sajikan dalam bab III dalam disertasi ini. Lihat juga Muḥammad Tauffiq Syaḡir Na'ūm Bakrī, *Amsāl al-'Awām fi Miṣraw a as-Sūdān wa asy-Syām* (Mesir: Maṭba'ah al-Ma'ārif, 1894), 61; Anīs Furayḡah, *Modern Lebanese Proverbs Collected at Rās Al-Matn, Lebanon; Collated, Annotated and Translated to English*, vol. 1 (Lebanon: American University of Beirut, 1953), 36; 'Abd ar-Raḡmān Tikrītī, *al-Amsāl al-Baḡhdādiyyah al-Muqāranah: Muqāranah ma'a Amsāl Aḡada 'Asyara Qaṭran 'Arabiyyan* (Baḡhdād: Maktabah al-Muṣannā, 1966), 3-4; Māzin Maḡmūd Syawwā', *Mausū'ah al-Amsāl asy-Sya'biyyah al-Faliṣṭīniyyah*, vol. 1 (Kuwait: Dār as-Salmā li an-Nasyr wa at-Tauzī', 1966), 166; Ḥasan as-Sa'āti, *Ḥikmat Lubnān: Taḡlīl Ijtimā'ī li Amsāl lihi* (Beirūt: Dār an-Naḡḡah al-'Arabiyyah, 1971), 18; Tarif Khalidi, *Land Tenure and Social Transformation in the Middle East* (Lebanon: American University of Beirut, 1984), vii.

sebuah corak dan identitas kultur islami.”² Dalam konteks ini, penulis merujuk pada institusi ekonomi, utamanya terkait istilah teknis hukum Islam *ḥimā* dan *iqtā’* yang memiliki asosiasi-asosiasi konotatif dan produk linguistik budaya dan doktrin sosial era sebelum Islam. Demikian halnya dengan istilah *kharāj* yang mengikuti sistem Arab pra-Islam era Sasania yang disebut sistem *‘ala al-misāḥah* dan identik dengan istilah *ṭasq*.³ Dengan demikian, meminjam teori John Obert Voll⁴ dan Wael B. Hallaq,⁵ terdapat proses gerak/kontinuitas (*continuity*) dan proses perubahan (*change*) dalam konsepsi hukum Keagrariaan Islam.

2. Keseimbangan antara Ruang Privat dan Ruang Publik dalam Pembangunan Norma-Norma Hukum Agraria

Kajian ini juga menunjukkan bahwa salah satu pokok persoalan yang selalu menjadi perdebatan hangat di kalangan para filsuf, agamawan, sosiolog hingga politikus adalah persoalan menyangkut keseimbangan antara individu dan masyarakat dalam membangun norma-norma hukum tentang hak untuk memiliki, menggunakan, dan mengalihkan aset, dan tanah pada khususnya. Hampir setiap sistem hukum, dengan latar belakang bentuk kontrol politik tertentu, keyakinan agama atau moral, dan struktur sosial ekonomi, telah bergulat dengan kebutuhan untuk menggambarkan batas-batas antara kontrol swasta dan publik atas tanah.

Kompleksitas yang melekat dalam upaya tersebut berkaitan dengan fakta bahwa mengidentifikasi “individu” dan “komunitas” untuk keperluan menarik garis tersebut dapat berubah dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ke tempat

² M. Ira Lapidus, *A History of Islamic Societies*, ed. ke-3 (New York: Cambridge University Press, 2014), 1.

³ Lihat kajian dalam disertasi ini, khususnya bab III.

⁴ John Obert Voll, *Continuity and Change in the Modern World* (Boulder: West View Press, 1982).

⁵ Wael B. Hallaq, *Authority, Continuity, and Change in the Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2001).

lainnya. Di satu sisi, banyak masyarakat sepanjang sejarah telah melihat keluarga, klan, atau kelompok orang lain sebagai subjek inti hukum (*as the core subject of law*). Di sisi lain, promosi tujuan “publik” atau “sosial” sering kali memisahkan diri dari suatu konsep “negara” atau “pemerintah”. Konsep-konsep yurisprudensi agama, moral, atau bahkan kontemporer yang dikembangkan oleh perjanjian-perjanjian dan pengadilan-pengadilan supranasional mungkin berbeda dari cara-cara pemerintah negara bagian tertentu dapat mengidentifikasi kepentingan-kepentingan “publik”, “sosial”, atau “komunitas”. Dengan demikian, tantangan untuk menggambarkan batas-batas antara individu dan masyarakat dalam hukum pertanahan dapat dilihat sebagai titik fokus untuk perdebatan yang lebih luas, di setiap masyarakat sepanjang sejarah, tentang keseimbangan yang tepat antara ruang privat dan publik.

Wawasan tersebut juga sekaligus menjelaskan pertanyaan apakah perdebatan tentang hukum pertanahan (*land law*) dan batasan hak atas properti (*limits on the right to property*) telah berubah secara substansial di era wacana hak asasi manusia saat ini, sementara situasinya mungkin berbeda untuk ketentuan lain yang termasuk dalam perjanjian hak asasi manusia dan kasus hukum tertentu. Ini jelas bukan untuk mengatakan bahwa titik fokus atau ayunan pendulum antara kepentingan pribadi dan publik (*the swing of the pendulum between private and public interests*) tidak berubah lintas era atau lintas batas. Akan tetapi, satu klaim dapat dinyatakan dengan penuh keyakinan bahwa “Yurisprudensi pengadilan hak asasi manusia internasional saat ini menggunakan terminologi baru, seperti “keseimbangan yang adil” (*fair balance*) dan “proporsionalitas” (*proportionality*),⁶ tetapi pada

⁶ Andrew Legg, *The Margin of Appreciation in International Human Rights Law Deference and Proportionality* (London: Oxford University Press, 2012), 188; Alastair Mowbray, *Cases, Materials, and Commentary on the European Convention on Human Rights* (Oxford: Oxford University Press, 2021), 594.

intinya, konsep-konsep hukum ini bergantung pada premis-premis yang sangat mendasar yang memandu para pembuat undang-undang, konstitusi, dan kasus peradilan sepanjang sejarah manusia.

Tanah terus menjadi sumber daya yang tidak ada bandingannya dalam hal menyatukan dilema tentang peran kemanusiaan, pembenaran keberadaan pemerintah, dan tempat yang berbeda dari individu dalam masyarakat. Tidak ada dua budaya yang memberikan jawaban yang sama. Tidak ada dua agama yang mengajarkan prinsip yang sama persis. Tidak ada dua pengadilan yang mengikuti yurisprudensi yang sama persis. Namun, mereka semua berurusan dengan serangkaian pertanyaan mendasar yang sama dan khususnya terkait keseimbangan inheren yang perlu dicapai, dalam konteks hukum pertanahan, antara kepentingan individu dan masyarakat.” Dalam konteks inilah, gagasan formulasi nalar kepentingan umum dalam kajian disertasi ini paling tidak dapat memberikan sedikit suntikan kontribusi dalam kerangka pengembangan kajian hukum pertanahan Islam (fikih agraria). Oleh sebab itu, menarik untuk dikaji, misalnya bagaimana kerangka dan praktik hukum pertanahan, sistem kepemilikan tanah dan kebijakan reformasi undang-undang kepemilikan tanah di berbagai negara Islam, utamanya dalam memformulasikan titik keseimbangan antara ruang privat dan ruang publik tersebut.

YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

I. Sumber Kitab Hadis

- ‘Alī, al-‘Allāmah Sirāj ad-Dīn ‘Umar ibn ibn Aḥmad al-Ma‘rūf bi Ibn al-Mulaqqin. *Mukhtaṣar Istidrāk az-Ẓahabī ‘alā Mustadrak Abī Abdullāh al-Ḥākim*. Ar-Riyāḍ: Dār al-‘Āṣimah, 1411 H.
- ‘Ābādī, Abū aṭ-Ṭayyib Muḥammad Syams al-Ḥaqq al-‘Azīm. *‘Aun al-Ma‘būd Syarḥ Sunan Abī Dāwud*. Ed. ‘Abd ar-Raḥmān Muḥammad ‘Uṣmān. Juz 8 dan 9. Cet. ke-2. Al-Madīnah al-Munawwarah: al-Mamlakah al-‘Arabiyyah as-Su‘ūdiyyah, 1968.
- Abū Ja‘far, ‘Abd al-Mālik ibn Salamah. *Syarḥ Ma‘āni al-Aṣār*. Juz 3. Beirūt: al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1399 H.
- Al-‘Ainī, al-‘Allāmah Badr ad-Dīn Abī Muḥammad Maḥmūd ibn Aḥmad. *‘Umdah al-Qārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Ed. ‘Abd Allāh Maḥmūd Muḥammad ‘Umar. Juz 15. Cet. ke-1. Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001.
- Al-‘Asqalānī, Abū al-Faḍl Syihāb ad-Dīn Aḥmad ibn ‘Alī ibn Muḥammad ibn Ḥajar. *Talkhīṣ al-Kabīr fī Takhrīj Aḥādīṣ ar-Rāfi‘ī al-Kabīr*. Juz 3. Beirūt: Mu’assasah Qurṭubah, 1995.
- . *Faṭḥ al-Bārī bi Syarḥ al-Bukhārī*. Vol. 14. Mesir: Maktabah wa Maṭba‘ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1959.
- . *Faṭḥ al-Bārī bi Syarḥi Ṣaḥīḥ al-Imām Abī ‘Abdillāh ibn Ismā‘īl al-Bukhārī*. Ed. ‘Abd al-Qādir Syaibah al-Ḥamd. Juz 4. Riyāḍ: Fahrasah Maktabah al-Mulk Fahd al-Waṭaniyyah Aṣnā’ an-Nasyr, 2001.
- . *Faṭḥ al-Bārī*. Juz 5. Beirūt: Dār al-Ma’rifah, 1379 H.
- Al-‘Irāqī, Aḥmad ibn ‘Abd al-Raḥīm ibn. *Kitāb al-Mustafād min Mubḥamāt al-Matn wa al-Isnād*. Juz 2. al-Qāhirah: Dār al-Wafā’ li al-Nasyr wa al-Tauzī’, 1994.

- Al-A'zamī, Muḥammad Diyā' ar-Raḥmān. *Al-Minnat al-Kubrā: Syarḥ wa Takhrīj as-Sunan aṣ-Ṣugrā li al-Ḥāfiẓ al-Baihaqī*. Juz 4. Cet. ke-1. Ar-Riyād: Maktabah ar-Rusyd, 2001.
- Al-Anṣārī, Sirāj ad-Dīn Abī Hafṣ 'Umar bin 'Alī bin Aḥmad asy-Syāfi'ī al-Ma'rūf bi Ibn al-Mulaqqin. *Al-Badr al-Munīr fī Takhrīj al-Aḥādīs wa al-Āsār al-Wāqī'ah fī asy-Syarḥ al-Kabīr*. Ed. Abī Ṣafiyyah Majdī ibn as-Saiyid ibn Amīn wa gairuhu. ttp.: Dār al-Hijrah li an-Nasyr wa at-Tauzī', t.t.
- . *Al-Badr al-Munīr fī Takhrīj al-Aḥādīs wa al-Āsār al-Wāqī'ah fī Syarḥ al-Kabīr*. Ed. Abī Ṣāfiyyah Majdī ibn as-Sayyid ibn Amīn wa Abī Muḥammad 'Abd Allāh ibn Sulaimān. Juz 7. Al-Qāhirah: Dār al-Hijrah li an-Nasyr wa at-Tauzī' t.t.
- Al-Asybīlī, 'Abū Muḥammad 'Abd al-Ḥaqq ibn 'Abd ar-Raḥman ibn 'Abd Allāh al-Aẓarī. *Al-Aḥkām al-Wuṣṭā min Ḥadīs an-Nabī saw*. Ed. Ḥamdī as-Salafī wa Ṣubḥī as-Samarā'ī. Ar-Riyād: Maktabah ar-Rusyd, 1995.
- Al-Baihāqī, Abū Bakar. *Sunan al-Baihāqī al-Kubrā*. Juz 5 dan 6. Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dār al-Bāz, 1994.
- . *As-Sunan al-Kubrā*. Ed. Muḥammad 'Abd al-Qādir 'Aṭā. Juz 6 dan 9. Cet. ke-3. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- . *Ma'rifah al-Sunan wa al-Āsār*. Juz 9. Al-Qāhirah: Dār al-Wafā' li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 1991.
- Al-Banā, Aḥmad 'Abd ar-Raḥmat. *Al-Fatḥ ar-Rabbānī li Tartīb Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal al-asy-Syaibānī wa Ma'ahu Bulūg al-Ma'ānī min Asrār Fatḥ ar-Rabbānī*. Juz 1. Cet. ke-2. Beirut: Dār al-Iḥyā' at-Turāš al-'Arabī, t.t.
- Al-Bukhārī, Imām 'Abd Allāh Muḥammad bin Ismā'il. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ibn Kaṣīr, 2002.
- Ad-Dāruquṭnī, Abū Ḥasan. *Sunan ad-Dāruquṭnī*. Juz 4. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1966.

- Ad-Dardirī, Aḥmad. *Asy-Syarḥ aṣ-Ṣagīr*. Juz 4. Al-Qāhirah: Dār al-Ma'rifah, t.t.
- Al-Ḥamdī, 'Abd al-Qādir Syaibah. *Fiqh al-Islām Syarḥ Bulūg al-Marām min Jam'i Adillah al-Aḥkām li al-Ḥāfiẓ Ibn Ḥajar al-'Asqalānī raḥimahu Allāh*. Juz 6. Cet. ke-1. Al-Madīnah al-Munawwarah: Maṭābi' ar-Rasyīd, 1982.
- Al-Ḥasanī, al-Imām al-Ḥāfiẓ al-Muḥaddiṣ Abū al-Faiḍ Aḥmād ibn Muḥammad ibn aṣ-Ṣiddīq al-Ghumārī. *Al-Hidāyah fī Takhrīj Aḥādīṣ al-Bidāyah*. Ed. 'Adnān 'Alī Syallāq. Juz 8. Beirut: 'Ālam al-Kutub, 1987.
- Al-Ḥasīnī, Imām Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Muḥammad bin Yūsuf as-Sanūsī. *Ṣaḥīḥ Muslim ma'a Syarḥihi wa Ikmāl al-Mu'lim wa Syarḥihi Mukammil Ikmāl al-Akmāl*. Juz 5. Cet. ke-1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1328 H.
- Al-Haiṣamī, Al-Ḥāfiẓ Nūr ad-Dīn 'Alī ibn Abī Bakar. *Bugyah ar-Rā'id fī Tahqīq Majma' az-Zawā'id wa Manba' al-Fauā'id*. Ed. Muḥammad 'Abdullāh ad-Darwīs. Juz 3. Beirut: Dār al-Fikr li aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī', 1994.
- Ibn Ḥanbal, Aḥmad. *Al-Musnad li al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*. Vol. 1. ttp: Dār al-Fikr, t.t.
- Ibn Abī Syaibah, Abū Bakar 'Abd Allāh bin Muḥammad al-'Abasī. *Al-Kitāb al-Muṣannif fī al-Aḥādīṣ wa al-Aṣār*. Juz 4. Beirut: Dār al-Tāj, 1989.
- Ibn al-Aṣīr, Majd al-Dīn al-Mubārak ibn Muḥammad. *Kitāb an-Nihāyah fī Garīb al-Hadīṣ wa al-Aṣar*. Vol. 3. Al-Qāhirah: 'Īsā al-Bābī, 1963.
- Ibn al-Ḥajjāj, Imām Abū Ḥusain Muslim al-Qusyairī an-Naisābūrī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz 1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.
- Ibn Ḥajjāj, Imām Muslim al-Qusyairī an-Naisābūrī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz 4. ttp.: Dār Iḥyā' at-Turās al-'Arabī al-Bābī al-Ḥalibī, t.t.
- Ibn al-Jārūd, al-Ḥāfiẓ Abū Muḥammad 'Abdullāh. *Al-Muntaqā min as-Sunan al-Musnadah 'an Rasūlillāh saw*. Beirut: Dār

- al-Jinān li aṭ-Ṭibā'ah li an-Nasyr wa at-Tauzī' -Mu'assasah al-Kutub as-Šaqāfiyyah, 1988.
- Ibn al-Jauzī, 'Abd al-Raḥman 'Alī. *Jāmi' al-Masānid*. Ed. 'Alī Ḥusain. Juz 3. Ar-Riyād: Maktabah al-Rusyd, 2005.
- Ibn al-Munzir, Abī Bakar Muḥammad bin Ibrāhīm an-Naisābūrī. *Al-Ausat fi as-Sunan wa al-Ijmā' wa al-Iktilāf*. Juz 11. Ar-Riyād: Dār Ṭayyibah li an-Nasyr wa at-Tauzī', 1999.
- Ibn Kašīr, al-Imām al-Ḥāfiẓ 'Imād ad-Dīn Abī al-Fadā' Ismā'il bin 'Umar al-Syāfi'ī ad-Dimasyqi. *Musnad al-Fārūq Amīr al-Mu'minīn Abī Ḥaḥsin 'Umar ibn al-Khaṭṭāb ra wa Aqwāluhu 'alā Abwāb al-'Ilmi*. Juz 1. Al-Qāhirah: Dār al-Wafā' li aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī', 1991.
- Ibn Mājah, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Yazī d. *Sunan Ibn Mājah*. Riyād: I'dād Bait al-Afkār ad-Dauliyyah, t.t.
- Al-Kāndahlawī, al-Imām al-Muḥaddiṣ Muḥammad Zakariyyā al-Madanī. *Aujaz al-Masālik ilā Muwaṭṭā' Mālik*. Ed. Taqiyy ad-Dīn am-Nadauī. Juz 14. India: Markaz asy-Syaikh Abī Ḥasan an-Nadauī li al-Buḥūs wa ad-Dirāsāt al-Islāmiyyah, 2003.
- Khalīl, Muḥammad Jawwād. *Ṣaḥīḥ Muslim: Baina al-Qadāsah wa al-Maudū'iyyah*. Juz 2. Beirut: Mu'assasah al-Balāg, 2009.
- Al-Ma'āfirī, Abū Bakar Muḥammad bin 'Abdillāh ibn al-'Arabī. *Al-Qabas fi Syarḥ Muwaṭṭā' Mālik bin Anas*. Ed. Muḥammad Walad Karīm. Juz 3. Cet. ke-1. Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1992.
- Mālik, Ibn Anas al-Imām. *Al-Muwaṭṭā'*. Ed. Muḥammad Fuād 'Abd al-Bāqī. Juz 2, Al-Qāhirah: Dār al-Hadīṣ, t.t.
- Al-Mubārakfūrī, Faḍīlah al-Syaikh Ṣaffiyyual-Raḥmān. *Minnah al-Mun'im fi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Muslim: al-Musnad aṣ-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min al-Sunani bi Naql al-'Adli 'an al-'Adli 'an Rasūlillāh saw*. Juz 3. Cet. ke-1. Ar-Riyād: Dār as-Salām, 1999.

- Al-Mubārakfūrī, Abū al-‘Alī Muḥammad ‘Abd al-Raḥmān bin ‘Abd al-Raḥīm. *Tuḥfat al-Aḥwazī bi Syarḥ Jāmi’ at-Turmuḏī*. Ed. ‘Abd al-Waḥḥāb ‘Abd al-Laṭīf. Juz 4. Al-Qāhirah: Dār al-Fikr li aṭ-Ṭibā‘ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī’, t.t.
- Al-Muttaqī, ‘Alā ‘ad-Dīn ‘Alī bin Ḥusām ad-Dīn. *Kanz al-Ummāl fī Sunan al-Aqwāl wa al-Af‘āl*. Juz 4. Hyderabad Pakistan: Dār al-Ma‘ārif al-Nizāmiyyah, 1984.
- An-Nabhānī, al-Syaikh Yūsuf ibn Ismā‘īl. *Al-Faṭḥ al-Kabīr fī Ḍammi al-Ziyādah ilā al-Jāmi’ al-Ṣaghīr*, Hadis No. 4829. Juz 1. Beirut: Syirkah Dār al-Arqām ibn Abī al-Arqam li al-Ṭibā‘ah li al-Nasyr wa al-Tauzī’, t.t.
- An-Naisābūrī, Al-Ḥāfiẓ Abū ‘Abdullāh al-Ḥākīm. *Al-Mustadrak ‘alā aṣ-Ṣaḥīḥa*. Juz 2. Al-Qāhirah: Dār al-Ḥaraimayn li aṭ-Ṭibā‘ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī’, 1997.
- An-Nasā’ī, Al-Imām Abī ‘Abd al-Raḥmān Aḥmad ibn Syu’aib. *Kitāb al-Sunan al-Kubrā*. Ed. ‘Abd al-Ghaḥfār Sulaimān al-Bandārī dan Sayyid Kasrawī Ḥasan. Juz 2. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991.
- An-Nawawī, Muḥyī ad-Dīn Abī Zakariyyā Yaḥyā bin Syaraf ad-Dimasyqī asy-Syāfi‘ī. *Al-Aẓkār min Kalām Sayyid al-Abrār Ṣallā Allāhu ‘Alaihi wa ‘alā Ālihi wa Sallām*. Juz 1. Cet. ke-1. Maktabah Nizār Muṣṭafā al-Bāz, 1997.
- Nufūrī, asy-Syaikh Khalīl Aḥmad al-Sahār. *Baḏl al-Majhūd fī Halli Abī Dāwud*. Juz 14. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.
- Al-Qarāfi, Syihāb ad-Dīn Aḥmad ibn Idrīs. *Az-Ẓakhīrah, Taḥqīq Sa’id ‘A’rāb*. Juz 6. Beirut: Dār al-Garbī al-Islāmī, 1994.
- Al-Qārī, Al-‘Allāmah al-Syaikh ‘Alī ibn Sulṭān Muḥammad. *Mirqāt al-Mafātiḥ Syarḥ Misykāh al-Miṣbāḥ*. Ed. Jamāl ‘Aitānī, Juz 7. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001.
- Rajab, Ibn al-Ḥanbalī al-Baghdādī. *Jāmi’ al-Ulūm wa al-Hikam fī Syarḥ Khamsī na Ḥadī san min Jawāmi’ al-*

- Kalim*. Ed. Muḥammad al-Aḥmadī Abū an-Nūr. Juz 2. Cet. ke-2. Al-Qāhirah: Dār as-Salām, 2004.
- Sāmarrā'ī, 'Abd Allāh Sallūm. *Al-Guluwwu wa al-Farq al-Gāliyah fī al-Ḥadārah al-Islāmiyyah: Silsilah al-Kutub al-Ḥadīṣ*. Vo. 48. Al-Jumhūriyyah al-'Irāqiyyah: Wizārat al-I'lām, Mudīriyyah as-Ṣaqāfah al-'Āmm, 1972.
- As-Sajastānī, Imām al-Ḥāfiẓ Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'aṣ. *Sunan Abī Dāwud*. Ed. Muḥammad 'Abd al-'Azīz al-Khālīdī. Juz 3. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996.
- Aṣ-Ṣan'ānī, al-Ḥāfiẓ al-Kabīr Abū Bakar 'Abd al-Razzāq ibn Hammām. *Al-Muṣannaḥ*. Ed. Ḥabīb ar-Raḥman al-A'zamā. Juz 11. Cet. ke-2. Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1983.
- Aṣ-Ṣan'ānī, Muḥammad ibn Ismā'il. *Subul as-Salām*. Juz 3. Beirut: Dār Ihya' at-Turās , 1379 H.
- As-Sanūsī, Imām Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Muḥammad bin Yūsuf al-Ḥasīnī. *Ṣaḥīḥ Muslim ma'a Syarḥihi wa Ikmāl al-Mu'lim wa Syarḥihi Mukammil Ikmāl al-Akmāl*. Juz 5. Cet. ke-1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1328 H.
- As-Subkī, Maḥmūd Muḥammad Khaṭṭāb. *Al-Manhal al-'Adzb al-Maurūd: Syarḥ Sunan al-Imām Abī Dāwud*. Juz 2. Beirut: Mu'assasah at-Tārīkh al-'Arabī , t.t.
- As-Suyūṭī, Abū al-Faḍl Jalāl ad-Dīn 'Abd ar-Raḥmān. *At-Tausyīkh Syarḥ al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ*. Ed. Riḍwān Jāmi' Riḍwān. Ar-Riyāḍ: Maktabah ar-Rusyd, 1998.
- As-Suyūṭī. *Ad-Durr al-Mansūr fī at-Taḥsīr bi al-Ma'sūr*. Juz 3. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.
- Asy-Syaukānī, Muḥammad 'Alī ibn Muḥammad. *Nail al-Auṭār*. Juz 5. Beirut: Dār al-Jīl, 1973.
- At-Tahānawī, Maulānā Zafar Aḥmad al-'Uṣmānī. *I'lā' al-Sunan*. Juz 12 dan 18. Cet. ke-3. Pakistan: Idārah al-Qur'ān wa al-'Ulūm al-Islāmiyyah, 1415 H.
- Aṭ-Ṭūsī, Abū 'Alī al-Ḥasan ibn 'Alī ibn Nṣr. *Mukhtaṣar al-Aḥkām li aṭ-Ṭūsī: Mustakhraj aṭ-Ṭūsī 'alā Jāmi' at-Tirmizī*. Ed. Anīs bin Aḥmad bin Ṭāhir al-Andūlūsī. Juz 6. Cet. ke-1. Jeddah: Dār al-Mu'ayyad li an-Nasyr wa at-Tauzī', 2003.

- Aṭ-Ṭūsī, Syaikh aṭ-Ṭāifah Abī Ja'far Muḥammad ibn al-Ḥasan. *Al-Istibṣār fīmā Ikhtalafa min al-Akḥbār*. Ed. 'Alī Akbar al-Ghaffārī, Juz 3. ttp.: Dār al-Ḥadīṣ li aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr, 1380 H.
- Aż-Ḍahabī, al-Imām Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn 'Usmān al-Syāfi'ī. *Al-Muḥaẓẓab fī Ikhtisārī as-Sunan al-Kabīr li al-Baihaqī*. Ed. Dār al-Misykāh li al-Baḥṣ al-'Ilmī. Juz 5. ttp.: Dār al-Waṭan li an-Nasyr, t.t.

II. Sumber Buku

- 'Abidīn, Basyīr Kamāl. *As-Siyāsah al-Iqtisādiyyah wa al-Māliyyah li-'Umar bin 'Abd al-'Azīz*. Yordania: Dār al-Mā'mūn li an-
- 'Ābidīn, Muḥammad Amīn Ibn 'Umar. *Ḥāsyiah Radd al-Muḥtār 'alā Durr al-Mukhtār*. Juz 4. Beirut: Dār al-Fikr, 1992.
- 'Āmir, Muḥammad Muḥammad Sayyid Aḥmad. *Al-Badīl asy-Syar'ī li Maṣādir at-Tamwīl ad-Daulī al-Mu'āṣirah fī al-'Ālam al-Islāmī*. Al-Qāhirah: Dār Muḥammad Muḥammad Sayyid 'Āmir, 1999.
- 'Āsyūr, Muḥammad Sāmīr. *Madkhal ilā 'Ilm al-Qānūn*. Sūriyah: al-Jāmi'ah al-Iftirādiyyah as-Sūriyyah, 2008.
- 'Abbādī, 'Abd as-Salām Dāwud. *Al-Milkīyah fī asy-Syarī'ah al-Islāmīyah: Ṭabī'atuhā wa Wāẓifatuhā wa Quyūduhā: Dirāsah Muqāranah bi al-Qauānin wa an-Nuzum wa al-Waḍ'īyah*. Juz 2. Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 2000.
- Al-'Abbājī, Bassām Majīd Sulaimān. *Milkiyyah al-Ussrah: Dirāsah Muqāranah*. Amman, Jordan: Dār al-Ḥāmid li an-Nasyr wa at-Tauzī', 2009.
- 'Abd al-'Azīz, Sya'bān Fahmī. *Ra's al-Māl fī al-Maẓhabī al-Iqtisādī li al-Islām*. Al-Qāhirah: al-Ittiḥād ad-Daulī li al-Bunūk al-Islāmiyyah, 1981.

- ‘Abd al-Ḥakīm, Syauqī. *As-Sair wa al-Malāḥim asy-Sya’biyyah al-‘Arabiyyah*. Al-Qāhirah: Mu’assasah Hindāwī li at-Ta‘līm wa aš-Šaqāfah, 2016.
- ‘Abd al-Ḥamīd, Musta’in ‘Alī. *As-Sūq wa Tanzīmātuhu fī al-Iqtisād al-Islāmī*. Khurṭūm-Sudan: Dār as-Sūdāniyyah li al-Kutub, 1985.
- ‘Abd al-Jabbār, Muḥammad. *Tajdīd al-Fikr al-Islāmī*. ttp.: ad-Dustūr, 1999.
- ‘Abd al-Karīm, Khalīl. *Al-Juzūr at-Tārīkhiyyah li asy-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*. Qāhirah: Sīnā li an-Nasyr, 1990.
- ‘Abd Allāh, Mahā Riyāḍ. *Šundūq an-Naqdi ad-Daulī: Taqdīr Iqtisādī Islāmī*. Fīrjīniyā-al-Wilāyāt al-Muttaḥidah al-Amrīkiyyah: al-Ma‘had al-‘Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 2012.
- ‘Abd Allāh, Muḥammad ‘Abd al-‘Azīz. *Al-Istismār al-Ajnbā al-Mubāsyir fī ad-Daul al-Islāmiyyah fī Ḍau-i al-Iqtisād al-Islāmī*. Ammān, Jordan: Dār an-Nafā’is li an-Nasyr wa at-Tauzī‘, 2005.
- ‘Abd al-Muṭalib, Fāṭimah Muḥammad. *Al-Maqāšid al-‘Āmmah li asy-Syarī‘ah al-Islāmiyyah baina al-Aṣālah wa al-Mu‘āširah*. Oman: Dār al-Jinān li an-Nasyr wa at-Tauzī‘, 2017.
- ‘Abd ar-Rasūl, ‘Alī. *Al-Mabādi’ al-Iqtisādiyyah fī al-Islām wa al-Binā’ al-Iqtisādī li ad-Daulah al-Islāmiyyah*. Al-Qāhirah: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1968.
- ‘Abd as-Salām, Abū ‘Ubaid al-Qāsim Ibn. *Kitāb al-Amwāl*. Beirut: Dār asy-Syurūq, 1989.
- ‘Abd as-Salām, Taqī. *Nadwah al-Iqtisād al-Islāmī*. Amman, Jordan: Ma‘had al-Buḥūs wa ad-Dirāsāt al-‘Arabiyyah, Mu’assasah al-Khalīj li at-Ṭibā‘ah wa an-Nasyr, 1983.
- ‘Abdillāh, ‘Alī Riḍā Ibn. *Majmū‘ah al-Rasāil al-Ḥadī šīyyah*. Taqrī z Šāliḥ bin Sa’d al-Laḥaidān wa Ḥamdi ‘Abd al-Majīd al-Salafī . Jilid I. Cet. Ke-1. Manchester-England: al-Bukhary Islamic Center, 2004.
- ‘Abdū, Muḥammad. *Al-Fikr al-Maqāšidī ‘inda al-Imām al-Gazālī*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2009.

- ‘Abduh, ‘Īsā. *Al-Iqtisād al-Islāmī: Madkhal wa Manhāj*. Cet. ke-1. Al-Qāhirah: Kulliyah asy-Syarī‘ah wa al-Qānūn Jāmi‘ah al-Azhar, 1974.
- . *An-Nuzum al-Māliyyah fī al-Islām*. Kairo: Ma‘had Dirāsah al-Islāmiyyah, t.t.
- Al-‘Abīdī, Ibrāhīm ‘Abd al-Laṭīf Ibrāhīm. *Al-Milkiyyah aš-Šalās: Dirāsah ‘an al-Milkiyyah al-‘Āmmah wa al-Milkiyyah al-Khaṣṣah wa al-Milkiyyah ad-Daulah fī an-Nizām al-Iqtisādī al-Islāmī*. Cet. ke-1. Dubai: Dāirah al-Syu‘ūn al-Islāmiyyah wa al-‘Amal al-Khairī, 2009.
- Al-‘Abīdī, Ḥammādī. *Asy-Syāṭibī wa Maqāsid asy-Syarī‘ah*. Beirut: Dār al-Qutaibah, 1992.
- Al-‘Abīdī, Sa‘īd ‘Alī Muḥammad. *Al-Iqtisād al-Islāmī*. Cet. ke-1. Oman: Dār Dajlah, 2011.
- Al-‘Abūdī, ‘Abbās. *Syarī‘ah Ḥamūrābī: Dirāsah Muqāranah ma’a at-Tasyrī‘āt al-Qadīmah wa al-Ḥadīšah*. Amman, Jordan: al-Maktabah al-Qānūniyyah, 2000.
- ‘Afānah, Ḥisām ad-Dīn ibn Mūsā. *Yas‘alūnaka ‘an al-Mu‘āmalāt al-Māliyyah al-Mu‘āširah*. Juz 1. Palestina: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah wa Dār at-Ṭayyib li at-Ṭibā‘ah wa an-Nasyr, 2009.
- Al-‘Ajl, Basysyār Ḥusain. *Al-Kharāj wa aḍ-Ḍarībah al-Mu‘āširah fī al-Fiqh al-Islāmī: Dirāsah Muqāranah*. Cet. ke-1. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2017.
- Al-‘Ajlūnī, Muḥammad ‘Abd al-Fattāh. *Afkār wa Mafāhim fī al-Iqtisād al-Islāmī*. Yordan: Dār al-Ma‘mūn li an-Nasyr wa at-Tauzī’, 2012.
- Al-‘Āl Ghubāsīyī, Ṭulbah ‘Abd. *Aḥkām Naz‘u al-Milkiyyah wa Taqyī duhā li Maṣlahah al-Gair fī asy-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*. Al-Qāhirah: Jāmi‘ah al-Manšūrah Kulliyah al-Ḥuqūq, 2001.
- Al-‘Alamī, ‘Abd al-Ḥamī d. *Manhaj al-Darsi al-Dilālī ‘inda al-Imām asy-Syāṭibī*. Al-Mamlakah al-Maghribiyyah: Wizārat al-Auqāf wa al-Syu‘ūn al-Islāmiyyah, 2001.

- ‘Alī, Aḥmad Sayyid Aḥmad. *Wilāyah al-Faqīh ‘inda asy-Syī’ah al-Isnāī ‘Asyariyah wa Mauqif al-Islām minhā*. Mesir: Maktabah al-Imām al-Bukhārī, 2007.
- ‘Alī, Sa’īd Ismā’īl. *Uṣūl at-Tarbiyyah al-Islāmiyyah*. Al-Qāhirah: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1993.
- ‘Alī, Fāṭimah Muḥammad Rāsyid. *As-Siyāsah al-Māliyah wa Dauruhā fī Takḥṣīs al-Mawārid al-Iqtisādiyyah baina al-Iqtisād al-Waḍ’ī wa al-Islāmī*. Al-Iskandariyyah: Dār at-Ta’līm al-Jamā’ī, 2020.
- ‘Alī, Ibrāhīm Mīrzah Muḥammad. *Madīnah Baghdād; al-Ab’ād al-Ijtimā’iyyah wa Zarūf al-Nasy’ah* (Dirāsah Binā’iyyah Tārīkhiyyah). Baghdād: Ma’had al-Abḥās wa al-Tanmiyyah al-Ḥaḍāriyyah, 2008.
- Al-‘Alīm, Yusūf Ḥamīd. *Al-Maqāsid al-‘Āmmah li asy-Syarī’ah al-Islāmiyyah*. Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought, 1991.
- Al-‘Allāf, Masyhad. *Falsafah al-Ḥaḍārah al-Islāmiyyah: ar-Ru’yah al-Ghazāliyyah*. Cet. ke-1. Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2013.
- Al-‘Āmilī, Muḥammad Jawwād. *Miftāḥ al-Karāmah fī Syarḥ Qawā’id al-‘Allāmah*. Vol. 14. Libanon: Mu’assasah Fiqh al-Syī’ah, 1996.
- ‘Āmir, Muḥammad Muḥammad Sayyid Aḥmad. *Al-Badīl al-Syar’ī li Maṣādir al-Tamwīl al-Daulī al-Mu’āṣirah fī al-‘Ālam al-Islāmī*. Al-Qāhirah: Dār Muḥammad Muḥammad Sayyid ‘Āmir, 1999.
- Al-‘Amr, Fuād ‘Abd Allāh. *Muqaddimah fī Tārīkh al-Iqtisād al-Islāmī wa Taṭawwuruḥu*. ttp: al-Ma’had al-Islāmī li al-Buḥūs wa at-Tadrīb, 1424 H/ 2003 M.
- Al-‘Ānī, ‘Abd al-Karīm ‘Umar ‘Abd al-Karīm asy-Syaqāqī. *Aḍ-Ḍawābiḥ al-Uṣūliyyah li al-Ijtihād fī al-Siyāsah al-Syar’iyyah*. Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2012.
- Al-‘Ānī, Ḥassān. “Naẓariyah al-Ḥuqūq al-‘Āmmah.” *Muḥādarāt al-Qait ‘alā Ṭalabah ad-Duktūrāh fī al-‘Ulūm*

- as-Siyāsī*. Baghdād: Jāmi'ah al-Baghdād, Kulliyah al-'Ulūm wa al-Siyāsah, 1996/1997.
- Al-'Ānī, 'Abd al-Raḥmān 'Abd al-Karīm. *Al-Khalīfah al-Fārūq 'Umar ibn al-Khaṭṭāb*. Baghdād: Dār asy-Syu'un al-Šaqāfiyah al-'Āmmāh, 1989.
- 'Aqal, Nādiyah Ḥasan Muḥammad. *Nazariyyah al-Tauzī' fī al-Iqtisād al-Islāmī: Dirāsah Ta'šiliyyah-Taṭbīqiyyah*. Yordan: Dār an-Nafā-is li an-Nasyr wa at-Tauzī', 2010.
- Al-'Arabī, Muḥammad 'Abd Allāh. *Al-Milkiyyah al-Khāsshah wa Hudūduhā fī al-Islām*. Mesir: Dār bi al-Mustasyfā al-Malakī al-Miṣrī, 1964.
- 'Arabī, Fauzī Ridwān. *Nizām al-Ḥayāzah fī al-Mujtama' al-Badaduwi*. Al-Qāhirah: al-Hai'ah al-Miṣriyyah al-'Āmmah li al-Kitāb, 1980.
- 'Asāl, Aḥmad Muḥammad. *Al-Nizām al-Iqtisādī fī al-Islām: Mabādiuhu wa Ahdāfuhu*. Al-Qāhirah: Maktabah Wahbah li al-Nasyr wa at-Tauzī', 1977.
- 'Assāf, Fātiḥ Mišqāl. *Al-Falsafah al-Ijtimā'iyyah 'Inda al-Gazālī*. Oman: Dār al-Isrā' li al-Nasr wa al-Tauzī', 2001.
- Al-'Aurān, Aḥmad Farrās. *Al-Azmah al-Iqtisādiyyah al-'Ālamiyyah al-Mu'āširah min Manzūr al-Islāmī*. Ferjīniyā: al-Ma'had al-'Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 2012.
- Al-'Awāmilah, Nā-il 'Abd al-Ḥāfiẓ. *Idārah al-Tanmiyyah: al-Usus, al-Nazariyāt, al-Taṭbī qāt al-'Amaliyah*. Yordan: Dār Zahrān li an-Nasyr wa at-Tauzī', 2010.
- Al-'Azāwī, Tāriq. *Al-Fikr wa al-Tārīkh al-Iqtisādī*. Baghdād: Maṭba'ah al-Azhar, 1975.
- Al-'Azīz, Ibrāhīm aḍ-Ḍarīr, 'Ādil al-Yamānī, dan 'Umar Muḥammad 'Abd. *Muṣṭalahāt al-Fiḥ al-Mālī al-Mu'āšir: Mu'āmalāt al-Sūq*. Taḥrīr Yūsuf Kamāl Muḥammad. Al-Qāhirah: al-Ma'had al-'Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 1997.
- Al-'Ibādī, 'Abd al-Salām. *Al-Milkiyyah fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Juz 2. Oman: Maṭābi' Wizārat al-Auqāf wa asy-Syu'un wa al-Muqaddasāt al-Islāmiyyah, t.t.

- Al-'Ibādī, 'Abd al-Salām Dāwud. *Al-Milkiyyah fī al-Syarī 'ah al-Islāmiyyah*. Juz 2. Cet. Ke-1. 'Ammān: Maktabah al-Aqṣā, 1977.
- 'Imārah, Muḥammad. *Muslimūna Śiwār*. Cet. ke-3. Al-Qāhirah: Dār asy-Syurūq, 1988.
- 'Ināyah, Gāzī. *al-Uṣūl al-'Āmmah li al-Iqtisād al-Islāmī*. Beirut: Dār al-Jīl, 1991.
- 'Ulais, Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad. *Minaḥ al-Jalīl Syarḥ 'alā Mukhtaṣar al-'Allāmah al-Khalīl*. Ed. 'Abd al-Jalīl 'Abd as-Salām. Juz 7. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1989.
- 'Umāmah, 'Adnān Muḥammad. *At-Tajdīd fī al-Fikr al-Islāmī*. al-Qāhirah: Dār Ibn al-Jauzī, t.t.
- Al-'Umarī, Fahad bin 'Abd Allāh bin Muḥammad. *Naz'u al-Milkiyyah al-Khāṣṣah wa Ahkāmuhā fī al-Fiqh al-Islāmī*. Saudi Arabia: Jāmi'ah al-Imām Muḥammad bin Sa'ūd al-Islāmiyyah, 2003.
- Al-'Umarī, 'Abd al-'Azīz bin Ibrahīm. *Al-Wilāyah 'alā al-Buldān fī 'Aṣri al-Khulafā' al-Rāsyidīn*. Riyāḍ: Dār Isybīliyyā, Maktabah al-'Arabiyah al-Su'ūdiyyah, 2001.
- 'Uṣmān, Muḥammad Fathī. *Al-Fikr al-Islāmī wa at-Taṭawwur*. Cet. ke-2. Kuwait: Dār al-Kuwaitiyyah li aṭ-Ṭibā'ah li an-Nasyr wa at-Tauzī', 1969.
- 'Uṣmān, Muḥammad Fathī. *Al-Fikr al-Islāmī wa at-Taṭawwur*. Cet. ke-3. ttp.: ad-Dār as-Su'ūdiyyah, 1985.
- . *Al-Fikr al-Qānūnī* . Al-Qāhirah: Maktabah Wahbah, t.t.
- Al-'Usrī, 'Abd al-Salām. *Naẓariyyah al-Akhdzi bimā Jarā bihi al-'Amāl fī al-Maghrib fī Iṭār al-Mazhab al-Mālikī*. Al-Mamlakah al-Maghribiyyah: Wizārat al-Auqāf wa asy-Syu'un al-Islāmiyyah, 1996.
- 'Usyrī, Sājid. *An-Nizām al-Mālī fī 'Aṣr al-Khulafā' ar-Rāsyidīn*. Alexandria, Mesir: Dār al-Jami'iyyīn li aṭ-Ṭibā'ah wa at-Tajlīd, 2006.

- Āli Šānī, Rauḍah Saḥīm Ḥamad. *Daur al-‘Arab fī Taṭwīr az-Zirā‘ah fī al-‘Irāq munz al-Fath al-Islāmī hattā Nihāyah ad-Daulah al-Umawiyah 231 H.* ‘Ammān-Yordan: Mu’assasah Ḥammādah li ad-Dirāsāt al-Jāmi‘ah li an-Nasyr wa at-Tauzī’, 2001.
- Abd al-Mahdī, ‘Ādil. *As-Šawābit al-Mutagayyirāt fī at-Tārīkh al-Iqtisādī li al-Bilād al-Islāmiyyah.* Bagdād: Markaz Dirāsāt Falsafah ad-Dīn, 2009.
- Abduh, ‘Īsā ‘dan Aḥmad Ismā‘il Yahyā. *Al-Milkiyyah fī al-Islām.* Kairo: Dār al-Ma’ārif, t.t.
- Abdul Mannan, Muhammad. *Islamic Economics: Theory and Practice (Foundations of Islamic Economics).* Ed. revisi, Sevenoaks, Kent. UK.: Hodder and Stoughton, 1986.
- Abramson, Allen dan Dimitrios Theodossopoulos. *Land, Law and Environment: Mythical Land, Legal Boundarie.* London: Pluto Press, 2000.
- Abū ‘Awwānah, Ya’qūb bin Ishāq. *Musnad Abī ‘Awwānah al-Musammā al-Musnad aṣ-Ṣaḥīḥ al-Mukhrā ‘alā Ṣaḥīḥ al-Muslim.* Juz 3. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006.
- Abū ‘Izzah, ‘Abd Allāh. *al-Islām: Risālatuhu, Ḥaḍāratuhu, Mustaqbaluhu.* Beirut: Dār al-‘Ilmi li al-Malāyīn, 1988.
- Abū al-‘Alā, Amjad Rabī’. *An-Nazariyah al-Mutakāmilah fī asy-Syūrā.* Al-Qāhirah: Dār al-Kalimah li an-Nasyr wa at-Tauzī’, 2012.
- Abū al-Ḥasan, Ḥusain ‘Abbās. *Ma‘ālim al-Isytirākiyyah fī Manzūri al-Islām.* Beirut: Dār al-Masīrah, 1980.
- Abū Ṭālib, Ṣūfī Ḥasan. *Tārīkh an-Naẓm al-Qānūniyyah wa al-Ijtimā‘iyyah.* Al-Qāhirah: Dār an-Naḥḍah al-‘Arabiyyah, 1976.
- Abū Ya’lā, al-Qāḍī al-Ḥanbalī. *Kitāb al-Mu’tamad fī Uṣūl ad-Dīn.* Taḥqīq Wadī’ Zaidān Ḥaddād. Beirut: Dār al-Masyriq, 1986.
- Adams, Charles J. (ed.). *A Reader's Guide to the Great Religions.* New York: The Free Press, 1965.

- Adnan. *Islam Sosialis: Pemikiran Sistem Ekonomi Sosialis Religius Sjafruddin Prawiranegara*. Yogyakarta: Menara Kudus, 2004.
- Affandi, Hakimul Ikhwan. *Akar Konflik Sepanjang Masa: Elaborasi Pemikiran Ibn Khaldun*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Agrarian Questions Organising Committee. *Agrarian Questions: The Politics of Farming Anno*. Proceedings. Volume 1. Netherlands: Wageningen Agricultural University, 1995.
- Ahmad, A. *Islamic Political System in the Modern Age*. New Delhi: Adam Publisher, 2007.
- Aḥmad, Aḥmad Muḥammad Luṭfī. *Al-Istiṣmār fī 'Uqūd al-Musyārahāt fī al-Maṣārif al-Islāmiyyah*. Cet. ke-1. Al-Manṣūrah-al-Qāhirah: Dār al-Fikr wa al-Qānūn li an-Nasyr wa at-Tauzī', 2013.
- Aḥmad, Aḥmad Ṭahā. *Al-Mar'ah: Kafāhān wa 'Amalahā*. Damaskus: Dār al-Jamāhir, 1964.
- Al-Aḥmad, al-Muḥāmī Ḥisām ad-Dīn 'Abd al-Raḥmān. *Al-Wajīz fī al-Qawā'id al-Kulliyah li al-Aḥkām al-'Adliyyah*. Cet. ke-1. Ar-Riyāḍ: Maktabah al-Qānūn wa al-Iqtisād, 2015.
- Aḥmad, Sayyid 'Abd al-Ḥamīd. *Naz'u al-Milkiyyah fī Iṭāri Qarārāh al-Manfa'ah al-Āmmah wa al-Muṣādarah wa Ta'mīm*. Al-Iskandariyyah: Maktabah al-Wafā' al-Qānūniyyah, 2018.
- Akbar, Jamīl 'Abd al-Qādir Muḥammad. *Al-'Aqlu wa Ḥatmiyyah al-Fasād*. Yordan: 'Ālim al-Kutub al-Ḥadīṣ, 2014.
- Akbar, Jamīl 'Abd al-Qādir. *Imārah al-Arḍi fī al-Islām: Muqāranah asy-Syarī'ah bi Anḏumah al-'Umrān al-Waḍ'iyah*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1995.
- Akbariyān, Ḥasan 'Alī. *Aṣ-Ṣābit wa al-Mutagayyirah fī al-Adillah an-Naṣṣiyyah: Dirāsah fī Ālāt al-Ijtihād al-Fiqhī (Constant and Variable in Textual Evidence: A Study in the*

- Mechanism of Jurisprudence*). Terj., Zain al-‘Ābidīn Syams ad-Dīn. Beirut: Markaz al-Ḥaḍārah al-Tanmiyyah al-Fikr al-Islāmī, 2013.
- Al-Alūsī, al-Sayyid Maḥmūd Syukrī al-Baghdādī. *Bulūgh al-Arbāb fī Ma’rifah Aḥwāl al-‘Arab*, Ed. Muḥammad Bahjah al-Aṣārī. Juz 3. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1971.
- Al-Alūsī, M. S. *Bulūgh al-Arab fī Aḥwāl al-‘Arāb* (on The Conditions of The Arabs), in Arabic, Vol. 3. Kairo, 1925.
- Alam, Mohammad Manzoor. *Perspectives on Islamic Economics*. New Delhi, India: Institute of Objective Studies, 1996.
- Amāmah, ‘Adnān Muḥammad. *at-Tajdīd fī al-Fikr al-Islāmī*. Cet. ke-1. Ar-Riyād: Dār Ibn al-Jauzī, 2003.
- Amerah, Z. I. M. *Public Finance in Islam*. Lahore: Readers publication, 1990.
- Āmīn, Aḥmad. *Zu’amā’ al-Iṣlāḥ fī al-‘Aṣr al-Ḥadīṣ*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Arabī, t.t.
- Amīn, ‘Abd ar-Ra’ūf ibn Muḥammad al-Indūnīsī. *Al-Ijtihād: Ta’aththuruḥu wa Ta’tḥīruḥu fī Fiqhī al-Maqāṣid wa al-Waqā’i’*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2013.
- Amīn, Aḥmad. *Fajr al-Islām*. Cet. ke-13. Kairo: Maktabah an-Nahḍah al-Miṣriyyah, t.t.
- Amīn, Ḥasan. *Mausū’ah al-Islāmiyyah*. Vol. 1. Beirut: Dār at-Ta’āruf li al-Maṭbū’āt, 1975.
- Anam, Munir Che. *Muhammad SAW & Karl Marx tentang Masyarakat Tanpa Kelas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Anas, Julia. *The Morality of Happiness*. New York: Oxford University Press, 1993.
- Anderson, J.N.D. *Law Reform in the Muslim World*. London: The Clarendone Press, 1976.
- Andrain, Charles F. *Comparative Political Systems: Policy Performance and Social Change*. New York-London: M.E. Sharpe, Inc., 1994.

- Anjum, Ovamir. *Reason and Politics in Medieval Islamic Thought: The Taymiyyan Moment*. University of Wisconsin--Madison, 2008.
- Al-Anṣārī, Abū ‘Abd Allāh Muḥammad. *Syarḥ Hudūd Ibn ‘Arfah al-Mausūm al-Hidāyah al-Kāfiyah asy-Syāfiyah li Bayān Haqā’iq al-Imām Ibn ‘Arfah al-Wāfiyah*. Ed. Muḥammad Abū al-Ajfan wa aṭ-Ṭāhir al-Ma’mūrī. Cet. ke-1. Beirut: Dār al-‘Arab al-Islāmī, 1993.
- Anṣārī, Ra’ūf Muḥammad ‘Alī. *Imārat al-Masājid: Dirāsah fī Tārīkh ‘Imārat al-Masājid Khilāl al-‘Uḥūd al-Islāmiyyah*. Al-Qāhirah: Dār Nubūg li an-Nasyr wa at-Tauzī’, 1996.
- Ansari, Ghaus. *Muslim Caste in Uttar Pradesh: A Study of Culture Contact*. Lucknow: Ethnographic and Folk Culture Society, 1960.
- Aprianto, Tri Chandra. *Tafsiran Land Reform: Tinjauan Kritis atas Tafsiran yang Ada*. Yogyakarta: Karsa, 2006.
- Arkoun, Mohammed. *Contribution à l’étude de l’humanisme arabe au IVe /Xe siècle: Miskawayh (320/325-421) = (932/936-1030) philosophe et historien*. Paris: Vrin, 1970.
- Ashcroft, Bill, Gareth Griffiths dan Helen Tiffin. *Post-Colonial Studies: The Key Concepts*. Ed. ke-2. London dan New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2007.
- Askari, Hossein, dan Abbas Mirakhor. *Conceptions of Justice from Islam to the Present: Political Economy of Islam*. Ed. ke-1. London: Palgrave Macmillan, 2020.
- Askari, Hossein, John Thomas Cummings, dan Michael Glover. *Taxation and Tax Policies in the Middle East: Butterworths Studies in the Middle East*. London: Butterworth Scientific Publisher, Ltd., 1982.
- Al-Asmar, Aḥmad Rajab. *Al-Nabiyyu al-Murabbī*. Cet. ke-1. Oman: Dār al-Furqān li an-Nasyr wa at-Tauzī’, 2001.
- Al-Asuyūfī, Šarwat Anīs. *Nizām al-Ushrah baina al-Iqtisād wa ad-Dīn*. Al-Qāhirah: Dār an-Nahḍah al-‘Arabiyyah, 1961.

- Aswad, ‘Abd ar-Razzāq Muḥammad. *Al-Madkhal ilā Dirāsah al-Adyān wa al-Madżāhib*. Vol. 3. The University of Michigan: ad-Dār al-‘Arabiyyah li al-Mausū’ah, 1981.
- Auda, Jasser. *Maqāṣid asy-Syarī’ah: A Beginner’s Guide*. London: The International Institut Islamic Thought, 2008.
- . *Maqāṣid al-Sharī’ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London dan Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Azizy, A. Qadri. *Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiyar Menuju Ijtihad sesuai Sainifik-Modern*. Jakarta: Teraju, 2003.
- Azmi, Sahabuddin. *Islamic Economics: Public Finance in Early Islamic Thought*. New Delhi: Goodword Books, 2002.
- Azmi, Sahabuddin. *Islamic Economics: Public Finance in Early Islamic Thought*. Terj. Widyawati. Bandung: Nuansa, 2005.
- Bābillī , Maḥmūd Muḥammad. *Khaṣais al-Iqtisād al-Islāmī wa Dḥawābiḥ al-Akhlāqiyyah*. Beirut: al-Maktab al-Islāmī li al-Ṭibā’ah wa al-Nasyr, 1988.
- Bacher, Christian. *Corporate Codes of Ethics*. Germany: GRIN Verlag, 2005.
- Bāqir, Tahā. *Muqaddimah fī Tārīkh al-Muḥādarāt al-Qadīmah*. Cet. ke-2. Juz I. London: Syirkah Dār al-Warrāq li an-Nasyr al-Maḥdūdah, 2012.
- Bāsallūm, Majdī Muḥammad Surūr. *Al-Wasaṭiyyah fī al-Fikr al-Islāmī*. Cet. ke-1. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004.
- Bāsyā, Aḥmad Tīmūr. *Nazrah Tārīkhiyyah fī Hudūs al-Mazāhib al-Fiḥiyyah al-Arba’ah*. Beirut: Dār al-Qādirī, 1990.
- Al-Bāyātī, ‘Abd al-Gafūr Muḥammad Ismā’īl. *Al-Madkhal li Dirāsah al-Qawā’id al-Fiḥiyyah: Dirāsah Manhajiyyah Jāmi’ah baina al-Nazariyyah wa at-Taṭbīq*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2015.

- Bāzmūl, Aḥmad bin ‘Umar bin Sālim. *Tuḥfat al-Alma’iyyī bi Ma’rifat Ḥudūd al-Mas’ā wa Aḥkām as-Sa’yī wa Ma’ahu Risālah fī Tausī’at al-Mas’ā li ‘Abd ar-Raḥmān bin Yaḥyā al-Ma’lamī al-Yamānī*. Cet. ke-1. Al-Qāhirah: Dār al-Istiḳāmah, 2008.
- Badawī, Muḥammad Ṭahā. *Nazariyah as-Siyāsah*. Al-Iskandariyah: Maktabah al-Miṣrā li aṭ-Ṭabā’ah, 1968.
- Al-Badawī, Yūsuf Aḥmad Muḥammad. *Maqāṣid al-Syarī’ah ‘inda Ibn Taymiyyah*. Yordan: Dār al-Nafā’is, 1999.
- Badrān, ‘Abd al-Qādir bin Aḥmad bin Muṣṭafā al-Dawamī al-Dimasyqī, *Nuzhat al-Khāṭir al-‘Āṭir Syarḥ Kitāb Rauḍah al-Nāẓir wa Jannah al-Munāẓir fī Uṣūl al-Fiq’ alā Mazhab al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal li Ibn Qudāmah al-Maqdisī*. Ed. wa Takhrīj ‘Abdullāh Maḥmūd Muḥammad ‘Umar, Juz 1. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002.
- Badrī, ‘Ādil. *Aṣar ar-Rasūl al-Muṣṭafā fī Takwīn al-Ḥaḍarī wa al-Mudunī*. Beirut: Dār al-Aṣar li an-Nasyr wa at-Tauzī’, 2007.
- Al-Badrī, ‘Abd al-‘Azīz. *Hukm al-Islām fī al-Isytirākiyyah*. Al-Madīnah al-Munawwarah: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, 1965.
- Badrī, Muḥammad ‘Abd Allāh al-Mahdī. *al-Mujāz fī an-Nuḥum al-Islāmiyyah*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1985.
- Al-Baghawī, Abū Muḥammad Ḥusain bin Mas’ūd. *Tafsīr al-Baghawī: Ma’ālim at-Tanzīl (Tafsīr Sūrah al-Māidah ayat 31)*. Cet. ke-1. Beirut: Dār Ibn Ḥazm li an-Nasyr wa at-Tauzī’, 2002.
- Al-Bāhi, Muḥammad. *Tahāfut al-Fikr al-Mādī at-Tārīkhī baina an-Nazarī wa at-Taṭbīqī*. Al-Qāhirah: Maktabah Wahbah li an-Nasyr wa at-Tauzī’, 1975.
- Bahnasī, Aḥmad Fathī. *As-Siyāsah al-Jinā’iyyah fī asy-Syarī’ah al-Islāmiyyah*. Cet. ke-2. Al-Qāhirah: Dār asy-Syurūq, 1988.
- Bahr al-‘Ulūm, Muḥammad Taqī. *Bulghah al-Faqīh*. Beirut: Maṭba’ah al-Ādāb, 1968.

- Bai, Hātim. *Al-Uṣūl al-Ijtihādiyyah allatī Yubnā ‘Alaihā al-Mazhab al-Mālikī*. Al-Kuwait: al-Wa’yu al-Islāmī, Wuzārah al-Auqāf wa asy-Syu’ūn al-Islāmiyyah, 2011.
- Bakrī, Muḥammad Taufiq Syaḳīr Na’ūm. *Amsāl al-‘Awām fī Miṣraw a al-Sūdān wa al-Syām*. Mesir: Maṭba’ah al-Ma’ārif, 1894.
- Al-Baiātī, al-Qāḍī ‘Abd al-Ghafūr Muḥammad Ismā’ī l. *Al-Madkhal li Dirāsah al-Qawā’id al-Fiqhiyyah: Dirāsah Manhajiyah Jāmi‘ah baina al-Nazariyyah wa al-Taṭbī q*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2015.
- Bakr, ‘Iṣmat ‘Abd al-Majīd. *Musykilāt at-Tasyrī’: Dirāsah Nazariyyah wa Taṭbīqiyyah Muqāranah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2014.
- Balqāsīm, Būqarah. *Min al-Istibdād asy-Syarqī ilā Nizām al-‘Ālamī al-Jadīd: at-Tārīkh al-Ijtīmā’ī li al-Jazā’ir tahta al-Mujhir*. Aljazair: Dīwān al-Maṭbū‘āt al-Jāmi‘iyyah, 2004.
- Baltājī, Muḥammad. *Al-Milkiyyah al-Fardiyyah fī an-Nizām al-Iqtisādī al-Islāmī*. Al-Qāhirah: Dār as-Salām, 2007.
- . *Manhaj ‘Umar Ibn al-Khaṭṭāb fī at-Tasyrī*. Kairo: Dār as-Salām, 2002.
- Banaji, Jairus. *Theory as History: Essays on Modes of Production and Exploitation*. Leiden and Boston: Brill, 2010.
- Bandelj, Nina, dan Elizabeth Sowers. *Economy and State: A Sociological Perspective*. UK: Polity Press, 2010.
- Al-Bannā, Al-Muḥāmī Khalīl. *Baina al-Qānūn wa al-Mujtama’*. Yordan: Dār Amwāj li an-Nasyr wa at-Tauzī, 2011.
- Al-Bannā, Al-Muḥāmī Khalīl. *Fī Maḥārib al-Qadā’*. Oman: Dār Amwāj li an-Nasyr wa at-Tauzī’, 2010.
- Bāqir, Ṭahā. *Muqaddimah fī Tārīkh al-Muḥādarāt al-Qadīmah*. Cet. Ke-2. Juz I. London: Syirkah Dār al-Warrāq li al-Nasyr al-Maḥdūdah, 2012.

- Bāqir, Ṭahā. *Muqaddimah fī Tārīkh al-Muḥāḍarāt al-Qadīmah*. Cet. Ke-2, Juz I. London: Syirkah Dār al-Warrāq li al-Nasyr al-Maḥdūdah, 2012.
- Barnāmij al-Umam al-Muttaḥidah li al-Mustawṭanāt al-Basyariyyah. “Milkiyyah al-Arḍ wa al-Adawāt al-Qānūniyyah li al-Arāḍī: Baḥs fī al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah wa ‘Alāqatuhā bi Ḥuqūq al-Arḍ.” *Al-Ijtīmā’ al-Tamhīdī li al-Muntadī al-Ḥaḍarī al-‘Ālamī al-Thālith. UN-HABITAT’s Islam, Land and Property Rights Series, Paper 2: Islamic Land Tenure and Reform*. Al-Qāhirah: ttp., 2005.
- Barcalow, Emmett. *Moral Phylosophy: Theories and Issues*. Ed. ke-2. New York: Wadsworth Publishing Company, An International Thomson Publishing Company, 1998.
- Barrī, Bāqir. *Fiqh an-Nazriyyah ‘inda asy-Syahīd aṣ-Ṣadr*. Beirut: Dār al-Hādī li aṭ-Ṭibā‘ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī‘, 2001.
- Basyūnī, Abū al-Futūḥ Muḥammad. *Al-Ḥurriyyah al-Iqtisādiyyah fī al-Islām wa Āsaruhā fī at-Tanmiyyah*. Cet. ke-1. Al-Qāhirah: Dār al-Wafā’ li aṭ-Ṭibā‘ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī‘ al-Mansūrah, 1988.
- Baṭāwī, Muḥammad ‘Abd al-Mu’izz. *Falsafah al-Akhlāq fī asy-Syarī‘ah al-Islāmiyyah: Dirāsah fī ‘Ilm Qawā’id al-Fiqh*. Fīrjiniyā: al-Ma’had al-‘Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 2018.
- Bates, D.G., dan F. Pollouge. *Cultural Anthropology*. Terj. M. Salasi. Tehran: Elmi Publishing, 2006.
- Batson, C. Daniel. *The Altruism Question: Toward a Social-Psychological Answer*. New York & London: Psychological Press, Taylor & Francis Group, 2014.
- Baumol, William J., Robert E. Litan, dan Carl J. Schramm. *Good Capitalism, Bad Capitalism, and The Economic of Growth and Prosperity*. New Haven & London: Yale University Press, 2007.

- Al-Bayātī, Al-Qādī ‘Abd al-Ghafūr Muḥammad Ismā’īl. *Al-Qawā'id wa ad-Dawābiṭ al-Fiqhiyyah fī Uṣūl at-Taqāḍī: Dirāsah Mauḍū'iyyah li al-Qawā'id al-Fiqhiyyah fī am-Nizā al-Qadā'ī wa Uṣūl al-Muḥākamāt wa al-Murāfa'āt asy-Syar'iyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2018.
- Bayawuḍ, Ḥusain. *Ar-Rasā'il as-Siyāsiyyah fī al-'Aṣr al-'Abbāsī al-Awwal*. Suriah: Mansyūrāt Wizārat aš-Ṣaqāfah fī al-Jumhūriyyah al-'Arabiyyah as-Sūriyyah, 1996.
- Bayyūmī, Zakariyyā Muḥammad. *Al-Māliyyah al-'Āmmah al-Islāmiyyah: Dirāsah Muqāranah baina Mabādi' al-Māliyyah al-'Āmmah fī ad-Daulah al-Islāmiyyah wa ad-Daulah al-Ḥadīṣah*. Al-Qāhirah: Dār an-Nahḍah al-'Arabiyyah, 1979.
- Bazā, ‘Abd an-Nūr. *Naḍariyah at-Ta'līl fī al-Fikr al-Kalāmī al-Uṣūlī*. Beirut: Maktabah at-Tauzī' fī al-'Ālam al-'Arabī, 2011.
- Bāzmūl, Aḥmad bin ‘Umar bin Sālim. *Tuḥfat al-Alma'iyyī bi Ma'rifat Ḥudūd al-Mas'ā wa Aḥkām al-Sa'yī wa Ma'ahu Risālah fī Tausi'at al-Mas'ā li 'Abd al-Raḥmān bin Yaḥyā al-Ma'lamī al-Yamānī*. Cet. Ke-1. Al-Qāhirah: Dār al-Istiḳāmah, 2008.
- Beckmann, Franz Von Benda. *Property in Social Continuity: Continuity and Change in the Maintenance of Property Relationships through Time in Minangkabau, West Sumatra*. The Hague-Martinus Nijhoff, 1979
- Beer, M. A *History of British Socialism*. Nottingham: Russel Press, 1984.
- Behdad, S., T. Kurnan. *Theory of Islamic Economics: Tradition and Transformation*. New Delhi, India: Global Vision Publishing House, 2006.
- Behesti, Muhammad H. *Ownership in Islam*. Terj. Lukman Hakim. Jakarta: Pustaka Hidayat, 1992.
- . *Ownership in Islam*. Terj. Ali Reza Afghani. Teheran: Islamic Thought Foundation, 1998.

- Beilharz, Peter. *Social Theory: A Guide to Central Thinkers*. Terj. Sigit Jatmiko. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Benett, William. *Justice and Happiness*. Oxford-New York: Clarendon Press, 1911.
- Berger, Peter L., dan Thomas Luckmann. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Harmonds-worth: Penguin Books, 1966.
- . *Invation to Sociology: A Humanistic Perspective*. Harmonds-worth: Penguin Books, 1966.
- . *Pyramids of Sacrifice: Political Ethics and Social Change*. New York: Anchor Books, 1976.
- Bey, Yacoub Artīn. *The right of landed property in Egypt*. Terj. E.A. Van Dyck. Llonon: Wyman & Sons, 1885.
- Biro, Allan. *Culture of Social Sciences*. Terj. Mohammad Bagher Saroukhani. Ed. ke-1. Tehran: Kayhan Publication, 1987.
- Al-Birr, Muḥammad Mūsā Muḥammad Aḥmad & Muḥammad Nūr Mūsā ‘Alī . *Nizām al-Ḥisbah fī al-Islām: Dirāsah fī Iṣlāḥ al-Mujtama’*. Al-Sūdān: al-Akādī miyyah al-Ḥadī ṣah li al-Kitāb al-Jāmi’ī , 2013.
- Black, Ann, Hossein Esmaeili, dan Nadirsyah Hosen. *Modern Perspectives on Islamic Law*. Cheltenham, UK dan Northampton, MA, USA: Edwar Elgar Publishing Limited, 2013.
- Blackstone, Sir William. *Commentaries on the Laws of England*. Vol. 1. Philadelphia: J.B. Lippincott Co., 1893.
- . *Commentaries on the Laws of England*. Vol. 2. Chicago: Univ. Chicago Press, 1979.
- Bonne, A. *State and Economics in the Middle East: A Society in Transition*. London: Routledge and Kegal Paul, 1960.
- Bousquet, G.H., dan Joseph Schacht (eds.). *Selected Works of C. Snouck Hurgronje*. Leiden: E.J. Brill, 1957.
- Bowie, Norman E. “A Kantian Theory of Capitalism.” *Business Ethics Quarterly* 8, no. S1 (1998): 37-60.

- Bowie, Norman E., Robert L. Simon, *The Individual and the Political Order: An Introduction to Social and Political Philosophy*. Ed. ke-3. New York-Oxford: Roman & Littlefield Publisher, Inc., 1998.
- Bowles, Samuel. *Microeconomics: Behavior, Institutions, and Evolution*. Princenton dan Oxford: Princenton University Press, 2004.
- Bratton, John, dan David Denham. *Capitalism and Classical Social Theory*. Ed. ke-2. Toronto: University of Toronto Press, 2014.
- Braudel, Fernand. *Civilization & Capitalism 15th-18th Century*. Vol. 2: *The Wheels of Commerce*. New York: Harper & Row, 1982.
- Brunkhorst, Hauke. *Critical Theory of Legal Revolutions: Evolutionary Perspective*. London: Bloomsbury, 2014.
- Buckle, Stephen. *Natural Law and the Theory of Property: Grotius to Hume*. London: Clarendon Press, 1991.
- Al-Bujairimī, Sulaimān ibn ‘Umar ibn Muḥammad. *Ḥāsyiyah al-Bujairimī*. Juz 3. Turki: al-Maktabah al-Islāmiyyah, t.t.
- Bungin, Burhan. *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Al-Būrnū, Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad. *Al-Wajīz fī Ī dāḥ Qawā’id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*. Cet. Ke-4. Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1996.
- Al-Būṭāmī, Aḥmad bin Ḥajar Āli. *Al-‘Aqāid al-Salafīyyah bi Adillatihā al-Naqliyyah wa al-‘Aqliyyah*. Juz 2. Cet. ke-2. Qatar: Dār al-Kutub al-Qaṭariyyah, 1992.
- Butgereit, Brent, dan Art Carden. “Capitalism, Socialism and Calculation.” *Institute of Economic Affairs*. Oxford: Blackwell Publishing, 2011.
- Al-Būṭī, Muḥammad Sa’id Ramaḍān. *Muḥādarat fī al-Fiqh al-Muqāran*. Beirut: Dār al-Fikr al-Mu’āṣir, 1981.

- Campsie, John S. *Conflict and Co-operation: An Introduction to Some Problems of International Relations in the Twentieth Century*. Canada: J.M. Dent, 1967.
- Carimokam, Sahaja. *Muhammad and The People of The Book*. New York: Xlibris Corporation, 2010.
- Cereti, Carlo G. *La letteratura Pahlavi*. Milan: Mimesis, 2001.
- Chapra, M. Umar. *The Islamic Welfare State and its Role in the Economy*. Leicester. U.K.: The Islamic Foundation, 1980.
- . *Islam and the Economic Challenge*. Nairobi: The Islamic Foundation, 1992.
- . *Islam and Economic Development*. New Delhi: Adam Publisher & Distributors, 2007.
- Chatterjea, Kishore Mohan. *The Law Relating to the Transfer of Immoveable Property: Inter Vivos With an Appendix Containing the Transfer of Property Act, Being Act IV of 1882*. London: W. Thacker & CO, 1890.
- Cherouny, Henry William. *Labor and Liberty: The Historic Development of the Labor Question*. New York: The Cherouny Printing and Publishing Co, 1885.
- Chiba, Masaji. (ed.), *Asian Indigenous Law in Interaction with Received Law*. London-New York: KPI, 1986.
- Chinhengo, Austin M. *Essential Jurisprudence*. Ed. ke-2. London-Sydney: Cavendish Publishing Limited, 2000.
- Choudhury, Marudul Alam. *Contributions to Islamic Economy Theory: A Study in Social Economics*. New York: St. Martin's Press, 1986.
- Christensen, A. *L'Iran sous les Sasanides*. Terj. R., Yasemi from French. Tehran: Payam Press, 1994.
- Clarke, Alison, dan Paul Kohler. *Property Law: Commentary and Materials*. New York: Cambridge University Press, 2005.
- Clarke, Alison. *Principles of Property Law*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2020.

- Coen, B. *Introduction to the Sociology*. Terj. Salaci M. Tehran: Farhange Moaser Press 1993.
- Cotula, Lorenzo (ed.). "Executive Summary." *Changes in "Customary" Land Tenure Systems in Africa*. Prancis: IIED, 2007.
- Coulson, N.J. *Fī Tārīkh at-Tasyrī' al-Islāmiyyah/A History of Islamic Law*. Beirut: al-Mu'assasah al-Jāmi'iyyah ad-Dirāsāt wa an-Nasyr wa at-Tauzī', 1992.
- . *A History of Islamic Law*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964.
- . *A History of Islamic Law*. USA and UK: Aldine Tracsaction, 2011.
- . *Conflict and Tension in Islamic Jurisprudence*. Chicago: The University of Chicago Press, 1968
- . *Succession in the Muslim Family*. London: Cambridge University Press, 1971.
- Cowan, David. *Graet Debates in Property Law*. Ed. ke-1. UK: Palgrave Macmillan, 2012.
- Cristman, John. *The Myth of Property: Toward an Egalitarian Theory of Ownership*. New York: Oxford University Press, 1994.
- Crone, Patricia. *From Kavad to al-Ghazali: Religion, Law and Political Thought in the Near, c.600-c.1100*. Routledge, New York: Ashgate Publishing, 2017.
- Cughṭā'ī, Muhtork: Oxām. *Iqbal, New Dimensions: A Collection of Unpublished and Rare Iqbalian Studies*. Pakistan: Sang-e-Meel Publications, 2003.
- D'Alberti, Marco. "Administrative Law and the Public Regulation of Markets in A Global Age." Dalam Susan Rose-Ackerman, Peter L. Lindseth (eds.). *Comparative Administrative Law*. Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 2010.
- Dabbūr, Anwar Maḥmūd. *Niẓām al-Istighlāl al-Arāḍī al-Zirā'iyyah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah: Dirāsah*

- Muqāranah bi al-Qawānīn al-Waḍ'īyyah*. Juz 1. Al-Qāhirah: Dār al-Šaqāfah al-'Arabiyyah, 1987.
- Daghī , 'Alī Muḥyī al-Dī n al-Qarah. *Al-Muqaddimah fī al-Māl wa al-Iqtisād wa al-Milkiyyah wa al-'Aqd*. Cet. ke-1. ttp.: Dār al-Basyāir al-Islāmiyyah, 1997.
- Al-Daqqar, 'Abd al-Ghanī . *Silsilah 'A'lām al-Muslimī n 23: al-Imām Mālik ibn Anas, Imām Dār al-Hijrah (93-179 H)*. Cet. ke-3. Damaskus: Dār al-Qalam, 1998.
- Al-Dāqūqī, 'Abbās Qāsim Maḥdī. *Al-Ijtihād al-Qaḍā-ī: Maḥmūhu-Ḥālatuhu-Niṭāquhu (Dirāsah Muqāranah bi al-Fiqh al-Islāmī Mu'azzazah bi at-Taṭbīqāt al-Qaḍā-īyyah)*. Al-Qāhirah: al-Markaz al-Qaumī li al-İşdārāt al-Qānūniyyah, 2015.
- Al-Darainī, Faṭḥī. *Ḥaqq al-Ibtikār fī al-Fiqh al-Islāmī al-Mmuqāran*. Cet. ke-2. Beirūt: al-Mu'assasah al-Risālah, 1981.
- Darwīs, 'Ādil Muḥammad. *Nizām al-Māl fī al-Islām*. Kairo: Jāmi'ah al-Azhar, 1997.
- Daryae, T. *Sasanid Iran (224–651 CE): Portrait of a Late Antique Empire*. New York, Mazda Publishers, 2008.
- Daryae, Touraj. *Sasanian Persia: The Rise and Fall of an Empire*. London & New York: I.B.Tauris & Co. Ltd in association with the Iran Heritage Foundation, 2009.
- Dasūqī, 'Āšim. *Dirāsāt fī al-Tārīkh al-Iqtisādī*. Al-Qāhirah: Dār al-Kitāb al-Jāmi'ī, 1981.
- Dawābah, Asyraf. *Al-Azmah al-Māliyah al-'Ālamiyah wa al-Hulūl al-Islāmiyah wa Daur al-Maşārif Namūzajan*. Riyāḍ: Dār al-Salām li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī, 2009.
- Dāwud, Ḥasan Yūsuf. *Al-Maşraf al-Islāmī li al-Istiṣmār al-Zirā'ī: Namūzaj Muqtarah*. Cet. ke-1. Al-Qāhirah-Miṣra: Dār al-Nasyr li al-Jāmi'āt 2005.
- Dāwudī, Ajmad bin Naṣr. *Kitāb fī al-Amwāl: Makḥṭūṭ*. Amman, Jordan: Dār al-Ḥāmid li al-Nasyr wa al-Tauzī', 2001.

- Delaporte, Florence. *Bilādu Mā baina al-Nahrain: al-Ḥaḍaratān al-Bābiliyyah wa wa al-Asywarīyyah*. Terj. Muḥrarram Kamāl. Cet. Ke-3. Mesir: al-Hai'ah al-Mmişriyyah al'Āmmah li al-Kitāb, 1997.
- Denny, Frederick. *An Introduction to Islam*. 4th Edition. London & New York: Roudledge Taylor & Francis Group, 2016.
- Al-Dihlawī. *Hujjat Allāh al-Balīghah*. Juz 2. Lahore, 1953.
- Al-Dīrsyawī, Muḥammad Junaid. *Al-Ḥurriyyah al-Iqtisādiyyah wa Madā Şulṭān al-Daulah fī Taqyīdihā fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Damaskus: Dār al-Nawādir, 2010.
- Ḍiyā'ī Far, Sa'īd. *Al-Imām al-Khumainī: Manhajuhu fī al-Ijtihād wa Madrasatuhu al-Fiqhiyyah*. Ed. Ra'd al-Ḥajjāj. Beirūt: Markaz al-Ḥaḍārah li Tanmiyyah al-Fikr al-Islāmī, 2016.
- Diamon, Michael. *The Public Nature of Private Property*. London & New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2016.
- Dogan, Recep. *Uşūl al-Fiqh: Methodology of Islamic Jurisprudence*. USA: Tughra Books, 2013.
- Donner, Fred. *The Early Islamic Conquests*. Princeton: Princeton University Press, 1981.
- Ad-Dūkhī, Falāḥ 'Abd al-Ḥasan. *Miṇṭaqah al-Farāg at-Tasyrī'ī: Dirāsah Muqāranah li Ahammi al-'Anāşir al-Murūnah li at-Tasyrī' al-Islāmiyyah*. Cet. ke-2. Qum, Iran: Markaz al-Muşṭafā al-'Ālamī li al-Tarjamah wa an-Nasyr, 1437 H.
- Durant, Well Wayryl. *Qişşah al-Ḥaḍārah*. Terj. Zakī Najīb Maḥmūd. Juz 1. Al-Qāhirah: Maktabah Lajnah al-Bayān, 1949.
- Durkheim, Émile. *Socialism (Le Socialisme)*. USA: Collier Books, 1962.

- Durrant, Russil, dan Tony Ward. *Evolutionary Criminology: Towards a Comprehensive Explanation of Crime*. New York, London: AP Elsevier, 2015.
- El-Dean, Bahaa Ali. *Privatization and the Creation of a Market-Based Legal System: The Case of Egypt*. Leiden-Boston: Brill, 2002.
- Engineer, Asghar Ali. *Islam and Liberation Theology: Essay on Liberative Element in Islam*. Terj. Agung Prihantoro. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Epps, Henry. *Altruism: Charity and Hope for The World*. California-US: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2012.
- Esposito, John L. *Women in Muslim Family Law*. New York: Syracuse University Press, 1982.
- Fā'ūr, 'Alī. *Sīrah 'Umar bin 'Abd al-'Azīz*. Cet. ke-1. Beirut: Dār al-Hādī, 1991.
- Al-Fāḍilī, Muḥammad 'Abbās. *Daur aḍ-Ḍabṭ al-Idārī al-Bī'ī fī Ḥimāyah Jamāl al-Mudun: Dirāsah Muqāranah*. Al-Qāhirah: al-Markaz al-'Arabī li an-Nasyr wa at-Tauzī', 2017.
- Al-Fāsī Taqī ad-Dīn Muḥammad bin Aḥmad al-Makkī. *Az-Zuhūr al-Muqtaṭafah min Tārīkh Makkah al-Musyarrrafah*. Cet. ke-1. Beirut: al-Maktabah aš-Šaqāfiyyah, 2001.
- . *Syifā' al-Garām bi Akhbār al-Baladi al-Ḥarām*. Juz 2. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.
- Faḍil, Syarūq 'Abbās, dan Asmā' Šabr 'Ulwān. *Al-Mas'ūliyyah al-Madaniyyah 'an Maḍārr al-Jiwār gair al-Ma'lūfah*. Cet. ke-1. Al-Qāhirah: al-Markaz al-'Arabī li an-Nasyr wa at-Tauzī', 2017.
- Faḍl, Munzīr 'Abd al-Ḥusain. *Al-Wazīfah al-Ijtimā'iyah li al-Milkiyyah al-Khaṣṣah fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa al-Qānūn al-'Irāqī*. Iraq: al-Jumhūriyyah al-'Irāqīyyah, Wizārah al-I'lām, 1977.

- . *Al-Milkiyyah al-Isytirākiyyah fī al-‘Irāq*. Bagdād: Mansyūrāt Maktabah at-Tahrīr, 1980.
- . *Al-Waẓīfah al-Ijtimā‘iyyah li al-Milkiyyah al-Khaṣṣāh*. Bagdād: Dār al-Ḥurriyyah li aṭ-Ṭibā‘ah, Maktabah Mansyūrāt Wizārah al-A’lām, 1977.
- Fagothey, Austin. *Right and Reason: Ethics in Theory and Practice*. US: Mosby Publishing, 1967.
- Fahdāwī, Fahmī Khalīfah. *Al-Idārah fī al-Islām: al-Manhajīyyah wa at-Taṭbīq wa al-Qawā‘id*. Amman, Jordan: Dār al-Muyassarah li an-Nasyr wa at-Tauzī‘, 2001.
- Al-Fakahānī, Ḥasan. *Mausū‘ah al-Qaḍā’ wa al-Fiḡh li ad-Daul al-‘Arabiyyah*. Vol. 7. Al-Qāhirah: ad-Dār al-‘Arabiyyah li al-Mausū‘āt al-Qānūniyyah, 1975.
- Fakhrī, Muḥammad Syauqī. *Al-Maẓhab al-Iqtiṣādī fī al-Islām*. Al-Qāhirah: al-Hai‘at al-Miṣriyyah al-‘Āmmah li al-Kitāb, 2006.
- FAO. *Land Tenure Studies 3: Land Tenure and Rural Development*. Roma: FAO, 2002.
- Faraj, ‘Abd ar-Rāziq Ḥasan. *Dawām Ḥaqq al-Milkiyyah: Dirāsah Muqāranah*. A. al-R.H. Faraj, 1981.
- Far, Sa’īd Diyā’ī. *Al-Imām al-Khumainī: Manhajuhu fī al-Ijtihād wa Madrasatuhu al-Fiḡhiyyah*. tarjamah wa taḥqīq. Ra’d al-Ḥajjāj. Beirut: Markaz al-Ḥaḍārah li Tanmiyyah al-Fikr al-Islāmī, 2016.
- Farḥāt, Muḥammad Yūsuf. *Qaḍāyā Iqtiṣādiyyah Mu‘āṣirah, al-‘Aulamah, al-Khaṣkhaṣah, al-Istiṣmār al-Ajnabī al-Mubāṣir: Maḡhūm at-Tanmiyyah, al-Iqtiṣād al-Lubnānī, Khaṣkhaṣah ar-Rijī, al-Miyāh al-‘Arabiyyah, al-Iqtiṣād al-Islāmī, al-Azmah al-Māliyyah al-‘Alāmiyyah*. Beirut: Dār aṭ-Ṭalī‘ah li aṭ-Ṭibā‘ wa an-Nasyr, 2010.
- Faruqi, Naser I., Asit K. Biswas, dan Murad J. Bino (eds.). *Water Management in Islam*. Tokyo: UNU Press, 2001.
- Al-Faruqi, Isma’il R.A. “Forward.” To *Contemporary Aspects of Economic Thinking in Islam*. Canada: American Trust Publications (ATP), 1980.

- Fauzi, Noer. *Bersaksi untuk Pembaruan Agraria: Dari Tuntutan Lokal hingga Kecenderungan Global*. Yogyakarta: Insist Press, 2003.
- Fauzī, Fārūq ‘Umar. *Al-Jaisy wa as-Siyāsah fī al-‘Aşri al-Umawī wa Maṭla’ al-‘Aşri al-‘Abbāsī 41 H/661 M-334H/956 M: Dirāsah Tārīkhiyyah*. Cet. ke-1. Oman: Dār Majdalāwī li ar-Nasyr wa at-Tauzī‘, 2005.
- Al-Fayyāḍ, Muḥammad Ishāq. *Al-Anmūzaj fī Manhaj al-Hukūmah al-Islāmiyyah*. Qum: Maktabah al-Fayyāḍ, 1426 H.
- Al-Fayyad, Muhammad. “Islam, Pembebasan, dan Keadilan Agraria: Pengantar.” Dalam Gita Anggraini. *Islam dan Agraria: Telaah Normatif dan Historis Perjuangan Islam dalam Merombak Ketidakadilan Agraria*. Yogyakarta: STPN Press, 2016.
- Feenstra, R. *Hugo Grotius, a Great European, 1583-1645: Contributions Concerning his Activities as A Humanist Scholar*. USA: Meinema, 1983.
- Fernando, A.C. *Business Environment*. India: Pearson, 2011.
- Fischer, Michael M. J. Mehdi Abedi. *Debating Muslim: Cultural Dialogues in Postmodernity and Tradition*. USA: University of Wisconsin Press, 1990.
- Fisher, I. *Elementary Principles of Economics*. New York: Macmillan, 1923.
- Foot, Philippa. *Moral Dilemmas and Other Topics in Moral Philosophy*. Oxford: Clarendon Press, 2002.
- Forni, Nadia. *Land Tanure Policies in the Middle East*. Rome: FAO, 2005.
- Friedmann, W. *Legal Theory*. Ed. ke-4. London: Stevens & Sons Limited, 1960.
- Frye, R. N. *The Golden Age of Persia. The Arabs in the East*. London: Weidenfeld and Nicolson, 1975.
- Furayḥah, Anīs. *Modern Lebanese Proverbs Collected at Rās Al-Matn, Lebanon; Collated, Annotated and Translated to*

- English*. Volume 1. Lebanon: American University of Beirut, 1953.
- Fusfeld, Daniel Roland. *The Age of the Economist*. London: Scott, Foresman/Little, Brown Higher Education, 1990.
- Al-Gāzī, Ibrāhīm ‘Abd al-Karīm. *Tārīkh al-Qānūn fī Bilādī Wādī ar-Rāfidīn wa ad-Daulah ar-Rūmāniyyah*. Baghdād: Maṭba‘ah al-Azhar, 1973.
- Al-Gaḍbān, Munīr Muḥammad. *Silsilah A‘lām al-Muslimīn 21: Mu‘āwiyah ibn Abī Sufyān, Ṣaḥābī al-Kabīr wa Maliki Mujāhid*. Beirut, Damascus: Dār al-Qalam, 1980.
- Al-Ganī, Muḥammad Ilyās ‘Abd. *Tārīkh al-Masjid an-Nabawī asy-Syarīf*. Al-Madīnah al-Munawwarah: Maktabah al-Malik Fahad al-Waṭaniyyah, 1999.
- Ganīm, Aḥmad Muḥamad. *Taṭūr al-Milkiyyah al-Fardiyyah*. Al-Qāhirah: Dār an-Nadīm, Dār al-Miṣriyyah li aṭ-Ṭibā‘ah wa an-Nasyr, 1957.
- Gardner , Gary T. *Invoking the Spirit: Religion and Spirituality in the Quest for a Sustainable World*. Washington D. C: Worldwatch Institute, 2002.
- Al-Gazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad. *Al-Mustaṣfā fī ‘Ilm al-Uṣūl*. Ed. Muḥammad ‘Abd as-Salām ‘Abd asy-Syāfī. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000.
- . *Syifā al-Galīl fī Baiāna asy-Syabahi wa al-Mukhaiyal wa Masālik at-Ta‘līl*. Ed. Ḥamdān al-Kabīsī. Bagdad, Maṭba‘ah al-Irsyād, 1971.
- . *Iḥyā’ ‘Ulūm ad-Dīn*. Juz 1. Beirut: Dār al-Ma’rifah, t.t.
- . *Al-Iqtisād fī al-I‘tiqād*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.
- Al-Gazālī, Muḥammad. *Al-Islām al-Muftarā ‘Alaih baina asy-Syuyū’iyyīn wa ar-Ra’sumālīyyīn*. Cet. ke-6. Mesir: Syirkah Nahḍah li aṭ-Ṭibā‘ah wa an-Nasyr wa ar-Tauzī’, 2005.
- . *Al-Islām wa al-Auḍā’ al-Iqtisādīyyah*. Cet. ke-3. Al-Qāhirah: Nahḍah Miṣra li aṭ-Ṭibā‘ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī’, 2005.

- . *Al-Islām wa al-Manāhij al-Isytirākiyyah*. Cet. ke-4. Al-Qāhirah: Syirkah Nahḍah Miṣrā, 2005.
- Gibb, H.A.R dan J. H. Kramers. *Shorter Encyclopedia of Islam*. Leiden: E.J.Brill, 1974.
- Gibb, H.R. *Mohammedanism*. Oxford: Oxford University Press, 1967.
- Gibb, Hamilton. *Studies on the Civilization of Islam (Dirāsah fī Hadlārati'l Islām)*. Terj. oleh Iḥsān 'Abbās et al. Beirut. Dār al-'Ilm li al-Malayin, 1979.
- Gibbon, Edward. *The History of the Decline and Fall of the Roman Empire*. Vol. 8. London: Creative Media Partners, LLC, 2019.
- Grigoriadis, Theocharis. "Aristotle vs. Plato: The Distributive Origins of the Cold War." *Diskussionsbeiträge*. No. 9. Berlin: Freie Universität Berlin, Fachbereich Wirtschaftswissenschaft, 2018.
- Gronow, Jukka. *On the Formation of Marxism Karl Kautsky's Theory of Capitalism, the Marxism of the Second International and Karl Marx's Critique of Political Economy*. Leiden dan Boston: Brill, 1986.
- Al-Gubāsyī, Ṭulbah 'Abd al-'Āl. *Aḥkām Naz'u al-Milkiyyah wa Taqyīduhā li Maṣlahah al-Gair fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah: Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah*. Mesir: Jāmi'ah al-Mansūrah Kuliyah al-Ḥuqūq, 2001.
- Gulaid, Mahmoud A. *Effect of Islamic Laws and Institutions on Land Tenure with Special Reference to Some Muslim Countries*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2002.
- . *Land Ownership in Islam (A Survey)*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2001.
- Gulaid, Mohamoud Awaleh, dan Mohamed Aden Abdullah. *Qirā-at fī al-Māliyyah al-'Āmmah fī al-Islām*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 1995.
- Gyselen, Rika. *La géographie administrative de l'empire sassanide: les témoignages sigillographiques*. Paris:

- Groupe pour l'Étude de la Civilisation du Moyen-Orient, 1989.
- Al-Ḥā-irī, Kāzim. *Al-Marja'iyah wa al-Qiyādah*. Cet. ke-3. Qum: Dār at-Tafsīr, 1425 H.
- Ḥājji, Ja'far 'Abbās. *Al-Maḏhab al-Iqtisādī fī al-Islām: Dirāsah Maḏhabiyyah Falsafiyah Muqārinah li ar-Rāsumāliyyah wa al-Isytirākhiyyah wa al-Islām*. Vol. 1 & 2. Beirūt: Maktabah al-Alfain, 1987.
- Al-Ḥāmid, Muḥammad. *Naḏrāt fī Kitāb Isytirākhiyyah al-Islām*. Damaskus: Maṭba'ah al-'Ilm, 1382 H.
- Al-Ḥārīsī, Jarībah bin Aḥmad. *Al-Fiqh al-Iqtisādī li Amīr al-Mu'minīn Umar bin Khaṭṭāb*. Jeddah Saudi Arabia: Dār al-Andalus al-Khaḍrā', 2003.
- Ḥabīb, Kāzim. *Lamaḥāt min Niḍal Ḥarakah at-Taḥarrur al-Waṭanī li Sya'b al-Kurdī fī Kurdistān al-'Irāq*. Iraq: Dār al-'Arās li aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr, 2005.
- Al-Ḥabāsī, Muḥammad Yūnus Ḥamādah. *Kasb al-Milkiyyah fī al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qānūn al-Waḍ'ī*. Oman: Dār Gīdā' li an-Nasyr, 2016.
- Ḥabīb, Muḥammad Bakr Ismā'īl. *Maqāshid asy-Syarī'ah Ta'ṣīlan wa Taf'īlan*. Makkah: Dār aṭ-Ṭibā'ah al-Ḥaḍrā', 2006.
- Al-Ḥafnāwī, 'Abd al-Majīd Muḥammad. *Tārīkh an-Nīzam al-Ijtīmā'iyah wa al-Qānūniyyah*. Mesir: Dār al-Maṭbū'āt al-Jāmi'iyah, 1973.
- Ḥaidar, Fu'ād. *At-Tanmiyyah wa at-Takhalluf fī al-'Ālam al-'Arabī: Ṭurūḥāt Tanmūwiyyah li at-Takhalluf*. Al-Qāhirah: Dār al-Fikr al-'Arabī li aṭ-Ṭibā'ah li an-Nasyr wa at-Tauzī', 1990.
- Al-Ḥaidarī, Ibrāhī. *Sūsiyūlūjiyya al-'Anafu wa al-Irhāb*. Beirūt: Dār as-Sāqī, 2017.
- Ḥaidarī, Kamāl. *Ma'ālim at-Tajdīd al-Fiqhī: Mu'ālajah Isykāliyyah aš-Šābit wa al-Mutagayyir fī al-Fiqh al-Islāmī*. Ed. Khalīl Rizq. Beirūt: Dār al-Hādī li aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī', 2008.

- Al-Haitamī, Alī ibn Abī Bakar. *Majma' al-Zawā'id*. Juz 5. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Arābī, 1407.
- Ḥakīm, Muḥammad Bāqir. *Al-Mujtama' al-Insānī fī al-Qur'an al-Karīm*. Beirut: Mu'assasah at-Tārīkh al-‘Arābī li at-Ṭibā‘ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī‘, 2004.
- Al-Ḥalībī, Ibn Amīr al-Ḥājj. *At-Taqrīr wa at-Taḥbīth Syarḥ ‘alā at-Taḥrīr fī Uṣūl al-Fiḥ al-Jāmi‘ baina Iṣṭilāḥī al-Ḥanafiyyah wa asy-Syāfi‘iyyah*. Ed. ‘Abdullāh Maḥmūd Muḥammad ‘Umar. Juz 3. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999.
- Al-Ḥamīd, Šāib ‘Abd. *Asy-Syahīd Muḥammad Bāqir aṣ-Šadr: Min Fiḥ al-Ahkām ilā Fiḥ an-Nazariyyāt (Silsilah A‘lām al-Fikr al-Iṣlāḥ fī al-‘Ālam al-Islāmī)*. Vol. 1. Beirut: Markaz al-Ḥaḍārah li Tanmiyyah al-Fikr al-Islāmī, 2008.
- Al-Ḥaqq, Aḥmad Lisān. *Al-Wasīṭ al-Iqtiṣād as-Siyāsī al-Islāmī wa al-‘Aṣrī wa Niẓām asy-Syarikāt al-Islāmiyyah wa al-‘Aṣriyyah*. Casablanca: Markaz al-Khidmah al-Muttaḥidah, 1993.
- Ḥasaballāh, ‘Alī. *Uṣūl al-Tasyrī‘ al-Islāmī*. Kuwait: Dār al-Ma‘rifah, t.t.
- Ḥasan, Ḥusain Ḥāmid. *Nazariyyah al-Maṣlahah fī al-Fikih al-Islām*. Beirut: Dār an-Nahḍah al-‘Arabiyah, 1971.
- Al-Ḥasanī, Muḥammad Balbasyīr. *Quṭūf Dāniyyah min Fikr ‘Allāl al-Fāsī, Kitāb al-‘Ilm: Silsilah Jadīdah Kitāb al-‘Ālam*. Vol. 4. Suriah: Jarīdah al-‘Ilm, 1991.
- Ḥasan, Salīm. *Miṣr al-Qadīmah: min Awākhir ‘Ahd Baṭlīmūs aṣ-Šānī ilā Ākhir ‘Ahd Baṭlīmūs ar-Rābi’*. Juz 15. Al-Qāhirah: al-Hai‘ah al-Miṣriyyah al-‘Āmmah li al-Kitāb, 1992.
- Ḥasan, Sayyid Dasūqī. *Al-Muqaddimāt fī Masyāri‘ al-Ba‘ṣ al-Ḥaḍārī*. Mesir: al-Maktab al-Miṣrī al-Ḥadīṣ, 1986.
- Ḥawwās, ‘Abd al-Wahhāb as-Sayyid. *Al-Iqtā’ fī al-Fiḥ al-Islāmī wa Aṣaruhu fī at-Tanmiyyah*. Beirut: Dār an-Nahḍah al-‘Arabiyah 1994.

- Ḥimrān, Rasyīd. *Mabādi' al-Iqtisād wa 'Awāmil at-Tanmiyyah fī al-Islām*. Algeria: Dār Haumah li aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī', 2003.
- Ḥilmī, Muṣṭafā. *Nizām al-Khilāfah fī al-Fikr al-Islāmī*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- . *Al-Akhlāq baina al-Falāsifah wa 'Ulamā' al-Islām*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Al-Ḥirdān, 'Audā 'Abbās. *Fiqh as-Sulṭah 'inda aṭ-Ṭawā-if wa al-Furuq al-Islāmiyyah*. Al-Qāhirah: Dār an-Nahḍah, 2010.
- Ḥubb Allāh, 'Alī. *Dirāsāt fī Falsafah Uṣūl al-Fiqh wa asy-Syarī'ah wa Naẓariyyah al-Maqāsid*. Beirut, Libanon: Dār al-Hādī li aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī', 2005.
- Al-Ḥusain, Abū Ya'lā Muḥammad ibn. *Al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah*. Kairo: 'Isā al-Bābī al-Ḥalibī, 1939.
- Ḥusain, Ṭahā. *Asy-Syaikhānī*. Al-Qāhirah: Mu'assasah Hindāwī li at-Ta'līm wa aṣ-Ṣaḳāfah, 2012.
- Al-Ḥusain, Walīd 'Alī. *I'tibāru Ma'ālāt al-Af'āl wa Aṣaruhā al-Fiqhī*. Riyāḍ: Dār at-Tadmuriyyah, 2009.
- Al-Ḥusainī, Abū Naṣr Aḥmad. *Al-Milkiyyah fī al-Islām*. Kairo: Dār al-Kutub al-Harbiyah, 1952.
- Al-Ḥusainī, Muḥammad. *Muḥammad Bāqir aṣ-Ṣadr: Ḥayāh Ḥāfilah, Fikr Khallāq*. Lebanon: Dār al-Maḥajjah al-Baidā', 2005.
- Hānī, Ḥusain Banī. *Ḥawāfir al-Istiṣmār fī an-Nizām al-Iqtisādī al-Islāmī, Maḥmūhā, Anwā'uhā, Aḥammīyatuhā: Dirāsah Muqāranah*. Bagdād: Dār al-Kindī li an-Nasyr wa at-Tauzī', 2004.
- Hāsyim, Salāh. *Al-'Adālah wa al-Ḥaqq fī at-Tanmiyyah*. Cet. ke-1. Al-Qāhirah: Aṭlas li an-Nasyr wa al-Intāj al-I'lāmī, 2017.
- Haara, Heikki. *Pufendorf's Theory of Sociability: Passions, Habits and Social Order*. Switzerland: Springer, 2018.
- Habdas, Magdalena. "The Community of Owners's Regulation of Common Property in Polish Condominium Schemes."

- Dalam Nicholas Hopkins (ed.). *Modern Studies in Property Law*. Vol. 7. Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing, 2013.
- Ḥabīb, Kāzim. *Lamahāt min Niḍal Ḥarakah al-Taḥarrur al-Waṭanī li Sya' b al-Kurdī fī Kurdistān al-'Irāq*. Irak: Dār al-'Arās li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr, 2005.
- Al-Ha-irī. *Asās al-Ḥukūmah al-Islāmiyyah*. Beirut: Maṭba'ah an-Nīl, 1399 H.
- Ḥaidarī, Kamāl. *Ma'ālim al-Tajdīd al-Fiḥī: Mu'ālajah Isyāliyyah al-Ṣābit wa al-Mutaghayyir fī al-Fiḥ al-Islāmī*. Tarjamah wa taḥqīq, Khalīl Rizq. Beirut: Dār al-Hādī li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 2008.
- Haikal, Khair. *Al-Jihād wa al-Qitāl fī al-Siyāsah al-Syar'iyyah: Risālah Duktūrāh 'an al-Jihād fī Ṣadr al-Islām wa al-'Aṣr al-Ḥadī ṣ*. Vol. 1. Damaskus: Dār Ibn Ḥazm, t.t.
- Al-Haiṣamī, Alī ibn Abī Bakar. *Majma' az-Zawāid*. Juz 5. Beirut: Dār al-Kutub al-'Arabī, 1407.
- Al-Haitamī, Ibn Ḥajar asy-Syāfi'ī. *Hawāsyī Tuḥfah al-Muḥtāj bi Syarḥ al-Minhāj*. Juz 9. Mesir: Maṭba'ah Muṣṭafā Muḥammad, t.t.
- Hajras, Sa'ad. *Al-Isḫāḥ al-Zirā'ī: Tārīkhan, Falsafatan, wa Manhājan*. Al-Qāhirah: Maktabah 'Ain Syams, 1970.
- Ḥakīm, Muḥammad Bāqir. *Al-Mujtama' al-Insānī fī al-Qur'ān al-Karīm*. Beirut: Mu'assasah al-Tārīkh al-'Arabī li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 2004.
- Haldon, John. *The State and the Tributary Mode of Production*. London-New York: Verso, 1993.
- Hallaq, Wael B. *Authority, Continuity, and Change in Islamic Law*. New York: Cambridge University Press, 2001.
- Ḥamādah, Maḥmūd Yūnus al-Ḥadīṣī. *Kasb al-Milkiyyah fī al-Fiḥ al-Islāmī wa al-Qānūn al-Waḍ'ī*. Oman: Dār Ghīdā' li al-Nasyr, 2016.
- Al-Hamdānī, Abū Bakar Aḥmad bin Muḥammad al-Ma'rūf bi Ibn al-Faqīh. *Mukhtaṣar Kitāb al-Buldān*. Beirut: Dār Ihyā' at-Turās al-'Arabī, 1988.

- Hameed, S. *Islamic Accounting-Accounting for the New Millennium*. Malaysia: Department of Accounting International Islamic University Malaysia, 2001.
- Hamī m, ‘Abd al-Laṭī f. *Al-Daulah wa Waṣī fatuhā al-Iqtisādiyyah fī al-Fiqh al-Siyāsī : Dirāsah Muqāranah*. ‘Ammān: Dār ‘Ammār li al-Nasyr wa al-Tauzī’, 2004.
- Ḥanbūlah, Muḥammad ‘Alī. *Al-Waṣīfah al-Ijtimā’iyyah li al-Milkiyyah al-Khāṣṣah: Dirāsah Muqāranah fī al-Qawānīn al-Waḍ’iyyah wa al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*. Al-Qāhirah: Jāmi’ah ‘Ain Syams, 1974.
- Ḥanbūlah, Muḥammad ‘Alī. *Al-Waṣīfah al-Ijtimā’iyyah li al-Milkiyyah al-Khāṣṣah: Dirāsah Muqāranah fī al-Qawānīn al-Waḍ’iyyah wa al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*. Al-Iskandariyyah: Dār Būr Sa’īd, 1974.
- Haq, Ziaul. *Landlords and Peasants in Early Islam: A Study of the Legal Doctrine of Muzara’a or Sharecropping*. Delhi-India: IDARAH-I ADABIYAT-I, 2009.
- Harīdī, Asmā’ ‘Abd al-Mun’im. *Mafhūm al-Nubuwwah fī al-Qur’ān al-Karīm*. Al-Qāhirah: Jāmi’ah ‘Ain Syams, 2001.
- Hart, Michael. *Seratus Tokoh yang Paling Berpengaruh dalam Sejarah*. Terj. Mahbub Junaidi. Jakarta: Pustaka Jaya, 1993.
- Hasan, Ahmad. *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*. Bandung: Pustaka Salman, 1984.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fikih Muamalat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Haviland, William A., Gary W. Crawford, Shirley Fedorak. *Human Evolution and Prehistory*. Toronto, Canada: Nelson Education Limited, 2005.
- Hayali, Nuri Majid. “Irrigation, Salinity and Drainage in the Iraq Delta.” *Sixt Near East-South Asia Regional Irrigation Practices Seminar*. March 19-30. Amman-Jordan: The Government of Jordan, 1966.
- Hazlitt, Henry. *The Foundations of Morality*. Pricenton: D. Van Nostrand Company, Inc, 1964.

- Heller, Henry. "Introduction": *The Birth of Capitalism A Twenty-First-Century Perspective*. London: Pluto Press, 2011.
- Hilālī, Sa'd ad-Dīn Mus'ad. *Al-Jadīd fī al-Fiḥ as-Siyāsī al-Mu'āṣir*. Al-Qāhirah: Maktabah Wahbah li an-Nasyr wa at-Tauzī', 2011.
- Hinz, Walther. *Islamische Masse und Gewichte*. Leiden: Brill, 1955.
- Hirst, Paul Q. *Law, Socialism and Democracy: Routledge Library Editions Political Science*. New York: Routledge, 2010.
- Hitti, Philip K. *History of The Arabs: From the Earliest Times to the Present*. London: Macmillan Education LTD, 1989.
- Al-Hiyājanah, Wā-il Salīm dan 'Umar Muḥammad Abū Jalbān. *Muqaddimah fī at-Tarbiyyah*. Cet. ke-1. Oman: Dār al-Mu'taz li an-Nasyr wa at-Tauzī', 2016.
- Hjerrild, Bodil. *Studies in Zoroastrian Family Law: A Comparative Analysis, CNI Publications, 28*. Copenhagen: Museum Tusculanum Press, University of Copenhagen, 2003.
- Hobgood, Mary E. *Dismantling Privilege: An Ethics of Accountability*. USA: Pilgrim Press, 2000.
- Hodgskin, Thomas. *The Natural and Artificial Right of Property Contrasted: A Series of Letters, Addressed without Permission to H. Brougham, Esq. M.P. F.R.S.* London: B. Steil dan Paternoster Row, 1832.
- Holton, R.J. *The Transition from Feodalism to Capitalism*. New York: Macmillan Publishers Ltd., 1985.
- Horwitz, MJ. *The Transformation of American Law. 1780–1860*. Cambridge: Harvard Univ. Press, 1977.
- Howard, Michael C. *Transnationalism in Ancient and Medieval Societies: The Role of Cross-Border Trade and Travel*. USA: McFarland & Company, Inc., Publishers, 2012.

- Hoyland, Robert G. *Arabia and The Arabs: From The Bronze Age to the Coming of Islam*. London & New York: Routledge, 2001.
- Holmes, Robert L. *Basic Moral Philosophy*. Ed. ke-2. New York: Wadsworth Publishing Company, 1998.
- Hunt, E. K. *Property and Prophets: The Evolution of Economic Institutions and Ideologies*, Ed. 7. Armonk-New York & London-England: M.E. Sharpe, Inc., 2003.
- Hussain, Mirza Mohammad. *Islam and Socialism*. Lahore Pakistan: Muhammad Asyraf, t.t.
- Ibn ‘Asākir al-Imām al-‘Ālim al-Ḥāfiẓ Abū al-Qāsim ‘Alī ibn al-Ḥasan ibn Hibati Allāh ibn ‘Abdillāh al-Syāfi’ī. *Tārīkh Madīnah al-Damasyqi*. Juz 30. Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Ibn ‘Āsyūr, Al-Syaikh al-Islām al-Imām al-Akbar Muḥammad Ṭāhir. *Maqāṣid al-Syarī ‘ah al-Islāmiyyah*. Ed. wa Murāja’ah al-Syaikh Muḥammad al-Ḥabī b Ibn al-Khawjah. Juz 3. Qatar: Ṭab’ah Wizārat al-Auqāf wa al-Syu’ūn al-Islāmiyyah Daulah Qaṭar, 2004.
- Ibn ‘Umar, ‘Umar bin Ṣāliḥ. *Maqāṣid al-Syarī ‘ah ‘inda al-Imām al-‘Izz al-Dīn bin ‘Abd al-Salām*. Cet. Ke-1. Yordan: Dār al-Nafā’is li al-Nasyr wa al-Tawzī’, 2003.
- Ibn al-‘Arabī, al-Imām al-Qāḍī Abī Bakar al-Mālikī. *Al-‘Awāṣim min al-Qawāṣim fī Taḥqīq Mawāqif al-Ṣaḥābah ba’da Wafāh al-Nabiyyī ṣallā Allāhu ‘alaihi wa sallam*. Ed. al-Syaikh Muḥib al-Dīn al-Khaṭīb. Cet. Ke-6. Al-Qāhirah: Maktabah al-Sunnah al-Dār al-Salafīyyah li Nasyr al-‘Ilm, 1412 H.
- Ibn al-Aṣīr, Al-Imām al-‘Allāmah ‘Umdah al-Mu’arrikhīn Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Abī al-Karam Muḥammad ibn Muḥammad ibn ‘Abd al-Karīm ibn ‘Abd al-Wāḥid al-Syaibānī. *Al-Kāmil fī al-Tārīkh*. Taḥqīq Abī al-Fadā’ ‘Abd Allāh al-Qāḍī. Juz 3. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1987.
- Ibn Awānij, Muḥammad Ṣabrī. *Al-Khaṣḥaṣah: Taḥwīl al-Milkiyyah al-‘Āmmāh ilā al-Qiṭā’ al-Khaṣ fī Ḍauī al-*

- Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Cet. ke-1. Jordan, Dār an-Nafāis, 2000.
- Ibn Ḥazm, Abū Muḥammad 'Alī bin Aḥmad bin Sa'īd al-Andalusī . *Al-Īṣāl fī al-Muḥallā bi al-Āsār*. Taḥqīq 'Abd al-Ghaffār Sulaimān al-Bāndārī . Juz XI. Cet. Ke-1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010.
- Ibn Ḥazm, Abū Muḥammad 'Alī bin Aḥmad bin Sa'īd. *Al-Ihkām fī Uṣūl al-Aḥkām*. Taḥqīq al-Syaikh Aḥmad Muḥammad Syākīr. Juz 6. Cet. ke-2. ttp.: Dār al-Afāq al-Jadīdah, 2008.
- Ibn Hazm, Aḥmad ibn Sa'īd al-Zāhirī. *Al-Muḥallā*. Juz 8. Beirut: Dār al-Āfāq al-Jadīdah, t.t.
- Ibn Humām, al-Imām Kamāl al-Dīn al-Ḥanafī. *Syarḥ Faṭḥ al-Qadīr 'Alā al-Bidāyah Syarḥ al-Mubtadī*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Ibn Ibrāhīm, Abū Yūsuf Ya'qūb. *Kitāb al-Kharāj*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1979.
- Ibn Kaṣīr, al-Ḥāfiẓ 'Imād al-Dīn Abī al-Fadā-i Ismā'īl ibn 'Umar al-Qurasyī al-Dimasyqī. *Al-Bidāyah wa al-Nihāyah*. Taḥqīq 'Abd Allāh bin 'Abd al-Muḥsin al-Turkī. Cet. Ke-1. Juz 6. Madinah: Hijr li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī' wa al-I'lān, 1997.
- Ibn Khaldūn, 'Abd al-Raḥmān ibn Muḥammad. *Muqaddimah Ibn Khaldūn*. Beirut: Dār al-Fikr, 2001.
- Ibn Manī' Muḥammad ibn Sa'd al-Hāsyimī al-Baṣrī. *Al-Ṭabaqāt al-Kubrā*. Juz 3. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- Ibn Mubārak, Jāmil Muḥammad. *Nazariyyah al-Ḍarūrah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah: Ḥudūduhā wa Ḍawābiṭuhā*. Al-Iskandariyyah: Dār al-Wafā', 1988.
- Ibn Najīm, Zain al-Dīn Ibrāhīm bin Muḥammad. *Al-Asybah wa al-Nazāir*. Al-Qāhirah: Mu'assasah al-Ḥalībī, 1968.
- Ibn Najīm, Zain al-'Ābidīn bin Ibrāhīm al-Syahīr bi al-Miṣrī. *Ghamz 'Uyūn al-Baṣāir Syarḥ Kitāb al-Asybah wa al-*

- Nazā'ir*. Juz 1. Cet. Ke-1. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1985.
- Ibn Nujaim al-Ḥanafī. *Al-Baḥr al-Rāiq Syarḥ Kanzi al-Daqāiq*. Juz 5. Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1993.
- Ibn Nujaim, Zain al-Dīn bin Ibrāhīm al-Ḥanafī. *Al-Asybah wa al-Nazāir*. Beirut: Dār al-Fikr al-Mu’āṣir, 1986.
- Ibn Rabī ‘ah, ‘Abd al-‘Azī z ‘Abd al-Raḥmān. *‘Ilm Maqāṣid al-Syāri’*. Cet. Ke-4. Al-Riyāḍ: Maktabah al-‘Abī kan li al-Nasyr wa al-Tauzī’, 2019.
- Ibn Rajab, ‘Abdurraḥman al-Ḥanbalī. *Al-Istikhrāj li Aḥkām al-Kharāj*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1985.
- Ibn Salām, Abū ‘Ubaid al-Qāsim. *Kitāb al-Amwāl*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986.
- Ibn Salām, Abū ‘Ubaid al-Qāsim. *Kitāb al-Amwāl*. Beirut: Dār al-Syurūq, 1989.
- Ibn Taymiyyah, ‘Abd al-Salām ibn ‘Abd Allāh. *Kitāb al-Muntaqā fī al-Aḥkām al-Syarī ‘ah min Kalām Khair al-Bariyyah*. Juz 3. Beirut: Mu’assasah al-Rayyān, 2003.
- Ibn Taymiyyah. ‘Abd as-Salām. *As-Siyāsal-Syar’iyyah fī Iṣlāḥ al-Rā’i’ wa al-Rā’iyyah*, ed. Muhammad al-Mubarak. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1961.
- Ibn Taymiyyah. *Al-Siyāsal-Syar’iyyah fī Iṣlāḥi al-Rā’i’ wa al-Rā’iyyah*. Mesir: Dār al-Kutub al-‘Arabī, 1951.
- Ibn Zanjawīyyah, Ḥumaid. *Kitāb al-Amwāl*. Taḥqīq Syākir Ḍaib Fayyād. Juz 1. Cet. Ke-1. Al-Riyāḍ: Markaz al-Malik Faiṣal li al-Buḥūs wa al-Dirāsāt al-Islāmiyyah, 1986.
- Ibrāhīm, Aḥmad ‘Abd al-Raḥmān. *Mauqif al-Islām min al-Dunyā*. Al-Muhandisī n, Jī zah: Hajar li al-Ṭibā’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī’ wa al-I’lān, 1986.
- Al-Ījī, al-‘Allāmah al-Qāḍī ‘Aḍad ad-Dīn ‘Abd ar-Raḥmān. *Syarḥ Muntahā al-Uṣūli li al-Imām Abī ‘Umar wa ‘Usmān ibn al-Ḥājjib al-Mālikī*. Ed. Muḥammad Ḥasan Ismā’īl. Juz 2. Cet. ke-1. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004.
- Iqbal, Allama Muhammad. *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*. Ed. M. Saeed Sheikh. Ed. ke-2. Pakistan,

- Lahore: Institute of Islamic Culture and Iqbal Academy, 1989.
- Iqbāl, Syaikh Muḥammad. *‘Ilm al-Iqtiṣād [The Science of Economics]*. 2nd Reprint. Lahore: Iqbal Academy Pakistan, 1991.
- Irsyīd, Maḥmūd ‘Abd al-Karīm. *An-Nazariyyāt al-Iqtiṣādiyyah al-Muaṣṣirah fī an-Nasyāṭ al-Iqtiṣādī*. ttp.: Dār an-Nafāis, 2011.
- Irwin, Douglas A. *Free Trade under Fire*. Ed. ke-4. United Kingdom: Princeton University Press, 2015.
- Ishay, Micheline. *The History of Human Rights: From Ancient Times to the Globalization Era*. University of California Press 2008.
- Al-Isfihānī, Abu al-Faraj. *Kitāb al-Agānī*. Vol.1. Beirut: Maṭba‘ah al-Arabiyyah, t.t.
- al-Islāmiyyah, Majma’ al-Buḥūs. *The Fourth Conference of The Academy of Islamic Research, Rajab 1388, September 1968*. U.S.: Government Printing Office, 1970.
- . *At-Taujīh at-Tasyrī‘ī fī al-Islām: Min Buḥūs Mu’tamirāt Majma’ al-Buḥūs al-Islāmiyyah*. Juz 1. Al-Qāhirah: Majma’ al-Buḥūs al-Islāmiyyah, 1391 H/1971 M.
- Ismā‘īl, Khālid Mansūr. *Isykalīyyāt at-Taḥkī m fī Munāza’āt ‘Uqūr al-Nifṭi: Dirāsah Mu’ammiqān Waḥdan li al-Tasyrī ‘āt al-Waṭaniyyah wa al-Ittifāqiyyāt al-Dauliyyah wa Aḥkām al-Taḥkī m al-Dauliyyah al-Muta’alliqah bi Munāza’āti al-Nifṭi*. Al-Riyād: Maktabah al-Qānūn wa al-Iqtiṣād, 2015.
- Ismā‘īl, Saif ad-Dīn ‘Abd al-Fattāḥ. *Fī an-Nazariyyah as-Siyāsiyyah min Manzūr al-Islāmī: Manhajiyyah at-Tajdīd as-Siyāsī wa Khibrah al-Wāqi’ al-‘Arabī al-Mu’āṣir*. Vol. 25. Amman: al-Ma’had al-‘Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 1998.
- Ismail, Syed Muhammad. *Critical Analysis of Capitalism, Socialism and Islamic Economic Order*. India: Adam Publisyers, 1989.

- Itoh, Makoto. *Political Economy for Socialism*. New York: ST. Martin's Press, Inc., 1995.
- Ja'far, Muḥammad Anas Qāsim. *Wilāyah al-Mazālim fī al-Islām wa Taṭbī quhā fī al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Sa'ūdiyyah*. Beirut: Dār al-Nahḍah al-'Arabiyyah, 1987.
- Jadyah, 'Umar. *Manhaj al-Istiqrā' 'inda al-Uṣūliyyī n wa al-Fuqahā'*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010.
- Jalāl al-Dīn, Adham Ibrāhīm. *Ilm al-Istiṣmār al-Islāmī*. Cet. Ke-1. Al-Qāhirah: Markaz al-Kitāb li al-Nasyr, 2018.
- Jalaluddin, Abul Khair Mohd. *The Role of Government in an Islamic Economy*. Kuala Lumpur: AS. Noordeen, 1991.
- Jāmi', Aḥmad. *Al-Iqtisād al-Isytirākī*. Al-Qāhirah: al-Maṭba'ah al-'Ālamiyyah, 1969.
- Jarf, Tu'aymah 'Abd al-Ḥamīd. *Nazariyyah ad-Daulah wa al-Usus al-'Āmmah li Tanzīm as-Siyāsī*. Al-Qāhirah: Maktabah al-Qāhirah al-Ḥadīshah, 1966.
- Jāsim, 'Abd al-Rāfi'. *Al-Madkhal li Dirāsah al-Syarī 'ah al-Islāmiyyah*. Al-Qāhirah: al-Markaz al-'Arabī li al-Nasyr wa al-Tauzī', 2016.
- Al-Jawwād, Muḥammad 'Abd. *Milkiyyah al-Arādī fī al-Islām: Taḥdīd al-Milkiyyah wa at-Ta'mīm*. Al-Qāhirah: aṬ-Ṭibā'ah al-'Ālamiyyah, 1391 H.
- . *Buḥūs fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa al-Qānūn*. Al-Qāhirah: Jāmi'ah al-Qāhirah, 1977.
- Johansen, Barber. *The Islamic Law on Land Tax and Rent*. London: Croom Helm, 1998.
- Jossa, Bruno. *Producer Cooperatives as a New Mode of Production*. London dan New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2014.
- Jubailī, 'Alī Abū Sulaimān. *Nazariyyah al-Qiyādah fī al-Islām: 'Ālam al-Falsafah wa al-'Irfān*. Vol. 13. Jeddah: Dār al-'Ilm li aṬ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī', 2002.

Jum'ah, Fāṭimah. *Al-Ittijāhāt al-Ḥizbiyyah fī al-Mujtama' al-Islāmī: Munzu 'Aṣr ar-Rasūl ḥattā Khilāfah Banī Umayyah*. Beirut: Dār al-Fikr al-Lubnānī, 1982.

Justinian. *Mudawwanah Justiniyān fī al-Fiqh ar-Rūmānī*. Terj. 'Abd al-'Azīz Ffahmī. Al-Qāhirah: Dār al-Kātib al-Miṣrī, 1946.

Kabbah, Ibrāhīm. *Dirāsāt fī Tārīkh al-Iqtiṣād wa al-Fikr al-Iqtiṣādī*. Bagdād: Maṭba'ah al-Irsyād, 1970.

Kadouf, Hunud Abia. *Law, Custom and Property Rights among the Āma/Nyima? of the Nuba Mountains in the Sudan: An Analysis of Traditional Property Concepts in a Historical Perspective*. Singapura: Partridge Publishing, 2014.

Kahf, Monzer. *Notes on Islamic Economics: Theories and Institutions*. Istanbul: Monzer Kahf Publishing, 2014.

Kamāl, Yūsuf. *Al-Iqtiṣād al-Islāmī baina Fiqh asy-Syī'ah wa Fiqh Ahl as-Sunnah: Qirā'ah Naqdiyyah*. Al-Qāhirah: Dār aṣ-Ṣaḥwah li an-Nasyr wa at-Tauzī', 1987.

------. *Al-Islām wa al-Mazāhib al-Iqtiṣādiyyah al-Mu'āṣirah*. Cet. ke-2. Al-Qāhirah: Dār al-Wafā' li aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī', 1990.

Kan'ān, 'Alī. *Al-Iqtiṣād al-Islāmī: Dirāsah fī 'Anāṣir al-Intāj*. Al-Qāhirah: Dār al-Ma'ārif, 1997.

Kan'ān, Tāhir Ḥamadī wa Ḥāzim Taisī r Raḥāhalah. *Al-Daulah wa Iqtiṣād al-Sūq: Qirā'āt fī Siyāsah al-Khaṣkhaṣah wa Tijārabuhā al-'Ālamiyyah wa al-'Arabiyyah*. Ar-Riyāḍ: al-Markaz al-'Arabī li al-Abḥāṣ wa Dirāsah al-Siyāsiyyāt, 2016.

Kannūn, 'Abd Allāh. *Al-Islām Ahdā*. Cet. ke-2. Beirut: Dār aṣ-Ṣaqāfah, 1984.

------. "Al-Milkiyyah al-Fardiyyah fī al-Islām," *Min Buḥūs al-Mu'tamar al-Auwal li Majma' al-Buḥūs al-Islāmiyyah*. Vol. 1. Al-Majma' fī Kitāb at-Taujih at-Tasyrī'ī fī al-Islām, 1971.

- . “al-Milkiyyah al-Fardiyyah wa Taḥdīduhā fī al-Islām.” *Baḥṣun Ulqiya fī al-Mu’tamar al-Awwal li Majma’ al-Buḥūs al-Islāmiyyah*. Al-Qāhirah: Jāmi’ah al-Azhar, 1964.
- Kattsoff, Louis O. *Making Moral Decisions: An Existential Analysis*. Netherlands: The Hague/Martinus Nijhoff, 1965.
- Kausar, Zinat. *Contemporary Islamic Political Thought: A Study of Eleven Islamic Thinkers*. Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia, 2005.
- Kazazi, J. *The Edition and Interpretation of Shahname of Ferdowsi*. Vol. I. Tehran 2006.
- Kehoe, Dennis P. *Law and Rural Economy in the Roman Empire*. USA: The University of Michigan Press, 2007.
- Kelle, Vladislav, dan Matvei Kovalson. *Al-Māddiyah at-Tāriḫiyyah: Dirāsah fī Naẓariyyah al-Mujtama’ al-Mārkiṣī*. Terj. Ilyās Syāhīn. Cet. ke-2. Moskow, Rusia: Dār at-Taḡaddum, t.t.
- Kelsen, Hans. *What is Justice? Justice, Law and Politics in the Mirror of Science: Collected Essays by Hans Kelsen*. Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 2000.
- Al-Khādimī, Nūr ad-Dīn bin Mukhtār. *‘Ilm al-Maqāṣid asy-Syarī’ah*. Beirut: Maktabah al-‘Abikān 2014.
- Al-Khaffī, ‘Alī. *Buḥūs wa Maqālāt fī at-Tasyrī’ al-Islāmī*. Cet. ke-1. Al-Qāhirah: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 2010.
- . “Al-Milkiyyah al-Fardiyyah wa Taḥdīduha fī al-Islam.” *Al-Mu’tamar al-Awwal li Jamī’ al-Buḥūs al-Islāmiyyah bi al-Azhar*. Syawwāl. Al-Qāhirah: Majma’ al-Buḥūs al-Islāmiyyah, 1964.
- . “Al-Milkiyyah al-Fardiyyah wa Taḥdīduhā fī al-Islām.” *Al-Buḥūs al-Mu’tamar al-Awwal li Majma’ al-Buḥūs al-Islāmiyyah*. Juz 1. Al-Qāhirah: Majma’ al-Buḥūs al-Islāmiyyah, 1971.
- . *Al-Milkiyyah fī asy-Syarī’ah al-Islāmiyyah ma’a al-Muqāranah bi al-Syarā’i al-Waḍ’iyyah: Ma’nāhā –*

- Anwā'uhā - 'Anāṣiruhā - Khawaṣṣuhā - Quyūduhā.* Madīnah Naṣr: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1996.
- . *Al-Milkiyyah fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah ma'a Muqāranatuhā bi al-Qawānīn al-'Arabiyyah: Anwā'uhā, al-Milkiyyah asy-Syāi'ah, Intihā' al-Syuyū' bi al-Qismah al-Mihāyah, Asbāb Kasb al-Milkiyyah.* Al-Qāhirah: Dār al-Nahḍah al-'Arabiyyah, 1990.
- . *Al-Milkiyyah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah ma'a al-Muqāranah bi al-Syarāi' al-Waḍ'iyyah: Ma'nāhā, Anwā'uhā, 'Anāṣiruhā, Khawāssuhā, Quyūduhā.* Al-Qāhirah: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1996.
- Khālīd, Adnān. *Al-Mazhab al-Iqtisādī al-Islāmī.* Jeddah: Maktabah as-Sawwādī, 1990.
- Khalidī, Tarif. *Land Tenure and Social Transformation in the Middle East.* Lebanon: American University of Beirut, 1984.
- Khalīl, Muḥsin. *Fī al-Fikrī al-Iqtisādī al-'Arabī al-Islāmī.* Vol. 323. Iraq: al-Jumhūriyyah al-'Irāqīyyah, Wizārah al-Ṣaqāfah wa al-I'lām, 1982.
- Khan, Q. *The Political Thought of Ibn Taymiyyah.* New Delhi: Adam Publisyers, 2007.
- Khan, Sarfraz. *Muslim Reformist Political Thought: Revivalist, Modernist, and Free Will.* London & New York: Routledge Tailor & Francis Group, 2003.
- Khan, Shahrukh Rafī. *Profit and Loss Sharing: An Islamic Experiment in Finance and Banking.* London: Oxford University Press, 1987.
- Al-Khaṭīb, Anwār. *Al-Naz'ah al-Isytirākiyyah fī al-Islām.* Beirut: Dār al-Malāyīn, 1956.
- Al-Khaṭīb, Farīd Muḥammad. *Taḥwīl Milkiyyah al-'Āmmah ilā Milkiyyah al-Khaṣṣah: Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah bi al-Qānūn.* Al-Qāhirah: Jāmi'ah al-Qāhirah, Kulliyah Dār al-'Ulūm, Qism asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah, 2001.
- Al-Khaṭīb, Maḥmūd bin Ibrāhim. *Al-Nizām al-Iqtisādī al-Islāmī.* Riyāḍ: Maktabah Ḥaramain, 1989.

- Kīrāh, Ḥasan. *Al-Madkhal ilā al-Qanūn*. Iskandariyah: Mansya'at al-Ma'ārif, t.t.
- *Uṣūl al-Qānūn al-Madanī*, Vol. 1. Al-Qāhirah: al-Munhya'at al-Ma'ārif, 1965.
- King, Leonid W. *A History of Sumer and Akkad: An Account of Babylonia from Prehistoric Times to the Foundation of the Babylonian Monarchy*. London: Chatto & Windus, 2015.
- Kirk, Michael (ed.). *Land Tenure Security in Selected Countries*. Kenya: United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat), 2015.
- Knox, T.M. *Hegel's Philosophy of Right*. London: Oxford University Press, 1969.
- Kostopoulos, Tryphon. *Beyond Capitalism: Toward Nomocracy*. New York: Praeger Publishers, 1986.
- Kubbah, Ibrāhīm. *Tārīkh al-Iqtiṣād wa al-Fikr al-Iqtiṣādī*. Juz 1. Bagdad: Maṭba'ah Irsyād, 1970.
- Kumar, Arvind. *A Text Book of Environmental Science*. New Delhi: APH Publishing Corporation, 2008.
- Kuntowijoyo. *Masalah Tanah dan Runtuhnya Mitos Negara Budiman*. Yogyakarta: Lembaga Penyadaran Masyarakat Pedesaan, 1992.
- *Peran Borjuis dalam Transformasi Eropa*. Yogyakarta: Ombak, 2005.
- Kurnan, S. Behdad, T. *Theory of Islamic Economics: Tradition and Transformation*. New Delhi, India: Global Vision Publishing House, 2006.
- Lambton, Ann K. S. *Continuity and Change in Medieval Persia: Aspects of Administrative, Economic and Social History 11th-14th Century*. USA: Bibliotheca Persica, 1988.
- Lambton. *Landlord and Peasant in Persia: A Study of Land Tenure and Land Revenue Administration*. New York: Oxford University Press, 1953.

- Lapidus, Ira M. *A History of Islamic Societies*. New York: Cambridge University Press, 2002.
- . *A History of Islamic Society (Sejarah Sosial Umat Islam)*. Terj. Ghufran A. Mas'adi. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999.
- Larsen, Stein Ugelvik (ed.). *The Challenges of Theories on Democracy: Elaborations over New Trends in Transitology*. New York and Boulder, CO: Columbia University Press, 200.
- Lehavi, Amnon. *The Construction of Property: Norms, Institutions, Challenges*. New York: Cambridge University Press, 2013.
- Liebesny. *The Law of the Near and Midle East, Readings, Cases, and Materials*. New York: State University of New York Press, 1975.
- Lilie, William. *An Introduction of Ethics*. Cet. ke-15. New Delhi: Allied Publisher Private Limited, 2003.
- Lokkegard, F. *Islamic Taxation in The Classic Period*. Copenhagen: Branner og Korch, 1950.
- Lūh, Muḥammad Aḥmad. *Taqdī s al-Asykhās fī al-Fikr al-Şūfī : 'Arḍun wa Tahḷī l 'alā Ḍau' i al-Kitāb wa al-Sunnah*. Juz 1. Cet. ke-1. Al-Qāhirah: Dār Ibn 'AffāN li al-Nasyr wa al-Tauzī ', 2002.
- Maamary, Ahmedal. "Private Ownership and Its Limitations in Islam." *Economics in Islam*. . New Delhi: Lancer Books, 1987).
- Macuch, Maria. *Rechtskasuistik und Gerichtspraxis zu Beginn des siebenten Jahrhunderts in Iran. Die Rechtsammlung des Farrohmard i Wahrāmān*. Wiesbaden: Harrasowitz Verlag, 1993.
- Madjid, Nurcholish. "Pertimbangan Kemaslahatan dalam Menangkap Makna dan Semangat Ketentuan Keagamaan: Kasus Ijtihad Umar Ibn al-Khaṭṭāb." Dalam, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988.

- Mahdī, Nazīh Muḥammad al-Şādiq. *Al-Milkiyyah fī al-Niẓām al-Isytirākī*. Al-Qāhirah: Dār al-Nahḍah al-‘Arabiyyah, 1971.
- Mahendra, A.A. Oka. *Menguak Masalah Hukum, Demokrasi dan Pertanahan*. Jakarta: Sinar Harapan, 1996.
- Mahmassani, Subhi. *Falsafah al-Tasyrī‘ fī al-Islām (The Philosophy of Jurisprudence in Islam)*. Trans. Farhat J. Ziadeh. Leiden: E.J. Brill, 1961.
- Maḥmūd, ‘Abd al-Ḥalīm. *Abū Żarr al-Ghiffāri wa al-Syuyū‘iyyah*. Mesir: Dār al-Ma’ārif, 1975.
- Maḥmūd, ‘Abd Allāh Muḥammad. *Al-Fikr al-Iqtisādī wa al-Mālī ‘inda Imām al-Ḥaramain al-Juwainī : Dirāsah Muqāranah*. Al-Qāhirah: Dār al-Kitab al-Şaqāfī , 2011.
- Maḥmūd, Aḥmad Maḥmūd ‘Āli. *Al-Bai‘ah fī al-Islām: Tārīkhuhā wa Aqsāmuhā baina an-Nazariyyah wa at-Taṭbīq*. Oman: Dār ar-Rāzī li aṭ-Ṭibā‘ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī‘, 2003.
- Maḥmūd, Maḥmūd Ḥamid. *Kitāb Buḥūs fī al-Iqtisād al-Islāmī*. Al-Qāhirah: Dār Ḥamīsrā li al-Nasyr wa al-Tarjamah, 2017.
- Mahoney, Joseph T. *Economic Foundations of Strategy*. London & New Delhi: Sage Publications, Inc., 2005.
- Majma’ al-Buḥūs al-Islāmiyyah. *Al-Taujīh al-Tasyrī‘ī fī al-Islām: Min Buḥūs Mu’tamirāt Majma’ al-Buḥūs al-Islāmiyyah*. Juz 1. al-Qāhirah: Majma’ al-Buḥūs al-Islāmiyyah, 1391 H/1971 M.
- Majma’ al-Buḥūs al-Islāmiyyah. *The Fourth Conference of The Academy of Islamic Research, Rajab 1388, September 1968*. U.S.: Government Printing Office, 1970.
- Malkawi, Mohammad. *Fall of Capitalism and Rise of Islam*. USA: Xlibris Corporation, 2010.
- Malik, Faṭḥ Muḥammad. *Iqbal's Reconstruction of Political Thought in Islam*. Volume 6 of South Asian History Academic Papers. UK: University of Leicester. Centre for the History of Religious and Political Pluralism, 2002.

- Mallūk, ‘Abd al-‘Ālī . *al-Tarjī ḥ al-Maṣlahī min Khilāl al-Qur’ān al-Karī m*. Al-Qāhirah: Dār al-Kalimah li al-Nasyr wa al-Tauzī ’, 2013.
- Mannan, Muhammad Abdul. *Islamic Economics: Theory and Practice (Foundations of Islamic Economics)*. Revised edition, Sevenoaks, Kent. UK.: Hodder and Stoughton, 1986.
- Manṣūr, Ḥasan ‘Abd al-Rāzaq. *Binā’ al-Insān baina al-Nazri wa al-‘Amali*. Cet. Ke-2. Oman: Amwāj li al-Nasyr wa al-Tauzī ’, 2013.
- Marsh, James H. *The Canadian Encyclopedia*. Vol. 3. Toronto: Hurtig Publishers, 1985.
- Mårtensson. *Tabari*. Oxford: Oxford University Press, 2009.
- Martin, Bon Louis Henri. *A Popular History of France from the First Revolution to the Present Time*. Boston: Dana Estes and Charles E. Lauriat, 1877.
- Marx, K., and F. Engels. *The Manifesto of the Communist Party (1848), Marx-Engels Collected Works, 6*. Moscow: Progress Publishers, 1976.
- Marx, Karl dan Frederich Engels. “Manifesto of the Communist Party.” Dalam Lewis S. Feuer. *Marx & Engels*. New York: Doubleday and Company, Inc., 1959.
- Marx, Karl. *Das Capital*. Chicago: Henry Regnery Compani, 1961.
- Marx, Karl. *Selected Writings*. Trans. and Ed. Lawrence Simon. Indiana: Hackett Publishing Company, 1994.
- Mas’udi, Masdar F. *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*. Jakarta: P3M, 1993.
- Maskūnī, Ṣabīḥ. *Tārīkh al-Qānūn al-‘Irāqī al-Qadīm*. Cet. ke-1. Baghdād: Maṭba’ah Syafīq, 1971.
- Maskūnī, Subḥī. *Al-Qānūn al-Rūmānī*. Cet. ke-2. Baghdād: Maṭba’ah Syafīq, 1971.
- Masud, Muhammad Khalid. *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abū Ishāq al-Syāṭibī Life and Thought*. Delhi: International Islamic Publishers, 1989.

- Masyāriqah, Muḥammad Zuhair. *Al-Ḥayāh al-Ijtimā'iyah 'inda al-Badwi fī al-Waṭan al-'Arabī*. Damaskus: Dār Tullās li al-Dirāsāt wa al-Tarjamah wa al-Nasyr, 1988.
- Al-Maudūdī, Abū 'A'lā. *Asas Ekonomi Islam al-Mawdudi*. Terj. Imam Munawir. Surabaya: Bina Ilmu, 2005.
- . *Mas'alah Milkiyyah al-Arḍi fī al-Islām*. Ed. Muḥammad Āṣim al-Ḥaddād. Cet. ke-2. Al-Ahwār-Pakistan: Dār al-'Arūbah li ad-Da'wah al-Islāmiyyah, 1969.
- Al-Maududi, Abul A'la. *Economic Problem of Man and its Islamic Solution*. Lahore: Islamic Publications, 1947.
- . *Economic System of Islam*. Lahore: Islamic Publications, 1970.
- Al-Māwardī, Abū al-Ḥasan 'Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb. *Kitāb al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt ad-Dīniyyah*, Ed. Aḥmad Mubārak al-Baghdādī. Kuwait: Maktabah Dār Ibn Qutaibah, 1989.
- Mażkūr, Muḥammad Salām. *Al-Fiqh al-Islāmī*. Kairo: Wahbah, 1995.
- . *Al-Madkhal li al-Fiqh al-Islāmī, Tārīkhuhu wa Maṣādīruhu wa Nazariyātuhu wa al-'Āmmah*. Al-Qāhirah: Dār al-Kitāb al-Ḥadīṣ, 1996.
- . *Ma'ālim al-Daulah al-Islāmiyyah*. Al-Kuwait: Maktabah al-Fallāh, 1983.
- McCahery, Joseph A., dan Luc Renneboog. *The Economics of the Proposed European Takeover Directive: CEPS Research Report in Finance and Banking*. No. 32. Brussels: Center for European Policy Studies, 2003.
- McNally, David. *Political Economy and the Rise of Capitalism*. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1990.
- Megarry dan Wade. *The Law of Real Property*. Ed. ke-5. Sweet & Maxwell, 1984.
- Menon, Kizhekkepat Krishna. *Outline of Jurisprudence*. Ed. ke-3. Mumbai, India: Asia Publishing House, 1961.

- Merges, Robert P., dan Seagull Haiyan Song. *Transnational Intellectual Property Law: Text and Cases*. Cheltenham, UK, Northampton: Edward Elgar Publishing, 2018.
- Milios, John. *The Origins of Capitalism as a Social System The Prevalence of an Aleatory Encounter*. London and New York: Routledge Taylor & Francis Grup, 2018.
- Mill, John Stuart. *Utilitarianism*. London: Parker, Son, and Bourn, West Strand, 1863.
- Miskawayh, Ibn. *The Tajārib al-Umam or History of Ibn Miskawayh*. Preface and Summary by L. Caetani, Principe di Teano. Vol. I. Leiden: Brill, 1909.
- Miṣrī, ‘Abd al-Mahdī ‘Abd al-Hādī. *Al-Arḍ al-Khāṣṣah bi ad-Daulah fī al-Islām: Arḍ aṣ-Ṣawāfī (Abḥās fī al-Iqtīṣād al-Islāmī)*. Yordan: Dār Umm al-Qurā, 1989.
- Al-Miṣrī, Rafīq Yūnus. *Uṣūl al-Iqtīṣādī al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1993.
- Moore, Brooke Noel, Kenneth Bruder. *Philosophy: The Power of Ideas*. US: McGraw-Hill Higher Education, 2001.
- Morony, M.G. *Iraq After the Muslim Conquest*. Princeton: Princeton University Press, 1984.
- Mu’assasah Āl al-Bait li al-Fikr al-Islāmī. *Niẓām al-Ḥukm al-Islāmī wa al-Dīmuqarātī: al-Furūq wa Imkāniyyah at-Ta’āyisy, Abḥās ad-Daurah aṣ-Ṣāliṣah ‘Asyrah li al-Mu’tamar al-‘Ām, 7-5 Rajab/23-25 Aghuṣṭus, Vol. 1*. Yordan: Mu’assasah Āl al-Bait li al-Fikr al-Islāmī, 2004.
- Mubārak, Ḥamīd. *Maqālāt fī Fahmi ad-Dīn*. Damaskus: Mu’assasah al-Intisyār al-‘Arabī, 2007.
- Mudzhar, M. Atho. “Kata Pengantar.” Dalam M. Atho Mudzhar. *Esai-Esai Sejarah Sosial Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Mueller, Dennis C. *The Oxford Handbook of Capitalism*. Oxford: Oxford University Press, 2012.
- Muḥammad, Muḥammad ‘Abd Allāh Syāhīn. *Al-Iqtīṣād al-Islāmī al-Munqiz min aḏ-Ḍalāl*. Mesir: Dār Ḥamīsrā li an-Nasyr wa at-Tauzī’, 2018.

- Muḥammad, Quṭb Ibrāhīm. *As-Siyāsah al-Māliyah li 'Umar ibn al-Khaṭṭāb*. Terj. Ahmad Syarifudin Syale. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- . *As-Siyāsah al-Māliyah li al-Rasūl*. Al-Hai'ah al-Nasyriyyah al-‘Āmmah li al-Kitāb, 2008.
- Mukhtār, Muḥammad Jamāl al-Dīn. *Dirāsāt fī Tārīkh al-‘Arab*. Al-Qāhirah: Dār al-Nahḍah al-‘Arabiyah, 1976.
- Mulḥim, Muḥammad Humām ‘Abd al-Raḥī m. *Ta’šī l Fiqh al-Awlawiyyāt: Dirāsah Maqāsidīyyah Tahlī liyyah* . Oman-Jordan: Dār al-Nafā’is, li al-Nasyr wa al-Tauzī ’, 2007.
- Muliawan, J.W. *Pemberian Hak Milik untuk Tempat Tinggal*. Jakarta: Cerdas Pustaka, 2009.
- Murphy, Jeffrie G., dan Jules L. Coelman. *The Philosophy of Law an Introduction of Jurisprudence*. San Francisco & London: Westview Press, 1990.
- Mūsā, Fariḥ. *Ad-Dīn wa ad-Daulah wa al-Ummah ‘inda al-Imām Muḥammad Mahdī Syams ad-Dīn*. Beirut: Dār al-Hādī li aṭ-Ṭibā’ah li an-Nasyr wa at-Tauzī’, 2002.
- Mūsā, Kāmil. *Aḥkām al-Mu’āmalāt*. Cet. ke-2. Beirut: Mu’assasah ar-Risālah, 1994.
- Mūsā, Muḥammad Yūsuf. *Al-Islām wa al-Haiāh: Dirāsāt wa Taujīhāt*. ttp.: Maktabah Wabhah, 1961.
- Mūsā, Muḥammad Yūsuf. *Tārīkh al-Fiqh al-Islāmī*. Mesir: Dār al-Kitāb al-‘Arābī, 1958.
- Mūsawī, Muḥsin Bāqir. *Daulat ar-Rasūl*. Al-Qāhirah: Mu’assasah Dār al-Bayān al-‘Arabī, 1990.
- Muṣliḥ, ‘Abd Allāh ‘Abd al-‘Azīz. *Quyūd al-Milkiyyah al-Khaṣṣāh*. Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1988.
- Muwāfi, Aḥmad. *Aḍ-Ḍarar fī al-Fiqh al-Islāmī: Ta’rīfuhu, Anwā’uhu, ‘Alāqatuhu, Ḍawābituhu, Jazā’uhu*. Vol. 1. Al-Qāhirah: Dār Ibn ‘Affān li al-Nasyr wa al-Tauzī ’, 1997.
- Muz’il, Jamal Asad. *Niẓām at-Ta’līm fī al-‘Irāq*. Baṣrah, Irak: Mudīriyyah Dār al-Kutub li al-Ṭibā’ah wa al-Nasyr, 1990.

- Muzaffar, Maḥmūd. *Iḥyā' al-Arāḍī al-Mawāt: Dirāsah Fiḥiyyah bi al-Qawānīn al-Waḍ'iyyah*. Al-Qāhirah: al-Maṭba'ah al-Ālamiyyah, 1972.
- An-Na'imah, Ibrāhīm. *Uṣūl at-Tasyrī' ad-Dustūrī fī al-Islām*. Irak: Jumhūr al-'Irāq, Diwān al-Waqfi as-Sunnī-Markaz al-Buḥūs wa ad-Dirāsāt al-Islām, 1430 H.
- An-Nabhānī, Taqiyuddin. *The Economic System of Islam*. London: Al-Khilafah Publications, 1990.
- Nabhān, Muḥammad Fārūq. *Al-Ittijāh al-Jamā'i fī al-Tasyrī' al-Iqtisādī al-Islāmī*. Beirut: Dār al-Fikr li al-Ṭibā'ah wa al-Nnasyr wa al-Tauzī', 1970.
- .. *Muḥādarāt fī al-Fikr al-Siyāsī wa al-Iqtisādī fī al-Islām*. Maroko: Maṭba'ah Faḍālah, 1987.
- Najmān. *Al-Tārīkh al-Iqtisādī li 'Aṣri al-Risālah wa al-Rāsyidīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2019.
- Nāmiq, Ṣalāḥ al-Dīn. *Al-Naẓm al-Iqtisādiyyah al-Mu'āṣirah wa Taṭbīqātuhā*. Al-Qāhirah: Dār al-Ma'ārif, 1980.
- Nangale, George. *The Politics of Partnership: A Reflection of a Living Life in a Legislative Assembly and Other Organisations*. Leicester, UK: Links Training Centre, Ltd., 2006.
- Naqvi, Syed Nawab Haider. *Ethics and Economics: An Islamic Synthesis*. Leicester, U.K.: Islamic Foundation, 1981.
- .. *Islam, Economics and Society*. London: Kegan Paul International, 1994.
- Naṣīf, Majdī. *Ṣaurah aṣ-Ṣūmāl, Arḍ al-Bakhūr wa al-'Uṭūr*. Al-Qāhirah: Maktabah Madbūlī aṣ-Ṣagīr, 1974.
- Nāṣir, Muḥammad al-Ḥāj. *Al-Islām wa Intizā' al-Milki li al-Maṣlahah al-Āmmah*. Al-Maghrib: Maṭba'ah Fuḍālah al-Muḥammadiyyah, 1991.
- Naṣr Allāh, Muḥammad 'Alī. *Taṭūr Milkiyyah al-Arāḍī fī al-Islām: Namūzaj Arāḍī as-Sawwād*. Beirut: Dār al-Ḥadāṣah li aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī', 1982.

- Naṣṣār, Naṣīf. *Al-Fikr al-Wāqi'ī 'inda Ibn Khaldūn: Tafsīr Tahlīlī wa Jadālī li al-Fikr Ibn Khaldūn fī Bunyātihi wa Ma'nāh*. Beirut: Dār at-Ṭalī'ah li at-Ṭibā'ah wa an-Nasyr, 1981.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Vol. 1. Jakarta: UI Press, 1985.
- Noor, Aslan. *Konsep Hak Milik atas Tanah bagi Bangsa Indonesia Ditinjau dari Ajaran Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju, 2006.
- Nourahmadi, Mohammad Javad. *Ownership, Justice and Growth in the Process Development of Economic Thoughts*. Tehran: Imam Sadiq University, 2013.
- Nozick, Robert. *Anarchy, State, and Utopia*. Oxford-Uk & Cambridge-USA: Blackwell Publishers, Ltd., 1974.
- Nuruddin, Amir. *Ijtihad Umar bin Khattab: Studi tentang Perubahan Hukum dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1991.
- Nyazee, Imran Ahsan Khan. *Theories of Islamic Law: The Methodology of Ijtihad*. Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 2006.
- Office of the High Commissioner, *Land and Human Rights: Standards and Applications*. United Nations Human Rights, 2015.
- Ostrom, Elinor, dan Charlotte Hess. "Private and Common Property Rights." *Workshop in Political Theory and Policy Analysis*. Indiana University, 2007.
- Pallay, Michael. *Al-Qānūn ar-Rūmānī*. Terj. Hāsyim al-Hāfīz. Baghdād: Dār al-Ḥurriyah li at-Ṭibā'ah, 1974.
- Palmer, Martin, Anne Nash, dan Ivan Hatting. *Faith and Nature: A Rider Book*. UK: Co-published with the WWF, 1987.
- Panoff, M. dan M. Bern. *Cultural Ethnology*. Tehran: Kayhan Publication, 1989.

- Parris, Marion. *Total Utility and the Economic Judgment Compared with Their Ethical Counterparts*. Philadelphia: J. C. Winston Company, 1909.
- Paul, Ellen Frankel, Fred D. Miller, dan Jeffrey Paul (eds.). "Introduction." *Natural Rights Liberalism from Locke to Nozick*. UK dan USA: Cambridge University Press, 2005.
- . *Property Rights and Eminent Domain*. USA and London: Transaction Publisher, 2009.
- Pejovich, Svetozar. *The Economics of Property Rights*. Dordrecht, the Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 1990.
- . *The Economics of Property Rights: Towards a Theory of Comparative Systems*. Boston-London: Kluwer Academic Publishers, 2007.
- Perveen, Sajida, dan Humaira Aris Dasti. "Feudalism: A Pastime of Power, Economic and Political influence in Pakistan." *Pakistan Vision* 15, no. 1 (2015): 59-75.
- Pollock dan Wright. *Possession in the Common Law*. Oxford: Clarendon Press, 1888.
- Posner, Richard A. *Economic Analysis of Law*. Ed. ke-7. 604. Austin-Boston, Chichago- New York: Wolters Kluwer Law & Business, 2007.
- Postema, Gerald J. *Bentham and the Common Law Tradition*. Oxford: Clarendon Press, 1986.
- . *Bentham and the Common Law Tradition*. Ed. ke-2. Oxford: Oxford University Press, 2019.
- Potter, David. *The Origin of Empire: Rome from the Republic to Hadrian*. USA: Harvard University Press, 2019.
- Pound, Roscoe. *An Introduction to the Philosophy of Law*. New Brunswick & London: Transaction Publishers, 1999.
- . *Interpretation of Legal History*. USA: Holmes Beach, Florida, 1986.

- Pourshariati, Parvaneh. *Decline and Fall of the Sasanian Empire: the Sasanian Parthian Confederacy and the Arab Conquest of Iran*. London: I.B. Tauris, 2008.
- Pravilova, Ekaterina. *A Public Empire: Property and the Quest for the Common Good in Imperial Russia*. UK: Princeton University Press, 2014
- Příbram, Karl. *A History of Economic Reasoning*. US: Johns Hopkins University Press, 1983.
- Qānah, Aṭ-Ṭāhir Sa'dī. *Ad-Daur at-Tauzī'ī li al-Milkiyyah fī al-Iqtisād al-Islāmī*. Oman-Yordan: Dār al-Khalīj li aṣ-Ṣaḥāfah li an-Nasyr, 2018.
- Qaddafī, Muḥammad. *Qaḍāyā Fikriyyah*. Vol 42. Libya: al-Markaz al-'Ālamī ad-Dirāsāt wa Abḥās al-Kitāb al-Akhḍar, 1985.
- Qadīd, Maḥmūd Ḥamīdān. *At-Takhḍīṭ al-Ḥaḍarī wa Daur at-Tasyrī'āt at-Takhḍīṭiyyah fī an-Nuhūd bi 'Amaliyyah at-Tanmiyyah al-'Umrāniyyah*. Yordan: Markaz al-Kitāb al-Akādīmiyyā, 2015.
- Qaḥaf, Muḥammad Munzir. *Mafhūm at-Tamwīl fī al-Iqtisād al-Islāmī*, cet. Ke-3. Jeddah: al-Ma'had al-Islāmī li al-Buḥūs wa at-Tadrīb, 2004.
- Al-Qarḍāwī, Yūsuf. *Daur al-Qiyam wa al-Akhlāq fī al-Iqtisād al-Islāmī*. Al-Qāhirah: Maktabah Wahbah, 2008.
- . *Madkhal li Dirāsah asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Al-Qāhirah: Maktabah Wahbah, 1990.
- . *Tajdīd ad-Dīn al-laẓī Nansyuduhu*. Amman, Jordan: Dār al-Manhal, 2011.
- Qurasyī, Ghālib 'Abd al-Kāfī. *Aulayāt al-Fārūq fī as-Siyāsah wa al-Idārah wa al-Qaḍā'*. Taqḍīm Mannā' al-Qaṭṭān. Juz 2. Al-Qāhirah: Dār al-Wafā' 2008.
- Quṭb, Sayyid. *Al-'Adālah al-Ijtimā'iyyah fī al-Islām*. Al-Qāhirah: Dār asy-Syurūq, 1989.

- Ra'ana , Irfan Mahmud. *Economic System under 'Umar the Great: A Treatise on Muslim Economy in Early Seventh Century*. Lahore, India: Sh. Muhammad Ashraf, 1977.
- . *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Al-Khatab*. Terj. Mansuruddin Djoely. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
- Ra'uf. *Al-Jihād fī Sabīl Allāh: Majālatuhu wa Wasāiluhu wa Ahdāfuhu*. Al-Qāhirah: Dār at-Turās al-‘Arabī, 1974.
- Rabī’, Muḥammad bin Manṣūr. *Aḥkām al-Milkiyyah fī al-Fiqh al-Islāmī: Dirāsah Muqāranah*. Ar-Riyād: Dār al-Mi’rāj ad-Dauliyyah li an-Nasyr, 1996.
- Rabie, Mohamed. *Global Economic and Cultural Transformation The Making of World History*. New York: Palgrave Macmillan, 2013.
- Rahālah, Ṭāhir Ḥamadī Kan’ān wa Ḥāzim Taisīr. *Ad-Daulah wa Iqtisād as-Sūq: Qirā-āt fī Siyāsah al-Khaṣḥaṣah wa Tijārabuhā al-‘Ālamiyyah wa al-‘Arabīyyah*. Ar-Riyād: al-Markaz al-‘Arabī li al-Abḥās wa Dirāsah as-Siyāsiyyāt, 2016.
- Rahbī, ‘Abd al-‘Azīz ibn Muḥammad. *Fiqh al-Mamlūk wa Miṭāḥ ar-Ritāj al-Murṣad ‘alā Khizānat Kitāb al-Kharāj*. Ed. Aḥmad ‘Ubaid al-Kubaisī. Irak: al-Jūmhuriyyah al-‘Irāqiyyah, Ri’āsāt Dīwān Auqāf, 1973.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rahim, Eric. “Marx: From Hegel and Feuerbach to Adam Smith.” *Strathclyde Discussion Papers in Economics*. Glasgow: Departement of Economics University of Strathclyde, 2012.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. Vol. 1. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- . *Economic Doctrines of Islam*. Ed. ke-2. Seerah Foundation, 2016.

- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: The University of Chicago Press, 1982.
- . *Islamic Methodology in History*. Delhi: Adam Publisher, 1994.
- Ramadan, Tariq. *To be European Muslim: A Study of Islamic Sources in the European Context*. Nairobi, Kenya: The Islamic Foundation, 2010.
- Ramages, Justin. *Introduction to Law: Capacities and Rights of the Legal Subject*. Grahamstown, South Africa: Faculty of Law-Rodhes University, 2018.
- Rana, S. V. S. *Essentials of Ecology and Environmental Science*. Ed. ke-4. New Delhi: PHI Learning Private Limited, 2009.
- Rasyīd, Fauzī. *Al-'Irāq fī Maukib al-Ḥaḍārah: al-Aṣālah wa at-Ta'sīr*, Juz 1. Bagdād: Dār al-Ḥurriyah li at-Ṭibā'ah, 1988.
- . *Asy-Syarāi' al-'Irāqiyyah al-Qadīmah*. Bagdād: Dār al-Ḥurriyah li at-Ṭibā'ah, 1973.
- Rauf, Muhammad Abdul. *The Islamic Doctrine of Economics and Contemporary Economic Thought: Highlight of a Conference on Theological Inquiry into Capitalism and Socialism*. Washington, D.C.: American Enterprise Institute, 1979.
- . *A Muslim's Reflection on Democratic Capitalism*. Washington: American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1984.
- Rauls, John. *A Theory of Justice*. Ed. Revisi. Cambridge: Harvard University Press, 1999.
- Ravandi, M. *Social History of Iran*. Ed. ke-3. Tehran: Negah, 2003.
- Reardon, John Joseph. *Selfishness and the Social Order: A Study in Thomistic Social Philosophy*. Washington DC: Catholic University of America Press, 1943.

- Renani, Mohsen. *Bazar and Na bazar*. Tehran: Planning and Budget Organization, 1997.
- Ridwān, Fathī. *Ad-Daul wa ad-Dasātīr: Durūs fī al-Mabādi' ad-Dustūriyyah ad-'Āmmah*. Vol. 8. Al-Qāhirah: Dār an-Nahḍah al-'Arabiyyah, 1965.
- Ridwan. *Hak Milik Perspektif Islam, Kapitalis, dan Sosialis*. Yogyakarta: Debut Wahana Press, 2011.
- . *Pemilikan Rakyat dan Negara atas Tanah Menurut Hukum Pertanahan Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.
- Robinson, William I. *Global Capitalism and the Crisis of Humanity*. New York: Cambridge University Press, 2014.
- Rodinson, Maxime. *Islam and Capitalism*. New York: Pantheon Books, 1973.
- Roll, Dirk. *Tārīkh al-Fikr al-Iqtisādī*. Terj. Rāsyid al-Barādī. Al-Qāhirah: Dār al-Kitāb al-'Arābī li at-Ṭibā'ah wa an-Nasyr, 1968.
- Rubā', Kāmil. *Fiqh al-Istiḍ'āf fī Daw'i as-Sīrah an-Nabawiyah fī 'Ahd al-Makkī*. Al-Quds: Dār al-Jundī li an-Nasyr wa at-Tauzī', 2017.
- Rubai'ī, Ṣaḥīb. *Ru'yah fī Mu'assisāt ad-Daulah wa al-Mujtama'*. Damaskus: Dār Ṣafahāt li ad-Dirāsāt wa an-Nasyr, 2011.
- Russel, Bertrand. *History of Western Philosophy*. London, USA: Taylor & Francis e-Library, 2005.
- Ryan, John A. *Economic Justice Selection from Distributive Justice and A Living Wage*. Ed. ke-1. Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press, 1996.
- . *The Right and Wrong of Our Present Distribution of Wealth*. Ed. ke-1. ttp.: The Floating Press, 1916.
- Aṣ-Ṣadr, As-Sayyid Muḥammad Bāqir. *Al-Islām Yaquḍu al-Hayāh*. Ed. Lajnah at-Taḥqīq at-Tābi'ah li al-Mu'tamar al-'Ālamī li al-Imām al-Syahīd al-Ṣadr. Cet. ke-4. Qum:

- Markaz al-Abḥās wa al-Dirāsāt al-Takhaṣuṣiyyah li al-Syahīd al-Ṣadr, 1429 H.
- . *Iqtisādunā; Dirāsah Mauḍū'iyah Tatanāwalu bi an-Naqd wa al-Bakth al-Mazāhib al-Iqtisādiyyah li al-Mārkisiyyah wa ar-Ra'sumāliyyah wa al-Islāmiyyah fī Ususihā al-Fikriyyah wa Tafāṣīlihā*. Cet. ke-20. Beirut: Dār at-Ta'āruf li al-Maṭbū'āt, 1987.
- . *Iqtisādunā: Dirāsah Mauḍū'iyah Tatanāwalu bi an-Naqdi wa al-Baḥsi al-Mazāhibi al-Iqtisādiyyah li al-Mārkisiyyah wa ar-Ra'sumāliyyah wa al-Islām fī Ususihā al-Fikriyyah wa Tafāṣīlihā*. Cet. ke-10. Beirut: Dār at-Ta'āruf li al-Maṭbū'āt, 1986.
- . *Iqtisādunā*. Beirut: Dār at-Ta'rīf al-Maṭbū'āt, 1981.
- . *Jawānib min al-Mas'alah al-Ijtimā'iyah: Mukhtarāt min al-Fikr al-Islāmī al-Mu'aṣir*. Vol. 3. Tunisia: Maktabah al-Jadīd, 1989.
- . *Majmū'ah al-Kāmilah li al-Mu'allafāt as-Sayyid Muḥammad Bāqir aṣ-Ṣadr*. Beirut: Dār at-Ta'āruf, 1990.
- . *Mūjaz Uṣūl ad-Dīn: al-Mursl, ar-Rasūl, ar-Risālah*. Beirut: Dār al-Hādī li an-Nasyr wa at-Tauzī', 2000.
- Aṣ-Ṣallābī, 'Alī Muḥammad Muḥammad. *Asy-Syūrā Farīdah Islāmiyyah*. Cet. ke-2. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2012.
- . *Ad-Daulah al-'Uṣmāniyyah: 'Awāmil an-Nuhūd wa Asbāb as-Suqūf*. Cet. ke-1. ttp.: Dār at-Tauzī' wa an-Nasyr, 2001.
- . *'Aṣr ad-Dauwlatain al-Umawiyyah wa al-'Abbāsiyyah wa Zuhūr Fikr al-Khawārij*. Mesir: Dār al-Bayāriq, 1998.
- Aṣ-Ṣawwāf, Akrām Fāliḥ. *Al-Himāyah ad-Dustūriyyah wa al-Qānūniyyah fī Haqq al-Milkiyyah al-Khāṣṣah: Dirāsah Muqāranah*. Cet. ke-1. Yordan: Dār Zahrān li an-Nasyr wa at-Tauzī', 2010.

Şābī, Ibrāhīm ibn Hilāl. *Al-Muntaza' min Kitāb at-Tājī*. Vol. 44 of Kutub at-Turās. Irak: Wizārat al-I'lām al-Jumhuriyyah al-'Irāqiyyah, 1977.

Şābir, Muḥyī ad-Dīn, dan Luwīs Kāmil Mulaikah. *al-Badw wa al-Badāwah: Maḥālim wa Manāhij*. Beirut: Mansyurāt Maktabah al-'Aşriyyah, 1986.

Aş-Şābūnī, Muḥammad 'Alī. *Rawāi' al-Baiān Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān*. Juz 1. Cet. ke-3. Damaskus-Beirut: Maktabah al-Ghazālī-Mu'assasah Manāhi al-'Irfān, 1980.

Şāliḥ, Amānī. *Asy-Syar'iyah baina Fiḥ al-Khilāfah wa Wāqī'ihā*. Juz 1. Cet. ke-1. Al-Qāhirah: li al-Ma'had 'Ālī li al-Fikr al-Islāmī, 2006.

Şāliḥ, Ḥunāsī La'lā Ibn. *Āşar al-Qaiyim 'alā al-Sulūk al-Idārī baina al-Fikr al-Islāmī wa al-Fikr al-Waḍ'ī : Dirāsah Muqāranah*. Taḥqī q Khālīd Sirr al-Khatam al-Saiyid. Cet. Ke-1. Dār al-Yāzūrī al-'Ilmiyyah li al-Nasyr wa al-Tauzī ', 2017.

Şāliḥ, Muḥammad Adīb. *Maşādir at-Tasyrī' al-Islāmī wa Manāhij al-Istinbāf*. Kairo: Dār al-Fikr, t.t.

----- . *Maşādir at-Tasyrī' al-Islāmī wa Manāhij al-Istinbāf*. Ar-Riyāḍ: Maktabah al-'Abīkān, 2002.

Aş-Şāliḥ, Şubḥī. *Ma'ālim asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Cet. ke-4. Beirut: Dār al-'Ilm li al-Malāyīn, 1982.

Şāliḥ, Su'ād Ibrāhīm. *Mabādi' an-Nizām al-Iqtisādī al-Islāmī wa Ba'd Taṭbīqātih*. Kuwait: Dār aḍ-Ḍiyā', 1986.

Aş-Şaddah, 'Abd al-Mun'im Faraj. *Al-Milkiyyah fī Qawānīn al-Bilād al-'Arabiyyah*. Juz 1. Cet. ke-1. Al-Qāhirah: Kulliyah al-Ḥuqūq fī Jāmi'ah 'Ain asy-Syams, 1961.

As-Sāhī, Syauqī 'Abduh. *Al-Māl wa Turuq Istismārihi fī al-Islām*. Madīnah: Maṭba'ah Ḥasan, 1984.

As-Sālūs, 'Alī Aḥmad. *Al-Iqtisād al-Islāmī wa al-Qaḍāyā al-Fiḥiyyah al-Mu'āşirah*. Juz 1. Katar: Dār aş-Şaqāfah, 1996.

- As-Sāyis, Muḥammad ‘Alī. “Milkiyyah al-Afrād li al-Arḍ wa Manāfi’ihā fi al-Islām.” *Al-Mu’tamar al-Awwal li Majma’ al-Buḥūs al-Islāmiyyah*. Al-Qāhirah: Majma’ al-Buḥūs al-Islāmiyyah, 1964.
- Aš-Šabat, Khālīd bin ‘Uṣman. *Al-Amr bi al-Ma’rūf wa an-Nahyu ‘an al-Munkar: Uṣūluhu wa Ḍawābiḥuhu wa Ādābuhu*. ttp.: al-Muntadā al-Islāmī, 2009.
- Sa’ad, Aḥmad Ṣādiq. *Al-Fikr al-Mu’āsir: Dirāsāt fī al-Mafāhim al-Iqtisādiyyah ladā al-Mufakkirīn al-Islāmiyyīn*. Vol. 3. Beirut: Dār al-Fārābī li an-Nasyr wa at-Tauzī’, 1990.
- , *Tārīkh al-‘Arab al-Ijtimā’ī: Taḥwīl at-Takwīn al-Miṣrī min an-Namaṭ asy-Asyawī ilā an-Namaṭ ar-Ra’sumālī*. Al-Qāhirah: Dār al-Ḥadāṣah, 1981.
- As-Sa’dī, ‘Abd Allāh Jam‘ān. *Siyāsah al-Māl fī ‘Ahd ‘Umar ibn al-Khaṭṭā’*. Doha-Qatar: an-Nāsyir Maktabah al-Madāris, 1983.
- Sa’īd, ‘Alī Karīm. *Uṣūl aḍ-Ḍu’fī: Dirāsah fī Mail al-‘Arabī al-Musyarak*. Taqḍīm Muṣṭafa Jamāl ad-Dīn. Damaskus: Dār an-Nasyr wa Tārīkh aṭ-Ṭibā‘ah, 1998.
- Sa’īd, Ṣubkhī ‘Abduh. *As-Sulṭah as-Siyāsah fī al-Mujtama‘ al-Islām*. Kairo: Jāmi‘ah al-Qāhirah, 1991.
- Ṣābī, Ibrāhīm ibn Hilāl. *Al-Muntaza’ min Kitāb al-Tājī*. Vol. 44 of Kutub al-Turās. Irak: Wizārat al-I‘lām al-Jumhuriyyah al-‘Irāqiyyah, 1977.
- Ṣābir, Muḥyī al-Dīn dan Luwīs Kāmil Mulaikah. *Al-Badw wa al-Badāwah: Mafāhim wa Manāhij*. Beirut: Mansyurāt Maktabah al-‘Aṣriyyah, 1986.
- Sacconi, Lorenzo. *The Social Contract of the Firm: Economics, Ethics, and Organization*. New York: Springer Publishing Group, 2000.
- Saddah, ‘Abd al-Mun’im Faraj. *Ḥaqq al-Milkiyyah*. Al-Qāhirah: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalībī, 1967.
- As-Safī, A.K. *Accountability: Islam versus the Man-made Doctrines*. Kuala Lumpur: Darul Fikr, 1992.

- Sahlānī, Fāḍil Muḥammad Jawwād. *Al-Yad fī Fiqh al-Islāmī Sababan li al-Milkiyyah wa Dalīlān ‘alaihā: Dirāsah Muqāranah*. Al-Qāhīrah: Dār az-Zahrā’ li at-Ṭībā’ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī’, 1990.
- Sait, M. Siraj, dan Hilary Lim. *Land, Law and Islam: Property and Human Rights in Muslim World*. London & New York: Zet Books, 2006.
- . *Islam, Land and Property: Research Series*. Nairobi: UN-HABITAT, 2005.
- Sait, Siraj, et al. *A Training Course on Land, Property and Housing Rights in the Muslim World*. Nairobi, Kenya: United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT), 2010.
- Sait, Siraj, dan Rafic Khouri. *Women and Land in the Muslim World: Pathswais to Increase Access to Land for the Realization of Development, Peace and Human Rights*. Nairob: United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT), 2018.
- As-Salām, ‘Izz ad-Dīn bin ‘Abd as-Sullamī asy-Syāfī’ī. *Maqāshid aṣ-Ṣalāh*. Ed. Iyāḍ Khālīd at-Ṭībā’. Cet. ke-1. Beirut: Dār al-Fikr al-Mu‘āshir, 1992.
- . *Al-Qawā’id al-Kubrā: al-Mausū’ah bi Qawā’id al-Aḥkam fī Iṣlāh al-Anām*. Ar-Riyāḍ: Dār Ibn Hazm, 2003.
- . *Qawā’id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*. Juz 2. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.
- As-Salāmī, Muḥammad al-Mukhtār. “Al-Qiyās wa Taṭbīqātuhu al-Mu‘āshirah.” *Silsilah Muḥāḍarāt al-‘Ulamā’ al-Bārizīn No. 15*. ttp.: al-Bank al-Islāmī li at-Tanmiyah, al-Ma’had al-Islāmī li al-Buḥūs wa at-Tadrīb, 1998.
- Salim G.P., M. Arskal. *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibn Taymiyah*. Jakarta: Logos, 1998.
- Sālīm, Muḥammad Azīzī Naẓamī. *Al-Fikr as-Siyāsī wa al-Ḥukmi fī al-Islām*. Al-Mu’assasah Lubab al-Jāmi’ah, t.t.

- As-Samhūdī, Nūr ad-Dīn ‘Alī bin Aḥmad. *Wafā’ al-Wafā’ bi Akhbār al-Muṣṭafā*. Ed. Muḥammad Muḥyī ad-Dīn ‘Abd al-Ḥamīd. Cet. ke-4. Juz 3. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1984.
- , *Wafā’ al-Wafā’ bi Akhbār Dār al-Muṣṭafā* (on the History of Medina), in Arabic. Cairo: Sa‘ādah Press, 1954.
- Šānī, Rauḍah Saḥīm Ḥamad Āli. *Daur al-‘Arab fī Taṭwīr az-Zirā’ah fī al-‘Irāq munz al-Faḥ al-Islāmī ḥattā Nihāyah al-Daulah al-Umawiyah 231 H.* ‘Ammān-Yordan: Mu’assasah Ḥammādah li ad-Dirāsāt al-Jāmi’ah li an-Nasyr wa at-Tauzī’, 2001.
- As-Sanūsī, ‘Abd ar-Raḥmān ibn Mu’ammar. *I’tibār Ma’ālāt al-Af’āl wa Murā’ah Natāij at-Taṣarrufāt: Dirāsah Muqāranah fī Uṣūl al-Fiḥ wa Maqāshid asy-Syarī’ah*. Riyāḍ: Dār Ibn al-Jauzī, 2003.
- As-Saqqāf, Sayyid ‘Alwī Aḥmad. *Ḥāsiyyah Tarsyīḥ al-Mustafīdīn bi Tausyīḥ Faḥ al-Mu’īn*. Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalībī, 1955.
- As-Sarkhasī, Muḥammad Abū Sahl Syams ad-Dīn. *Kitāb al-Mabsūt li Syams ad-Dīn as-Sarkhasī*. Juz 3, 10, 11 dan 27. Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1406.
- Al-Sarīrī, Abū Ṭayyib al-Maulūd. *Nail al-Munā fī Naẓm al-Muwāfaqāt li asy-Syāṭibī li al-‘Allāmah al-Qādī Abī Bakar Muḥammad al-Garnāṭī (760-829 H)*. Juz 1. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2015.
- Sārī, Muḥammad. *Al-Baḥs ‘an an-Naqdi al-Adabī*. Beirut: Dār al-Ḥadāshah li al-Ṭibā’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī’, 1984.
- As-Sattār ‘Abd asy-Syaikh. *‘Umar bin ‘Abd al-‘Azīz, Khāmis Khulafā-i ar-Rāsyidīn*. Cet. ke-2. Damaskus: Dār al-Qalam, 1996.
- Sātī, Mahdī. “Ifriqā fī Zamāni al-Rāsyidīn.” Dalam ‘Abd al-Majīd ‘Abd al-Raḥīm al-Hāj, dkk (ed.). *Al-Mu’tamar al-Dawlī*, 26-27 November. Jāmi’ah Ifriqiyyā al-‘Ālamiyyah-Jam’iyyah al-Da’wah al-Islāmiyyah al-‘Ālamiyyah Lībiyā-Wizārat al-Irsyād wa al-Auqāf, 2006.

- Satrāwī, ‘Abd Syahīd. *Al-Qur’ān: Nahjun wa Ḥaḍārah*. Manama, Bahrain: Syirkah al-Muṣṭafā li at-Tauzī‘ wa al-Khidmāt aš-Šaqāfiyyah, 1997.
- Sawwār, Muḥammad Waḥīd ad-Dīn. *An-Naz‘ah al-Jamā‘iyyah fī al-Fiqh al-Islāmī wa Āsaruhā fī Ḥaḍḍi al-Milkiyyah*. Aljazair: al-Mu’assasah al-Waṭaniyyah li al-Kitāb, 1986.
- Schacht, Joseph. *An Introduction to Islamic Law*. Oxford: Clarendon Press, 1964.
- . *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*. Oxford: Clarendon Press, 1959.
- Schippmann, K. *Grundzüge der Geschichte des Sasaniden Reiches*, Terj. F. Najd-e Samiee. Tehran: Cultural Heritage and Tourism Organization Publishing (in Persian), 1990.
- Schouler, James. *A Treatise on the Law of Personal Property*. Vol. 2. Boston: Little Brown and Company, 1884.
- Sengupta, Subir Bijoy. *Cosmic Evolution and the Evolution of Life*. India: Kalpaz Publications, 2011.
- Sexton, Christopher Gerard. *A Theology of Land: Terra Australis from Christian-Aboriginal Perspective*. Australia: ATF Press Publishing, 2019.
- Shahpari, Hasan dan Tahereh Alavi Hojjat (eds.). *Islamic Economy and Social Mobility: Cultural and Religious Considerations*. USA: Advances in Religious and Cultural Studies (ARCS) Book Series, 2016.
- Shalai, Felician. *Tārīkh al-Milkiyyah*. Terj., Šabāh Kan’ān. Al-Jazā’ir: al-Syirkah al-Waṭaniyyah li al-Nasyr, t.t.
- Shalāy, Felician. *Tārīkh al-Milkiyyah*. Beirut: Mansyūrāt ‘Uwaidāt, 1973.
- Shapiro, Ian. *The Evolution of Rights in Liberal Theory*. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.
- Shohibuddin, Mohamad. *Perspektif Agraria Kritis: Teori, Kebijakan dan Kajian Empiris*. Yogyakarta: STPN Press, 2018.
- As-Sibā’ī, Muṣṭafā. *Al-Faqr al-Jū’ al-Ḥirmān: Musykilāt wa Hulūl*. ttp.: Dār al-Warāq, 2002.

- . *Isytirākiyyah al-Islām*. Cet. ke-2. Al-Qāhirah: Dār al-Qaumiyyah li at-Ṭabā‘ah wa an-Nasyr, 1960.
- As-Sibhānī, ‘Abd al-Jabbār Ḥamad ‘Ubaid. *Al-Istikhlāf wa at-Tarkīb al-Ijtimā’ī fī al-Islām*. Cet. ke-1. Oman: Dār Wā-il li an-Nasyr wa at-Tauzī‘, 2003.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. “Islam’s Approach to Right of Property.” *Some Aspects of the Islamic Economy*. Lahore: Islamic Publications Ltd., 1978.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature*. Leicester, U.K.: The Islamic Foundation, for the International Centre for Research in Islamic Economics, 1981.
- Siddiqi, S.A. *Public Finance in Islam*. New Delhi: Adam Publisher and Distributors, t.t.
- Sinjārī, ‘Alī bin Tāj al-Dī n. *Manā’ih al-Karam fī Akhbār Makkah wa al-Bait wa Wulāt al-Ḥaram*. Vo. 3. Al-Makkah al-Mukarramah: Ma’had al-Buḥūs al-‘Ilmiyyah Jāmi’ah Umm al-Qurā, 1998.
- Sjadzali, Munawir. *Ijtihad Kemanusiaan*. Jakarta: Paramadina, 1997.
- Smith, Adam. *An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. Edinburg dan New York: T. Nelson and Sons, 1864.
- . *The Wealth of Nations: The Economic Classic, A Selected Edition for the Contemporary Reader with An Introduction by Tom Butler-Bowdon*. United Kingdom: Capstone Publishing Ltd., 2010.
- Sol, George. *Al-Mazāhih al-Iqtisādiyyah al-Kubrā*. Terj. Rāsyid al-Barāwī. Cet. ke-3. Al-Qāhirah: Dār an-Nahḍah al-Miṣriyyah, 1957.
- Sousa, Ahmed. “Irrigation in Iraq: Its History and Development.” *Issue 7 of Facts and prospects in Iraq series*. Irak: New Publishers Iraq, 1945.
- . *Al-‘Arab wa al-Yahūdi fī at-Tārīkh: Ḥaqāiq Tārīkhiyyah Tuḏharuhā al-Muktasyafāt al-Āsāriyyah*. Cet.

- ke-2. Damaskus: al-‘Arabī li al-‘I‘lān wa an-Nasyr wa aṭ-Ṭibā‘ah, t.t.
- Strayer, Joseph R. *Feudalism*. Canada: D. Van Nostrand Company, 1965.
- Su‘ūd, Maḥmūd Abū. *Khuṭūṭ Ra’iṣiyyah fī al-Iqtisād wa al-Islām*. Cet. ke-1. ttp.: an-Nādī asy-Syabābī, 1965.
- As-Subkī, Imām Tāj ad-Dīn ‘Abd al-Wahhāb bin ‘Alī. *Al-Asybah wa an-Nazāir*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991.
- Sujono dan Abdurrahman. *Metodologi Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- As-Sulaimānī, ‘Abd as-Salām. *Al-Ijtihād fī al-Fiqh al-Islāmī: Ḍawābiḥu wa Mustaqbaluhu*. Al-Mamlakah al-Maghribiyah: Wizārat al-Auqāf wa asy-Syu‘ūn al-Islāmiyyah, 1996.
- Sultān, Ṣalāh al-Dīn ‘Abd al-Ḥalī m. *Sultāh Waliyyu al-Amrī fī Farḍi Waḍāif al-Mālī hi al-Ḍarāib: Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah*. T.tp.: Sultān li al-Nasyr, 2004.
- Sumardjono, Maria, S.W. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008.
- Supriyadi, Eko. *Sosialisme Islam; Pemikiran Ali Syariat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Suseno, Franz Mmagnis. *Pemikiran Karl Marx dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2000.
- Sutedi, Adrian. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- As-Suwaidān, Ṭāriq. *Al-Andalus: at-Tārīkh al-Muṣawwar*. Kuwait: al-Ibdā’ al-Fikrī, 2005.
- As-Suyūṭī, Abdurrahmān ibn Abī Bakar. *Al-Asybah wa an-Nazāir*. Juz I. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1403 H.

- . *Al-Asybah wa an-Nazair fi Qawā'id wa Furū' Fiqh asy-Syāfi'ī*. Mesir: Syirkah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalibī, 1959.
- . *Ad-Durr al-Mansūr fi at-Tafsīr bi al-Ma'sūr*. Juz 3. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.
- Asy-Syāfi'ī, Muḥamad ibn Idrīs. *Al-Umm*. Juz 4. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1393 H.
- . *Ar-Risālah*, ed. Aḥmad Muḥammad Syākir. Cairo: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalibī, 1940.
- Asy-Syātibī, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad. *Al-Muwāfaqāt*. Taqdīm asy-Syaikh Bakr ibn 'Abdillāh Abū Zaid. Juz 2. Al-Mamlakah al-'Arabiyyah as-Su'ūdiyyah: Dār ibn 'Affān li an-Nasyr wa at-Tauzī', 1997.
- . *Al-I'tisām*. Ed. Aḥmad 'Abd asy-Syāfi, Juz 1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2016.
- . *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl asy-Syarī'ah*. Tasyrīḥ wa Takhrij asy-Syaikh 'Abd Allāh Darār. al-Mujallad al-Awwal (2). Cet. ke-7. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005.
- Syah, Niaz A. *Islamic Law and the Law of Armed Conflict: The Armed Conflict in Pakistan*. Ed. 1. London & New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2011.
- Asy-Syahrānī, Ḥusain bin Ma'lawī. *Huqūq al-Ikhtirā' wa at-Ta'lif fi al-Fiqh al-Islāmī*. Cet. ke-1. Riyād: Dār at-Tayyibah li an-Nasyr wa at-Tauzī', 2004.
- Asy-Syahrastānī. *Al-Milāl wa an-Nihāl*. Jilid I. Kairo: al-Azhar, t.t.
- Syahwān, Rāsyid Sa'īd. *Aḍ-Ḍawābiṭ asy-Syar'iyyah li aš-Šawābiṭ wa al-Mutagayyirāt fi al-Islām*. Amman, Jordan: Dār al-Mā'mūn li an-Nasyr wa at-Tauzī', 2013.
- Asy-Syaibānī, Al-Imām al-'Allāmah 'Umdah al-Mu'arrikhīn Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Abī al-Karam Muḥammad ibn Muḥammad ibn 'Abd al-Karīm ibn 'Abd al-Wāḥid al-Ma'rūf bi Ibn al-Ašīr. *Al-Kāmil fi at-Tārīkh*. Ed. Abī al-

- Fadā' 'Abd Allāh al-Qāḍī. Juz 3. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1987.
- Syalabī , Ra'ūf. *Al-Jihād fī Sabī l Allāh: Majālatuhu wa Wasāiluhu wa Ahdāfuhu*. Al-Qāhirah: Dār al-Turās al-'Arabī , 1974.
- Syalabī, Aḥmad. *Al-Iqtiṣād fī al-Fikr al-Islāmī*. Cet. ke-6. Al-Qāhirah: Maktabah an-Nahḍah al-Miṣriyyah, 1987.
- Asy-Syamarī, Ṭahā 'Alī Ḥusain ad-Dulaimī dan Zainab Ḥasan Najm. *Asālīb Tadrīs at-Tarbiyyah al-Islāmiyyah*. Al-Qāhirah: Dār asy-Syurūq li an-Nasyr wa at-Tauzī', 2003.
- Syams ad-Dīn, Muḥammad Maḥdī. *Al-Ijtihād wa at-Tajdīd fī Fiqh al-Islāmī*. Beirut: al-Mu'assasah ad-Dauliyyah li ad-Dirāsāt wa an-Nasyr, 1412 H.
- Syariati, Alī. *Haji*. Terj. Anas Mahyudin. Bandung: Penerbit Pustaka, 1995.
- . *Islam Mazhab Pemikiran dan Aksi*. Terj. Afif Muhammad. Mizan: Bandung, 1995.
- . *Man and Islam*. Terj. Fatollah Marjani. Houston: Filing, 1974.
- Syarqāwī, Maḥmūd. *Al-'Adālah al-Ijtīmā' iyyah 'inda al-'Arab*. Al-Qāhirah: Maktabah al-Anjlū al-Miṣriyyah, 1966.
- . *Al-Fard wa al-Mujtama' fī al-Islām*. Al-Qāhirah: Maktabah al-Anjalū al-Miṣriyyah, 1963.
- Asy-Syarwānī, 'Abd al-Ḥamīd. *Hawāsyī Tuḥfah al-Muḥtāj bi Syarḥ al-Minhāj*. Juz 6. Mesir: Maṭba'ah Muṣṭafā Muḥammad, t.t.
- Asy-Syaukānī, Muḥammad ibn 'Alī. *Kitāb Faṭḥ ar-Rabbānī min Fatāwā al-Imām asy-Syaukānī*. Ed. Abū Muṣ'ab Muḥammad Ṣubḥī ibn Ḥasan Ḥallāf. Juz 1. Yaman: Maktabah al-Jīl al-Jadīd, t.t.
- . *Nail al-Auṭār*. Juz 9. Beirut: Dār al-Jīl, 1973.
- Syaumān, Na'imah. *Al-Islām baina Kīnz wa Mārks wa Ḥuquq al-Insān fī al-Islām*. Damaskus: Ittiḥād al-Kitāb al-'Arab, 2000.

- Ṭāhirī, Ḥasan. *Al-Wilāyah wa al-Qiyādah fī al-Islām*. Beirut: Markaj al-Ḥaḍārah li Tanmiyah al-Fikr al-Islāmī, 2014.
- Ṭāyil, Fauzī Muḥammad. *Ahdāf wa Majālāt as-Sultāh fī Daulah al-Islāmiyyah: Dirāsah Muqāranah*. Al-Qāhirah: Dār Nahḍah al-‘Arabiyyah, 1986.
- Ṭahāwī, Ibrāhīm. *Al-Iqtisād al-Islāmī, Mazhabān wa Niḡāmān: Dirāsah Muqāranah*. Vol. 1. Al-Qāhirah: al-Haiāh al-‘Āmmah li Syu-ūn al-Maṭābi’ al-Amīriyyah, 1974.
- Aṭ-Ṭahāwī, Abū Ja‘far Aḥmad ibn Muḥammad ibn Salāmah. *Syarḥ Musykil al-Āsār*. Ed. Syu‘aib Arnā‘ūt. Juz 2. Beirut: Mu’assasah ar-Risālah, 1994.
- Ṭaha, Ganī Ḥasan. *Al-Ḥuqūq al-‘Ainiyyah fī al-Qānūn al-Mudunī al-Kuwaitī: Dirāsah Muqāranah, Ḥaqq al-Milkiyyah*. Juz 1. Kuwait: Maṭbū‘āt Jāmi’ah al-Kuwait, 1977.
- . *Ḥaqq al-Milkiyyah*. Kuwait: al-Jāmi’ah al-Kuwait, 1977.
- Ṭāj, ‘Abd ar-Raḥmān. *As-Siyāsah asy-Syar‘iyyah wa al-Fiqh al-Islāmī*. Taqḍīm Muḥammad ‘Imārah. Al-Qāhirah: Dār al-Salām wa al-Nasyr wa al-Tauzī’, 2014.
- At-Tamām, Ghāzī ibn Sālim ibn Lāfī. *Iqtisādiyyāt al-Ḥarbi fī al-Islām: Dirāsah Fiqhiyyah Iqtisādiyyah Mu’āṣirah*. Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 1990.
- Ṭamawī, Sulaimān Muḥammad. *‘Umar Ibn al-Khaṭṭāb wa Uṣūl as-Siyāsah wa al-Idārah al-Ḥadīṣah: Dirāsah Muqāranah*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- . *Mabādi’ al-Qānūn al-Idāri*. Cet. ke-2. Al-Qāhirah: Dār al-Fikr al-‘Arabī li al-Ṭibā’ah wa al-Nasyr, 1966.
- Tania, Bernard dkk. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia, Lintas Ruang, dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- At-Ṭantāwī, ‘Alī dan Nājī al-Ṭantāwī. *Akhbāru ‘Umar wa Akhbāru ‘Abdillāh ibn ‘Umar*. Cet. Ke-8. Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1983.

- Aṭ-Ṭarīqī, ‘Abd Allāh bin ‘Abd al-Muḥsin. *Al-Iqtiṣād al-Islāmī: Ususun wa Mabādi’u wa Ahdāfun*. Cet. ke-11. Al-Riyād: Mu’assasah al-Jarīsī li al-Tauzī‘ wa al-I’lān, 2009.
- Aṭ-Ṭawīl, Taufiq. *Falsafah al-Akhlāq: Nasy’atuhā wa Taṭawwuruhā*. Cet. ke-4. Kairo: Dār an-Nahḍah al-‘Arabiyah, 1979.
- . *Falsafah al-Akhlāq*. Yordan: Dār as-Ṣaqāfah wa an-Nasyr wa an-Tauzī‘, 1985.
- . *Al-‘Arab wa al-‘Ilm fī ‘Aşri al-Islām al-Żahabī*. Al-Qāhira: Dār al-Nahḍah al-‘Arabiyyah, 1968.
- At-Tahānuwī, Ḥāmid Ibn Ṣābir al-Farūqī. *Al-Aḥkām al-Arādī*. Riyād: Maktabah al-Malk Fahd, 2001.
- Taylor, Overton H. *A History of Economic Thought*. New York: McGraw-Hill Book Company, Inc., 1960.
- Ṭayyār, ‘Ammād Ḥaidar. *Al-Mu’āhadah ad-Dauliyyah: Syurūṭuhā wa Aḥkāmuhā fī asy-Syarī‘ah wa al-Qānūn*. Damaskus: Dār al-Ḥāfiz, 2000.
- Tikrītī, ‘Abd ar-Raḥmān. *Al-Amsāl al-Bagdādiyyah al-Muqāranah: Muqāranah ma’a Amsāl Aḥada ‘Asyara Qaṭran ‘Arabiyyan*. Baghdād: Maktabah al-Muṣannā, 1966.
- Tisdell, Clement A. *Competition, Diversity, and Economic Performance: Processes, Complexities, and Ecological Similarities*. Cheltenham-UK & Northampton-USA: Edward Elgar Publishing, Inc., 2013.
- Tjokroaminoto, HOS. *Islam dan Sosialisme*. Bandung: Segi Arsy, 2010.
- Ṭūfī, Sulaimān ibn ‘Abd al-Qawī. *Syarḥ Mukhtaṣar ar-Rauḍah*. Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1987.
- Al-Ṭūsī, Syaikh Abī Ja’far Muḥammad bin Ḥasan bin ‘Alī. *Al-Mabsūṭ fī Fiqh al-Imāmiyyah*. Vol. 3. Qum: al-Maktabah al-Murtaḍawiyah li Iḥyā’ al-Āşār al-Ja’fariyah, 1967.
- Turner, Bryan S. *Religion and Social Theory*. Ed. ke-2. London: SAGE Publications, 1991.
- . *Religion and Social Theory*. Terj. Ridwan Muzir. *Agama dan Teori Sosial*. Jogjakarta: IRCISoD, 2006.

- Udovitch, Abraham. *Partnership and Profits in Medieval Islam*. Princeton: Princeton University Press, 1970.
- Uwaid, Ḥasan ‘Abd al-Ḥamīd. *An-Nuzum al-Islāmiyyah wa al-Mazāhib al-Mu‘āṣirah: Dirāsah Muqāranah*. Riyād: Dār ar-Rasyīd, 1981.
- Vahrāman, Farraxvmartī. *The Book of a Thousand Judgments (a Sasanian Law-Book)*. Ed. Anahit G. Perikhanian. Costa Mesa: Mazda Publishers, 1997.
- Van Banning Theo R. G. *The Human Right to Property*. Groningen-Oxford: Intersentia-Hart, 2001.
- Vibert, Conor. *Theories of Macro Organizational Behavior: A Handbook of Ideas and Explanations*. Armonk, New York, London, England: M.E. Sharpe, 2004.
- Voll, John Obert. *Islam: Continuity and Change in the Modern World*. Boulder: Westview Press, 1982.
- Von Benda-Beckmann, Franz. *Property in Social Continuity: Continuity and Change in the Maintenance of Property Relationships through Time in Minangkabau, West Sumatra*. The Hague-Martinus Nijhoff, 1979.
- Al-Wā-ilī, Aḥmad. *Muḥāḍarāt al-Wā-ili*. Ed. Muṣṭafā asy-Syaikh ‘Abd al-Ḥamīd Āli Marhūn. Vol. 10. Beirut Syikah Dār al-Muṣṭafā li Iḥyā’ at-Turās, 2008.
- Al-Wafā, Aḥmad Abū. *Al-Qānūn ad-Diblūmāsī al-Islāmī*. Al-Qāhirah: Dār an-Nahḍah al-‘Arabiyah, 1992.
- . *Kitāb al-I‘lām bi Qawā‘id al-Qānūn ad-Daulī wa al-‘Alāqāt ad-Dauliyah fī Syarī‘at al-Islām*. Vol. 4. Al-Qāhirah: Dār an-Nahḍah al-‘Arabiyah, 2001.
- Al-Wakīlī, Aḥmad Ḥafīzah. *Taḥqīq al-Manāṭ wa Aṣaruhu fī Ikhtilāf al-Fuqahā’, Fiqh al-Amwāl Namūdżajān*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1971.
- Al-Wakīlī, Muḥammad. *Fiqh al-Aulawiyāt: Dirāsah fī aḍ-Ḍawābiṭ*. Cet. ke-1 ttp.: al-Ma’had al-‘Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 1997.

- Al-Wardī, Muḥammad ‘Abd Allāh. *Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah al-Muta’alliqah bi Khulūl al-Bilād min al-Aḥkām wa Taṭbīqāhā al-Mu’āṣirah: an-Nawāzil al-Fiqhiyyah fī Manāṭiq aṣ-Ṣirā’*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2020.
- . *Mahzilat al-‘Aqli al-Basyarī: Muḥāwalah Jadīdah fī Naqd al-Manṭiq al-Qadīm lā Takhlū min Safsaṭihi*. Cet. ke-2. London-Beirut: Dār Kūfān- Dār al-Kunūz al-Adabiyyah, 1994.
- . *Wa’āz as-Salāṭīn: Ra’yun Ṣarīḥ fī Tārīkh al-Fikr al-Islāmī fī Dau’i al-Manṭiq al-Ḥadīs*. Cet. ke-2. London: Dār Kūfān, 1995.
- Ward-Perkins, Bryan. *The Fall of Rome: And the End of Civilization*. Oxford, New York: Oxford University Press, 2005.
- Waṣfī, Muṣṭafā Kamāl. *Al-Milkiyyah fī al-Islām*. Al-Qāhirah: Maṭba’ah al-Amānah, 1973.
- Watt, William Montgomery. *Muhammad at Madinah*. Oxford: Clarendon Press, 1956.
- Weber, Max. *Religion, Power, Community*. Terj. Ahmad Tadayon. Tehran: Hermes Publication, 2003.
- . *Economy and society*. New York, NY: Bedminster, 1968.
- Weiss, Bernard. *The Spirit of Islamic Law*. University of Georgia Press, Georgia, 1998.
- Wolff, Jonathan. *Liberal Democracy and its Critics Perspectives in Contemporary Political Thought*. Cambridge: Polity Press, 1998.
- Yahyā, ‘Īsā ‘Abduh dan Aḥmad Ismā’īl. *Al-Milkiyyah fī al-Islām: Kitāb Yabḥaṣ fī al-Māl wa al-Istikhlāf wa al-Milkiyyah fī an-Nazm al-Waḍ’iyyah wa al-Aḥkām asy-Syar’iyyah*. Al-Qāhirah: Dār al-Ma’ārif, t.t.
- Yasīn, al-Sayyid. *Al-Kauniyyah wa al-Uṣūliyyah wa Mā Ba’da al-Ḥadāṣah: As’ilah al-Qarn al-Ḥādī wa al-‘Isyrīn* (Naqd al-‘Aql at-Taqlīdī). Juz 1. Cet. ke-1. Al-Qāhirah: al-Maktabah al-Akādīmiyyah, 1996.

- Yāsīn, Muḥammad Najmān. *Arḍ as-Sawāfi: al-Arḍ al-Khāṣṣah bi ad-Daulah fī al-Islam munz 'Aṣr ar-Risālah ḥattā Nihāyah al-'Aṣr al-Umawī*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2014.
- Yilmaz, Ihsan. *Muslim Laws, Politics and Society in Modern Nation State: Dynamic Legal Pluralism in England, Turkey and Pakistan*. Burlington, VT: Asygate, 2005.
- Younkins, Edward W. (ed.). *Three in One: Essays on Democratic Capitalism, 1976-2000 Michael Novak*. New York-Oxford: Rowman & Littlefield Publisher, Inc., 2001.
- Al-Yūbī, Muḥammad Sa'd ibn Aḥmad ibn Mas'ūd. *Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa 'Alaqaṭuhā bi al-Adillah asy-Syar'iyyah*. Riyāḍ: Dār al-Hijrah li an-Nasyr wa at-Tauzī', 1998.
- Yūnus, 'Abd Allāh Mukhtār. *Al-Milkiyyah fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa Daurihā fī al-Iqtisād al-Islāmī*. Al-Iskandariyah: Mu'assasah Syabāb al-Jāmi'ah, 1987.
- Yūnus, 'Abd Allāh Mukhtār. *Aṣar al-Tanzī m al-Islāmī li al-Milkiyyah: al-Mauārid al-Māliyyah li al-Daulah al-Islāmiyyah*. Aljazair: Dār al-Syī mā' li an-Nasyr wa at-Tauzī', 1990.
- Yusūf, Abū Kitāb al-Kharrāj. Pakistan: Idārat al-Qur'ān wa al-'Ulūm al-Islāmiyyah, 1987.
- Zāhid, 'Abd al-Amīr Kāzīm. *Qirā'ah fī al-Fikr al-Islāmī al-Mu'āṣir*. Beirut: Mu'assasah al-'Ārif li al-Maṭbū'āt, 2009.
- Az-Zāhirī, Aḥmad ibn Sa'īd ibn Hazm. *Al-Muḥallā*. Juz 8. Beirut: Dār al-Āfāq al-Jadīdah, t.t.
- Zāwī , Muṣṭafā. *Al-Islām wa al-Ḥadāṣah wa al-Dī muqerāṭiyyah min al-Insijām ilā al-Taṭābiq fī Zill al-Nizām al-Siyāsī fī al-Maghrib*. Rabat: Éditions Axioms Communication, 2004.
- Az-Zabīdī, Maḥmūd 'Abd 'Alī Ḥamīd. *An-Nizām al-Qānūnī li Inqīdā' ad-Da'wā al-Idāriyyah min Dūn al-Ḥukm bi al-Mauḍū'*: *Dirāsah Muqāranah*. Cet. ke-1. Al-Qāhirah: al-Markaz al-'Arabī li an-Nasyr wa at-Tauzī', 2018.

- Zahrah, Muḥammad Abū. *Al-Milkiyyah wa Nazariyyah al-‘Aqd fī Syarī‘ah al-Islāmiyyah*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1996.
- , *Mālik: Haiātuhu wa ‘Aşruhu-Ārā-uhu wa Fiqhuhu*. Al-Qāhirah: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 2006.
- , *at-Takāful al-Ijtimā‘ī fī al-Islām*. Al-Qāhirah: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1991.
- Zaid, Waşfī ‘Āsyūr Abū. *Ru‘ya Maqāşidiyyah fī Aḥdās ‘Aşriyyah*. Taqdī m al-‘Allāmah Aḥmad al-Raisūnī . Al-Qāhirah: Dār al-Maqāşid, 2017.
- Zaidān, ‘Abd al-Karīm. *Al-Madkhal li al-Dirāsah al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*. Beirut: Mu’assasah al-Risālah Nāsyirūn, 2005.
- Az-Zaila‘ī, Jamāl ad-Dīn Abī Muḥammad ‘Abdullāh bin Yūsuf al-Ḥanafī. *Naşbu ar-Rāyah Takhrīj Aḥādīs al-Hidāyah ma‘a al-Hidāyah Syarḥ Bidāyah al-Mubtadī wa Yalīhi Ākhiri al-Mujallad al-Khāmis Maniyyat al-Alma‘ī fimā Fāta az-Zaila‘ī; Kitāb al-Jināyāt*. Ed. Aḥmad Syams ad-Dīn. Juz 5. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2010.
- Az-Zain, Muḥammad Syauqī. *aş-Şiqāf fī al-Azminah al-‘Ijāf: Falsafah aş-Şaqāfah fī al-Gharb wa ‘inda al-‘Arab*. Cet. ke-1. ar-Riyāḍ: Dār al-Amān, 2013.
- Zainī, Jāsyim. *Al-Daulah fī Fikr Muḥammad Bāqir al-Şadr*. Amman, Jordan: Mu’assasah al-Badīl li al-Dirāsāt wa al-Nasyr, 2009.
- Zaitūn, Muḥammad Maḥmūd. *Iqlīm al-Baḥīrah: Şafahāt Majīdah min al-Ḥaḍārah wa al-Şaqāfah wa al-Kafāh*. Al-Qāhirah: Dār al-Ma‘ārif, 1962.
- Zaitūn, Muḥammad Maḥmūd. *Iqlīm al-Baḥīrah: Şafahāt Majīdah min al-Ḥaḍārah wa al-Şaqāfah wa al-Kafāh*. Al-Qāhirah: Dār al-Ma‘ārif, 1962.
- Az-Zalāqī, Muḥammad Munīr. *Al-Muqtaşad wa al-Mujtama‘ az-Zirā‘ī wa as-Samākī al-‘Arabī*. al-Qāhirah: Dār al-Mujtama‘ al-Mişriyyah, 1976.

- Zamakhsyarī, Abū Qāsim Jār Allāh. *Asās al-Balāghah*. Beirut: Dār al-Šādir, 1965.
- Zaman, Asad. *Islamic Economics: A Survey of the Literature*. UK: Religion and Development Research Program Lead Research Institution, International Development Department, University of Birmingham, 2008.
- Az-Zankī, Najm ad-Dīn Qādir Karīm. *Al-Ijtihād fī Maurid an-Naşş: Dirāsah Uşūliyyah Muqāranah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006.
- Az-Zarkasyī, Badrud ad-Dīn Muḥammad Bahādir. *Al-Baḥr al-Muḥīṭ fī Uşūl al-Fiqh*. Ed. Abū ‘Abd as-Sattār Abū Ghadah. Juz 6. Cet. ke-2. Al-Qāhirah: Dār aṣ-Şafwah, 1992.
- Al-Zarkalī, Khair al-Dīn. *Al-A’lām: Qāmūs Tarājim al-Asyhar al-Rijāl wa al-Nisā’ min al-‘Arab wa al-Musta’ir baina al-Mustasyriqīn*. Juz 2. Cet. Ke-7. Beirut: Dār al-‘Ilm li al-Malāyīn, 1986.
- Az-Zarqā’, Muṣṭafā Aḥmad. *Al-Fiqh al-Islāmī fī Şaubih al-Jadīd*. Beirut: Dār al-Fikr, 1967.
- , *Al-Madkhal al-Fiqhī al-‘Ām*. Juz 1. Cet. ke-1. Damaskus: Maṭābi‘ Alif Bā’, 1967.
- Az-Zībārī, Iyād Kāmil Ibrāhīm. *Siyāsah at-Tadarruj fī Taṭbīq al-Aḥkām asy-Syar’iyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1971.
- Zinātī, Maḥmūd Salām. *Mūjaz Tārīkh al-Nizam al-Ijtimā’iyyah wa al-Qānūniyyah: al-Mujtama’āt al-Badā’iyyah wa al-Qabiliyyah wa al-Muduniyyah*. Juz 1. Cet. Ke-1. Al-Qāhirah: al-Mu’assasah al-‘Arabiyyah al-Ḥadīşah li al-Ṭab’i wa al-Nasyr wa al-Tauzī’, 1971.
- Az-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu: asy-Syāmīl li al-Adillah asy-Syar’iyyah wa al-Ārā’ al-Maḥabiyyah wa Aḥamm an-Nazariyyāt al-Fiqhiyyah wa Taḥqīq al-Aḥādīs an-Nabawiyyah wa Takhrījuhā*. Juz 4 dan 5. Cet. ke-2. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- , *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu: asy-Syāmīl li al-Adillah asy-Syar’iyyah wa al-Ārā’ al-Maḥabiyyah wa*

- Ahamm an-Nazariyyāt al-Fiqhiyyah wa Tahqīq al-Aḥādīs al-Nabawiyyah wa Takhrījuhā.* Juz 5. Cet. ke-2. Damaskus: Dār al-Fikr, 2003.
- . *Al-Wasīf fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī.* ttp.: Dār al-Kitāb, 1977.
- . *Asār al-Ḥarb fī al-Fiqh al-Islāmī: Dirāsah Muqāranah.* Cet. ke-3. Beirut: Dār al-Fikr, 1998.
- . *Nazariyyah aḍ-Ḍarūrah asy-Syarī‘ah: Muqāranah ma‘a al-Qānūn al-Waḍ‘ī.* Cet. ke-4. Damaskus: Mu‘assasah ar-Risālah, 1985.
- . *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmiyyah.* Juz 2. Cet. ke-1. Sūriyah-Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.
- . *Wasatiyyah al-Islām wa Simāḥatuhu.* Damaskus: Kulliyat Syarī‘ah Jāmi‘ah Dimasyqā, t.t.

III. Sumber Artikel/Paper

- ‘Āyadah, Haddawī. “Al-Mafhūm al-Mu‘āṣir li Amlāk ad-Daulah al-Khāṣṣah.” *Majallah al-Manār li al-Buḥūs wa ad-Dirāsāt al-Qānūniyyah wa as-Siyāsiyyah* 1, no. 1 (2017): 239-255.
- ‘Abd al-Karīm, Khālīd Ḥamidī, dan Yāsir Muḥammad ‘Abd ar-Raḥmān. “Ta‘āruḍ al-Maṣāliḥ al-‘Āmmah wa al-Khāṣṣah: Dirāsah Uṣūliyyah al-Fiqhiyyah.” *Majallah Jāmi‘ah al-Madīnah al-‘Ālamiyyah* no. 13 (Juli 2015): 77-101.
- ‘Alī, ‘Amād Muḥammad Muḥammad Hasānain, Riḍā Maḥmūd Ḥamādah, dan Majdī Muḥammad Qāsim. “At-Taḥawulāt as-Siyāsiyyah wa Ta‘šīruhā ‘alā aṭ-Ṭābi‘i al-Ma‘mārī li al-Mabānī al-Idāriyyah fī Miṣra (Dirāsah Ḥālah: al-Mabānī al-Idāriyyah fī Miṣra Khilāl al-Qarnī al-‘Isyrīn).” *Journal of Engineering Sciences Assiut University Faculty of Engineering* 43 no. 4 (Juli 2015): 595-598.

- ‘Usmānī, Nūr Muḥammad dan Muḥammad Ḥabīb al-Raḥmān. “Kaifiyah al-Ta‘āmul ma‘a asy-Syarī‘ah al-Islāmiyah bi Mazāhibihā al-Muta’addidah: Taḥḍiyātin wa Ḥulūlin,” *Majallah al-Islām fī Āsiyā*, no. 4 (Desember 2011).
- A. K., Hasan Basri, Siti Nabihah and M. Syabri Abd. Majid. “Accounting and Accountability in Religious Organizations: An Islamic Contemporary Scholars’ Perspective.” *Gadjah Mada International Journal of Business* 18, no. 2 (May-August 2016): 207-230.
- Aarab, Ali. “A Survey of Iran’s Social Structure in the Transition from the Sassanid to the Early Islamic Era from the Manuscript and Archaeological Evidence.” *Cedrus: The Journal of MCRI* 4 (2016): 341-352.
- Abdul Ghani, Nik Abdul Rahim Nik, AHCENE LAHSASNA, dan Muhammad Yusuf Saleem. “Beneficial Ownership: To What Extent It Complies with Syari’ah?” *Asian Social Science* 11, no. 27 (2015): 155-167.
- Abdul Mun’im, Muhtadi. “Interpreting Violence on Religious Story.” *Conference Proceedings, Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XII)* (2012): 1624-1642.
- Abu Sulayman, Abdul-Hamid Ahmad. “The Theory of the Economics of Islam: The Economics of Tawhid and Brotherhood.” Dalam *Contemporary Aspects of Economic Thinking in Islam*. USA dan Canada: American Trust Publications, 1980, 8-50.
- Adams, Robert Merrihew. “Things in Themselves.” *Philosophy and Phenomenological Research* 57, no. 4 (Desember 1997): 801-825.
- Adhim, Nur, Sukirno, dan Muh. Afif Mahfud. “The Social Function of Land in Liberal and Islamic Law Perspective.” *The First International Conference on Islamic Development Studies (ICIDS)*. September 10-12, Bandar Lampung, Indonesia (2019): 1-4.

- Aiginger, K., M. Landesmann. "Competitive Economic Performance: USA versus EU." *WIIW Research Reports*, No. 291 (November, 2002): 1-70.
- Akbar, Ali. "Konsep Kepemilikan dalam Islam." *Jurnal Ushuluddin* 18, no. 2 (Juli 2012): 124-140.
- Al Saadi, Ahmad. "Al-Milkiyyah al-‘Āmmah fī al-Islām: Nazriyyah Fiqhiyyah Ta’šiliyyah." *Gümüŕhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 2, c. 1, sayı: 2 (2012): 266-286.
- Alpaugh, Micah. "A Self-Defining "Bourgeoisie" in the Early French Revolution: The "Milice Bourgeoise." The Bastille Days of 1789, and Their Aftermath." *Journal of Social History* 47, no. 3 (2014): 696-720.
- Anjum, Faraz. "Crisis of Muslim Civilization in Modern Times: Some Insights from Ibn Khaldun’s Thoughts." *Journal of Islamic Thought and Civilization* 2, no. 2 (2011): 151-163.
- Al-Ansari, Nadhir, Ammar A. Ali, dan Sven Knutsson. "Present Conditions and Future Challenges of Water Resources Problems in Iraq." *Scientific Research: Journal of Water Resource and Protection* 6 (2014): 1066-1098.
- Aydin, Necati dan Eron Manusov. "Materialism, Hedonism, Spirituality, and Subjective Well-being: An Empirical Study of Risale-i Nur (RN) Readers." *Al Shajarah: Journal of the International Islamic Institute of Islamic Thought and Civilization* 19, no. 2 (2014): 1-32.
- Bälz, Kilian. "Shariah versus Secular Law." Dalam *Islam and the Rule of Law: Between Sharia and Secularization*, ed. Birgit Krawietz dan Helmut Reifeld. Berlin: Konrad-Adenauer-Stiftung, 2008.
- Badr, Gamal Moursi. "Islamic Law: Its Relation to Other Legal Systems." *The American Journal of Comparative Law* 26, no. 2 (February 1977): 187-198.

- Banaji, Jairus. "Aristocracies, Peasantries and the Framing of the Early Middle Ages." *Journal of Agrarian Change* 9 (2009): 78–86.
- Barbot, Michela. "When the History of Property Rights Encounters the Economics of Convention: Some Open Questions Starting from European History." *Historical Social Research* 40, no. 1 (2015): 78-93.
- Bari, Zohurul. "Syirian-Iraqi Dispute over the Euphrates Water." *International Studies* 16, no. 2 (April-Juni 1977): 227-244.
- Barton, Stephen E. "Property Rights and Human Rights: Efficiency and Democracy as Criteria for Regulatory Reform." *Journal of Economic Issues* 17, no. 4 (Desember 1983): 915-930.
- Bashir, Abdel Hameed M. "Property Rights in Islam." *Proceedings of the Third Harvard University Forum on Islamic Finance: Local Challenges, Global Opportunities*. Cambridge: Massachusetts, Center for Middle Eastern Studies, Harvard University, 1999.
- . "Property Rights, Institution and Economic Development: An Islamic Perspective." *Humanomics* 18, no. 3 (2002): 75-91.
- Bates, Thomas R. "Gramsci and the Theory of Hegemony." *Journal of the History of Ideas* 36, no. 2 (April-June 1975): 351-366.
- Behdad, Sohrab. "Property Rights in Contemporary Islamic Economic Thought: A Critical Perspective." *Review of Social Economy* 47, no. 2 (1989): 185-211.
- . "Islam, Revivalism, and Public Policy." Dalam *Islam and the Everyday World: Public Policy Dilemmas*, ed. Sohrab Behdad dan Farhad Nomani. London dan New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2006.
- . "Property Rights and Islamic Economic Approaches." Dalam *Islamic Economic Alternatives: Critical*

- Perspectives and New Directios*, ed. Jomo K.S.. Houndmills, Basingstoke and London: Macmillan Academic and Professional Ltd., 1992.
- Berton, Stephen E. "Property Rights and Human Rights: Efficiency and Democracy as Criteria for Regulatory Reform." Dalam *Journal of Economic Issue* 17, no. 4 (December 1983): 915-930.
- Bjørnskov, Christian, dan Martin Paldam. "The Spirits of Capitalism and Socialism A Cross-Country Study of Ideology." *Economics Working Paper* 2009-18: 1-30.
- Bjørnskov, Christian and Martin Paldam. "The Spirits of Capitalism and Socialism A Cross-Country Study of Ideology." *Public Choice* 150, no. 3/4 (March 2012): 469-498.
- Böckenförde, Markus. "The Sudanese Interim Constitution of 2005: A Model to Establish Co-Existence between an Islamic and A Secular Legal Regime." Dalam *Islam and the Rule of Law: Between Sharia and Secularization*, ed. Birgit Krawietz dan Helmut Reifeld. Berlin: Konrad-Adenauer-Stiftung, 2008.
- Boltanski, Luc, dan Eve Chiapello. "The New Spirit of Capitalism." *International Journal of Politics, Culture, and Society* 18, no. 3/4, (2005): 161-188.
- Borhan, Joni Tamkin. "Economic Functions of the State: An Islamic Perspective." *Jurnal Usuluddin* 16 (2002): 75-90.
- Boukema, H. J. M. "Grotius' Concept of Law." *Archives for Philosophy of Law and Social Philosophy* 69, no. 1 (1983): 68-73.
- Bradley JR, Robert L., dan Roger Donway. "Capitalism, Socialism, and "The Middle Way": A Taxonomy." *The Independent Review* 15, no. 1 (2010): 71-76.
- Bowie, Norman E. "A Kantian Theory of Capitalism." *Business Ethics Quarterly*. (1998): 37-60.
- Calarent, Barbara. "On the Sociology of Islam by Ali Shari'ati: Marxism and Other Western Fallacies by Ali Shari'ati."

- American Journal of Sociology* 117, no. 4 (January 2012): 1288-1294.
- Campopiano, Michele. "Secret Knowledge for Political and Social Harmony: the 'Secretum Secretorum' between the Middle East and Europe." Dalam *Prodesse et delectare: Case Studies on Didactic Literature in the European Middle Ages/Fallstudien zur didaktischen Literatur des europäischen Mittelalters*, ed. Norbert Kössinger dan Claudia Wittig, 39-56. Boston: Walter de Gruyter GmbH, 2019.
- , "Irrigation and Taxation in Iraq 6th to 10th Century." *Working Paper* (2009): 2-34.
- , "Land Tax 'alā l-Misāḥa and Muqāsama: Legal Theory and the Balance of Social Forces in Early Medieval Iraq (6th-8th Centuries C.E.)." *Journal of the Economic and Social History of the Orient* 54 (2011): 239-269.
- Carruthers, Bruce G., dan Laura Ariovich. "The Sociology of Property Rights." *Annual Review of Sociology* 30 (2004): 23-46.
- Chavance, Bernard. "The Historical Conflict of Socialism and Capitalism, and The Post-Socialist Transformation." Dalam *Trade and Development: Directions for the 21st Century*, ed. John Toye, 16-34. USA: Edward Elgar Publishing, Inc., 2003.
- , "The Historical Conflict of Socialism and Capitalism, and The Post-Socialist Transformation." *UNCTAD X, High-level Round Table on Trade and Development: Directions for the Twenty-first Century, Bangkok*, 12 February 2000, 1-25.
- Champeil-Desplats, Véronique. "Law, the Plurality of Modes of Normativity and their Interactions." *La Revue des droits de l'homme* 16 (2019): 1-14.
- Chiapello, Eve. "Capitalism and its Criticisms." Dalam *New Spirits of Capitalisms*, ed. Paul du Gay dan Glenn Morgan, 60-82. Oxford: Oxford Scholarship Online, 2013.

- Cohen, Joel E. "Human Population: The Next Half Century." *Science* 302 (2003): 1172-1175.
- Cohen, Felix S. "Dialogue on Private Property." Dalam *Private and Common Property: Liberty, Property, and the Law*, ed. Richard A. Epstein. New York and London: Routledge Taylor & Francis Group, 2011.
- Congost, Rosa, Jorge Gelman, and Rui Santos. "Property Rights in Land: Institutions, Social Appropriations, and Socio-Economic Outcomes." Dalam *Property Rights in Land: Issues in Social, Economic, and Global History*, ed. Rosa Congost, Jorge Gelman, dan Rui Santos. London & New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2017.
- Cosgel, Metin, Rasya Ahmed, dan Thomas Miceli. "Law, State Power, and Taxation in Islamic History." *Department of Economics Working Paper Series, Working Paper 2007-01R* (January 2007): 22-28.
- Crewett, Wibke, Ayalneh Bogale, dan Benedikt Korf. "Land Tenure in Ethiopia: Continuity and Change, Shifting Rulers and the Quest for State Control." *CGIAR Systemwide Program on Collective Action and Property Rights (CAPRI)-Working Paper No. 91* (September 2008): 1-30.
- D'Alberti, Marco. "Administrative Law and the Public Regulation of Markets in A Global Age." Dalam *Comparative Administrative Law*, ed. Susan Rose-Ackerman dan Peter L. Lindseth. Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 2010.
- Daryae, Touraj. "Sasanian Persia (ca. 224-651 C.E.)." *Iranian Studies* 31, no. 3/4 (1998): 431-461.
- Davidson, Nestor M. "Property and Relative Status." *Michigan Law Review* 107, no. 5 (March 2009): 759-816.
- De Blois, Matthijs. "Religious Law versus Secular Law: The Example of the Get Refusal in Dutch, English and Israeli law." *Utrecht Law Review* 6, no. 2 (June 2010): 93-104.

- De Schutter, Olivier. "The Role of Property Rights in the Debate on Large-Scale Land Acquisitions." *CRIDHO Working Paper 1* (2015).
- Deininger, Klaus, dan Gersyon Feder. "Land Institutions and Land Markets". *Policy Research Working Paper*. The World Bank Development Research Group Rural Development (November 1998).
- Demsetz, Harold. "Toward a Theory of Property Rights." *The American Economic Review* 57, no. 2 (May 1967): 347-359.
- . "Toward a Theory of Property Rights II: The Competition between Private and Collective Ownership." *The Journal of Legal Studies* 31, no. 2 (2002): 653-672.
- Denny, Frederick M. "Islamic Theology in the New World, Some Issues and Prospects." *Journal of the American Academy of Religion* 62, no. 4 (1994): 1069-1084.
- Dezhamkhooy, Maryam. "An Introduction to Gender Structure and Social Inequality in the Sasanian Empire, Iran." *Archaeological Science Journal* 1, no. 1 (May 2012): 1-4.
- Domingo, Rafael. "Roman Law: Basic Legal Concepts and Values." *Social Science Research Network* (June 2017): 1-36.
- Ad-Dūkhi, Falāḥ ‘Abd al-Ḥasan Hāsyim. "Mintaqah al-Farāgh wa Isykalātuhā al-‘Aqidiyyah: Dirāsah fī al-Ab’ād al-‘Aqidiyyah li Mintaqah al-Farāgh fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah." *Majallah al-Dalīl*, no. 7 (2020): 72-78.
- Duncan, Myrl L. "Reconceiving the Bundle of Sticks: Land as A Community Based Resources." *Environmental Law* 32, no. 4 (Fall 2002): 773-807.
- Earle, Timothy. "Archaeology, Property, and Prehistory." *Annual Review of Anthropology* 29 (2000): 39-60.
- Eben-Saleh, M.A. "Land Use and Planning of Vernacular Landscape in the Highlands of the Southwest of Saudi Arabia." *Journal of Sustainable Forestry* 7, no. 3-4 (1998): 53-76.

- Eckl, Andreas. "Kant and Hegel on Property." Dalam *Handbook of the Philosophical Foundations of Business Ethics*, ed. Christoph Luetge, 385-414. New York and London: Springer, 2013.
- Ellickson, Robert C. "Property in Land." *The Yale Law Journal* 102 (1993): 1315-1400.
- Epstein, Richard A. "Possession as the Root of Title." Dalam *Liberty, Property, and the Law: A Collection of Essays*, ed. Richard A. Epstein. New York & London: Garland Publishing, Inc., 2000.
- Facchini, François. "Islam and Private Propert." 1st *Workshop of the European Network on the Economics of Religion (ENER)* in Granada, Spain, 16 – 17 November (2007) JEL Classification : KOO, N23: 1-16.
- Feder, G., dan D. Feeny. "Land Tenure and Property Rights: Theory and Implications for Development Policy." *The World Bank Economic Review* 5 (1991):135-153.
- Feinberg, Joel. "Psychological Egoism." Dalam *Ethics: Essential Readings in Moral Theory*, ed. George Sher. Ed. ke-1. London: Routledge, 2012.
- Finke, Roger. "Origins and Consequences of Religious Freedoms: A Global Overview." *Sociology of Religion* 74, no. 3 (2013): 297-313.
- Foster, Sheila R, dan Daniel Bonilla. "The Social Function of Property: A Comparative Law Perspective." *Fordham Law Review* 80 (November 2011): 101-113.
- Foster, J. "Bourgeoise." Dalam *Marxian Economics*, ed. John Eatwell, Murray Milgate dan Peter Newman. London: Macmillan Press Limited, 1990.
- Fowden, Garth. "Religious Communities." Dalam *Late Antiquity: Essays on the Postclassical World*, ed. Glen Warren Bowersock, Peter Brown, dan Oleg Grabar. Cambridge, Massachusetts, London, England: The Belknap Press of Harvard University Press, 2000.

- Frye, R. N. "Sasanid Political History." Dalam *Iran history: From Seleucid to Sasanids*, ed. E. Yarshater, 461-480. Tehran, Amirkabir (in Persian), 2001.
- Gabriel, Satyananda J. "Comparative Economic System." Dalam *21st Century Economics: A Reference Handbook*, ed. Rhona C Free, 441-450. Vol. 1. Los Angeles, Singapore, London: Sage Publications, Inc., 2010.
- Gamble, Clive. "Humanity from the Ice: The Emergence and Spread of an Adaptive Species." Dalam *The Oxford Illustrated History of the World*, ed. Felipe Fernández-Armesto, 13-41. Oxford: Oxford University Press, 2019.
- Gari, Lutfallah. "A History of the *Himā* Conservation System." *Environment and History* 12, no. 2 (May 2006): 213-228.
- Ghebru, Hosaena. "Technical Efficiency and Productivity Differential Effects of Land Right Certification: A Quasi-Experimental Evidence." *Quarterly Journal of International Agriculture* 54, no. 1 (2015): 1-13.
- Gintis, Herbert, Carel van Schaik, dan Christopher Boehm. "Zoon Politikon: The Evolutionary Origins of Human Political Systems." *Current Anthropology* 56, no. 3 (Juni 2015): 327.
- Giovanni dan Isadora Tarola. "Is Governance an Issue for Plumbers? Preliminary Remarks on Consolidation of Securities Settlement Systems." Dalam *Capital Markets in the Age of the Euro: Cross-Border Transactions, Listed Companies and Regulation*, ed. Guido Ferrarini, Klaus J. Hopt, dan Eddy Wymeersch. The Hague/London/New York: Kluwer Law International, 2002.
- Gregor, Mery. "Kant's Theory of Property." *The Review of Metaphysics* 41, no. 4 (Jun., 1988): 757-787.
- Grieves, Forest L. "Classical Writers of International Law and the Environment." *Boston College Environmental Affairs Law Review* 4, no. 2 (1975): 309-322.

- Guild, James "Land Acquisition in Indonesia and Law No. 2 of 2012." *Asian Development Bank Institute. Working Paper No. 1036* November (2019): 1-12.
- Gündogan, Ercan. "John Rauls' Theory of Justice as Fairness: An Introduction." *SEEU Review* 5, no. 2 (2009): 9-33.
- . "Conception of Hegemony in Antonio Gramsci's Southern Question and the Prison Notebooks." *Journal of Marxism and Interdisciplinary Inquiry* 2, no. 1 (November 2008): 45-60.
- Hasan, Ahmad. "Ijmā' in the Early Schools." *Islamic Studies* 6, no. 2 (Juni 1967): 121-139.
- Habdas, Magdalena. "The Community of Owners's Regulation of Common Property in Polish Condominium Schemes." Dalam *Modern Studies in Property Law*, ed. Nicholas Hopkins. Vol. 7. Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing, 2013.
- Hajati, Sri. "Application of Agreement Principles in Land Procurement for Development Public Interest." *Yuridika* 34, no 2. (May 2019): 365-385.
- Hartwell, R. M. "Was There an Industrial Revolution?" *Social Science History* 14, no. 4 (1990): 567-576.
- Hayali, Nuri Majid. "Irrigation, Salinity and Drainage in the Iraq Delta." *Sixt Near East-South Asia Regional Irrigation Practices Seminar*. March 19-30. Amman-Jordan: The Government of Jordan, 1966.
- Heitger, Bernhard. "Property Rights and the Wealth of Nations: A Cross-Country Study." *Cato Journal* 23, no. 3 (Winter 2004): 381-402.
- . "Property Rights and their Impact on the Wealth of Nations: A Cross-Country Study." *Kiel Working Paper No. 1163*. Germany: Kiel Institute for World Economics, 2003.
- Herlihy, David. "General Introduction." Dalam *The History of Feudalism*, ed. David Herlihy. London: Palgrave Macmillan, 1970.

- Herring, Ronald J. "Political Conditions for Agrarian Reform and Poverty Alleviation." *DFID Conference on 2001 World Development Report on Poverty*. Birmingham, England, August 16-17, 1999, 1-37.
- Hodgson, Geoffrey M. "1688 and All that: Property Rights, the Glorious Revolution and the rise of British capitalism." *Journal of Institutional Economics* 13, no. 1 (2017): 79–107
- Hoppit, Julian. "Counting the Industrial Revolution." *The Economic History Review* 43, no. 2 (May 1990): 173-193.
- Inter-Departmental Working Group on Land Use Planning. "Guidelines for Land-Use Planning." *FAO Development Series 1* (1993).
- Iqbal, Nuzhat, dan Zulfiqar Ahmad Gill. "The Concept of Land Ownership in Islam and Poverty Alleviation in Pakistan (with Comments)." *The Pakistan Development Review* 39, no. 4 (2000): 649-662.
- Ishak, Muhammad Syahrul Ifwat. "The Principle of Considering Ma'alat in Islamic Rules: Do Ends Justify Means?" *International Journal of Islamic Thought* 14 (2018): 52-59.
- Ismail, Nurhasan. "Prinsip-Prinsip Hukum Agraria Indonesia: Adakah Kesejajaran dengan Fikih Agraria?" Makalah disampaikan dalam *Seminar Nasional Pembaruan dan Tata Kelola Agraria Perspektif Islam dan Keindonesiaan* yang diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah bekerjasama dengan Pusat Tarjih Muhammadiyah Universitas Ahmad Dahlan, Kamis, 19 Desember 2019 di Yogyakarta, 1-16.
- Jābir, Maḥmūd Ṣāliḥ, dan Ẓiyāb 'Abd al-Karīm al-'Aql. "At-Ta'āruḍ wa at-Tarjīḥ baina al-Maṣāliḥ wa al-Mafāsiḍ fī at-Tasyrī' al-Islāmī." *Dirasāt 'Ulūm asy-Syarī'ah wa al-Qānūn* 32, no. 1 (2005).
- Jacobsen dan Lipman. "Political Science." Dalam *College Outline Series Barmers and Noble*. New York: t.p., 1956, 15-18.

- Jalil, Abdul. "Hak atas Tanah; Formulasi Normatif Model Fiqh." *Kasyf el -Fikr* 2, no.1 (Juni 2015): 10-14.
- Jamrozi, Ahmad Syafi'i Sulaiman, dan Ratno Lukito. "The Logic of State Authority on the Control of Agrarian Resource (Socio-Anthropological and Islamic Perspective)." *American Journal of Social Sciences and Humanities* 4, no. 4 (2019): 516-527.
- ."Maqāṣid al-Syarī'ah in the Study of Ḥadīṣ and Its Implication for The Renewal of Islamic Law (Study on Jasser Auda's Thought)." *Proceedings of ADVED 2017-3rd International Conference on Advances in Education and Social Sciences* 9-11 October 2017- Istanbul, Turkey.
- ."Menggagas Hukum Islam yang Akomodatif-Transformatif dalam konteks Legal Pluralism di Indonesia." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 1 (Januari 2010): 1-25.
- ."Problem Pengembangan Kreativitas Hakim di Tengah Intervensi Kekuasaan dan Mafia Peradilan (Bercermin dari Pemikiran Filsafat Hukum Roscou Pound)." *Al-Manāhij* 3, no. 2 (Juli-Desember 2009): 255-258.
- Al-Jaiyousi, Odeh Rasyed. "The State of Ecosystem and Progress of Societies." *Proceedings of International Conference on Statistics, Knowledge and Policy: Measuring and Fostering The Progress of Societies*. (OECD): 1-16.
- Johnson, Denise R. "Reflections on the Bundle of Rights." *Vermont Law Review* 32 (2007): 247-272.
- Joyce, R. A. "Embodied Subjectivity." Dalam *A Companion to Social Archaeology*, ed. L. Meskell dan R. Proucel. London and Newyork: Routledge, 2004.
- Johnston, James Howard. "The Two Great Powers in Late Antiquity: Comparison." Dalam *States, Resources and*

- Armies: The Byzantine and Early Islamic Near East*, 3, ed. A. Cameron, 157–226. Princeton: Darwin Press, 1995.
- Jr., Fred D. Miller. “Aristotle on Property Rights.” *The Society for Ancient Greek Philosophy Newsletter* 317 (1986): 1-27.
- Julia, Taslim, dan Zainab Belal Omar. “Application of Ijma’ in Modern Islamic Finance Rulings: Does Ijma’ Really Exist? A Literature Review.” *Bangladesh Journal of Islamic Thought* 13, no. 19 (2017): 35-46.
- Ka Khel, Muhammad Nazeer Ka. “Political System in Pre Islamic Arabia.” *Islamic Studies* 20, no. 4 (Winter 1981): 375-393.
- Kadamovich, Yusubov Jaloliddin et al. “Social Justice as a Condition of Socio-Spiritual Stability in Society.” *Journal of Critical Reviews* 7, no. 5 (2020): 816-818.
- Kahya, Emel, dan Sungsoo Kim. “Aristotle on Economics and Ethics.” *Applied Economics and Finance* 5, no. 6 (November 2018): 23-32.
- Kale, Mr. Kiran Ranganath. “Concept of Public Purpose: It’s Importance in Present Legal Scenario.” *International Journal of Innovative Studies in Sociologies and Humanities (IJISSH)* 2, no. 5 (July 2017): 8-13
- Kamali, Mohammad Hashim. “Istiḥsān and The Renewal of Islamic Law.” *Islamic Studies* 43, no. 4-5 (Winter 2004): 561-581.
- Karbasian dan Zanjani. “Religious Foundation of State in Sasanid Era.” Dalam *Intentional Movements in Sasanid Iran*, ed. Zandiq. Tehran: Akhtaran Publishing, 2005.
- Karimian, H. dan N. Moghimi. “Sasanian Emperors as the Pioneers of Globalization: An Investigation on the Ideas of Globalization in Ancient Iran.” *Journal of Historical Sociology* 6, no. 3 (2014): 31-55.
- Kesuma, Arsyad Sobby. “Pandangan Ulama tentang Kepemimpinan dalam Negara Islam.” *ISLAMICA* 4, no. 1 (September 2009): 120-132.

- Al-Khātib, Sa'ad Mahmoed Nāsser. "Al-Mukhtaṣar al-Jāmi' fī Siyāsah asy-Syar'iyah." *Majallah al-Jāmi'ah al-'Irāqiyah* 2, no. 38 (t.t.): 201-220.
- Khadduri, Majid. "Human Rights in Islam." *The Annals of the American Academy of Political and Social Science* 243 (Januari 1946): 77-81.
- Kia, Amir. "A Non-Technical Primer on Private Ownership in Islam." *Journal of Business Inquiry* 6, no. 1 (2007): 73-76.
- Kidwai, Azim, dan Choy Heng Lai. "Scientific Thinking: Between Secularisation and the Transcendent." Dalam *Ideals and Realities: Selected Essays of Abdus Salam*, ed. Azim Kidwai dan Choy Heng Lai, 279-343. Ed. ke-3. Singapore: World Scientific Publishing Co, Ltd., 1989.
- Kim, Jongwook, dan Joseph T. Mahoney. "Property Rights Theory, Transaction Costs Theory, and Agency Theory: An Organizational Economics Approach to Strategic Management." *Managerial and Decision Economics* 26 (2005): 223-242.
- Kitanishi, Koichi. "Food Sharing 84 Among the Aka Hunter-Gatherers in Northeastern Congo." *African Study Monographs* 25 (March 1998): 3-32.
- Klein, Daniel B., dan John Robinson. "Property: A Bundle of Rights? Prologue to the Property Symposium." *Econ Journal Watch* 8, no. 3 (September 2011): 193-204.
- Kline, Danile T. "Virtually Medieval: The Age of Kings Interprets the Middle Ages." Dalam *Mass Market Medieval: Essays on the Middle Ages in Popular Culture*, ed. David W. Marshall, 154-170. Jefferson, North Carolina dan London: McFarland & Company, Inc., Publishers, 2007.
- Krier, James E. "Evolutionary Theory and the Origin of Property Rights." *Law & Economics Working Papers Archive: 2003-2009*. Art. 98. University of Michigan Law School, 2009.

- Kumar, Mohd Younus. "Islamic Political Thought: A Study of the Diverse Interpretations of Medieval Muslim Political Thinkers." *Saudi Journal of Humanities and Social Sciences* 2, no. 11A (November 2017): 1050-1057.
- Kumm, Mattias. "The Legitimacy of International Law: A Constitutionalist Framework of Analysis." *The European Journal of International Law* 15, no. 5 (2004): 907-931.
- Kuran, Timur. "The Economic System in Contemporary Islamic Thought: Interpretation and Assessment." *International Journal of Middle East Studies* 18, no. 2 (May 1986): 135-164.
- Laduddin, Hayatullah. "Property and Ownership Right from an Islamic Perspective." *Advances in Natural and Applied Sciences* 6, no. 7 (2012): 1125-29.
- , "Maslahah's Role as an Instrument for Revival of Ijtihad." *International Journal of Islamic Thought* 8 (Desember 2015): 27-34.
- Lavoie, Don. "A Critique of the Standard Account of the Socialist Calculation Debate." *The Journal of Litenorion Studies* 5, no. 1 (Winter 1981): 41-86.
- Lecaldano, Eugenio. "Hume's Theory of Justice, or Artificial Virtue." Dalam *A Companion to Hume*, ed. Elizabeth S. Radcliffe. UK: A John Wiley & Sons, Ltd., Publication, 2011.
- Lehavi, Amnon. "Land Law in the Age of Globalization and Land Grabbing." Dalam *Comparative Property Law: Global Perspectives*, ed. Michele Graziadei dan Lionel Smith. Cheltenham, UK, Northampton: Edward Elgar Publishing, 2017.
- , "The Global Law of the Land." *University of Colorado Law Review* 81 (2010): 425-471.
- , "Unbundling Harmonization: Public versus Private Law Strategies to Globalize Property." *Chicago Journal of International Law* 15, no. 2 (Winter 2015): 453-517.

- Llewellyn, O.A. "The Basis for a Discipline of Islamic Environmental Law." Dalam *Islam and Ecology*, ed. R.C. Foltz et al. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2003.
- Lobingier, Charles Sumner. "Rise and Fall of Feodal Law." *Cornell Law Review* 18, no. 1 (December, 1932): 192-231.
- Lubis, Nazly Hanum. "Maşlahah Mursalah in the Thought of Muḥammad ‘Abduh and Rasyī d Riḍā." *Al-Jām’ah* 42, no. 1 (2004): 134-152.
- Lueck, Dean dan Thomas J. Miceli. *Property Law*. Economic Working Paper -04. University of Connecticut, (February 2004): 1-60.
- Lurye, John. "The Evolution Philosophy of Property." *Res Judicatae*, no. 3 (1946-1947): 181-86.
- Mahoney, Robert et al. "Land Markets: Why Are They Required and How Will They Develop?" *International Federation of Surveyors* (July 2007): 1-11.
- Makovi, Michael. "Two Opposing Literary Critiques of Socialism: George Orwell versus Eugen Richter and Henry Hazlitt." *Munich Personal RePEc Archive* (MPRA) (February 2015): 1-32.
- Malik, Maszlee. "A Special Case Study on Religion & Property Rights: Property Rights from an Islamic Perspective." *IREP* (2016): 1-21.
- Man Li, Rita Yi. "Private Property Rights, Legal Enforcement and Economic Prosperity: The Fall of Early Civilized China and the Rise of United Kingdom in 18th-19th Century." *Asian Social Science* 5, no. 10 (October, 2009): 10-15.
- Mangini, Michele. "Rationality and Ethics between Western and Islamic Tradition." *Religions* 9, no. 302 (2018): 1-23.
- Mårtensson, Ulrika. "Discourse and Historical Analysis: the Case of al-Tabarī’s History of the Messengers and the Kings." *Journal of Islamic Studies* 16, no. 3 (2005): 287-331.

- Mas'udi, Masdar F. "Meletakkan Kembali Maslahat sebagai Acuan Syari'at." *Jurnal Ulumul Qur'an*, no. 3 (1995).
- Massie, Pascal. "Ethics of Property, Ethics of Poverty." *The Saint Anselm Journal* 12, no. 1 (Fall 2016): 38-62.
- Mayhew, Robert. "Aristotle on Property." *The Review of Metaphysics* 46, no. 4, (June 1993): 803-831.
- McDaniel, Charles. "Islam and the Global of Society: A Religious Approach to Modernity." *Brigham Young University Law Review* 2003, no. 2 (2003): 507-540.
- McGlynn, Conor. "Aristotle's Economic Defence of Private Property." *Economic History: The Student Economic Review* (2015): 1-7.
- Michals, Teresa. "That Sole and Despotic Dominion": Slaves, Wives, and Game in Blackstone's Commentaries." *Eighteenth-Century Studies* 27, no. 2, (Winter 1993-1994): 195-216.
- Michie, Jonathan, and Linda Lobao. "Ownership, Control and Economic Outcomes." *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society* 5 (2012): 307-324.
- Miller Jr., Fred D. "Aristotle on Property Rights." *The Society for Ancient Greek Philosophy Newsletter* 317 (1986): 1-27.
- Miller, Tracy C. "The Role of Property Rights in Economic Development that Benefits the Poor." Paper dipresentasikan di *Baylor University*, 24 Oktober 2008, 1-16.
- Mirow, M C. "The Social-Obligation Norm of Property: Duguit, Hayem, and Others." *Florida Journal of International Law* 22 (2010): 191-226.
- Moftakhari, H., Rajablou, A., dan S. Sasan Pour. "The Role of Anushirvan Reforms on Sassanid Social Stratification". *Humanity Journal of University of Al-Zahra* 17, no. 71 (2008): 1-38.
- Moinifar, H. "Investigation of the Roots of the Caste System in India." *Journal of Subcontinent Researches* 4, no. 10 (2012): 91-108.

- Moore, Jason W. "The Crisis of Feudalism: An Environmental History." *Organization & Environment* 15, no. 3 (September 2012): 301-322.
- Muhammad, Diyāuddīn. "Fī Dill Siyāsah al-Khaṣkhaṣah: Kaifa Nahmā Mujtama'ātanā al-Islāmiyyah min Saitarah Ra's al-Māl al-AjNabi?" *Majallah al-Iqtisād al-Islāmī*. Dubai: Qism al-Buḥūs wa al Dirāsāt al-Iqtisādiyyah, Bank Dubai al-Islāmī, 1996.
- Mulyany, Ratna, dan Hafas Furqani. "Sharing Property: Distributive Justice Framework in An Islamic Moral Economy." *MADANIA* 23, no. 2 (Desember, 2019): 117-176.
- Muntoha. "Otoritas Negara dalam Pengaturan Kehidupan Beragama di Indonesia: Urgensi Ataukah Intervensi." *Millah* 11, no. 2 (Februari 2012): 519-540.
- Mustafa, Ahmad H., dan Hossein G. Askari. "The Economic Implications of Land Ownership and Cultivation in Islam." Dalam *Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economy*, ed. Munawwar Iqbal. Islamabad: International Institute of Islamic Economcs, 1996.
- Muwahid. "Implikasi Yuridis Kekaburan Makna Kepentingan Umum dalam Undang-Undang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum." *Al-Hikam, Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (September 2015): 1-12.
- Nafik, M. "Comparison between the Modern and Islamic Concept of Taxation." *Proceeding of the 2012 International Conference on Business and Management*, Phuket – Thailand (2012): 19-21.
- Nahar, H.S., dan H. Yaacob. "Accountability in the Sacred Context: The Case of Management, Accounting and Reporting of a Malaysian Casy Awqaf Institution." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 2, no. 2 (2011): 87-113.

- Nails, Debra. "Plato's "Republic" in Its Athenian Context." *History of Political Thought* 33, no. 1 (Spring 2012): 1-23.
- Naqvi, Syed Nawab Haider. "The Dimension of an Islamic Economic Model." *Islamic Economic Studies* 4, no. 2 (May 1997): 1-23.
- Nelson, S. "Gender Archaeology." Dalam *Archaeology: the Key Concepts*, ed. C. Renfrew dan P. Bahn, 127-132. London: Routledge, 2005.
- Newcomb, George B. "Theory of Property." *Political Science Quarterly* 1, no. 4 (December 1886): 595-611.
- Nezhad, M. Zarra. "Tribute (Kharāj) as a Tax on in Islam." *International Journal of Islamic Financial Services* 5, no.1 (Juni 2014): 1-15.
- Nienhaus, Volker. "Fundamentals of an Islamic Economic System Compared to the Social Market Economy." *KAS INTERNATIONAL REPORTS* 11 (2010): 75-96.
- Nomanul-Haq, S. "Islam and Ecology: Toward Retrieval and Reconstruction." Dalam *Islam and Ecology*, ed. R.C. Foltz et al. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2003.
- Nourahmadi, Mohammad Javad. "Shaheed Sadr's Perspective on Property Rights in Islam." Dalam *Handbook of Ethics of Islamic Economics and Finance: De Gruyter Studies in Islamic Economics, Finance and Business*, ed. Abbas Mirakhor, Zamir Iqbal, dan Seyed Kazem Sadr. Vol. 5. Berlin/Boston: Walter de Gruyter GmbH, 2020.
- Al-Nowaihi, Muhammad. "Fundamentals of Economic Justice in Islam." Dalam *Contemporary Aspects of Economic Thinking in Islam: Proceedings of the Third East Coast Regional Conference of the Muslim Students' Association of the United States and Canada*, (April 1968). Canada: American Trust Publication, 1980: 65-81.

- An-Nu'amī, Syaīmā' 'Alī. "Min an-Nasyā'āt al-Iqtisādiyyah li Ma'ābid Bilād Bilād Assyria fī al-'Aṣr Assyria (911-612 SM)." *Dirāsāt Mauṣuliyyah*. no. 30 (Sya'bān, 2010): 65-82.
- Nur, Iffatin. "In the Name of Public Interest We Evict? (Re-actualizing The Standing Position of Proletarian Jurisprudence to the Marginalized)." *Sawdi Journal of Humanities and Social Sciences* 5, no. 2 (February 2020): 21-32.
- Opwis, Felicitas. "Maṣlaḥah in Contemporary Islamic Legal Theory." *Islamic Law and Society* 12, no. 2 (2005): 182-223.
- Osman, Fathi. "Parameters of the Islamic State." *Arabia: The Islamic World Review*. No. 17, Januari (1983): 1-18.
- Ostrom, E. "Private and Common Property Rights." Dalam *Civil Law and Economics. Encyclopedia of Law and Economics*, ed. Bouckaert and G. DeGeest. Vol. 2 B. Cheltenham: Elgar, 2000.
- Othmann, Norani. "Islam Constitution, Citizenship Rights and Justice in Malaysia." Dalam *Islam and the Rule of Law: Between Sharia and Secularization*, ed. Birgit Krawietz dan Helmut Reifeld, 93-114. Berlin: Konrad-Adenauer-Stiftung, 2008.
- Panasar, Sukhninder. "Theories of Private Property in Modern Property Law." *The Denning Law Journal* 15, no. 1 (2000): 113-138.
- Parkasy. "Antonio Gramsci's Concept of Hegemony: A Study of the Psyche of the Intellectuals of the State." *BRDU International Journal of Multidisciplinary Research* 1, no. 5 (April 2016): 1-10.
- Patnaik, Prabhat. "The Marxist Argument." *Social Scientist* 40, no. 9/10 (September–Oktober 2012): 27-45.
- Pejo, Erida. "The Right of Property and its Social Function." *Academic Journal of Business, Administration, Law and Social Sciences IIPCCCL Publishing, Graz-Austria* 3, no. 3 (November 2017): 32-44.

- Penner, James E. "The 'Bundle of Rights' Picture of Property." *UCLA Law Review* 43, no. 3 (1996): 711-820.
- Perveen, Sajida, dan Humaira Aris Dasti. "Feodalism: A Pastime of Power, Economic and Political influence in Pakistan." *Pakistan Vision* 15, no. 1 (2015): 59-75.
- Pirot, Florent. "On Totalitarianism and its Levers: the Study of Sismondi as A User's Manual." *La Région AuvergneRhône-Alpes* (2018): 1-23.
- Porzecanski, Arturo C. "Human Rights and Sovereign Debts in Context of Property and Creditor Rights." Dalam *Sovereign Debt and Human Rights*, ed. Ilias Bantekas dan Cephas Lumina. UK: Oxford University Press, 2018.
- Pound, Roscoe. "Theories of Law." *The Yale Law Journal* 22, no. 2 (1912): 114-150.
- Power, David S. "The Islamic Inheritance System: A Socio-Historical Approach." Dalam *Issues in Islamic Law*, ed. Mashood A. Baderin. Vol. II. London and New York: Routledge, 2016.
- Pryor, John H. "The Origins of the Commenda Contract." *Speculum* 52, no. 1 (1977): 5-37.
- Pullen, John. "An Essay on Distributive Justice and the Equal Ownership of Natural Resources." *American Journal of Economics and Sociology* 72, no. 5 (November 2013): 1044-1074.
- Al-Quḍāh, Ḥanān 'Abd al-Karīm dan Muḥammad Khālid Maṣṣūr. "Manḥaj al-Istiṣlāḥ wa Taṭbī qātuḥu fī al-Maḥḥab al-Syāfi'ī." *Dirāsāt 'Ulūm al-Syarī'ah wa al-Qanūn* 42, no. 3 (2015): 1156-1158.
- Rauls, John. "Justice as Fairness." *The Philosophical Review* 67, no. 2 (April 1958): 164-195.
- Ar-Rawsān, Ṭāriq Muḥammad al-'Azzām, dan Muḥammad 'Alī. "Nasy'ah wa Taṭūr al-Uṣṭūl al-Islāmī; Zaman al-Khalīfah 'Uṣmān ibn 'Affān." *Majallah al-Misykāh li al-*

- 'Ulūm al-Insāniyyah wa al-Ijtimā'iyah* 2, no. 1 (2015): 57-86.
- Razak, Abd Hakim Abd. "Multiple Syariah Board Directorship: A *maṣlahah* (Public Interest) Perspective." *Journal of Islamic Marketing* 11, no. 3 (2019): 745-764.
- Ar-Rubai'ī, Ḥasan Karīm Mājid. "Naẓariyyah al-Firāg at-Tasyrī'ī 'inda as-Sayyid asy-Syahīd Muḥammad Bāqir aṣ-Ṣadr: Juẓūruhā at-Tārīkhiyyah wa Ḥudūduhā ma Mawānī'uhā asy-Syar'iyah." *Journal of Human Science (Majallah 'Ulūm al-Insāniyyah)* 1, no.16 (2013): 71-79.
- Reinhart, Kevin. "A Major Contribution to the History of Academic Institution in Islam and the West." *The Muslim World* 80, no. 1 (1990): 37-40.
- Rejekiingsih, Triana. "Asas Fungsi Sosial Hak atas Tanah pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan dari Teori, Yuridis dan Penerapannya di Indonesia)." *Yustisia* 5, no. 2 (Mei-Agustus 2016): 298-325.
- Rezakhani, Khodadad and Michael G. Morony. "Markets for Land, Labour and Capital in Late Antique Iraq, AD 200–700." *Journal of Economic and Social History of the Orient* 57 (2014): 231–261.
- Rezakhani, Khodadad. "Continuity and Change in Late Antique Irān: An Economic View of the Sasanians." *International Journal of the Society of Iranian Archaeologists* 1, no. 2 (Summer-Autumn 2015): 95-108.
- Ridwan. "Land Ownership Reform in Islam." *Asian Social Science* 15, No. 2 (2019): 164-171.
- Rose, Carol M. "Canons of Property Talk, or, Blackstone's Anxiety." *The Yale Law Journal* 108, no. 3 (Dec., 1998): 601-632.
- Rubin, Zeev. "The Reforms of Khusro Anūshirwān." Dalam *The Byzantine and Early Islamic Near East. III: States, Resources and Armies*, ed. Averil Cameron, 227-97. Princeton: The Darwin Press, 1995.

- ". "Nobility, Monarchy and Legitimation under the Later Sasanians." Dalam *The Byzantine and Early Islamic Near East. Vol. 6, Elites Old and New in the Byzantine and Early Islamic Near East*, ed. John Haldon dan Lawrence I. Conrad. Princeton: Darwin Press, 2004.
- Şalīḥah, Ibn 'Asyūr. "Nazariyah al-Milkiyyah baina at-Tasyrī' al-Iqtisādī al-Islāmī wa al-Qānūnī." *Majallah 'Ulūm al-Islāmiyyah* (2006).
- Şiddīqī, Muḥammad Najātullāh. "Al-Fikrī al-Iqtisādī li Abī Yūsuf." *Majallah Abḥās al-Iqtisād al-Islāmī* 2 (1985): 77-99.
- Sadoughianzadeh, Minoosh. "Gender Structure and Spatial Organization: Iranian Traditional Spaces." *SAGE Open* (Oktober-Desember 2013): 1-12.
- Sait, M. Siraj. "The Relevance of Islamic Land Law for Policy and Project Design." *Conference on Challenges for Land Policy and Administration*. 14-15 February. Washington DC: The World Bank, 2008: 1-13.
- Salasal, Siti Mariam Malinumbay S. "The Concept of Land Ownership: Islamic Perspective." *Buletin Geoinformasi* 2, no.2 (Desember, 1998): 285-304.
- Sasanpur, S. dan H. Moftakhari. "The Change of Social Stratification System in Iran from the Fall of Sasanian to the End of Omavids." *Social History Research Journal* 1, no. 1 (2012): 79-96.
- Sayın, Yiğit et al.. "Land Law and Limits on the Right to Property: Historical, Comparative and International Analysis." *European Property Law Journal* 6, no. 1 (2017): 4-52.
- Schacht, Joseph. "Pre-Islamic Background and Early Development of Jurisprudence." Dalam *Law in the Middle East: Origin and Development of Islamic Law*, ed. Majid Khadduri dan Herbert J. Liebesny. Vol. I. Clark, New Jersey: The Lawbook Exchange, Ltd., 2008.

- Schaebler, B. "Practising Musha: Common Lands and the Common Good in Southern Syria under the Ottomans and the French." Dalam *New Perspectives on Property and Land in the Middle East*, ed. R. Owen. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000.
- Schlager, Edella, dan Elinor Ostrom. "Property-Rights Regimes and Natural Resources: A Conceptual Analysis." *Land Economics* 68, no. 3 (Agustus 1992): 249-262.
- Scott, Bruce R. "The Political Economy of Capitalism." *Working Papers-07-037*, Harvard Business School (2006): 1-30.
- Sewornu, Rita Esinu, Benjamin Quaye, dan Nelson Duut Namikat. "Land Tenure Security in Ghana." Dalam *Land Tenure Security in Selected Countries*, ed. Michael Kirk. Kenya: United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat), 2015.
- Shaikh, Salman Ahmed. "Equitable Distribution of Income with Growth in an Islamic Economy." *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 3, no. 3 (Desember 2017): 6-14.
- Siddiqi, Mohammad Nejatullah. "Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature." Dalam *Studies in Islamic Economics*, ed. Khurshid Ahmad. Leicester: Islamic Foundation, 1980.
- Simm, Kadri. "The Concepts of Common Good and Public Interest: from Plato to Biobanking." *Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics* 20, no. 4 (2011): 554-562.
- Singirankabo, Uwacu Alban and Maurits Willem Ertsen. "Relations between Land Tenure Security and Agricultural Productivity: Exploring the Effect of Land Registration." *Land* 9, no. 138 (2020): 1-18.
- Steiger, Otto. "Property Economic versus New Institutional Economics: Alternative Foundations of How to Trigger Economic Development." *Journal of Economic Issues* 40, no. 1 (March 2006): 183-208.

- Suhendra, Ahmad. "Models of Land Ownership in Islam: Analysis on Hadis Ihyā' al-Mawāt." *ESENSIA: Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin* 18, no. 2 (Oktober 2017): 189-199.
- Sunaryo, Sidik. "The Trancendental Idelogy: The Reflection of Just Law Certainty in Indonesia Adjudication." *Global Journal of Politics and Law Research* 3, no. 6 (December 2015): 1-16.
- Aṭ-Ṭa'ān, Fāris. "Taṭāwur an-Nizām al-Mālī al-'Arabī min Ṣadr al-Islām ilā 'Ahdī al-Bitrūl." *Majālah al-Idārah wa al-Iqtiṣād* (1981).
- Tahir, Pervez. "Poverty, Feudalism, and Land Reform: The Continued Relevance of Iqbal." *The Pakistan Development Review* 41, no. 4 (Winter 2002): 969-970.
- Taliqani, Ayatullah Mahmud. "Ciri-Ciri Ekonomi Islam." Dalam *Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-Masalah*, ed. John J. Donohue dan John L. Esposito. Terj. Mahnun Husain. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Tambunan, Sihol Farida. "Keadilan Sebagai Pemecahan Masalah Konflik antara Kekuasaan (Power) dan Hak Kepemilikan (Property Right) dalam Negara Demokrasi (Sebuah Tinjauan Filsafat)." *Jurnal Masyarakat & Budaya*. 10, no. 2 (2008): 117-138.
- Tarigan, Azhari Akmal. "'Umar bin al-Khaṭṭāb dan Siyāsah Syar'iyah." *MIQOT* 32, no. 1 (Januari-Juni 2008): 67-87.
- Ṭarsyanī, Yāsir Muḥammad, dan Khālid Ḥamidī. "Ta'āruḍ al-Maṣāliḥ al-'Āmmah wa al-Khāṣṣah: Dirāsah Uṣūliyyah Fiqhiyyah." *Majallah Jāmi'ah al-Madīnah al-'Ālamīyyah* 1, no.13 (2015): 77-101.
- Tellenbach, Sylvia. "Muslim Countries between Religious and Secular Law." Dalam *Islam and the Rule of Law: Between Sharia and Secularization*, ed. Birgit Krawietz dan Helmut Reifeld. Berlin: Konrad-Adenauer-Stiftung, 2008.
- Terkenli, Theano S., dan Dimitris Kavroudakis. "A Stakeholders's Analysis of Eastern Mediterranean

- Landscape: Contextualities, Commonalities, and Concerns.” Dalam *Landscapes in the Eastern Mediterranean between the Future and the Past*, ed. Ioannis N. Vogiatzakis, Theano S. Terkenli, Maria Gabriella Trovato, dan Nizar Abu-Jaber, 91-110. Basel, Switzerland, 2017.
- Usman. “Negara dan Fungsinya (Telaah atas Pemikiran Politik).” *Al-Daulah* 4, no. 1, Juni (2015): 130-139.
- Vellema, Sietze, Saturnino M. Borrás JR, dan Francisco Lara JR. “The Agrarian Roots of Contemporary Violent Conflict in Mindanao, Southern Philippines.” *Journal of Agrarian Change* 11, no. 3 (July 2011): 298–320.
- Waters, Tony, dan Dagmar Waters. “Are the Terms “Socio-Economic Status” and “Class Status” a Warped form of Reasoning for Max Weber?” *Palgrave Communications* 2, no. 16002 (March 2016): 1-13.
- Wee, Vivinne, dan Cynthia Chou. “Continuity and Discontinuity in the Multiple Realities of Riau.” *KITLV Journals*, no. 4 (1997): 527-541.
- West, Edwin G. “Property Rights in the History of Economic Thought: From Locke to J. S. Mill.” *Carleton Economic Papers*, 1-35. <http://www.carleton.ca/economics/wp-content/uploads/cep01-01.pdf>.
- Westerlund, David. “Reviewed Work(s): From Socialism to Islam? Notes on Islam as a Political Factor in Contemporary Africa.” *The Journal of Modern African Studies* 24, no. 2 (Juni 1986): 360-361.
- Wisman, Jon .D. “The Financial Crisis of 1929 Reexamined: The Role of Soaring Inequality.” *Review of Political Economy* 26, no. 3 (2014): 372–391.
- Wolfe, Patrick. “Settler Colonialism and the Elimination of the Native.” *Journal of Genocide Research* 8, no. 4 (December 2006): 387–409.
- Yayla, Atilla. “Prospects for Democracy and Market Economy in Turkey.” Paper dipresentasikan dalam *The Middle East*

- Young Leadership Conference*. Brussel, Belgium, 20-23 October 1997.
- Yiu, C.Y., S.K. Wong, dan Y. Yau. "Property Management as Property Rights Governance: Exclusion and Internal Conflict Resolution." *Property Management* 24, no. 2 (2006): 87-97.
- Yusdani. "Sumber Hak Milik dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Mawarid Edisi* 9 (2003): 58-69.
- Zaid, Bakar 'Abd Allāh Abū. "Mušāmanah fī al-'Aqār li al-Mašlahah al-'Āmmah." fī *Munazzamah al-Mu'tamar al-Islāmī . Intizā' al-Milkiyyah li al-Mašlahah al-'Āmmah*. Majallah Majama' al-Fiqh al-Islāmī al-Daurah al-Rābi'ah li Mu'tamar Majama' al-Fiqh al-Islāmī . No. 4. Juz 2 (1988).
- Zalesco, Marian. "Capitalism Vs. Socialism- An Attempt to Analyse the Competitiveness of Economic System." *Ekonomia I Prawo: Economics and Law* 14, no. 1 (2015): 61-79.

IV. Sumber Tesis/Disertasi

- 'Ābid, 'Abd aš-Šamad bin Bakar bin Ibrāhīm. "Takhrij al-Aḥādīs wa al-Āšār al-Wāridah fī Kitāb al-Amwāl li Abī 'Ubaid." *Disertasi*, Jāmi'ah Umm al-Qurā, 1404 H.
- Abū Saqr, Muḥammad Šubhī Ḥusain. "Siyāsah at-Tasyrī 'inda 'Umar bin al-Khaṭṭāb." *Tesis*, Al-Jāmi'ah al-Islāmiyah Gazah, 2007.
- Al-'Ajl Basysyār Ḥusain. "Al-Kharāj wa aḍ-Ḍarībah fī al-Fiqh al-Islāmī: Dirāsah Muqāranah." *Disertasi*, Jāmi'ah al-Jinān, 2006.
- Ampadu, Richard Ameyaw. "Finding the Middle Ground: Land Tenure Reform and Customary Claims Negotiability in Rural Ghana." *Disertasi*, International Institute of Social Studies (IISS), 2013.

- Ataner, Attila. "Kant on Freedom, Property Rights and Environmental Protection." *Tesis*, McMaster University, 2012.
- Al-Basydarī, Ḥasan Muḥammad Ibrāhīm al-Kurdī. "Al-Fiqh al-Maqāṣidī 'Inda al-Imām 'Umar ibn al-Khaṭṭāb." *Tesis*, Kuliyah al-Imām al-A'zam, 2007.
- Çetinkaya, Dilek Zehra. "In Defense of Utopian Thought." *Tesis*, Istanbul Technical University, 2019.
- Holstlag-Broekhof, Sanne. "Dealing with Private Property for Public Purposes: An Interdisciplinary Study of Land Transactions from a Micro-Scale Perspective." *Disertasi*, Wageningen University, NL, 2016.
- Ibn Hāsyim, Zahr ad-Dīn 'Abd ar-Raḥmān. "Maqāṣid asy-Syarī'ah fī Ahkām al-Buyū". *Tesis*, Jāmi'ah al-Yarmūk, 2004.
- Al-Lahaibah, Nawāl binti Ḥāmid bin Salmān. "Zauāid Sunan ad-Dār Quṭnī 'alā al-Kutub as-Sunnah: al-Qism as-Šānī." Vol. 1. *Disertasi*, Jāmi'ah Umm al-Qurā, 1419-1420 H.
- Long, Dam Manh. "The Difference in Economic System in Capitalist and Communist Countries." *Skripsi*, Central University of Applied Science- Degree programme in Business Management, 2016.
- Malik, Maszlee. "Constructing the Architectonics and Formulating the Articulation of Islamic Governance: A Discursive Attempt in Islamic Epistemology." *Disertasi*, Durham University. 2011.
- Qānah, aṭ-Ṭāhir. "Ad-Dār at-Tauzī'ī li al-Milkiyyah fi al-Iqtisād al-Islāmī: Dirāsah Muqāranah." *Tesis*. Jāmi'ah Ḥājj Lakhḍar Batna, 2006-2007.
- Ratray, Michael Frederick. "Functional Anarchism(s) and the Theory of Global Contemporary Art." *Tesis*, Concordia University, 2014.
- As-Samarā-ī, Šibāh Ṭaha Basyīr. "Al-Ḥikmah 'Inda al-Uṣūliyyīn." *Disertasi*, Jāmi'ah Bagdād, 2007.

As-Sufyānī, Ābid ibn Muḥammad. “Dār al-Islām wa Dār al-Harb: wa Aṣl al-‘Alāqah bainahumā.” *Tesis*, Jāmi‘ah al-Mulk ‘Abd al-‘Azīz, 1400-1401 H.

V. Sumber Ensiklopedia

- ‘Auḍī, Rif’at as-Sayyid. *Mausū’at al-Iqtiṣād al-Islāmī, fī al-Maṣārif wa an-Nuqūd wa al-Aswāq al-Māliyyah*. Vol. 3. Al-Iskandariyyah: Dār as-Salām li an-Nasyr wa at-Tauzī‘ wa at-Tarjamah, 2009.
- Amīn, Ḥasan. *Mausū’ah al-Islāmiyyah*. Vol. 1. Beirut: Dār at-Ta’aruf li al-Maṭbū‘āt, 1975.
- Al-Bakrī, Muḥammad ‘Azmī. *Mausū’ah al-Fiqhiyyah wa al-Qaḍā’ wa at-Tasyrī’ fī al-Qānūn al-Madanī al-Jadīd*. Vol. 3. Al-Qāhirah: Dār al-Maḥmūd li an-Nasyr wa at-Tauzī‘, 2018.
- Al-Būrnū, Muḥammad Ṣadqī ibn Aḥmad dan Abū Ḥārīs al-Ghazzī. *Mausū’at Qawā‘id al-Fiqhiyyah, al-Qism al-Awwal –Harf al-Hamzah*. Vol. 2. Cet. ke-1. Beirut: Mu’assasah ar-Risālah, 2003.
- Chehod, J. ‘Himā’, in *Encyclopaedia of Islam*. 3 (1971).
- Dahlan, Abdul Aziz et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ihtiar Van Hoeve, 1996.
- Al-Fakahānī, Ḥasan. *Mausū’ah al-Qaḍā’ wa al-Fiqh li al-Daul al-‘Arabiyyah*. Vol. 7. Al-Qāhirah: ad-Dār al-‘Arabiyyah li al-Mausū’āt al-Qānūniyyah, 1975.
- Gray, Cristoper Berry (ed.), *The Philosophy of Law an Encyclopedia*. Vol. I., Grland Publising, Inc., 1999.
- Hussain, Syed B. *Encyclopedia of Capitalism*. New York: Golson Books, Ltd, 2004.
- Jām’ah al-Mauṣil Wazārat at-Ta’līm al-‘Ālī wa al-Baḥṣ al-‘Ilmī. *Mausū’ah al-Mauṣal al-Ḥaḍāriyyah*. Juz 2. Cet. ke-1.
- Jā’mi‘ah al-Mauṣil Jūmhuriyyah al-‘Irāq: Dār al-Kutub li aṭ-Ṭibā‘ah wa an-Nasyr, 1992.

- Jammāl, Muḥammad ‘Abd al-Mun’im. *Mausū’ah al-Iqtisād al-Islāmī wa Dirāsāt Muqāranah*. Al-Qāhirah: Dār al-Kitāb al-Miṣrī, 1980.
- Al-Juhnī, Māni‘ bin Ḥammād. *Al-Mausū’ah al-Muyassarah fī al-Adyān wa al-Maḏahib al-Mu’āṣirah*. Cet. ke-4. Ar-Riyād: Dār an-Nadwah al-‘Ālamiyyah li aṭ-Ṭibā‘ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī‘, 1420 H.
- Khū’ī, Abū al-Qāsim ibn ‘Alī Akbar. *Mausū’āt al-Imām al-Khū’ī*. Vol. 37. Qum: Mu’assasah Iḥyā’ Aṣār al-Imām al-Khū’ī, 1998.
- An-Najafī, al-‘Allāmah asy-Syaikh ‘Abd al-Ḥusain Aḥmad al-Amīnī. *Mausū’ah al-Gadīr fī al-Kitāb wa as-Sunnah wa al-Adāb*. Ed. Markaz al-Gadīr li ad-Dirāsāt al-Islāmiyyah. Juz 8. Cet. ke-3. Iran: Mu’assasah Dā-irah Maṣārif al-Fiqh al-Islāmī, Islamic Jurisprudence Encyclopedia Institute, 2005.
- Orhanlu, Cengiz. “Kharaj in Ottoman Turkey.” Dalam *Encyclopaedia of Islam*. Leiden – New York, E. J. Brill. Vol. IV. 1990. :1053-1055.
- Qal’ah Jī, Muḥammad Rawwās. *Mausū’ah Fiqh ‘Uṣmān bin ‘Affān*. Makkah al-Mukarramah: Markaz al-Baḥṣ al-‘Ilmī wa Iḥyā’ al-Turās al-Islāmī, 1983.
- Al-Qaisī, Marwān Ibrāhim. *Mausū’ah Huqūq al-Insān fī al-Islām (al-Muyassarah)*. Yordan: Dār al-Kitāb as-Ṣaqāfī, 2014.
- At-Tahānuī, Muḥammad ‘Alī. *Mausū’ah Kasasyāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa al-‘Ulūm*. Juz 1. Cet. ke-1. Beirut: Maktabah Labnān Nasyirūn, 1996.
- At-Tibrīzī, Muḥammad ibn ‘Abd Allāh Khaṭīb. *Mausū’āt al-Utabāt al-Muqaddasah*. Vo. 1. Beirut: Mu’assasah al-A’lāmī li al-Maṭbū’āt, 1987.
- Wizārat al-Auqāf wa asy-Syu-ūn al-Islāmiyyah. *Al-Mausū’ah al-Fiqhiyyah*. Juz 2. Kuwait: Wizārah al-Auqāf wa asy-Syu-ūn al-Islāmiyyah, 1983.

VI. Sumber Kamus

- Abū Jaib, Sa'īd. *Al-Qāmūs al-Fiqhī: Lughatan wa Iṣṭilāḥan*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1998.
- Al-Aṣḫānī, Ar-Rāghib. *Al-Mufradāt fī Garīb al-Qur'ān*. Beirut: Dār Iḥyā' at-Turās al-'Arabī, 1423 H.
- Al-Bagdādī, Syihāb ad-Dīn Abī 'Abd Allāh Yāqūt ibn 'Abd Allāh al-Ḥamwī al-Rūmī. *Mu'jam al-Buldān*. Ed. Farīd 'Abd al-'Azīz al-Jundī. Juz 5. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009.
- *Mu'jam al-Buldān*. Vol. 2. Beirut: Dār aṣ-Ṣādir, t.t.
- Al-Balādiyyu, 'Ātiq ibn Ghaiš. *Mu'jam al-Ma'ālim al-Jugrāfiyyah fī as-Sīrah an-Nabawiyyah*. Al-Makkah al-Mukarramah: Dār Makkah, 1982.
- Ad-Dahbi, Asyraf Ṭaha Abū. *Al-Mu'jam al-Islāmī: al-Jawānib ad-Dīniyyah wa as-Siyāsiyyah wa al-Ijtimā'iyyah wa al-Iqtisādiyyah*. Cet. ke-1. Al-Qāhirah: Dār asy-Syurūq, 2002.
- Gadīrī, 'Abdillāh 'Īsā Ibrāīm. *Al-Qāmūs al-Jāmi' li al-Muṣṭalaḥat al-Fiqhiyyah*. Vol. 1. Beirut: Dār al-Maḥajjah al-Baiḍa', 1998.
- Ḥammād, Nazīh. *Mujma' al-Muṣṭalaḥāt al-Māliyyah wa al-Iqtisādiyyah fī Lughah al-Fuqahā'*. Damaskus: Dār asy-Syāmilah, 2008.
- *Mu'jam al-Muṣṭalaḥāt al-Iqtisādiyyah fī Lughah al-Fiqh*. Riyāḍ: al-Ma'had al-'Ālī li Fikr al-Islāmī, 1995.
- Ibn Manzūr, Jamal ad-Dīn Muḥammad ibn Mukarram al-Anṣārī. *Lisān al-'Arāb*. Vol. 8. Beirut: Dār aṣ-Ṣādir, 1956.
- Al-Jum'ah, 'Alī bin Muḥammad. *Mu'jam al-Muṣṭalaḥāt al-Iqtisādiyyah wa al-Islāmiyyah*. Ar-Riyāḍ: Maktabah al-'Abīkān, 2000.
- Al-Jurjānī, 'Alī Ibn Muḥammad. *Kitāb at-Ta'rifāt*. Jeddah: al-Haramain, 1431 H.
- Majd ad-Din, Muḥammad bin Ya'qūb al-Fairūz Ābādī. *Al-Qāmūs al-Muḥīṭ*. Juz 3. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

- . *Al-Qāmūs al-Muḥiṭ*. Ed. ke-2. Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1987.
- Al-Qal'ajī, Muḥammad Rawwās dan Ḥāmid Ṣādiq Qānītī. *Mu'jam Lugah al-Fuqahā'*. Beirut: Dār an-Nafā'is, 1985.
- Simon, Seymour. *Science Dictionary*. Mineola, New York: Dover Publications, Inc., 2012.
- Syarbāṣī, Aḥmad. *Al-Mu'jam al-Iqtiṣādī al-Islāmī*. ttp.: Dār al-Jīl, 1981.

VII. Rujukan Elektronik dan Internet

- Caponera, Dante A. "Ownership and Transfer of Water and Land in Islam." Diakses dari <http://www.idr.ca/en/ev-93958-201-Do-Topic.Html>.
- Ebeling, Richard M. "Aristotle Understood the Importance of Property." *Foundation for Economic Education*. September, 2016. Diakses dari <https://fee.org/articles/aristotle-understood-the-importance-of-property/>.
- Ehrbar, Hans G. "Notes about Selected Literature about Socialism." 16 November 1999. Diakses 6 September 2018. <http://content.csbs.utah.edu/~ehrbar/socialis.pdf>.
- Eisel, Stephan. "Between Ideologis: the Social Market Economy." Januari 2012. Diakses 6 September 2018. http://www.kas.de/wf/doc/kas_31897-1522-11-30.pdf?120904143031
- Al-Ḥāzimī, 'Abd ar-Raḥmān bin Sa'īd. "Taqdīm al-Maṣāliḥ al-'Āmmah 'alā al-Maṣāliḥ al-Khāṣṣah." *Al-Alūka aṣ-Ṣaqāfiyah*. Diakses 14 September 2015. <http://www.alukah.net/culture/0/100824/>.
- Al-Ḥirdān, 'Audā 'Abbās. "Al-Ḥuqūq wa al-Ḥurriyāt al-'Āmmah: Iṭārun Marjī'yyun." *Ahl al-Bait*, No. 13, 149-150. Diakses dari <https://abu.edu.iq/sites/default/files/research/journals/ahl-al-bayt/issues/13/180421-140043.pdf>

- Hasil-Hasil Munas Alim Ulama Konbes NU 2017, diakses dari <https://www.nu.or.id/archive/read/54/hasil-munas-dan-konbes-nu-2017>.
- Islahi, Abdul Azim. “Kharaj and Land Proprietary Right in the Sixteenth Century: An Example of Law and Economics.” *Muslim Economic Thinking in the 10th/16th Century*, 20 April 2006. Diakses dari https://mpru.ub.uni-muenchen.de/18231/1/Kharaj_and_Land_Proprietary_Right.pdf
- Al-Munīfī, Aḥmad Muḥammad ‘Abd ar-Ra’ūf. *Manhaj al-Hukm ‘alā al-Maṣlaḥah allatī Lā Naṣṣā fihā ‘inda Uṣūliyyīn* (Syabakah al-Alūkah), 54-57. Diakses dari www.alukah.net.
- Na’īmīyān, Żabīḥ Allāh. “Nazariyyah Mintaqah al-Farāgh.” *Al-Ijtihād* 25 (November 2017). Diakses dari www.ijtiḥadnet.net.
- Rusyaidi, Achmad. “Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum: Antara Kepentingan Umum dan Perlindungan HAM.” Diakses 18 September 2018. <http://prpmakasar.wordpress.com>.
- Tuma, Elias H. “Land Rreform.” *Encyclopedia Britannica*. Diakses 01 April 2020 dari <https://www.britannica.com/topic/land-reform>.
- Wisman, John D. “Capitalism and Inequality Re-Examined.” *Conference Paper*. (Agustus 2015): 1-19. Diakses 06 September 2018 https://www.researchgate.net/publication/281346322_CAPI_TALISM_AND_INEQUALITY_RE-EXAMINED .
- Wood, Ellen Meiksins. “The Agrarian Origins of Capitalism.” *Monthly Review: An Independent Socialist Magazine* 50, no. 3 (July-August, 1998). Diakses <https://monthlyreview.org/1998/07/01/the-agrarian-origins-of-capitalism/>.